



panganbiru **08** KKP
POVERTY GROWTH 2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KEUANGAN AUDITED TA.2024

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DJKPRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban tersebut merupakan tindak lanjut dari tugas-tugas untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PKRL ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan periode Tahunan (*Audited*) untuk Tahun Anggaran 2024 atau sampai dengan 31 Desember 2024, yang dalam penyusunannya berbasis akrual sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan ini diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan, yaitu untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal PKRL. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	37
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	67
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	135
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	153
F. Pengungkapan Penting Lainnya	162
VI. Lampiran dan Daftar	201

DAFTAR TABEL

Tabel A.1.	Rekapitulasi Satker Lingkup Ditjen PKRL	18
Tabel A.2.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	26
Tabel A.3.	Kualitas Piutang	27
Tabel A.4.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel B.1.	Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2024 berdasarkan Jenis Belanja MonSAKTI	37
Tabel B.2.	Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2024 berdasarkan Kegiatan	39
Tabel B.3.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan MonSAKTI	40
Tabel B.4.	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA. 2024 dan 2023	48
Tabel B.5.	Target dan Realisasi PNBP Satker Lingkup Ditjen PKRL per 31 Desember 2024	49
Tabel B.6.	Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	49
Tabel B.7.	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan.....	50
Tabel B.8.	Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA. 2024 dan 2023.....	52
Tabel B.9.	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 MonSAKTI	53
Tabel B.10.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA. 2024 dan 2023	53
Tabel B.11.	Rincian Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 MonSAKTI	54
Tabel B.12.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA. 2024 dan 2023	59
Tabel B.13.	Rincian Realisasi Belanja Sosial per 31 Desember 2024	60
Tabel B.14.	Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 MonSAKTI	61
Tabel B.15.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA. 2024 dan 2023	62
Tabel B.16.	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	63
Tabel B.17.	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	64
Tabel B.18.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024	65
Tabel B.19.	Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024	66
Tabel C.1.	Perbandingan Kas di BP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	67
Tabel C.2.	Perbandingan Kas Lainnya di BP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	69
Tabel C.3.	Perbandingan Belanja Barang Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	70
Tabel C.4.	Perbandingan Uang Muka Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	70
Tabel C.5.	Perbandingan Piutang PNBP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	71
Tabel C.6.	Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	75
Tabel C.7.	Neraca Persediaan Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024	76
Tabel C.8.	Mutasi Barang Konsumsi	77
Tabel C.9.	Rincian Saldo Barang Konsumsi	78
Tabel C.10.	Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan	78
Tabel C.11.	Mutasi Pita Cukai, Materai, Leges.....	79
Tabel C.12.	Rincian Mutasi Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	80

Tabel C.13. Rincian Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	81
Tabel C.14. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	83
Tabel C.15. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	86
Tabel C.16. Rincian Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	88
Tabel C.17. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses	89
Tabel C.18. Rincian Mutasi Bahan Baku	91
Tabel C.19. Rincian Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	92
Tabel C.20. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya	93
Tabel C.21. Perbandingan Tagihan TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	94
Tabel C.22. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	95
Tabel C.23. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	95
Tabel C.24. Rincian Mutasi Tanah	96
Tabel C.24.1 Rincian Transaksi Saldo Awal Tanah PPKT	98
Tabel C.25. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	99
Tabel C.26. Rincian Satker Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin	100
Tabel C.27. Transaksi Perolehan Lainnya pada Satker LPSPL Serang	101
Tabel C.28. Transaksi Likuidasi Masuk pada Satker Dinas KP Prov. Kaltim	101
Tabel C.29. Transaksi Likuidasi Keluar pada Satker Dinas KP Prov. Kaltim	104
Tabel C.30. Rincian Aset Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang LPSPL Serang	104
Tabel C.31. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan	106
Tabel C.32. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	107
Tabel C.33. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan	112
Tabel C.34. Rincian Mutasi Irigasi	113
Tabel C.35. Rincian Mutasi Jaringan	114
Tabel C.36.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi	115
Tabel C.36.2 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	117
Tabel C.37. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	118
Tabel C.38. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	121
Tabel C.39. Rincian Mutasi Software	123
Tabel C.40. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	125
Tabel C.41. Mutasi Kurang Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	126
Tabel C.42. Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	126
Tabel C.43. Mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	127
Tabel D.1. Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024	135
Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024	138
Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024	139
Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024	139
Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024	141
Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024	142
Tabel D.7. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024	143
Tabel D.8. Rincian Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024	147
Tabel D.9. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per	

31 Desember 2024	150
Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024	159
Tabel F.1. Tabel BMKT Disimpan dan dikuasai KKP	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 5 Prioritas Kebijakan KKP	14
Gambar A.2 Proses Migrasi dari Database E-Rekon menuju ke Database SAKTI	18
Gambar A.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	31
Gambar A.4 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	32
Gambar A.5 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33
Gambar A.6 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34
Gambar A.7 Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan	35
Gambar A.8 Struktur Organisasi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.....	36
Gambar B.1 Beranda Aplikasi Seapark	48
Gambar F.1 Proyek Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa.....	182
Gambar F.2 Galeri BMKT, GMB IV, KKP	184
Gambar F.3 Kegiatan <i>Update Geotagging</i> BMKT di <i>Warehouse</i> , Cileungsi	185
Gambar F.4 Bagan Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	193
Gambar F.5 Jenis PNBPK PPKPRL Kabel dan Pipa Bawah Laut	196

DAFTAR LAMPIRAN

A. Laporan Modul GLP SAKTI	193
I. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I Tahunan TA. 2024	177
II. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Jenis Belanja / Akun	180
III. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sumber Dana / Program / Kegiatan.....	184
IV. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Wilayah / Satuan Kerja	190
V. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program / Kegiatan	196
VI. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19	200
VII. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Eselon I	202
VIII. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Wilayah / Akun	204
IX. Neraca Tingkat Eselon I Tahunan TA. 2024	207
X. Neraca Percobaan Tingkat Eselon I per 1 Januari 2023	210
XI. Neraca Percobaan Tingkat Eselon I Tahunan TA. 2024	213
XII. Neraca Percobaan Kas	218
XIII. Laporan Operasional Tingkat Eselon I	222
XIV. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Eselon I	225
XV. Laporan BMN dan Persediaan	227
XVI. Rekapitulasi Monitoring SAKTI	251
B. Daftar Rekening per Satker Lingkup Ditjen PKRL TA. 2024	262
C. Lain-Lain	265



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 Ekst.6106, FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahunan (*Audited*) TA. 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut juga telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahunan TA. 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada periode ini adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp843.308.374.261,00 atau mencapai 119,06% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp708.313.391.000,00. Realisasi Belanja Negara pada periode ini adalah sebesar Rp471.154.781.232,00 atau mencapai 68,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp684.053.244.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode Tahunan TA. 2024 *Audited*. Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp857.604.229.317,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp14.064.002.058,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp576.202.572.855,00; Properti Investasi sebesar Rp110.346.287.172,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp97.664.861.367,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp59.326.505.865,00; sementara nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp774.485.777,00 dan Rp856.604.229.317,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp849.223.580.038,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp490.444.135.669,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp358.779.444.369,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.481.782.895,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp(357.297.661.474,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp837.822.061.097,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp357.297.661.474,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp17.318.355.738,00, Lain-lain senilai Rp(1.169.084.070,00), dan transaksi antar entitas senilai Rp(355.608.334.769,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp856.829.743.540,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PKRL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24		% thd Angg	31-Dec-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		708.313.391.000	843.308.374.261	119,06	707.036.792.705
JUMLAH PENDAPATAN		708.313.391.000	843.308.374.261	119,06	707.036.792.705
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2.1	112.500.887.000	112.074.699.246	99,62	98.632.702.317
Belanja Barang	B.2.2	470.570.648.000	340.478.444.137	72,35	286.169.017.708
Belanja Bantuan Sosial	B.2.3	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasional		583.071.535.000	452.553.143.383	77,62	384.801.720.025
Belanja Modal	B.2.4				
Belanja Tanah	B.2.4.1	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.4.2	95.642.817.000	13.294.280.559	13,90	14.033.983.926
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.4.3	5.338.892.000	5.307.357.290	99,41	169.800.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.4.4	0	0	#DIV/0!	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.4.5	0	0	#DIV/0!	0
Jumlah Belanja Modal		100.981.709.000	18.601.637.849	18,42	14.203.783.926
JUMLAH BELANJA		684.053.244.000	471.154.781.232	68,88	399.005.503.951

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PKRL NERACA PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1.381.065.501	883.191.198
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.3	0	548.385.782
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	11.239.891.322	2.832.398.450
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	C.7	(198.749.177)	(194.731.226)
Piutang dari KUN	C.8	0	0
Persediaan	C.9	1.641.794.412	1.028.272.785
Persediaan yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		14.064.002.058	5.097.516.989
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR		0	(6.250)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.11	98.155.639.556	100.714.895.633
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12	(490.778.189)	(503.574.469)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		97.664.861.367	100.211.314.914
ASET TETAP			
Tanah	C.13	328.758.991.227	308.545.890.024
Peralatan dan Mesin	C.14	125.006.191.641	122.993.161.716
Gedung dan Bangunan	C.15	90.736.630.532	86.958.983.679
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	12.616.970.810	13.492.329.061
Aset Tetap Lainnya	C.17	129.357.185.571	129.592.041.571
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	492.149.864
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(110.273.396.926)	(107.252.414.395)
Aset Tetap yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Tetap		576.202.572.855	554.822.141.520
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.20	103.876.004.000	214.231.398.172
Aset Tak Berwujud	C.21	1.194.618.534	832.527.534
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	0	411.012.378
Aset Lain-Lain	C.23	13.782.435.459	21.210.163.880
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(59.526.552.128)	(58.429.021.016)
Jumlah Aset Lainnya		59.326.505.865	178.256.080.948
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.25	110.346.287.172	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.26	0	0
Jumlah Properti Investasi		110.346.287.172	0
JUMLAH ASET		857.604.229.317	838.387.054.371
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	774.372.777	522.601.474
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	0	0
Hibah Yang Belum Disahkan	C.29	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.30	0	42.391.800
Uang Muka dari KPPN	C.31	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.32	113.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		774.485.777	564.993.274
JUMLAH KEWAJIBAN		774.485.777	564.993.274
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	856.829.743.540	837.822.061.097
JUMLAH EKUITAS		856.829.743.540	837.822.061.097
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		857.604.229.317	838.387.054.371

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PKRL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	849.223.580.038	702.424.483.944
JUMLAH PENDAPATAN		849.223.580.038	702.424.483.944
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	112.197.428.463	98.524.358.181
Beban Persediaan	D.3	922.018.513	1.049.371.886
Beban Barang dan Jasa	D.4	126.468.152.564	92.151.728.840
Beban Pemeliharaan	D.5	8.110.707.732	10.117.997.525
Beban Perjalanan Dinas	D.6	150.661.582.859	129.331.972.654
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	70.985.835.693	53.300.973.230
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	21.068.599.317	19.577.237.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(29.810.528)	(13.548.802)
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		490.384.514.613	404.040.091.400
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		358.839.065.425	298.384.392.544
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(2.498.153.617)	(6.748.615.449)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		427.360.838	(1.342.599.995)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.925.514.455	(8.091.215.444)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.016.370.722	3.501.928.048
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.249.356.722	(3.501.928.048)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		232.986.000	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.481.782.895)	(3.246.687.401)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		357.357.282.530	295.137.705.143
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.13	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		357.357.282.530	295.137.705.143

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PKRL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	2023
EKUITAS AWAL	E.1	837.822.061.097	847.116.239.121
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	357.297.661.474	295.137.705.143
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	17.318.355.738	2.423.893.389
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	(7.865.132)	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	18.495.304.940	2.407.214.188
LAIN-LAIN	E.3.6	(1.169.084.070)	16.679.201
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(355.608.334.769)	(306.855.776.556)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		19.007.682.443	(9.294.178.024)
EKUITAS AKHIR	E.5	856.829.743.540	837.822.061.097

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Ditjen
PKRL*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal PKRL

A.1.1. Profil

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomenklatur berubah dari yang sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya

- ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk jumlah pegawai Ditjen PKRL s.d Desember tahun 2024 berdasarkan aplikasi e-pegawai yaitu berjumlah 1.070 orang pegawai (713 orang laki-laki; 357 orang perempuan). Rincian pegawai pusat terdiri dari 315 orang ASN (196 orang laki-laki; 119 orang perempuan), 25 orang PPPK (18 orang laki-laki; 7 orang perempuan), 1 orang JPT Non ASN (1 orang laki-laki), 42 orang Kontrak (23 orang laki-laki; 19 orang perempuan), dan 94 *Outsource* (58 orang laki-laki; 36 orang perempuan).

Sementara itu rincian pegawai UPT terdiri dari 363 orang ASN (236 orang laki-laki; 127 orang perempuan), 23 orang PPPK (12 orang laki-laki; 11 orang perempuan), 0 orang JPT Non ASN, 48 orang Kontrak (36 orang laki-laki; 12 orang perempuan), dan 159 *Outsource* (133 orang laki-laki; 26 orang perempuan).

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen PKRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- b. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- d. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen PKRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PKRL.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen PKRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis Ditjen PKRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan Perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024, khususnya di sub sektor pengelolaan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Ditjen PKRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL;
- b. Direktorat Penataan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat penggabungan empat Direktorat yang sebelumnya masing-masing memiliki 1 DIPA tersendiri kemudian dilebur menjadi satu DIPA, yaitu pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL. Dalam rangka penggabungan satker pusat dalam lokasi yang sama sesuai kebijakan satu DIPA, beberapa hal menyangkut 1 DIPA, antara lain :

- a. Penggabungan DIPA dimaksud tidak disertai dengan peleburan identitas satker yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian tidak terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- b. Penetapan kode dan nomenklatur satker yang akan digunakan;
- c. Penetapan struktur pengelola anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan BPP); dan
- d. Penggabungan data keuangan, Aset Tetap, dan Aset Lancar

Untuk aset yang masih terdapat pada masing-masing Direktorat, telah ditransfer pada Semester I tahun 2021 menuju satker Sekretariat Ditjen PKRL. Sementara itu, untuk penatausahaan aset selanjutnya telah dibuatkan anak satker atau satker pembantu pada kode satker 622145 yaitu 622145.001 untuk Direktorat PRL, 622145.002 untuk Direktorat P4K, 622145.003 untuk Direktorat Jasa Kelautan, dan 622145.004 untuk Direktorat KEBP.

A.1.2. Rencana Strategis

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Ditjen PKRL merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Renstra Ditjen PKRL menjadi pedoman penyusunan Renja Direktorat Jenderal PKRL setiap tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKRL, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Periode kurun waktu 2015 - 2019 sebelumnya, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Ditjen PKRL, baik

secara kelembagaan maupun program dan kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada, Ditjen PKRL berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut.

Secara garis besar, target IKU Ditjen PKRL telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

A.1.3. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020 - 2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 - 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020 - 2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
- b. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui

“Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;

- c. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- d. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu :

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan pengelolaan ruang laut adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- e. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020 - 2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari :

- SP-1 Kesejahteraan petambak garam meningkat
- SP-2 Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SP-3 Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan kawasan
- SP-4 Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat
- SP-5 Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT
- SP-6 Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
- SP-7 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat

- SP-8 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
- SP-9 Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
- SP-10 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali
- SP-11 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat
- SP-12 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL



Gambar A.1. 5 Prioritas Kebijakan KKP

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan TA. 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PKRL. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PKRL Periode Tahunan TA. 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal PKRL yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.2.1. Aplikasi SAKTI

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI menggunakan *database* terpusat, *multi user* dan/ atau multi satker. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kewenangannya. Terhadap pengiriman data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik.

SAKTI terdiri atas : a) Modul Administrasi; b) Modul Penganggaran; c) Modul Komitmen; d) Modul Bendahara; e) Modul Pembayaran; f) Modul Persediaan; g) Modul Aset Tetap; h) Modul Piutang; dan i) Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi : a) periode Januari sampai dengan Desember; b.) periode 13; dan c) periode 14. Periode Januari sampai dengan Desember digunakan untuk transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud. Periode 13 dan periode 14 digunakan untuk transaksi Laporan Keuangan *Audited* dengan tanggal buku 31 Desember.

Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Dalam hal terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku, terhadap transaksi dimaksud dicatat pada periode berikutnya.

Pengguna operasional modul terdiri atas : a) *operator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI; b) *validator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas perekaman data yang dilakukan operator; dan/ atau c) *approver*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/ atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh validator. Kewenangan Pengguna operasional modul tidak dapat dilakukan perangkapan dalam modul yang sama.

Modul-modul yang utamanya digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Modul Komitmen

- Modul Komitmen digunakan untuk : a) pengelolaan data supplier, b) pengelolaan data kontrak; c) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual; d) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual; dan e) pengelolaan data capaian output.
2. Modul Persediaan
Pengguna Modul Persediaan terdiri atas operator dan *approver*. Modul Persediaan digunakan antara lain untuk kegiatan : a) perekaman referensi barang persediaan; b) perekaman transaksi persediaan; c) tutup buku persediaan; d) pencetakan laporan persediaan; e) konfigurasi metode pencatatan; dan f) konfigurasi metode penilaian. Modul persediaan menghasilkan laporan antara lain : a) buku persediaan; b) laporan persediaan; dan c) laporan posisi persediaan di neraca.
 3. Modul Aset Tetap
Pengguna Modul Aset Tetap terdiri atas : a) operator; b) *validator*, dan c) *approver*. Modul Aset Tetap digunakan antara lain untuk pemrosesan transaksi : a) perekaman transaksi BMN; b) perhitungan penyusutan/ amortisasi; c) pembuatan data *summary* untuk keperluan pelaporan aset tetap; d) tutup buku aset tetap; dan e) pencetakan buku/daftar dan laporan BMN.
Modul Aset Tetap menghasilkan Laporan antara lain sebagai berikut : a) buku/daftar berupa buku barang, daftar transaksi BMN, *history* BMN, kartu konstruksi dalam pengerjaan, daftar barang rusak berat/hapus yang diusulkan ke pengelola; dan b) Laporan BMN berupa laporan barang, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di neraca, dan catatan ringkas BMN.
 4. Modul Piutang
Modul Piutang digunakan antara lain untuk : a) perekaman referensi debitur; b) perekaman transaksi piutang; c) perekaman *settlement* pembayaran/pelunasan piutang; d) perekaman surat penagihan; e) perekaman dokumen reklasifikasi kualitas piutang; f) perhitungan penyisihan piutang; g) transfer keluar-transfer masuk data piutang; h) perekaman hapus buku/hapus tagih; i) perekaman koreksi piutang; j) tutup buku piutang; dan k) pencetakan laporan piutang.
 5. Modul Akuntansi dan Pelaporan
Modul Akuntansi dan Pelaporan menghasilkan laporan antara lain sebagai berikut : a) Laporan Buku Besar; b) Neraca Percobaan; c) Laporan Operasional; d) Neraca; e) Laporan Realisasi Anggaran; f)

Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan *Sub Ledger*.

Konsolidasi Laporan Keuangan dilakukan oleh konsolidator pada tingkat : a) UAPPA-W; b) UAPPA-EI; dan c) UAPA. Konsolidator Laporan Keuangan melakukan pencetakan Laporan Keuangan konsolidasian sesuai dengan tingkat konsolidasiannya. Konsolidator Laporan Keuangan dapat melakukan pencetakan Laporan Keuangan tingkat di bawahnya.

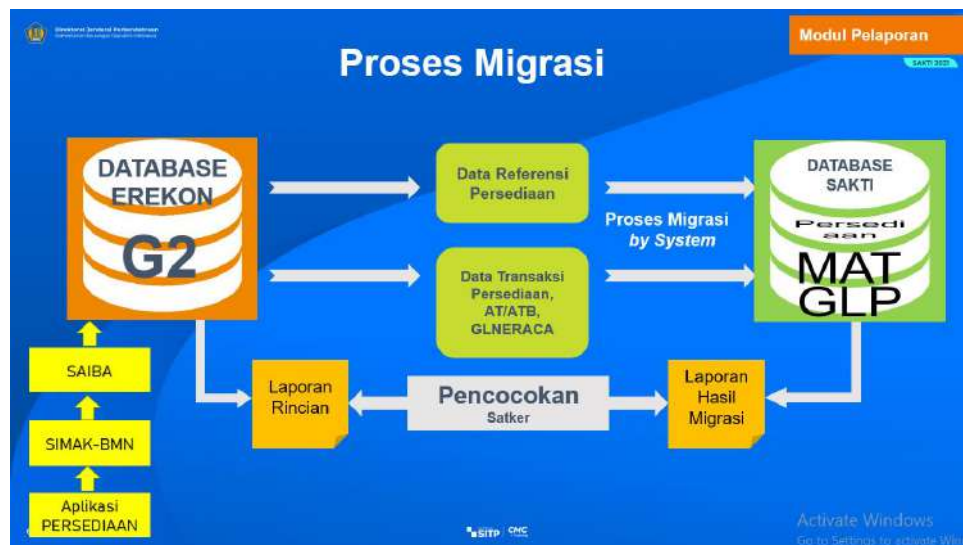
Migrasi Data Saldo Awal SAKTI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penerapan SAKTI seluruh modul termasuk Kelompok Modul Pelaporan dimulai pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Implementasi SAKTI pada Kelompok Modul Pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan pada saat penggunaan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk pertama kali. Migrasi data saldo awal meliputi : a) migrasi data persediaan; b) migrasi data aset tetap; dan c) migrasi data buku besar neraca. Hasil pelaksanaan migrasi data dituangkan dalam berita acara migrasi data.

Terkait dengan pelaksanaan proses migrasi data saldo awal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan khususnya Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) untuk pertama kali;
2. Satker wajib memastikan konfigurasi Satker dan user Kelompok Modul Pelaporan sudah terdaftar sebelum pelaksanaan proses migrasi data saldo awal;
3. Migrasi data saldo awal wajib dilakukan oleh Satker yang memiliki data referensi dan saldo per tanggal 31 Desember 2021;
4. Proses migrasi data dilakukan dengan cara interkoneksi untuk menarik data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan TA. 2021 pada Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI;
5. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk memantau penyelesaian migrasi data saldo awal;
6. Satker wajib melakukan verifikasi data hasil migrasi data saldo awal dan

- memastikan laporan-laporan SAKTI hasil migrasi sudah sama dengan laporan-laporan yang dihasilkan Aplikasi e-Rekon&LK;
7. Satker menuangkan hasil verifikasi dan perbandingan antara laporan-laporan SAKTI hasil migrasi data saldo awal dengan laporan-laporan dari Aplikasi e-Rekon&LK pada Berita Acara Migrasi;
 8. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk melakukan proses unggah berkas Berita Acara Migrasi;
 9. Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) sebagai unit konsolidasi laporan keuangan melakukan pemantauan penyelesaian migrasi data saldo awal SAKTI dan memastikan kelengkapan berita acara migrasi Satker sudah diunggah di Aplikasi MONSAKTI.



Gambar A.2. Proses Migrasi dari Database E-Rekon menuju ke Database SAKTI

A.2.2. Satker Lingkup Ditjen PKRL

Jumlah entitas akuntansi dilingkup Direktorat Jenderal PKRL yang mendapatkan DIPA pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah 43 entitas. Rincian entitas tersebut berdasarkan jenis kewenangan tersaji sebagai berikut :

Tabel A.1. Rekapitulasi Satker Lingkup Ditjen PKRL

No.	Kode	Baru	NAMA UNIT/SATKER
			Kantor Pusat (KP)
1	622145		Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
			Kantor Daerah (UPT)
1	499346		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang
2	477456		Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru
3	477425		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak
4	477431		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar
5	477419		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar

6	499352		Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang
7	290145		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang
8	477440		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong
			Tugas Pembantuan (TP)
1	603201	691046	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. DKI Jakarta
2	029092	691047	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Barat
3	039019	691048	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
4	049035	691049	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DI Yogyakarta
5	059034	691050	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur
6	069024	691051	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Aceh
7	079035	691052	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara
8	089006	691053	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat
9	099041	691054	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau
10	109037	691055	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi
11	119040	691056	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan
12	129036	691057	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
13	139027	691058	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat
14	149032	691059	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Tengah
15	159039	691060	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Selatan
16	169036	691061	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur
17	179057	691062	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara
18	189038	691063	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
19	199037	691064	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan
20	209035	691065	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
21	219032	691066	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku
22	229057	691067	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
23	239069	691068	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat
24	249088	691069	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Timur
25	259040	691070	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua
26	269035	691071	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu
27	289031	691072	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara
28	299038	691073	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Banten
29	309041	691074	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bangka Belitung
30	319035	691075	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo
31	329013	691076	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau
32	339154	691077	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat
33	340066	691078	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat
34	417744	691079	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun

2024 bahwa untuk TA. 2024 terdapat 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Ditjen PKRL.

Selain itu, sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor S-174/AG/AG.3/2024 tanggal 13 Februari 2024 Hal Penyampaian Kode Satker Tugas Pembantuan Lingkup KKP bahwa seluruh satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lingkup Ditjen PKRL terjadi perubahan kode satker.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal PKRL menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dilakukan mulai Tahun 2015.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna *atau full disclosure*. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal PKRL dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PKRL, selaku entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PKRL adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

- dilaksanakan
- b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1. Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2. Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

- pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

5.3. Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

5.4. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- e. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- f. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- a) Kewajiban Jangka Pendek
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b) Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Tabel A.3. Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
- Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

- akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

A.6. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

*Pelaksanaan
Program
Penanganan
Pandemi Covid-
19 dan PEN
serta Dampak
Pandemi Covid-
19*

A.7. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 serta Dampak Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas

sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup Bendahara Umum Negara. Program PC-PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sementara itu untuk TA. 2024 sudah tidak ada anggaran PEN dan Covid-19.

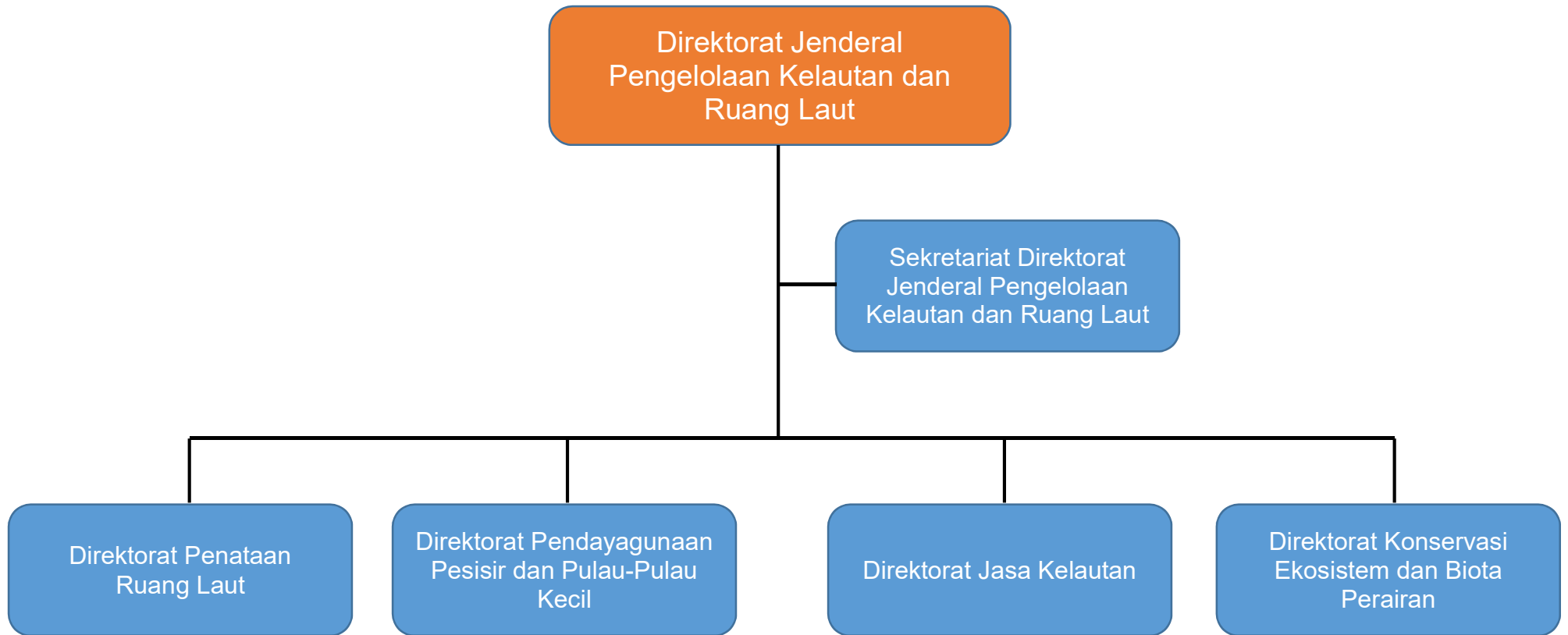
*Program
Prioritas
Nasional (PN)*

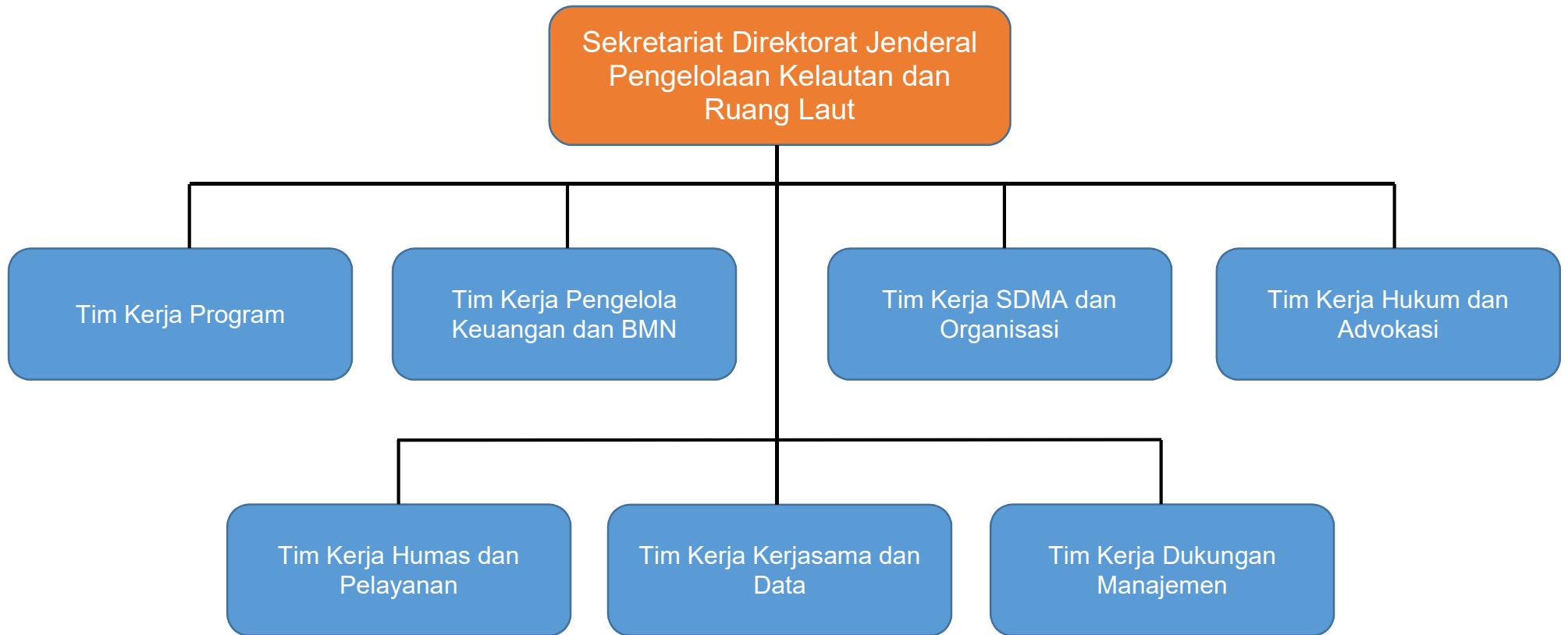
A.8. Program Prioritas Nasional (PN)

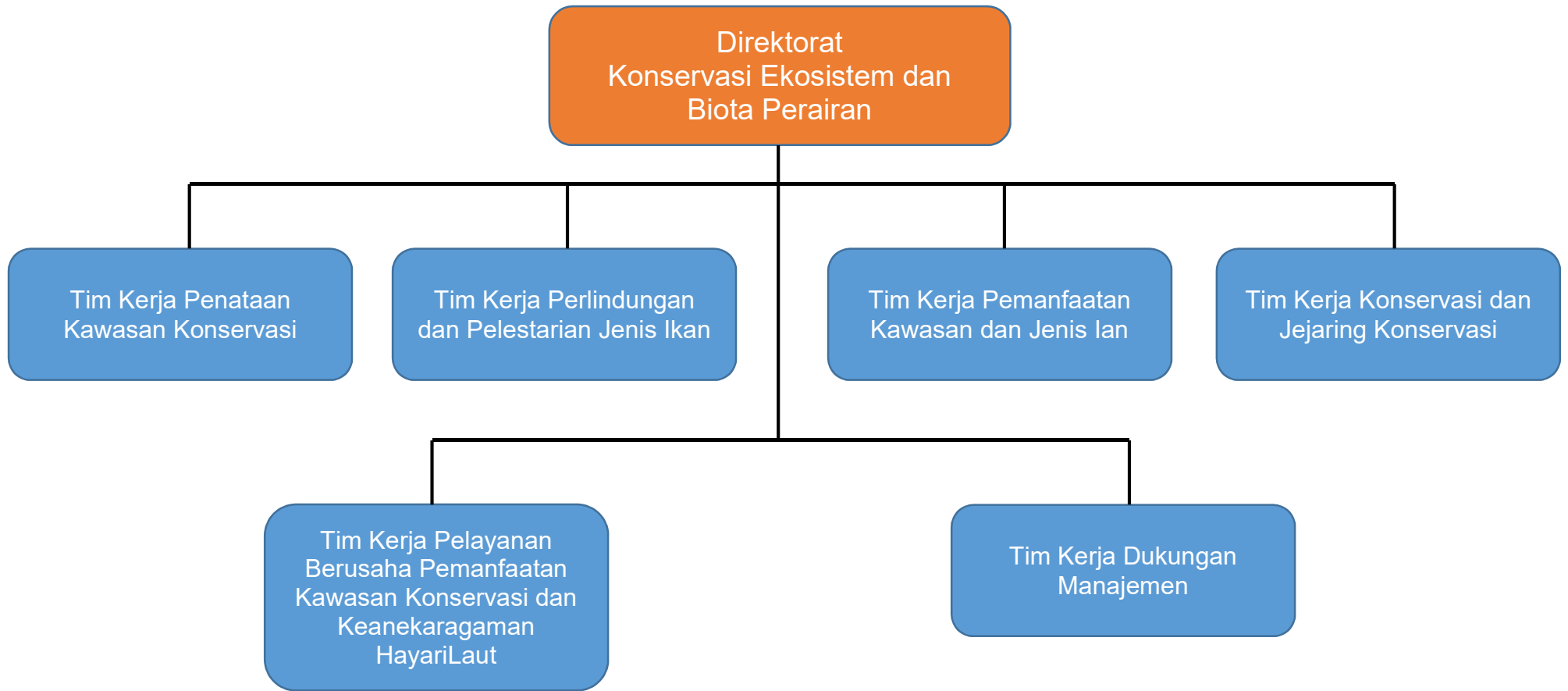
Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan kegiatan dibagi atas berikut :

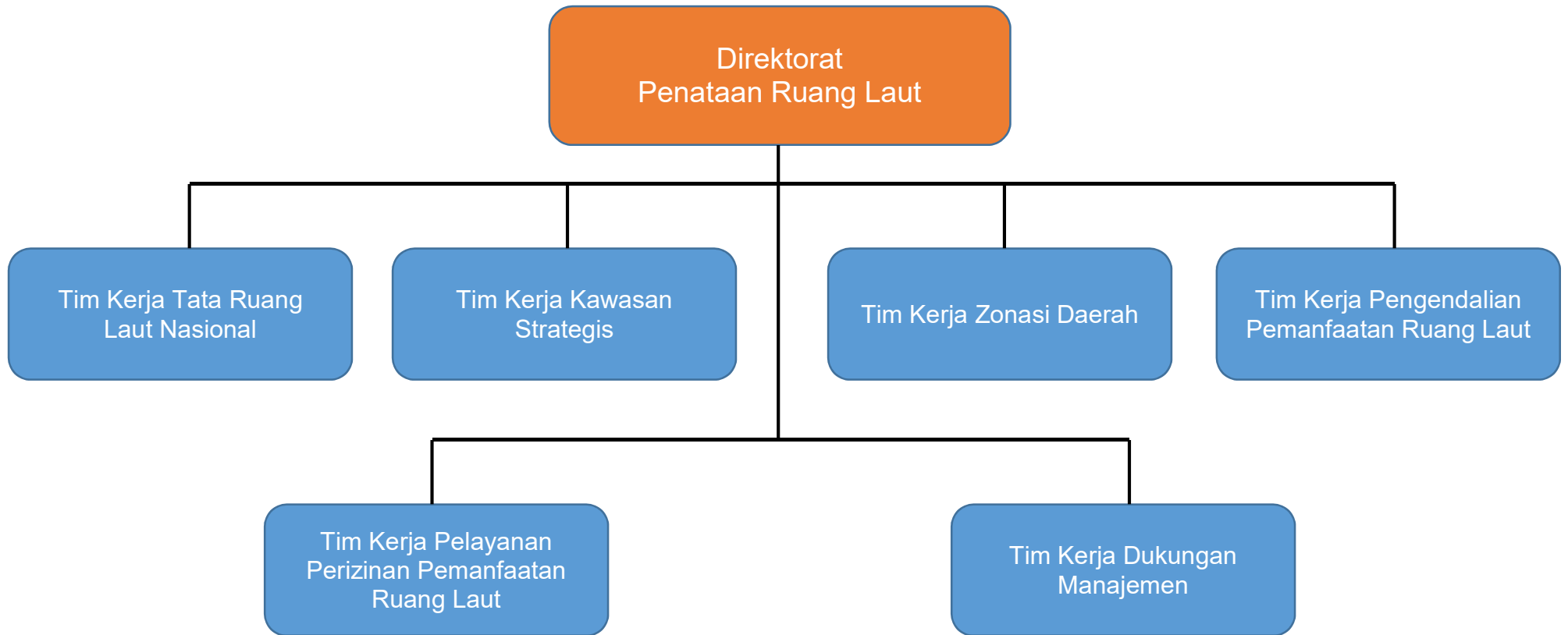
1. **Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Kerja Sama, Kemitraan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Kelompok Masyarakat, Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, Konservasi Jenis/Spesies, Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
2. **Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Sarana Pengembangan Kawasan;
3. **Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan;
4. **Perencanaan Ruang Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan, Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
5. **Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan

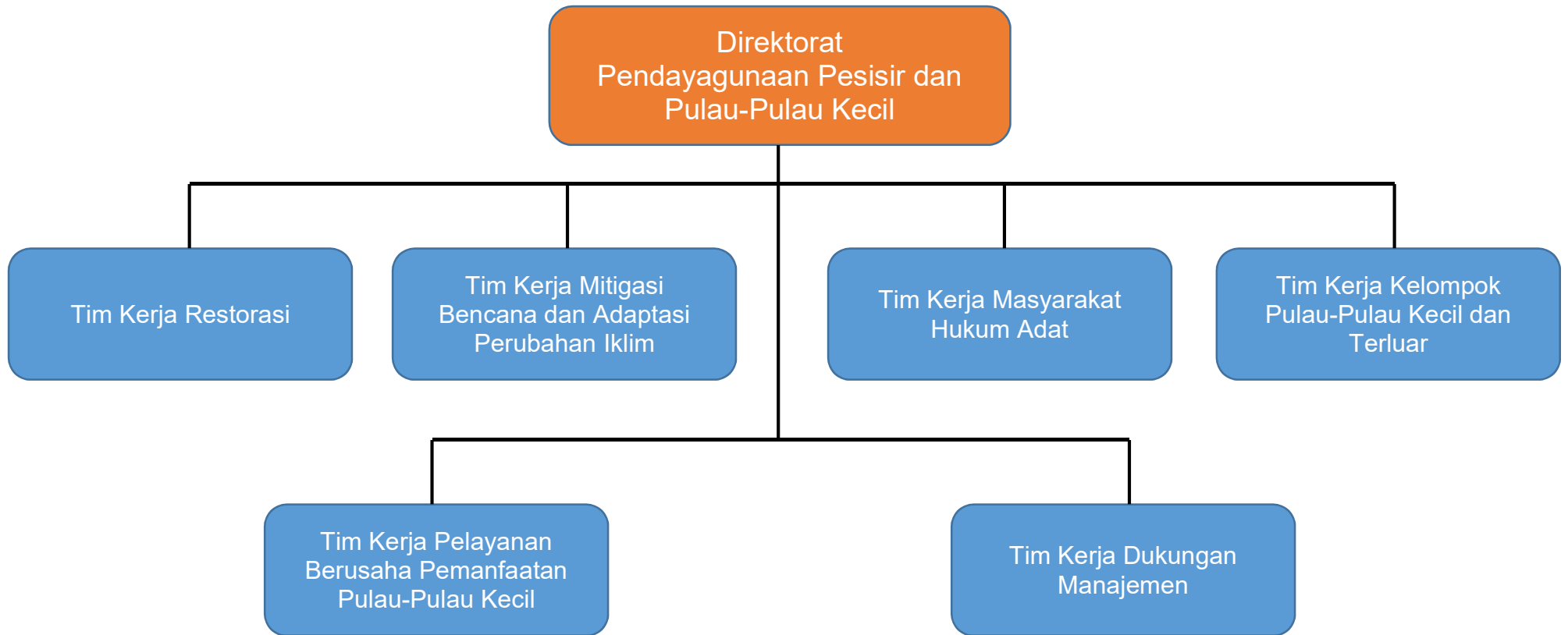
Peralatan/Sarana, Prasarana Bidang Pencarian Pertolongan dan Penanganan Bencana, Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem.













B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Ditjen PKRL telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan sehingga diperlukan pergeseran akun, serta adanya himbauan pemerintah terkait dengan berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga adanya *refocusing* anggaran terkait dengan *automatic adjustment*. Perubahan pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel B.1.

Tabel B.1. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2024 berdasarkan Jenis Belanja MonSAKTI

Uraian	2024		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
Belanja			
Belanja Pegawai	111.538.033.000	112.500.887.000	0,86
Belanja Barang	467.794.751.000	470.570.648.000	0,59
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	97.492.306.000	100.981.709.000	3,46
Jumlah Belanja	676.825.090.000	684.053.244.000	1,06

Revisi anggaran secara umum mengalami perubahan dari pagu awal senilai Rp676.825.090.000,00 menjadi pagu revisi senilai Rp684.053.244.000,00. Kenaikan total pagu sebesar Rp7.228.154.000,00 atau 1,06%. Perubahan dikarenakan adanya kenaikan pada belanja pegawai dari sebelumnya Rp111.538.033,000 menjadi Rp112.500.887.000,00 atau sebesar 0,86%, pada belanja barang dari sebelumnya Rp467.794.751.000,00 menjadi Rp470.670.648.000,00 atau sebesar 0,59%, belanja modal juga mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari sebelumnya Rp97.492.306.000.000 menjadi Rp100.981.709.000 atau sebesar 3,46%.

Untuk pagu belanja pegawai lingkup Ditjen PKRL terdapat pada 1 satker pusat dan 8 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp58.927.436.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja pegawai terbesar terdapat pada satker BPSPL Padang sebesar Rp7.947.856.000,00.

Untuk pagu belanja barang terdapat pada seluruh satker aktif lingkup Ditjen PKRL dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp365.224.099.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja barang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang sebesar Rp14.524.248.000,00.

Untuk lingkup satker Tugas Pembantuan pagu belanja barang terbesar terdapat pada satker Dinas KP Prov. Sulawesi Selatan sebesar Rp1.120.760.000,00.

Untuk pagu belanja modal lingkup Ditjen PKRL terdapat pada 1 satker pusat dan 8 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp91.167.451.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja modal terbesar terdapat pada satker LKKPN Pekanbaru sebesar Rp3.301.896.000,00.

Selain adanya revisi pagu, juga ada pagu blokir pada pagu revisi terkait *automatic adjustment* (pencadangan anggaran). Hal ini merupakan implementasi kebijakan APBN Tahun 2024 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* pada semua K/L.

Untuk nilai Outstanding Kontrak yaitu Rp640.960.321,00 yang terdapat pada satu satker yaitu Setditjen PKRL dengan rincian Rp608.861.400,00 pada Direktorat Jasa Kelautan berupa belanja 526 yang akan dibayarkan tahun 2025 dan Rp32.098.921,00 pada Direktorat P4K berupa belanja 526 Pembangunan Prasarana Dermaga Apung yang merupakan sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Sementara itu jumlah blokir sebesar Rp200.005.822.000,00 yang terdapat pada 9 satker yaitu Setditjen PKRL senilai Rp198.486.293.000,00 dan seluruh satker UPT dengan nilai blokir terbesar pada satker LPSPL Sorong Rp329.938.000,00.

Terdapat Revisi DIPA/POK selama satu tahun anggaran yang berhubungan dengan pemotongan anggaran/*refocusing* di awal tahun yaitu pembukaan blokir kegiatan, penambahan belanja pegawai (gaji), adanya penambahan kegiatan Prioritas Nasional (PN) (sarpras, pengadaan dan penanaman bibit mangrove, dll), perpindahan/pergeseran antara akun belanja sampai dengan revisi bulan Desember dimana seluruh satker UPT dan Pusat terkena dampak blokir anggaran.

Sedangkan apabila dilihat pagu berdasarkan kegiatan, terjadi perubahan penurunan dari pagu awal menjadi pagu revisi yang hanya terjadi pada empat kegiatan dengan pembiayaan Rupiah Murni yaitu pada Perlindungan dan

Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar 19.51%, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363) sebesar 7,52%, Perencanaan Ruang Laut (2366) sebesar 2,21% dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367) sebesar 1,27%. Rincian anggaran Ditjen PKRL menurut jenis kegiatan disajikan pada Tabel B.2.

Tabel B.2. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2024 berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	2024		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
01 RUPIAH MURNI			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	49.456.206.000	41.383.818.000	(19,51)
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	50.044.175.000	46.544.175.000	(7,52)
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	16.299.150.000	16.299.150.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	221.960.857.000	217.160.857.000	(2,21)
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367)	223.761.396.000	220.946.727.000	(1,27)
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346)	38.272.000.000	38.272.000.000	-
04 PNPB			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	20.847.488.000	20.847.488.000	-
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	25.150.825.000	25.150.825.000	-
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	8.210.850.000	8.210.850.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	16.622.143.000	16.622.143.000	-
02 PINJAMAN LUAR NEGERI			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	5.000.000.000	29.604.791.000	83,11
Perencanaan Ruang Laut (2366)	100.000.000	100.000.000	-
09 HIBAH LUAR NEGERI			
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	100.000.000	1.400.000.000	
11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI			
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	0	510.420.000	100,00
03 RUPIAH MURNI PENDAMPING			
Perencanaan Ruang Laut (2366)	1.000.000.000	1.000.000.000	
Total Belanja	676.825.090.000	684.053.244.000	1,06

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp843.309.536.116,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau 119,06% dari estimasi atau target pendapatan sebesar Rp708.313.391.000,00. Terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp1.161.450,00 sehingga realisasi pendapatan menjadi Rp843.308.374.261,00 atau 119,06% Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya disajikan pada Tabel B.3.

Tabel B.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan MonSAKTI

Uraian	31-Dec-24		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	2.380.704.000	1.662.802.413	69,84
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)	690.923.051.000	819.555.281.761	118,62
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	15.009.636.000	21.134.564.636	140,81
Pendapatan Denda (4258)	0	172.777.623	#DIV/0!
Pendapatan Lain-Lain (4259)	0	782.947.828	#DIV/0!
Jumlah	708.313.391.000	843.308.374.261	119,06

Rincian pendapatan per satker menurut MonSAKTI disajikan dalam lampiran AVII dan AVIII. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251) dengan total Rp1.662.802.413,00 dari estimasi Rp2.380.704.000,00 sehingga realisasi sampai saat ini sebesar 69,84%. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp1.250.000,00 berupa tiket masuk penggunaan Gallery BMKT. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp427.360.838,00 yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL, dua satker UPT yaitu BPSPL Padang yang merupakan nilai terbesar senilai Rp187.832.107,00 dan BPSPL Makassar senilai Rp14.656.181,00. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp209.660.360,00 antara lain PKPB Dit. P4K berupa Alsin sebesar Rp5.019.000,00, 4 unit sepeda motor sebesar Rp13.128.000,00, kendaraan dinas Dit. P4K1 senilai Rp21.000.000 dan kendaraan dinas Dit. P4K senilai Rp32.000.000,00; PKPB Dit PRL berupa Alsin senilai Rp13.392.243,00 dan kendaraan dinas Dit. PRL senilai Rp41.921.000,00; PKPB Dit. KEBP berupa kendaraan dinas KEBP senilai Rp69.000.000,00 dan Alsin senilai Rp2.510.000,00; PKPB Dit. Jaskel berupa Alsin senilai

Rp9.172.040,00; Setditjen PKRL berupa Kendaraan dan Alsin sebesar Rp261.000,00; PKPB BAPPEDA Provinsi Riau berupa Alsin sebesar Rp1.017.077,00; dan PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.240.000,00.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) senilai total Rp43.839.911,00 yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya. Nilai terbesar terdapat pada satker LPSPL Serang senilai Rp12.156.804,00 berupa pendapatan sewa mess pegawai.

Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan (425134) yang merupakan KSP di P. Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada aset tanah yang dimiliki satker Setditjen PKRL telah disetor sebesar Rp1.190.351.664,00 pada bulan April 2024 dari estimasi pembayaran tahun ini Rp2.380.703.327,62. Nilai tersebut merupakan setoran kesebelas dari KSP P. Nipa yang dimulai pada tahun 2014. Penjelasan terkait dengan KSP P. Nipa terdapat pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Keterangan terkait pembayaran 50% dari yang seharusnya dibayarkan tahun 2024 ini dijelaskan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya (425259). Sejak tanggal 18 September 2021 pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBPN di bidang kelautan dan perikanan. Aturan ini menggantikan PP Nomor 75 Tahun 2015 dan juga sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBPN yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. PP tersebut mengatur 18 jenis PNPB pada sektor kelautan dan perikanan yang salah satunya terkait tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNBPN pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi

pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya senilai Rp819.555.686.761,00 dengan pengembalian Rp405.000,00 sehingga pendapatan perizinan menjadi Rp819.555.281.761. Pengembalian hanya terdapat pada 1 satker UPT yaitu BPSPL Padang disebabkan karena kesalahan input pada aplikasi sehingga dikembalikan ke pihak ketiga yang menyetorkan. Dengan estimasi Pendapatan senilai Rp690.923.051.000,00 maka persentase realisasi total sebesar 118,62%. Nilai Pendapatan Perizinan Lainnya terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL yaitu Rp815.042.906.761,00.

Pendapatan Perizinan Lainnya berasal dari : 1) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut berupa : a. Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, b. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN), c. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Luar Negeri (SAJI-LN), d. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri, e. Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, f. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), g. Pelaksanaan Reklamasi, h. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, i. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km², j. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berupa : a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut, b. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut, c. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut.

Terkait adanya selisih rekonsiliasi eksternal SAKTI - SPAN sampai dengan Semester I Tahun 2024 yang dikarenakan adanya setoran yang tidak diakui dan diinput pada SAKTI senilai Rp2.316.320.000,00, dimana angka tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak, atas akun pendapatan perizinan lainnya (425259) pada satker Inaktif Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (kode satker 329013 - Dekonsentrasi). Pada bulan Juli 2024 telah dilakukan pemindahan kode satker dari yang sebelumnya 329013 menjadi 622145

Sekretariat Ditjen PKRL sehingga pada periode laporan Tahunan sudah tidak ada selisih lagi.

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp21.135.321.491,00 dengan pengembalian Rp756.855,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi Rp21.134.564.636,00 berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pengembalian hanya terdapat pada 1 satker UPT yaitu BPSPL Makassar disebabkan karena kesalahan input pada aplikasi sehingga dikembalikan ke pihak ketiga yang menyetorkan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 bersumber dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKP) yaitu LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang bersumber dari karcis masuk dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya berupa Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan. Dengan estimasi Pendapatan senilai Rp15.009.636.000,00 maka persentase realisasi total sebesar 140,81%.

Nilai Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya terbesar pada satker pusat Sekretariat Ditjen PKRL yaitu Rp10.014.353.334,00 berupa Pungutan Penangkapan Jenis Ikan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan sementara pada lingkup UPT yang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang senilai Rp4.114.560.000,00.

Pendapatan Denda (4258) senilai Rp172.777.623,00 terdapat pada satu akun yaitu Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp172.777.623,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL dan Satker LKKPN Pekanbaru. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Setditjen PKRL yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp878.378,00 untuk pekerjaan pengadaan sarana usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Kebumen, setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai

Rp377.027,00 untuk pekerjaan Pengadaan Landmark dan toilet di Kabupaten Pidie, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp1.452.351,00 untuk pekerjaan Pembangunan GGR Kabupaten Sumenep, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp20.281.081,00 untuk pekerjaan Pembangunan GGR di Kabupaten Pamekasan, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp99.508.000,00 untuk pekerjaan belanja barang sesuai kontrak nomor 597/PPK/DJPKRL.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, Addendum Kontrak nomor 2627/PPK/DJPKRL.3/XI/2024 tanggal 5 November 2024, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp996.281,00 untuk pekerjaan belanja barang sesuai kontrak nomor 2418/PPK/DJPKRL.3/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Addendum nomor 2792a/PPK/DJPKRL.3/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp19.759.010,00 untuk pekerjaan belanja barang sesuai kontrak nomor 848/PPK/DJPRL.3/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, Addendum Kontrak nomor 2610N/PPK/DJPRL.3/XI/2024 tanggal 1 November 2024, Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan Penataan Ruang Kerja Pegawai Dit. KKHL sebesar Rp3.659.733,00 oleh CV. Sinawit Indomas Perkasa dan denda keterlambatan atas pekerjaan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp58.000,00 oleh CV. Kalembo Ade Mautama. Sedangkan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Satker LKKPN Pekanbaru merupakan setoran denda keterlambatan pembangunan prasarana layanan Pulau Pieh senilai Rp25.483.402,00.

Pendapatan Lain-Lain (4259) senilai Rp782.947.828,00 terdiri dari : (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada lima satker yaitu LPSPL Serang sebesar Rp8.581.500,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 a.n.Yuli Deviyani Riadi, BPSPL Denpasar sebesar Rp955.243,00 dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, PPPK dan pembayaran uang makan tahun anggaran 2023, BPSPL Makassar sebesar Rp21.199.200,00 yaitu penerimaan pengembalian gaji pegawai dua orang PNS yakni A. Muhammad Ishak Yusma dikarenakan adanya perubahan data pegawai telah diuji kebenarannya dan sesuai dengan dokumen yang sah. Selanjutnya dokumen pendukung tersebut disimpan sebagai pertinggal pada PPSPM. Berdasarkan perubahan data pegawai tersebut, pembayaran gaji menjadi sebesar Rp14.094.600,00 dan Moh. Yasir dikarenakan adanya kelebihan gaji dan

tunjangan pada saat melakukan tugas belajar dalam negeri pada Tahun 2022 senilai Rp679.200,00 dan Tahun 2023 senilai Rp6.480.000,00, LKKPN Pekanbaru sebesar Rp119.245,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja 9 orang pegawai LKKPN Pekanbaru, dan Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp14.515.600,00 merupakan pengembalian atas temuan BPK RI berupa kelebihan pembayaran Gaji Pegawai tugas belajar Tahun 2023 sehingga total Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp45.370.788,00.

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) senilai Rp734.367.499 yang terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL sebesar Rp676.843.824,00, 8 satker UPT yaitu LPSPL Serang Rp2.917.656, BPSPL Denpasar sebesar Rp6.099.758,00, BPSPL Pontianak sebesar Rp11.765.504,00, BPSPL Makassar sebesar Rp300.000,00, LPSPL Sorong sebesar Rp28.004.797,00, LKKPN Pekanbaru sebesar Rp2.568.833,00, dan BPSPL Padang sebesar Rp425.500,00 serta 1 satker Tugas Pembantuan DKP Provinsi Maluku Utara senilai Rp2.000.000,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan karena pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri senilai Rp2.917.656 pada LPSPL Serang, Pengembalian atas kelebihan pembayaran honor enumerator senilai Rp1.000.000,00, pembayaran belanja pemeliharaan senilai Rp400,00, kelebihan pembayaran belanja barang operasional senilai Rp390,00 dan pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri senilai Rp5.098.908,00 pada Tahun Anggaran 2023 pada BPSPL Denpasar, Pendapatan dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit Inspektorat Jenderal berupa temuan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan listrik mess senilai Rp11.765.504,00 pada BPSPL Pontianak, Pengembalian kelebihan pembayaran biaya pencetakan bahan sosialisasi senilai Rp300.000,00 pada BPSPL Makassar, Pengembalian terhadap *base camp* tenaga kerja konstruksi rehab kantor senilai Rp2.500.000,00 pengembalian terhadap Kelebihan pembayaran jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp718.080,00 pengembalian terhadap realisasi belanja pemeliharaan pada LPSPL Sorong yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717,00 pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan senilai Rp10.810.000,00 pada LPSPL Sorong. LKKPN Pekanbaru memiliki rincian senilai Rp189,57 sesuai LHP Kinerja TA. 2022 s.d 2023 Nomor : T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yakni pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan

jalan dan komplek kantor/*paving block* a.n. CV. Rihandi Kartika Perkasa senilai Rp713.180,00 dan pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi P. Pieh dan P. Anambas, pemeliharaan pagar kantor dan gerbang gapura kantor senilai Rp1.855.653,00. Sedangkan pada BPSPL Padang senilai Rp425.500,00 berupa pengembalian kekurangan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kantor BPSPL Padang, Pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp3.441.627,00 pada BKKPN Kupang, Setoran temuan Inspektorat Jenderal KKP tahun 2006 senilai Rp2.000.000,00 pada satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara terkait kemahalan harga pada pengadaan peralatan *Single Side Band Plus*. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Setditjen PKRL senilai Rp676.843.824,00 berasal dari Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp138.144.508,00, Dit. Jasa Kelautan sebesar Rp124.543.410,00 berupa temuan Itjen KKP terkait Kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai Pembangunan GGR Kab Jeneponto oleh PT Alfa Mahkota Abadi sebesar Rp4.151.387,00, Setoran Temuan Itjen atas Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin TA. 2022 oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera senilai Rp4.230.627,00, Kekurangan volume pekerjaan oleh CV. Gibran Bima Pratama senilai Rp76.512,00, Setoran Temuan Itjen LHP atas Kekurangan volume pekerjaan oleh CV. Bangun Jaya senilai Rp85.448,00, Setoran Temuan BPK RI atas Pengembalian Gaji Pegawai senilai Rp17.761.000,00, Setoran Temuan Itjen No. T.613/ITJ.3/HP.550/XII/2023 atas Kekurangan Perhitungan Volume Pekerjaan Pintu Besi GGR Pangkep senilai Rp3.131.250,00 dan Setoran Temuan Itjen No.T.613/ITJ.3/HP.550/XII/2023 atas Kekurangan Perhitungan Volume Pekerjaan Rangka Kanopi GGR Pangkep senilai Rp38.357,00 dan Pengembalian Temuan Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp95.068.829,00, Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sebesar Rp127.497.208,00 berupa Setoran Temuan BPK RI atas Belanja Barang Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban senilai Rp7.975.691,00, Setoran Temuan BPK RI atas Belanja Barang Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban Yang Sah senilai Rp4.839.404,00, Setoran Temuan BPK RI atas Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber / Pakar Tidak Sesuai SBM senilai Rp59.245.000,00, dan Pengembalian Temuan Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp55.437.113,00. Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp35.650.900,00 terkait Setoran Temuan BPK RI atas Belanja Barang Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban sebesar

Rp3.144.935,00, Setoran Temuan BPK RI atas Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Tidak Sesuai SBM sebesar Rp28.670.000,00 dan Pengembalian Temuan Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp3.835.965,00. Dinas KP Kab. Bima sebesar Rp660.000,00 berupa temuan Itjen atas dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan, Dinas KP Kab. Buton sebesar Rp27.224.198,00 berupa temuan BPK RI Tahun 2016 atas kekurangan pungutan PPh pasal 21 dan kekurangan volume atas pengadaan barang dan temuan BPKP Tahun 2014 atas kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat, Dinas KP Kab. Cirebon sebesar Rp1.530.000,00 berupa temuan itjen atas kegiatan pertemuan *fullday meeting* tidak sesuai ketentuan, Dinas KP Kab. Pamekasan sebesar Rp17.898.566,00 berupa temuan Itjen terkait Kelebihan Pembayaran Senilai Rp1.677.066,00,00 dan Koreksi *As Built Drawing* dan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp3.350.000,00,00 dan Tidak Lengkap Senilai Rp45.398.000,00, Dinas KP Kab. Flores Timur sebesar Rp28.654.500,00 berupa temuan BPK RI Tahun 2009 atas program stimulus atas Rumah Nelayan Ramah Bencana (RNRB), Dinas KP Kab. Pangkajene Kepulauan sebesar Rp3.734.480.00 berupa temuan Itjen terdiri atas Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.380.000,00, *Output* Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap Senilai Rp1.300.000,00 dan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.054.480,00,00. Dinas KP Prov. Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5.032.000,00 berupa Setoran temuan Itjen LHA No. 1698/ITJ.RC.320/X/2008 atas realisasi yang tidak benar berupa kegiatan penyadaran masyarakat terhadap bahaya Tsunami sebesar Rp2.332.000,00 dan realisasi keuangan yang tidak benar sebesar Rp2.700.000,00.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) hanya pada satker BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 berupa temuan Itjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla.

Selain itu, secara umum terdapat kenaikan pada akun Pendapatan dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 16,16%. Peningkatan secara drastis terdapat pada Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) sebesar 27,54% berasal dari penerimaan fungsional antara lain Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi serta Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi

Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan. Terdapat juga peningkatan pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) sebesar 16,20% berupa Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) dikarenakan pada tahun ini terdapat Penerimaan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut yaitu Kegiatan Wisata Bahari, Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Pelaksanaan Reklamasi, Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA.



Gambar B.1. Beranda Aplikasi Seapark

Tabel perbandingan realisasi pendapatan TA. 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel B.4.

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA. 2024 dan 2023

Uraian	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	1.662.802.413	3.599.020.683	(116,44)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)	819.555.281.761	686.762.808.355	16,20
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	21.134.564.636	15.314.132.406	27,54
Pendapatan Bunga & Pengelolaan Rekening Perbankan (4257)	0	4.500.000	0
Pendapatan Denda (4258)	172.777.623	306.151.342	(77,19)
Pendapatan Lain-Lain (4259)	782.947.828	1.050.179.919	(34,13)
Jumlah	843.308.374.261	707.036.792.705	16,16

Secara umum realisasi pendapatan melebihi target yaitu mencapai sebesar 119,06%, dimana estimasi pendapatan senilai Rp708.313.391.000,00 dengan realisasi pendapatan Rp843.308.374.261,00. Atas target dan realisasi Pendapatan negara Bukan Pajak per satker lingkup Ditjen PKRL per tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.5.

Tabel B.5. Target dan Realisasi PNBPN Satker Lingkup Ditjen PKRL per 31 Desember 2024

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	LPSPL Serang	1.216.260.000	2.629.830.631	216,22
2	BPSPL Denpasar	950.000.000	3.035.051.977	319,48
3	BPSPL Pontianak	2.000.000.000	2.421.607.418	121,08
4	BPSPL Makassar	500.000.000	849.310.891	169,86
5	LPSPL Sorong	1.100.000.000	1.687.478.812	153,41
6	LKKPN Pekanbaru	18.203.000	164.934.448	906,08
7	BPSPL Padang	650.000.000	1.087.770.503	167,35
8	BKKPN Kupang	1.354.900.000	4.133.213.817	305,06
9	Setditjen PKRL	700.524.028.000	827.297.175.764	118,10
10	Dinas KP Prov. Maluku Utara	0	2.000.000	#DIV/0!
Jumlah		708.313.391.000	843.308.374.261	119,06

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada seluruh rincian akun pendapatan.

Realisasi Belanja
Rp471.154.781.232

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp471.706.118.246,00 atau 68,96% dari anggaran belanja sebesar Rp684.053.244.000,00. Dengan pengembalian sebesar Rp551.337.014,00 realisasi belanja menjadi sebesar Rp471.154.781.232,00 atau 68,88%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.6.

Tabel B.6. Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	TA. 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	112.500.887.000	112.107.454.106	99,65
Belanja Barang	470.570.648.000	340.997.026.291	72,46
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	100.981.709.000	18.601.637.849	18,42
Total Belanja Kotor	684.053.244.000	471.706.118.246	68,96
Pengembalian		(551.337.014)	0,00
Jumlah	684.053.244.000	471.154.781.232	68,88

Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp580.606.727.000,00 dengan realisasi sebesar Rp379.285.721.526,00 atau 65,33% ditambah dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp29.704.791.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.492.150.918,00 atau 82,45%, serta anggaran Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi masih Rp0,00, anggaran tambahan PNBP sebesar Rp70.831.306.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.515.155.277,00 atau 92,49%, anggaran hibah luar negeri sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.358.306.451,00 atau 97,02%, dan hibah langsung luar negeri dengan anggaran sebesar Rp510.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp503.447.060,00 atau 98,63%, sehingga realisasi total per 31 Desember 2024 sebesar Rp 471.153.398.532,00 atau 68,88%.

Tabel B.7. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan

Kegiatan	31 Desember 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01 RUPIAH MURNI	580.606.727.000	379.285.721.526	65,33
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	41.383.818.000	39.528.055.424	95,52
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	46.544.175.000	44.787.539.582	96,23
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	16.299.150.000	15.744.427.984	96,60
Perencanaan Ruang Laut (2366)	217.160.857.000	29.571.859.971	13,62
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367)	220.946.727.000	213.428.374.294	96,60
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346)	38.272.000.000	36.225.464.271	94,65
02 PINJAMAN LUAR NEGERI	29.704.791.000	24.492.150.918	82,45
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	29.604.791.000	24.492.150.918	82,73
Perencanaan Ruang Laut (2366)	100.000.000	0	0,00
03 RUPIAH MURNI PENDAMPING	1.000.000.000	0	0,00
Perencanaan Ruang Laut (2366)	1.000.000.000	0	0,00
04 PNBP	70.831.306.000	65.515.155.277	92,49
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	20.847.488.000	19.730.776.086	94,64
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	25.150.825.000	23.803.651.013	94,64
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	8.210.850.000	7.810.478.194	95,12
Perencanaan Ruang Laut (2366)	16.622.143.000	14.170.249.984	85,25
09 HIBAH LUAR NEGERI	1.400.000.000	1.358.306.451	97,02
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2363)	1.400.000.000	1.358.306.451	97,02
11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	510.420.000	503.447.060	98,63
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	510.420.000	503.447.060	98,63
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	0,00
Total Belanja	684.053.244.000	471.154.781.232	68,88

Anggaran Rupiah Murni terdapat pada enam kegiatan dimana realisasi yang terbesar yaitu pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PKRL (2367) sebesar Rp213.427.741.594,00. Anggaran Pinjaman Luar Negeri terdapat pada dua kegiatan yaitu kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp29.604.791.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.492.150.918,00 atau 82,73% dan Perencanaan Ruang Laut (2366) sebesar Rp100.000.000,00 dan belum realisasi. Anggaran Rupiah Murni Pendamping terdapat pada satu kegiatan yaitu Perencanaan Ruang Laut (2366) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan belum ada realisasi. Anggaran PNBPN terdapat pada empat kegiatan yang semuanya telah ada realisasi. Realisasi yang terbesar yaitu pada kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363) sebesar Rp 23.803.651.013,00 atau 94,64%. Anggaran Hibah Luar Negeri terdapat pada satu kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.358.306.451,00 dan anggaran hibah langsung luar negeri terdapat pada satu kegiatan yaitu Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363) sebesar Rp510.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp503.447.060,00. Rincian realisasi belanja berdasarkan program kegiatan disajikan pada Tabel B.7.

Selain itu, secara umum terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada realisasi belanja dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 15,25%. Kenaikan yang sangat drastis terdapat pada Belanja Modal sebesar 22,07% dikarenakan pada tahun ini terdapat Belanja Modal pada sembilan satker diantaranya satu satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan delapan satker UPT antara lain LPSPL Sorong, LPSPL Serang, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, LKKPN Pekanbaru BPSPL Padang dan LKKPN Kupang serta Belanja Barang dengan peningkatan sebesar 15,95%. Sementara itu untuk Belanja Pegawai juga terdapat kenaikan sebesar 11,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian perbandingan realisasi belanja disajikan pada Tabel B.8.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA. 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	112.074.699.246	98.632.702.317	11,99
Belanja Barang	340.478.444.137	286.169.017.708	15,95
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	18.601.637.849	14.496.104.926	22,07
Jumlah	471.154.781.232	399.297.824.951	15,25

Belanja Pegawai
Rp112.074.699.246

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Untuk jumlah pegawai Ditjen PKRL s.d Desember tahun 2024 berdasarkan aplikasi e-pegawai yaitu berjumlah 1.070 orang pegawai (713 orang laki-laki, 257 orang perempuan) yang terdiri dari kantor pusat sejumlah 315 PNS (196 orang laki-laki, 119 orang perempuan), 25 berstatus PPPK (18 orang laki-laki, 7 orang perempuan), JPT Non ASN 1 orang, 42 berstatus kontrak (23 orang laki-laki, 19 orang perempuan) dan 94 berstatus *Outsource* (58 orang laki-laki, 36 orang perempuan) serta kantor UPT berjumlah 363 PNS (236 orang laki-laki, 127 orang perempuan), 23 berstatus PPPK (12 orang laki-laki, 11 orang perempuan), 48 berstatus kontrak (36 orang laki-laki, 12 orang perempuan) dan 159 berstatus *Outsource* (133 orang laki-laki, 26 orang perempuan).

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp112.500.887.000,00 adanya revisi terjadi perubahan dibandingkan anggaran awal sebesar Rp111.538.033.000,00. Untuk realisasi belanja pegawai *bruto* sd 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp112.107.454.106,00 atau 99,65%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp32.754.860,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp112.074.699.246,00 atau 99,62%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai sd 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.9.

Anggaran dan realisasi terbesar yaitu pada Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus /Kegiatan) akun 512411 yaitu dengan anggaran Rp58.247.629.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.149.452.647,00 atau 99,83% dengan pengembalian

Rp5.540.915,00 yang terdapat pada sembilan satker yaitu satu satker pusat dan delapan satker UPT. Realisasi terbesar terdapat pada satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp30.232.853.994,00.

Tabel B.9. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	50.320.741.000,00	50.075.244.373,00	99,51
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.614.704.000,00	2.581.884.086,00	98,74
Belanja Lembur (5122)	1.317.813.000,00	1.300.873.000,00	98,71
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	58.247.629.000,00	58.149.452.647,00	99,83
Jumlah Belanja Kotor	112.500.887.000	112.107.454.106	99,65
Pengembalian Belanja Pegawai		(32.754.860)	
Jumlah Belanja	112.500.887.000	112.074.699.246	99,62

Realisasi belanja pegawai Tahunan TA. 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA. 2023 sebesar 13,63%. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan jumlah anggaran yang juga cukup signifikan seiring dengan perubahan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji pegawai karena adanya perpindahan menuju fungsional. Kenaikan yang paling signifikan yaitu pada Belanja lembur (5122) dengan kenaikan 31,43%. Rincian perbandingan belanja pegawai Tahunan TA. 2024 dengan TA. 2023 disajikan pada Tabel B.10.

Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA. 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	50.075.244.373	47.472.482.299	5,48
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK	2.581.884.086	236.680.166	0,00
Belanja Lembur (5122)	1.300.873.000	989.747.000	31,43
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	58.149.452.647	49.964.742.048	16,38
Jumlah Belanja Kotor	112.107.454.106	98.663.651.513	13,63
Pengembalian Belanja Pegawai	(32.754.860)	(30.949.196)	5,83
Jumlah Belanja	112.074.699.246	98.632.702.317	13,63

Pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp32.754.860,00 terdapat pada lima akun diantaranya yaitu Belanja Gaji Pokok PNS (511111) senilai Rp19.124.550,00, Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) senilai Rp24.235,00, Belanja Tunj. Khusus /Kegiatan/Kinerja senilai Rp4.243.304,00, Belanja Tunj. Struktural PNS (511123) senilai Rp1.620.000,00, Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124) senilai Rp2.745.000,00, dan Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai

Rp3.700.050,00.

Belanja Barang
Rp340.478.444.137

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Anggaran semula sebesar Rp467.794.751.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp470.570.648.000,00. Untuk realisasi belanja barang *bruto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp340.997.026.291,00 atau 72,46%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp518.582.154,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp340.478.444.137,00 atau 72,35%. Rincian Realisasi Belanja Barang sd 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.11.

Persentase realisasi belanja barang terbesar yaitu pada Belanja Barang Persediaan dengan persentase 99,48% sementara realisasi belanja yang terkecil terdapat pada Belanja jasa dengan persentase 33,83%.

Tabel B.11. Rincian Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	12.842.377.000	12.500.806.666	97,34
Belanja Barang Non Operasional (5212)	43.349.945.000	41.572.076.257	95,90
Belanja Barang Persediaan (5218)	937.341.000	932.512.540	99,48
Belanja Jasa (5221)	164.468.253.000	55.633.698.937	33,83
Belanja Pemeliharaan (5231)	8.341.910.000	8.106.815.346	97,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	156.596.486.000	142.109.516.691	90,75
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	11.764.276.000	9.024.502.739	76,71
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	64.975.460.000	64.057.195.316	98,59
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	7.294.600.000	7.059.901.799	96,78
Jumlah Belanja Kotor	470.570.648.000	340.997.026.291	72,46
Pengembalian Belanja		(518.582.154)	
Jumlah Belanja	470.570.648.000	340.478.444.137	72,35

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Dari pagu anggaran Rp12.842.377.000,00, realisasi sebesar Rp12.500.806.666,00, dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp631.470,00 sehingga realisasi 97,34%.

Realisasi Belanja Barang Operasional terbesar yaitu Belanja Keperluan Perkantoran (521111) sebesar Rp9.330.589.362,00 yang terdapat pada 1 satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana yang nilai yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp5.143.636.686,00. Pengembalian belanja merupakan setoran mandiri karena kelebihan pembayaran pada satker UPT BPSPL Denpasar dan LPSPL Sorong.

Pada Belanja Barang Operasional juga terdapat belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, belanja Honor Operasional Satuan Kerja, dan belanja Barang Operasional Lainnya. Untuk belanja Barang Operasional Lainnya (521119) terdapat realisasi sebesar 95,93% yang terdapat pada 1 satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT.

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Dari pagu Rp43.349.945.000,00 realisasi sebesar Rp41.572.076.257,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.805.000,00 sehingga realisasi sebesar 95,89%. Realisasi terbesar yaitu Belanja Bahan (521211) sebesar Rp38.129.689.752,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp2.505.000,00 sehingga realisasi sebesar 96,63%. Realisasi Belanja Bahan terdapat pada 43 satker dengan rincian 1 satker Kantor Pusat, 8 satker UPT dan 44 satker Tugas Pembantuan dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp27.506.683.791,00.

Selain itu juga terdapat belanja Honor *Output* Kegiatan, belanja Barang Non Operasional Lainnya, dan belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel. Realisasi belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp694.644.502,00 yang terdapat pada lima satker yaitu Setditjen PKRL, tiga satker UPT yaitu BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, dan BPSPL Padang serta 1 satker TP yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo. Realisasi belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp148.994.003,00 yang terdapat hanya pada satker UPT BPSPL Denpasar dan BKKPN Kupang.

Belanja Barang Persediaan merupakan pembelian barang yang memiliki masa manfaat selama satu tahun. Terdiri dari dua akun diantaranya yaitu Persediaan Barang Konsumsi (521811) dengan pagu Rp936.877.000, realisasi sebesar Rp932.048.540,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 99,48%. Realisasi terdapat pada 33 satker yaitu Setditjen PKRL, seluruh

satker UPT serta 24 satker Tugas Pembantuan. Selain itu terdapat juga akun Barang Persediaan Lainnya (521832) dengan pagu Rp464.000,00 realisasi senilai Rp464.000,00 yang terdapat pada satu satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Prov. Aceh.

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp55.633.698.937,00 atau 33,83% dari total pagu sebesar Rp164.468.253.000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp25.954.996,00 sehingga realisasi menjadi Rp55.607.743.941,00 atau 33,81%. Realisasi Belanja Jasa yang tergolong besar yaitu Belanja Sewa (522141) sebesar Rp15.295.525.549,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp18.354.996,00 sehingga realisasi sebesar 97,25% dari total pagu Rp15.277.170.553,00 diantaranya yaitu sewa tempat kerja, sewa gedung untuk pertemuan, sewa perahu/kapal, kendaraan operasional, alat selam untuk kegiatan, dll. Realisasi Belanja Jasa Sewa terdapat pada 39 satker yang terdiri dari satu satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan 30 satker Tugas Pembantuan dimana realisasi terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL yaitu Rp6.107.610.637,00.

Selanjutnya terdapat realisasi belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp27.154.311.387,00 atau 29,08% dari total pagu sebesar Rp93.385.423.000,00 dan tidak terdapat pengembalian. Belanja Jasa Lainnya terdapat pada 19 satker dengan rincian satu satker pusat, seluruh satker UPT dan 10 satker TP dimana realisasi yang terbesar terdapat pada satker Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp16.081.307.139,00. Selain itu, pada belanja Jasa juga terdapat diantaranya belanja Langganan Listrik, Telepon, Air, belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya, belanja Jasa Konsultan, dan belanja Jasa Profesi.

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp8.106.815.346,00 atau 97,18% dari total pagu sebesar Rp8.341.910.000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp10.348.131,00. Realisasi belanja pemeliharaan yang tergolong besar yaitu terkait Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp3.143.264.774,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.455.950,00 sehingga realisasi sebesar 96,06% dari total pagu Rp3.269.706.000,00. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat pada 1 satker pusat dan seluruh satker UPT dengan yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp1.043.089.055,00. Selain itu juga terdapat realisasi belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, belanja pemeliharaan Jaringan, dan

belanja Pemeliharaan Lainnya. Seluruh belanja pemeliharaan hanya terdapat pada satker Kantor Pusat dan UPT.

Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp142.109.516.691,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp176.069.315,00 sehingga realisasi *netto* Rp141.933.447.376,00 atau 90,64% dari total pagu sebesar Rp156.596.486.000,00. Realisasi terbesar yaitu belanja Perjalanan Biasa (524111) yang merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, dan lain-lain sebesar Rp83.330.932.020,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp140.343.388,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp83.190.588.632,00 atau 92,1% dari total pagu Rp90.321.969.000,00.

Realisasi belanja Perjalanan Biasa (524111) terdapat pada 43 satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan 34 satker Tugas Pembantuan. Pengembalian belanja Perjalanan Biasa terdapat pada satker Pusat Setditjen PKRL, BPSPL Pontianak dan LPSPL Sorong. Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri juga terdapat pada belanja perjalanan Dinas Dalam Kota, belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam dan Luar Kota.

Realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp9.024.502.739,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp291.670.557,00 sehingga realisasi *netto* Rp8.732.832.182,00 sehingga realisasi sebesar 74,23% dari total pagu sebesar Rp11.764.276.000,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri terdiri dari Perjalanan Biasa Luar Negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan Perjalanan Lainnya Luar Negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan satu satker BPSPL Pontianak. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri senilai Rp4.521.785.472,00, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp153.053.486,00

dan Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri senilai Rp4.502.717.267,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp138.617.071,00.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp64.057.195.316,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp11.102.685,00 sehingga realisasi *netto* Rp64.046.092.631,00 dari total pagu sebesar Rp64.975.460,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 98,57%. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya terdiri dari : (1) Realisasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112) sebesar Rp27.462.731.737,00 atau 97,24% dari total pagu sebesar Rp28.242.175,000,00 yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan tujuh satker UPT dimana realisasi terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp25.972.454.339,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya berupa kegiatan Kompak berupa pengadaan alat selam dan lain sebagainya untuk satker UPT. Pada satker pusat terdapat pada Dit. P4K kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif diantaranya berupa kapal, mesin tempel, *fish finder*, dll. dan Dit. Jasa Kelautan berupa mesin *washing plant*.

(2) Realisasi belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113) sebesar Rp18,310,202,000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp291.670.557,00 sehingga realisasi *netto* Rp10.847.730,00 sehingga realisasi sebesar 99,69% dari total pagu sebesar Rp18.356.000.000,00. Realisasi akun ini hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL yaitu Dit. Jasa Kelautan berupa perencanaan dan pembangunan Gudang Garam Rakyat

(3) Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526114) masih Rp2.813.072.000,00 atau 99,39% dari total pagu sebesar Rp2.830.285.000,00. Realisasi akun ini terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL yaitu Dit. Jasa Kelautan berupa integrasi lahan pergarman.

(4) Realisasi belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115) sebesar Rp15.471.189.579,00 dari total pagu sebesar Rp15.547.000.000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp254.955,00 sehingga realisasi menjadi Rp15.470.934.624,00 atau 99,51% yang terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL dan dua satker UPT yaitu BPSPL Makassar dan BPSPL Denpasar. Pada satker UPT berupa kegiatan Kompak. Pada satker pusat terdapat pada Dit. P4K berupa Pengadaan Bantuan dan Pembangunan TPS/PDU

di Desa Pesisir Bersih, kegiatan Stimulan untuk masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil, bantuan ekonomi produktif, pembangunan dermaga apung/tambat labuh, dan pengadaan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

(5) Realisasi Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp7.059.901.799,00 atau 96,78% dari total pagu sebesar Rp7.294.600.000,00 tanpa pengembalian belanja. Realisasi belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (526311) hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL diantaranya berupa kegiatan bantuan penanaman mangrove dan vegetasi pantai serta pengadaan sarana pengolahan produk mangrove.

Realisasi belanja barang TA. 2024 secara umum dibandingkan dengan TA. 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 15,95%. Secara rinci menurut akun belanja, kenaikan yang paling signifikan terdapat pada belanja Jasa dimana pada tahun sebelumnya realisasi sebesar Rp37.553.987.612,00 mengalami kenaikan pada tahun ini menjadi sebesar Rp55.633.698.937,00 atau naik 32,50%. Sementara itu, terdapat juga penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Belanja Barang Operasional sebesar 77,71% dimana pada tahun sebelumnya realisasi anggaran Belanja Operasional sebesar Rp22.214.569.342,00 dibandingkan tahun ini masih Rp12.500.806.666,00. Rincian perbandingan belanja TA. 2024 dengan TA. 2023 disajikan pada Tabel B.12.

Tabel B.12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA. 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	12.500.806.666,00	22.214.569.342,00	(77,71)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	41.572.076.257,00	32.236.584.114,00	22,46
Belanja Barang Persediaan (5218)	932.512.540,00	1.052.488.332,00	(12,87)
Belanja Jasa (5221)	55.633.698.937,00	37.553.987.612,00	32,50
Belanja Pemeliharaan (5231)	8.106.815.346,00	10.132.275.675,00	(24,98)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	142.109.516.691,00	120.104.946.594,00	15,48
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	9.024.502.739,00	9.226.929.767,00	(2,24)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	64.057.195.316,00	47.754.806.596,00	25,45
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	-	-	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	7.059.901.799,00	5.934.413.134,00	15,94
Jumlah Belanja Kotor	340.997.026.291	286.211.001.166	16,07
Pengembalian Belanja	(519.964.854)	(41.983.458)	91,93
Jumlah Belanja	340.477.061.437	286.169.017.708	15,95

B.2.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal PKRL tidak mempunyai anggaran belanja sosial. Rincian Realisasi Belanja Sosial Tahunan disajikan pada Tabel B.13.

Tabel B.13. Rincian Realisasi Belanja Sosial per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

B.2.4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran awal sebesar Rp97.492.306.000,00 dan direvisi menjadi Rp100.981.709.000,00. Untuk realisasi belanja modal *bruto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.601.637.849,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal pada akun Belanja Modal sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp18.601.637.849,00 atau 18,42%.

Realisasi terbesar yaitu belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.400.885.520,00 atau 100,00%. Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.14.

Tabel B.14. Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	93.989.704.000	13.030.287.559	13,86
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan P	1.389.113.000	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan & Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	264.000.000	263.993.000	100,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	2.400.896.000	2.400.885.520	100,00
Belanja Perencanaan & Pengawasan GB	276.260.000	276.205.299	99,98
Belanja Penambahan Nilai GB	2.661.736.000	2.630.266.471	98,82
Belanja Modal JIJ	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	100.981.709.000	18.601.637.849	18,42
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	100.981.709.000	18.601.637.849	18,42

Realisasi Belanja Modal periode Tahunan TA. 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 28,32% dibandingkan dengan TA. 2023 dikarenakan anggaran Belanja Modal tahun 2023 jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, pada periode Tahunan 2023 masih banyak anggaran belanja modal yang diblokir. Rincian perbandingan belanja modal TA. 2024 dengan TA. 2023 disajikan pada Tabel B.15.

Tabel B.15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA. 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik (Turun)%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	13.030.287.559	14.033.983.926	-7,15
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan & Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	263.993.000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung & Bangunan	2.400.885.520	169.800.000	1.313,95
Belanja Perencanaan & Pengawasan GB	276.205.299	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai GB	2.630.266.471	292.321.000	799,79
Belanja Modal JJ	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	18.601.637.849	14.496.104.926	28,32
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	18.601.637.849	14.496.104.926	28,32

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.2.4.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah (5311) merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah untuk tahun 2024 ini.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp13.294.280.559

B.2.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Anggaran semula Belanja Modal Peralatan dan Mesin

sebesar Rp91.637.410,00,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp95.642.817.000,00. Untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin *bruto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.294.280.559,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp13.294.280.559,00 atau 13,9%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.16.

Tabel B.16. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.989.704.000	13.030.287.559	13,86
Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan pe	1.389.113.000	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	264.000.000	263.993.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	95.642.817.000	13.294.280.559	13,90
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	95.642.817.000	13.294.280.559	13,90

Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) yang terdapat pada delapan satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan tujuh satker UPT (hanya satker LKKPN Pekanbaru yang tidak memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dengan realisasi terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp7.333.966.842,00. Untuk belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin hanya terdapat pada satker UPT LKKPN Pekanbaru yaitu perubahan nilai unit tanpa mengubah jumlah unit pada Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 sebesar Rp263.993.000,00 berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW dan Whiper kaca kapal.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp5.307.357.290*

B.2.4.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Anggaran semula sebesar Rp4.992.896.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp5.338.892.000,00. Untuk realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan *bruto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.307.357.290,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sehingga realisasi belanja *netto*

tetap sebesar Rp5.307.357.290,00.atau 99,41%. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.17.

Tabel B.17. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.896.000	2.400.885.520	100,00
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan GB	276.260.000	276.205.299	99,98
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.661.736.000	2.630.266.471	98,82
Jumlah Belanja Kotor	5.338.892.000	5.307.357.290	99,41
Pengembalian Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja	5.338.892.000	5.307.357.290	99,41

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbagi menjadi tiga yaitu : (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) dengan realisasi *bruto* senilai Rp2.400.885.520,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi *netto* tetap sebesar Rp2.400.885.520,00 atau 100,00% yang hanya terdapat pada satu satker UPT LKKPN Pekanbaru berupa belanja pengelola kegiatan pembangunan prasarana layanan kawasan konservasi Pieh, (2) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (533115) dengan realisasi *bruto* senilai Rp276.205.299,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi *netto* tetap sebesar Rp276.205.299,00 atau 99,98% yang terdapat pada dua satker UPT yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp39.260.000,00 berupa perencanaan dan pengawasan pelaksanaan renovasi ruang pelayanan kantor BPSPL Pontianak dan LKKPN Pekanbaru senilai Rp236.945.299,00 berupa perencanaan pembangunan prasarana layanan Kawasan konservasi Pieh, dan (3) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) dengan realisasi *bruto* senilai Rp2.630.266.471,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi *netto* tetap sebesar Rp2.630.266.471,00 atau 98,82% yang terdapat pada satu satker pusat Sekretariat Ditjen PKRL dan lima satker UPT yaitu LKKPN Pekanbaru, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang dan BPSPL Denpasar. Pada satker BPSPL Makassar senilai Rp454.200.000,00 berupa renovasi ruang rapat utama bangunan Gedung kantor NUP 1, pada satker LKKPN Pekanbaru senilai Rp397.223.501 berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1), pada satker BPSPL Pontianak senilai Rp129.000.000,00 berupa pelaksanaan renovasi ruang pelayanan kantor BPSPL Pontianak, serta

pada satker Setditjen PKRL berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pekerjaan Renovasi Gudang BMKT Cileungsi, Bogor pada Dit. Jasa Kelautan.

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp0

B.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (5341) pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.18.

Tabel B.18. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal JIJ	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.4.5. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu dapat juga digunakan untuk mencatat atau memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan *software*, pengembangan *website*, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya yaitu pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

Anggaran awal Belanja Modal Lainnya (5361) sebesar Rp862.000.000,00 direvisi terakhir mengalami perubahan dari pagu awal menjadi Rp0,00 per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel B.19.

Tabel B.19. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada seluruh rincian akun Belanja baik Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (1116) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Akun ini terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Sementara itu Saldo Kas di Bendahara Penerimaan (1117) per 31 Desember 2024 juga sebesar Rp0,00 atau tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir Tahunan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2023 *Audited* senilai Rp0,00 atau tidak akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun. Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada seluruh rincian akun Belanja baik Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Tabel C.1. Perbandingan Kas di BP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
Jumlah	0	0

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.381.065.501*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas (1118XX) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.381.065.501,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Akun ini terdiri atas

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821), Kas Lainnya di K/L dari Hibah (111822), dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (111827). Saldo 31 Desember 2024 *Unaudited* terdapat kenaikan sebesar 36,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 *Audited*.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri atas : (1) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp113.000,00 yang hanya terdapat pada 1 satker yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo yang merupakan pajak atas kegiatan dari dana UP/TUP yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran yang disetorkan melewati Tahun Anggaran 2024 yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan kode billing 029599369123002 (bukti setor pajak terlampir).

(2) Kas Lainnya di K/L dari Hibah hanya terdapat pada satu satker kantor pusat yaitu Setditjen PKRL senilai Rp1.380.952.501,00. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp883.191.198,00 yaitu hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00 yang telah didaftarkan dengan nomor register 2PG6AJQA. Perubahan data hibah register dari Pengelola Satker Pusriskan menjadi Satker Sekretariat Ditjen PKRL telah tertuang dalam Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement Nomor S-682/PR.8/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian terdapat penambahan sebesar Rp1.008.181.303,00 atau senilai KRW510.420.000 pada tanggal 28 Juni 2024. Saldo akhir pada rekening koran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.380.952.501,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp275.000,00 yang merupakan biaya administrasi cek/bg.

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis proyek kerja sama ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada Direktorat Jasa Kelautan - Ditjen PKRL dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi sebagaimana tusi Ditjen PKRL.

Tabel C.2. Perbandingan Kas Lainnya di BP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	113.000	0	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.380.952.501	883.191.198	36,04
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0	0,00
Jumlah	1.381.065.501	883.191.198	36,05

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp0*

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berupa Belanja Barang yang Dibayar Dimuka/*prepaid* (114112) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain *website* dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi kerja. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan pada pos belanja dibayar dimuka pada neraca.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 *Audited* senilai Rp548.385.782,00, saldo Belanja Barang yang Dibayar Dimuka mengalami penurunan yang signifikan yaitu 100%. Untuk saldo tahun lalu telah dilakukan jurnal balik pada awal tahun yang terdapat pada 3 satker yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp164.754.167,00 berupa sewa kendaraan dan sewa kantor, LPSPL Serang senilai Rp174.622.133,00 berupa sewa kendaraan dan sewa kantor, dan Setditjen PKRL senilai Rp199.245.000,00 berupa sewa tempat ruang penyimpanan arsip. Untuk tahun ini, Belanja Dibayar Dimuka pada satker tersebut berakhir pada bulan Desember sehingga kontrak dimulai pada bulan Januari 2025, sementara pada satker Setditjen PKRL yang berasal dari sewa tempat ruang penyimpanan arsip, sesuai dengan kontrak nomor 3341/DJPKRL.1/PPK/XI/2023 tanggal 1 Desember 2023 senilai

Rp199.245.000,00 berlangsung selama 12 bulan sejak 1 Desember 2023 s.d 1 Desember 2024 telah berakhir.

Tabel C.3. Perbandingan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	0	548.385.782	-100,00
Jumlah	0	548.385.782	-100,00

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*).

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima (114311) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Tidak ada perubahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2023 *Audited*.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Uang Muka Belanja Rp0

C.5. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja (*prepayment*) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat perbedaan Uang Muka Belanja dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2023 *Audited* dimana pada tahun sebelumnya tidak ada juga akun Uang Muka Belanja.

Tabel C.4. Perbandingan Uang Muka Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Uang Muka Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Uang Muka Belanja (*prepayment*).

Piutang Bukan
Pajak
Rp11.239.891.322

C.6. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (1152XX) per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.239.891.322,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Terdapat kenaikan nilai yang sangat signifikan jika dibandingkan Laporan Keuangan Tahunan 2023 *Audited* sebesar 74,80% pada akun Piutang Bukan Pajak Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp2.832.398.450,00 diantaranya karena adanya koreksi *Audited* baik yang diakibatkan temuan BPK maupun koreksi dari KKP.

Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211) dan Piutang Lainnya (115212). Pada awal tahun terdapat Piutang PNBPNP sebesar Rp2.380.703.328,00 pada satker Setditjen PKRL yang merupakan nilai kontribusi tetap yang akan diterima pada tahun 2024, telah dilakukan jurnal balik karena telah dilakukan penyetoran yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, yaitu berupa piutang Pendapatan KSP Tanah Pulau Nipa berupa nilai kontribusi tetap yang telah diakui di akhir tahun 2023. Namun dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024 ini yaitu Rp1.190.351.664,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tabel C.5 Perbandingan Piutang PNBPNP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Piutang PNBPNP	2.559.256.077	2.380.703.328	6,98
Piutang Lainnya	8.680.635.245	451.695.122	94,80
Jumlah	11.239.891.322	2.832.398.450	74,80

Selain itu pada awal tahun juga terdapat Piutang Lainnya (115212) senilai Rp451.695.122,00. Piutang Lainnya yang diantaranya karena adanya temuan BPK maupun Itjen pada 9 satker yaitu Setditjen PKRL Rp301.982.780,00, LPSPS Serang Rp8.581.500,00, BPSPL Makassar Rp7.159.200,00, LPSPS

Sorong Rp24.786.717,00, Dinas KP Kab. Cirebon Rp25.395.000,00, Dinas KP Kab. Pamekasan Rp1.617.066,00, Dinas KP Kab. Jenepono Rp31.360,00, Dinas KP Kab. Pangkep Rp3.734.480,00, dan Dinas KP Kab. Bima Rp954.000,00 yang sebagian besar telah dilakukan jurnal balik.

Untuk saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 *Audited* senilai Rp2.559.256.077,00 pada satker Setditjen PKRL merupakan nilai kontribusi tetap yang akan diterima pada tahun 2025 walaupun pada tahun 2025 pembayaran dilakukan 50% sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai ini tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan saldo LK *Unaudited*.

Untuk saldo Piutang Lainnya pada 31 Desember 2024 terdapat perubahan antara LK *Unaudited* menjadi LK *Audited*. Pada LK *Unaudited* senilai Rp143.266.052,00 hanya terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Pada satker Setditjen PKRL dengan rincian nilai Rp14.746.000,00 yang merupakan temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton yang belum disetor dari nilai total temuan Rp123.046.000,00, diantaranya terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pengeluaran tanpa bukti pendukung, pembayaran tidak sesuai ketentuan, dll. Dinas terkait telah melakukan pembayaran secara bertahap, untuk tahun ini juga telah dilakukan pembayaran telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang lainnya pada neraca. Selama Tahun 2024 terdapat beberapa setoran sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Setoran NTPN No. 72AD03G81K68OBR0 tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp5.000.000,00 (belum tercatat pada periode sebelumnya);
- b. Setoran atas CV. Mitra Alami NTPN No. 6519948VVEE6IU9G tanggal 26 Januari 2024 Rp5.000.000,00;
- c. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5CA107QLUOQC9S6N tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- d. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5752D55DF96JOM7Q tanggal 28 Maret 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- e. Setoran atas LEHPI NTPN No. 54FDF7QLUP0M6CR0 tanggal 27 April 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- f. Setoran atas LEHPI NTPN No. DCCEE7QLUP3N4J4H tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- g. Setoran atas LEHPI NTPN No. E88543CIFKANITOE tanggal 28 Juni 2024

senilai Rp1.000.000,00;

- h. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. 2F8467QLUPCN5BUI tanggal 30 Agustus 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- i. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. AC77361QV4ASLD8D tanggal 28 September 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- j. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 29 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- k. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 30 November 2024 senilai Rp1.000.000,00.

Sementara itu, untuk sisanya senilai Rp128.520.052,00 berasal dari temuan BPK Dinas KP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN Cabang Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. CV. Putra Ridi Mandiri, Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas sesuai LHP BPK RI No.22C/LHP/XVII/06/2017 senilai Rp0,00 (sudah lunas). Dimana saldo awal senilai Rp17.450.000,00 ini pada tahun 2024 terdapat setoran dengan NTPN No. CD30C61QV4JM9D8C tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp5.584.000,00 dan mendapat *crash program* dari Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-2085/KNL.1505/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Persetujuan *Crash Program* berupa Keringanan Utang Debitur a.n. CV. Putra Ridi Mandiri (Iskadir) senilai sisa piutang yaitu Rp11.866.000,00;
- b. CV. Lande Bersaudara, kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* sesuai LHP BPK RI No. 22C/LHP/XVII/06/2017 dimana pada Tahun 2024 terdapat setoran pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp1.980.198,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp12.019.802,00;
- c. CV. L, Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi senilai Rp28.000.250,00;
- d. CV. YJ, Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu senilai Rp88.500.000,00.

Untuk Piutang Lainnya pada 5 satker Tugas Pembantuan dengan total Rp31.731.906,00 dengan rincian Dinas KP Kab. Cirebon Rp25.395.000,00, Dinas KP Kab. Pamekasan Rp1.617.066,00, Dinas KP Kab. Jenepono Rp31.360,00, Dinas KP Kab. Pangkep Rp3.734.480,00, dan Dinas KP Kab. Bima Rp954.000,00 telah dilakukan jurnal balik secara manual setelah ditransfer ke Setditjen PKRL dikarenakan satker inaktif dan penyetoran dilakukan pada akun Setditjen PKRL.

Sementara itu untuk LK *Audited*, saldo Piutang Lainnya terdapat perubahan menjadi Rp8.680.635.245,00 dikarenakan adanya koreksi yang akan dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Perubahan terdapat pada 5 satker dengan rincian satker Setditjen PKRL dan empat satker UPT (BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong, dan BKKPN Kupang).

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
Rp(198.749.177)*

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 sebesar Rp(198.749.177,00) atau terdapat kenaikan jika dibandingkan Laporan Keuangan TA. 2023 *Audited* yang senilai Rp(194.731.226,00) sesuai dengan kenaikan pada nilai piutangnya. Nilai ini menjelaskan maksimum besarnya uang yang tidak dapat tertagih yang biasanya sebesar 5 permil dari total piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terdiri atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBK senilai Rp(12.796.279,00) dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya senilai Rp(185.952.898,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBK (116211) yang pada awal tahun senilai Rp(11.903.517,00) merupakan perhitungan 5 permil dari Piutang PNBK P. Nipa yang pembayarannya diterima tahun 2024 telah dilakukan jurnal balik. Pada akhir tahun dilakukan kembali jurnal manual sehingga nilai per 31 Desember 2024 *Audited* sebesar Rp(12.796.279,00) yang merupakan penyisihan atas Piutang PNBK KSP P. Nipa yang akan diterima pada tahun 2025. Nilai ini tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan saldo LK *Unaudited*.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) yang pada awal tahun senilai Rp(182.827.709,00) pada beberapa satker telah dilakukan jurnal balik. Sementara untuk LK 2024 *Unaudited* yang sebelumnya senilai Rp(143.266.052,00) yang merupakan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar 100% pada satker Setditjen PKRL yang merupakan temuan pada Dinas KP

Kab. Buton seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah dilakukan koreksi, sehingga nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya pada LK *Audited* sebesar Rp(185.952.898,00).

Saldo saat ini senilai Rp(198.749.177,00) atau naik sebesar 2,06% dibandingkan saldo Laporan Keuangan *Audited* 2023 yang sebelumnya senilai Rp(194.731.226,00). Penyisihan Piutang pada Dinas KP Kab. Buton yang tercatat pada satker Setditjen PKRL senilai sama dengan piutangnya atau 100% dan termasuk golongan kualitas piutang macet karena pembayaran secara bertahap yang sudah terlampaui lama dan telah dilayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga untuk segera dilakukan pelunasan.

Tabel C.6. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Peny. Piutang PNB	12.796.279	11.903.517	0,00
Peny. Piutang Lainnya	185.952.898	182.827.709	1,71
Jumlah	198.749.177	194.731.226	2,06

Piutang dari KUN
Rp0

C.8. Piutang dari KUN

Saldo Piutang dari KUN pada Ditjen PKRL per 31 Desember 2024 *Audited* yaitu Rp0,00. Tidak terdapat perubahan nilai Piutang dari KUN dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2023 *Audited* dimana sebelumnya senilai Rp0,00. Piutang dari KUN dapat berupa (1) Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima (115613) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan dan (2) Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima (115614) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan.

Saldo Piutang dari KUN yang terdapat pada Semester I berupa Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima (115614) yang terdapat pada dua satker yaitu BKKPN Kupang dan Dinas KP Prov. Jawa Tengah berupa Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima dikarenakan pengajuan SPM di akhir bulan namun realisasi di bulan berikutnya. Nilai tersebut telah terkoreksi setelah dilakukan proses pembayaran, saldo akun piutang ini telah tereliminasi menjadi akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan

telah hilang begitu proses Nihil.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Piutang dari KUN.

Persediaan
Rp1.641.794.412

C.9. Persediaan

Saldo awal persediaan 1 Januari 2024 senilai Rp1.028.272.785,00. Total mutasi tambah persediaan selama periode Tahunan TA. 2024 senilai Rp137.253.456.790,00. Total mutasi kurang persediaan selama periode Tahunan TA. 2024 senilai Rp136.639.935.163,00, sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2024 *Audited* senilai Rp1.641.794.412,00. Adapun rincian mutasi dan saldo terdapat pada tabel C.7.

Tabel C.7. Neraca Persediaan Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024

No.	Akun	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	117111	Barang Konsumsi	17.291.935	9.839.208.184	9.828.977.957	27.522.162
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	263.800	263.800	0
3	117121	Pita Cukai Materai Leges	0	3.070.000	3.070.000	0
4	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	32.939.518.241	32.939.518.241	0
5	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	3.699.317.078	3.699.317.078	0
6	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	33.564.438.835	33.564.438.835	0
7	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	4.300.971.062	4.300.971.062	0
8	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	744.470.250	0	744.470.250
9	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	2.428.969.000	2.428.969.000	0
10	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.010.980.850	49.666.583.840	49.807.762.690	869.802.000
11	117131	Bahan Baku	0	65.000	65.000	0
12	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	0	66.581.500	66.581.500	0
13	117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	0
			1.028.272.785	137.253.456.790	136.639.935.163	1.641.794.412

Sisa saldo barang persediaan terdapat pada 16 satker lingkup Ditjen PKRL (1 satker pusat, 8 satker UPT, dan 7 satker TP) yaitu berupa alat tulis kantor, kertas HVS, tinta printer, dan Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK

Audited TA. 2024 pada akun Persediaan yaitu berkurang senilai Rp290.000,00 hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan secara rinci akun-akun persediaan sebagai berikut :

1. Barang Konsumsi (117111)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2024 Barang Konsumsi adalah Rp17.291.935,00 dengan mutasi tambah senilai Rp9.839.208.184,00 terdiri dari pembelian, reklasifikasi masuk, koreksi, hasil opname fisik, serta mutasi kurang senilai Rp9.828.977.957,00 dengan transaksi habis pakai, reklasifikasi keluar, dan opname fisik, sehingga saldo Bahan Konsumsi per 31 Desember 2024 Rp27.522.162,00. Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Barang Konsumsi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8. Mutasi Barang Konsumsi

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	17.291.935
MUTASI TAMBAH	9.839.208.184
Pembelian	929.113.740
Reklasifikasi Masuk	6.194.550
Koreksi Nilai Bertambah	8.902.299.893
Koreksi Kuantitas Bertambah	1
Saldo Awal	1.600.000
MUTASI KURANG	(9.828.977.957)
Habis Pakai	(917.196.213)
Reklasifikasi Keluar	(3.124.550)
Koreksi Kuantitas Kurang	(8.902.299.894)
Hasil Opname Fisik	(6.357.300)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	27.522.162

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Barang Konsumsi yaitu berkurang senilai Rp290.000,00 hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB karena koreksi mandiri satker pada periode 14. Saldo Barang Konsumsi terdapat pada 16 satker lingkup Ditjen PKRL (1 satker pusat, 8 satker UPT, dan 7 satker TP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.9. Rincian Saldo Barang Konsumsi

No.	Nama Satker	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	LPSPL Serang	699.500
2	BPSPL Denpasar	1.604.250
3	BPSPL Pontianak	2.910.400
4	BPSPL Makassar	2.831.500
5	LPSPL Sorong	540.000
6	LKKPN Pekanbaru	829.700
7	BPSPL Padang	3.625.800
8	BKKPN Kupang	7.456.800
9	Setditjen PKRL	4.293.680
10	Dinas KP Prov. Jawa Barat	30.400
11	Dinas KP Prov. Jawa Tengah	489.000
12	Dinas KP Prov. Jawa Timur	471.500
13	Dinas KP Prov. Sumatera Utara	120.000
14	Dinas KP Prov. Maluku	75.000
15	Dinas KP Prov. Bali	934.000
16	Dinas KP Prov. Gorontalo	610.632
TOTAL		27.522.162

2. Bahan untuk Pemeliharaan (117113)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2024 Bahan untuk Pemeliharaan adalah Rp0,00. Mutasi tambah senilai Rp263.800,00 dan mutasi kurang senilai Rp263.800,00 sehingga Saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2024 Rp0,00. Mutasi kurang disebabkan karena adanya pemakaian pada Satker LPSPL Serang. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.10 berikut :

Tabel C.10. Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	263.800
Pembelian	263.800
Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	(263.800)
Habis Pakai	(263.800)
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Bahan untuk Pemeliharaan.

3. Pita Cukai, Materai, Leges (117121)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2024 Pita Cukai, Materai, Leges adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.070.000,00 dan mutasi kurang senilai Rp3.070.000,00. Mutasi kurang disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar dengan nilai yang sama, sehingga Saldo Pita Cukai, Materai, Leges Per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Transaksi ini hanya terdapat pada satker UPT yaitu BKKPN Kupang karena adanya salah catat pada modul komitmen yang seharusnya barang tersebut merupakan barang konsumsi berupa ATK.. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Pita Cukai, Materai, Leges per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.11 berikut :

Tabel C.11. Mutasi Pita Cukai, Materai, Leges

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	3.070.000
Pembelian	3.070.000
Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	(3.070.000)
Habis Pakai	0
Reklasifikasi Keluar	(3.070.000)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Pita Cukai, Materai, Leges.

4. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)

Saldo awal per 1 Januari 2023 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang dengan nilai yang sama sebesar Rp32.939.518.241,00 pada akun ini. Saldo Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.12 berikut :

Tabel C.12. Rincian Mutasi Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	32.939.518.241
Pembelian	6.750.668.462
Persediaan Dalam Proses Masuk	26.188.849.779
MUTASI KURANG	(32.939.518.241)
Habis Pakai	(28.654.365.841)
Reklasifikasi Keluar	(4.285.152.400)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat perolehan/pembelian Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.750.668.462,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Satker PKPB Dit. P4K sebesar Rp4.285.152.400,00 terdiri dari 41 pekerjaan
 - ii. Satker PKPB Dit. Jasa Kelautan sebesar Rp2.465.516.062,00 terdiri dari 34 pekerjaan
- Terdapat Persediaan Dalam Proses Masuk berupa Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp26.188.849.779,0 sebagai berikut :
 - i. PKPB Dit. P4K dengan nilai keseluruhan Rp7.878.647.779,00 berupa pembangunan dermaga apung/tambat labuh di 4 lokasi yaitu Kab. Banggai Laut, Kab. Kep. Aru, Kab. Pesisir Selatan, dan Kab. Sumbawa
 - ii. PKPB Dit. Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.310.202.000,00 berupa pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) pada 13 lokasi diantaranya di Kab. Jeneponto, Kab. Lombok, Kab. Pamekasan, dll, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) pada 1 lokasi yaitu Kab. Cirebon, pembangunan Rumah Garam pada 1 lokasi yaitu Kab. Sambas, dan Rehabilitasi GGN pada 1 lokasi yaitu Kab. Bima.

Penjelasan mutasi kurang Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat Reklasifikasi Keluar Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar

Rp4.285.152.400,00

- Terdapat transaksi Habis Pakai Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp10.344.163.84100
- Terdapat transaksi Habis Pakai Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp18.310.202.000,00 berupa pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) pada 13 lokasi diantaranya di Kab. Jeneponto, Kab. Lombok, Kab. Pamekasan, dll, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) pada 1 lokasi yaitu Kab. Cirebon, pembangunan Rumah Garam pada 1 lokasi yaitu Kab. Sambas, dan Rehabilitasi GGN pada 1 lokasi yaitu Kab. Bima

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

5. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117123)

Saldo awal per 1 Januari 2024 Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.699.317.078,00 dan mutasi kurang senilai Rp3.699.317.078,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.13.

Tabel C.13. Rincian Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	3.699.317.078
Pembelian	3.699.317.078
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
MUTASI KURANG	(3.699.317.078)
Habis Pakai	(3.699.317.078)
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Mutasi tambah Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat karena terdapat transaksi Perolehan/Pembelian Hewan dan Tanaman Untuk

Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00. Sementara mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat Terdapat transaksi Habis Pakai Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00.

Penjelasan mutasi tambah Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Perolehan/Pembelian Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K yang terdiri dari 128 Pekerjaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.699.317.078,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Penanaman Mangrove yang tersebar pada 48 lokasi di kabupaten Demak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.032.374.900,00
 - b. Pekerjaan Penanaman Vegetasi untuk Mitigasi Bencana yang tersebar pada 17 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp500.825.000,00 yaitu terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebanyak 8 lokasi, dan pada Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 lokasi
 - c. Pekerjaan Penyulaman Mangrove yang tersebar pada 56 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.111.079.700,00 yaitu terdapat Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 lokasi, Kabupaten Kebumen sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Sampang sebanyak 1 lokasi, Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Brebes sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Indramayu sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Pesawaran sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Probolinggo sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Sampang sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Situbondo sebanyak 4 lokasi, Kota Pasuruan sebanyak 5 lokasi, Kota Surabaya sebanyak 5 lokasi, Kota Pasuruan sebanyak 2 lokasi
 - d. Penyulaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana yang tersebar pada 7 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp55.037.478,00 yaitu terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebanyak 4 lokasi dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 3 lokasi

Penjelasan mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat yaitu terdapat transaksi Habis Pakai Hewan dan Tanaman Untuk

Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

6. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2024 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00, mutasi tambah senilai Rp33.564.438.835,00 dan mutasi kurang dengan nilai yang sama. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.14 berikut :

Tabel C.14. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	33.564.438.835
Pembelian	15.734.768.674
Persediaan Dalam Proses Masuk	15.293.191.215
Reklasifikasi Masuk	2.310.900.946
Reklasifikasi Dari Aset	225.578.000
MUTASI KURANG	(33.564.438.835)
Habis Pakai	(32.674.594.435)
Koreksi Kuantitas Kurang	(85.800.000)
Reklasifikasi Keluar	(804.044.400)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Perolehan/Pembelian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.7346.768.674,00 pada seluruh satker UPT dan Dit. Jasa Kelautan dan Dit. P4K
- Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk Peralatan dan Mesin untuk

dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.293.191.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BPSPL Pontianak berupa Kapal Fiber sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp99.900.000, hal tersebut dilakukan karena kesalahan akuntansi pencatatan oleh Operator Persediaan, yaitu melakukan transaksi Habis Pakai terhadap barang Persediaan 526 Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya transaksi yang dilakukan adalah transaksi Penyelesaian Barang Dalam Proses
- 2) PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.193.291.215,00 berupa rumah garam di Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Utara, Kab. Malang, Kab. Pidie Jaya, dan *Washing Plant* di Kab. Bima

Hal tersebut karena kesalahan akuntansi pencatatan oleh Operator Persediaan, yaitu melakukan transaksi Habis Pakai terhadap barang Persediaan 526 Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya transaksi yang dilakukan adalah transaksi Penyelesaian Barang Dalam Proses.

- Transaksi Reklafikasi Persediaan Masuk Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.310.900.946,00 dengan rincian pada satker : (1) BPSPL Makassar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp66.581.500,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dan (2) Dit. Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.224.319.446,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat.
- Transaksi Reklafikasi Dari Aset pada Satker BPSPL Makassar berupa berupa belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebanyak 8 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp225.578.000,00. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai

perolehan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Penjelasan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp33.564.438.835,00 pada seluruh satker UPT dan Dit. Jasa Kelautan dan Dit. P4K
- Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K berupa Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Rembang, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp85.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu *double input*, sehingga dilakukan koreksi pencatatan (Koreksi Kuantitas Kurang) sebesar Rp85.000.000,00
- Transaksi Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 5 unit, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp804.044.400,00
- Reklasifikasi Keluar berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Peralatan dan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat, yang seharusnya dicatat sebagai belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)

Saldo awal Tahun 2024 Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp4.300.971.062,00 dan mutasi kurang senilai Rp4.300.971.062,00 sehingga saldo menjadi Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31

Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.15 berikut :

Tabel C.15. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	4.300.971.062
Pembelian	1.487.899.062
Persediaan Dalam Proses Masuk	2.813.072.000
MUTASI KURANG	(4.300.971.062)
Habis Pakai	(3.754.440.062)
Reklasifikasi Keluar	(546.531.000)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada Satker Kantor Pusat yaitu Dit. Jasa Kelautan dan Dit. P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.487.899.062,00
- Terdapat transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.813.071.000,00 berupa Integrasi Lahan Pergaraman. Transaksi Persediaan Dalam Proses tersebut dilakukan, karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05), yang seharusnya dicatat sebagai AKUN belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09).

Penjelasan mutasi kurang Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dan Dit. P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.754.440.062,00
- Transaksi Reklasifikasi Keluar berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp546.531.000,00 yaitu Integrasi Lahan Pergaraman. Reklasifikasi Keluar berupa Jalan, Irigasi dan

Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat tersebut dilakukan, karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05), yang seharusnya dicatat sebagai AKUN belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09).

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

8. Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)

Saldo awal TA. 2024 Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp744.470.250,00 sedangkan mutasi kurang pada akun ini senilai Rp0,00 sehingga saldo akhir Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 adalah Rp744.470.250,00. Pagu anggaran untuk akun Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA. 2024 adalah Rp0,00. Terdapat Transfer Masuk dari Biro Umum dan PBJ KKP berupa Aset Lain-Lain Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pekerjaan Ijin Lingkungan pembangunan SKPT MOA (Konsultan Ijin Lingkungan/UKLUPL) pada PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp744.470.250,00, yang selanjutnya akan dilakukan transfer ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kepelabuhanan.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Aset Lain-Lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

9. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (117128)

Saldo awal Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat adalah Rp0,00. Mutasi tambah sebesar Rp2.428.969.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.428.969.000,00, sehingga Saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.16.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	2.428.969.000
Pembelian	100.000.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	1.086.299.000
Reklasifikasi Masuk	1.242.670.000
MUTASI KURANG	(2.428.969.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	(2.428.969.000)
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Pembelian/Pengadaan Sarana Wisata Bahari Kab. Jepara dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
- Persediaan Dalam Proses Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.086.299.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Cirebon dengan nilai sebesar Rp445.200.000,00
 - b) Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp641.099.000,00
- Reklasifikasi Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.242.670.000,00 berupa pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari di Kab. Kendal dan Sarana Wisata Bahari di Kab. Kep. Anambas, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Pidie.

Penjelasan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai dengan nilai sebesar Rp2.428.969.000,00 dengan rincian pekerjaan Pondok Informasi Wisata Bahari di Kab. Kendal, Sarana Wisata Bahari di Kab. Jepara, Kab. Kep. Anambas, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Pidie, dan Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Cirebon dan Kab. Lombok Timur.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan

kepada Masyarakat.

10. Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)

Saldo awal Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 1 Januari 2024 adalah Rp1.010.980.850,00 dengan rincian pada Dit. P4K Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Banggai senilai Rp145.158.000,00, Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Sumbawa senilai Rp242.081.900,00, Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Aru senilai Rp17.400.000,00 dimana kegiatan tersebut dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024. Pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa dokumen perencanaan Pembangunan Gudang Garam Nasional di Kab. Kupang - Prov. Nusa Tenggara Timur senilai Rp147.186.000,00 telah dilakukan penghapusan pada Semester I TA. 2024 berdasarkan Surat Bupati Nomor : BU.523/3043/DISKAN/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan PKPB Dit. PRL berupa Dokumen Konsultan Izin lingkungan pada SKPT Moa senilai Rp459.154.950,00.

Terdapat mutasi tambah senilai Rp49.566.683.840,00 dan mutasi kurang senilai Rp49.707.862.690,00 sehingga Saldo Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2024 senilai Rp869.802.000,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.17 berikut :

Tabel C.17. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	1.010.980.850
MUTASI TAMBAH	49.666.583.840
Pembelian	43.597.935.740
Reklasifikasi Masuk	5.683.432.800
Transfer Masuk Online	285.315.300
Opname Fisik	99.900.000
MUTASI KURANG	(49.807.762.690)
Persediaan Dalam Proses Keluar	(46.025.982.244)
Habis Pakai	(99.900.000)
Barang Persediaan Rusak/Usang	(147.186.000)
Reklasifikasi Keluar	(3.534.694.446)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	869.802.000

Penjelasan mutasi tambah Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Perolehan/Pembelian Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses sebanyak 128 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp43.597.935.740,00 diantaranya sebagai berikut :
 - 1) PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp36.123.927.861,00 antara lain kegiatan Intergrasi Lahan Garam yang tersebar pada 5 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.931.932.000,00 yaitu Kab. Lombok Barat, Kab. Pamekasan, serta Kab. Pangkajene Kepulauan; Pekerjaan Bangunan Rumah Produksi Minyak Ikan yang tersebar pada 3 lokasi yaitu Kab. Lombok Timur 1 lokasi dan Kab. Cirebon 2 lokasi; Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR); Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN); Pembangunan Rumah Produksi Minyak Ikan; Pekerjaan Bangunan dan Mesin *Washing Plant*; Pekerjaan/Pembangunan Wisata Bahari (Wisbar) yang terdiri dari 13 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.337.889.446,00; Pengadaan Peralatan dan Mesin (Geomembran), dll.
 - 2) PKPB Direktorat P4K sebanyak 16 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.474.007.879,00 antara lain kegiatan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di beberapa lokasi
- Terdapat transaksi Opname Fisik pada satu satker yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp99.000.000,00
- Reklasifikasi Masuk Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 45 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.683.432.800,00. Hal tersebut dilakukan karena, terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09)
- Transfer Masuk Online pada PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang berasal dari Biro Umum dan PBJ KKP berupa Pembayaran Termin 3 Jasa Konsultan UKLPL sebesar Rp285.315.300,00

Penjelasan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Reklasifikasi Keluar Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses sebanyak 17 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.534.694.446,00. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 berupa Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09), yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05)
- Transaksi Habis Pakai terdapat pada satu satker yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp99.000.000,00
- Persediaan Dalam Proses Keluar berupa Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Penyelesaian Barang Dalam Proses) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp46.125.882.244,00
- Transaksi Barang Persediaan Usang/Rusak pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp147.186.000,00

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses .

11. Bahan Baku (117131)

Saldo awal per 1 Januari 2024 untuk akun Bahan Baku adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Bahan Baku senilai Rp65.000,00 yang terdapat hanya pada satker UPT LPSPL Serang. Transaksi Habis Pakai pada Satker LPSPL Serang yang seharusnya barang tersebut merupakan nilai Barang Konsumsi berupa ATK. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan Baku per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.18 berikut :

Tabel C.18. Rincian Mutasi Bahan Baku

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	65.000
Pembelian	65.000
MUTASI KURANG	(65.000)
Habis pakai	(65.000)
Reklasifikasi Keluar	(0)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Bahan Baku.

12. Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)

Saldo Awal Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial per 1 Januari 2024 senilai Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp66.581.500,00 dan mutasi kurang senilai Rp66.581.500,00 dikarenakan reklasifikasi keluar (kesalahan catat pada modul komitmen) berupa bantuan pemerintah yang diserahkan pada masyarakat (KOMPAK) yang dicatat pada modul aset dimana seharusnya pada modul persediaan dan sudah diserahkan terimakan kepada kelompok dengan BAST kegiatan KOMPAK pada Satker BPSPL Makassar, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.19 berikut :

Tabel C.19. Rincian Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	66.581.500
Pembelian	66.581.500
MUTASI KURANG	(66.581.500)
Reklasifikasi Keluar	(66.581.500)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial.

13. Persediaan Lainnya (117199)

Saldo awal Persediaan Lainnya adalah Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Persediaan Lainnya sehingga saldo Persediaan Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Persediaan Lainnya. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.20 berikut :

Tabel C.20. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	0
Pembelian	0
MUTASI KURANG	(0)
Habis Pakai	(0)
Reklasifikasi Keluar	(0)
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	0

Piutang Tagihan
TP/TGR Rp0

C.10. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Nilai TP/TGR di tahun sebelumnya hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Makassar atas kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi DD 4832 D (plat merah) dengan kode barang 3020104001 NUP 11 yang disebabkan adanya unsur kelalaian atas nama Andi Jaya, A.Pi, M.Si dan telah dilakukan penetapan tuntutan ganti rugi sesuai dengan PERMEN KP Nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi. Nilai penetapan TP/TGR yaitu Rp5.000.000,00 diangsur selama 10 bulan, yang bersangkutan telah membayar angsuran pertama s.d kesembilan terakhir pada bulan September 2023 sehingga saldo Piutang TP/TGR per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Namun terkait dengan Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR masih menyisakan Rp6.250,00 dimana nilai tersebut merupakan nilai penyisihan pada pelaporan tahun yang lalu. Pada saat penginputan terakhir di SAKTI modul piutang sistem tidak menghilangkan penyisihan tersebut, terkait dengan hal ini telah disesuaikan pada periode Tahunan Tahun 2024 dengan jurnal manual pada modul GLP.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Tabel C.21. Perbandingan Tagihan TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun %
Tagihan TP/TGR	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp98.155.639.556

C.11. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya (1551XX) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp98.155.639.556,00 dan Rp100.714.895.633,00 atau terdapat penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,61%. Penurunan diakibatkan adanya setoran di tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian dengan Jurnal Manual pada akhir tahun 2024. Nilai ini merupakan sisa Piutang Pendapatan dari Kontribusi tetap dari KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PKRL (622145) selama 30 tahun. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan CaLK Neraca akun Piutang PNBPNP.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penyetoran atas kontribusi tetap P. Nipa secara tepat waktu, namun seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, penyesuaian pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya dilakukan pada akhir tahun 2024 sehingga pada akhir tahun nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berkurang sebesar nilai setoran tahun ini. Pada Laporan Keuangan 2023 sempat berpindah akun menjadi Piutang PNBPNP dikarenakan kewajiban untuk menginput pada Modul Piutang. Namun pada Laporan Keuangan *Audited* 2023 saldo Piutang tersebut dipindahkan kembali ke Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024 ini yaitu Rp1.190.351.664,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA.

2024 pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Tabel C.22. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik/ Turun %
Piutang Jangka Panjang Lainnya	98.155.639.556	100.714.895.633	-2,61
Jumlah	98.155.639.556	100.714.895.633	-2,61

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp(490.778.189)

C.12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya (1569) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(490.778.189,00) dan Rp(503.574.469,00) atau terdapat penurunan nilai sebesar 2,61% sesuai dengan nilai Piutang Jangka Panjangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar 5/1000 dalam hal ini atas KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PKRL (622145).

Tabel C.23. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited*

Perkiraan	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik/ Turun %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	490.778.189	503.574.469	-2,61
Jumlah	490.778.189	503.574.469	-2,61

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Tanah Rp328.758.991.227

C.13. Tanah

Saldo awal tanah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna periode Tahunan per 1 Januari 2024 seluas 3.109.405 m² dengan nilai sebesar Rp308.545.890.024,00. Mutasi tambah seluas 4.960.419 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp130.559.388.375,00 dan mutasi kurang sebanyak 24.000 m² sebesar Rp110.346.287.172,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 seluas 4.742.025 m² dengan nilai sebesar Rp328.758.991.227,00. Penjelasan rinci terkait mutasi Tanah terdapat pada

tabel dibawah ini :

Tabel C.24. Rincian Mutasi Tanah

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	308.545.890.024
MUTASI TAMBAH	130.559.388.375
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0
Pembelian	0
Koreksi Nilai Bertambah	0
Perolehan Lainnya	500.800.000
Hibah Masuk	36.698.203
Transfer Masuk	0
Perubahan dari Aset Kemitraan ke BMN	110.346.287.172
Saldo awal	19.675.603.000
MUTASI KURANG	(110.346.287.172)
Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Perubahan BMN ke PI	(110.346.287.172)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
Transfer Keluar	0
Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)	328.758.991.227

Penjelasan mutasi tambah tanah sebagaimana tabel tersebut di atas adalah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat Hibah Masuk pada Satker BKKPN Kupang berupa 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 750 m² dengan nilai sebesar Rp36.698.203,00 yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 750 m² sesuai BAST Nomor : 000.232/1249/BKA/2023 tanggal 28 November 2023;
- 2) Terdapat transaksi Perubahan Aset Kemitraan ke BMN berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- 3) Terdapat transaksi Perolehan Lainnya berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 Bidang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp500.800.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 1 Bidang yang berlokasi di Pulau Batek, Desa Netemnanu Utara, Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang, Prov. NTT dengan nilai perolehan sebesar Rp250.800.000,00;
 - b. Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 1 Bidang yang berlokasi di Pulau Manggudu, Desa Prai Salura, Kec. Karera, Kab. Sumba Timur, Prov. NTT dengan nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00.
- 4) Terdapat transaksi Saldo Awal lingkup Direktorat Jenderal PKRL seluas 4.606.969 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.675.603.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Transaksi Saldo Awal pada Satker Setditjen PKRL berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) sebanyak 15 bidang dengan luas 4.606.834 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.257.219.000,00. Transaksi Saldo Awal berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT), sebanyak 14 bidang tersebut di atas, dilakukan karena keberadaan data dukung/dokumen tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tabel C.24.1;
 - b. Transaksi Saldo Awal pada Satker BPSPL Denpasar berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebanyak 1 bidang dengan total luas sebesar 135 m² dengan sebesar Rp1.418.384.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp152.467.040,00, kenaikan tersebut berdasarkan hasil penilaian oleh KPKNL Sidoarjo Nomor Lap-0320/1/PRO-01/KNL.1/2/01.01.11/2024 sesuai nilai NJOP tanah disekitarnya yaitu Tanah Kantor Pemerintah tersebut digunakan sebagai kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur yang berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, transaksi Saldo Awal dilakukan karena pada tahun 2022 pencatatan tanah tersebut masih tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 02.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Tanah.

Tabel C.24.1 Rincian Transaksi Saldo Awal Tanah PPKT

No.	Lokasi Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan	Nilai	Jumlah
1	Pulau Buraidi, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	37.450.000	1
2	Pulau Buraolei, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	7.700.000	1
3	Pulau Gusundian, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	15.750.000	1
4	Pulau Kamarian Kayyang, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	37.100.000	1
5	Pulau Kamarian Marinni, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	8.400.000	1
6	Pulau Lalungan, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	15.400.000	1
7	Pulau Sumangga Kayyang, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	133.350.000	1
8	Pulau Sumangga Marinni, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	19.600.000	1
9	Pulau Lamudaan Marinni, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	36.050.000	1
10	Pulau Lumulumu, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	53.550.000	1
11	Pulau Malamber Marinni, Desa Balabalakang, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	124.600.000	1
12	Pulau Tapilagaan, Desa Balabalakang Timur, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	14.945.000	1
13	Pulau Tasambela, Desa Balabalakang Timur, Kec.Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar	10.500.000	1
14	Pulau Salaut Besar, Desa Langi, Kec. Alafan, Kab. Simeuleu, Prov. Aceh	7.111.000.000	1
15	Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu Pulau Mega, Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Prov.	10.631.824.000	1
Jumlah Keseluruhan		18.257.219.000	15

Penjelasan mutasi kurang tanah sebagaimana tabel tersebut di atas adalah dengan rincian sebagai berikut : Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Properti Investasi berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00, hal tersebut dilakukan juga sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

*Peralatan dan Mesin
Rp125.006.191.641*

C.14. Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel periode per 1 Januari 2024 sebanyak 11.955 unit dengan nilai

keseluruhan sebesar Rp122.993.161.716,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 1.357 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.060.059.156,00 dan mutasi kurang sebanyak 1.552 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.047.029.231,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebanyak 11.913 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp125.006.191.641,00. Adapun uraian transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang saldo pada akun Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.25. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	122.993.161.716
MUTASI TAMBAH	15.060.059.156
Likuidasi Masuk	259.925.800
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.899.000
Penggunaan Kembali BMN yg Sudah Dihentikan	57.847.720
Saldo Awal	14.988.500
Pembelian	13.255.235.559
Pengembangan Nilai Aset Langsung	263.993.000
Perolehan Lainnya	111.084.660
Reklasifikasi Masuk	617.945.617
Transfer Masuk	477.139.300
MUTASI KURANG	(13.047.029.231)
Hibah Keluar	(259.925.800)
Koreksi Pencatatan	(198.800.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(111.084.660)
Penghapusan	(966.568.950)
Penghentian Aset dari Penggunaannya	(9.284.994.720)
Reklasifikasi Keluar	(716.782.617)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(224.948.000)
Transfer Keluar	(1.023.998.684)
Likuidasi Keluar	(259.925.800)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)	125.006.191.641

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Peralatan dan Mesin.

Rincian mutasi tambah Peralatan dan Mesin

- 1) Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 1.187 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.255.235.559,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.26. Rincian Satker Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	Nilai	Jumlah
1	BPSPL DENPASAR	878.592.590	126
2	BPSPL MAKASSAR	1.736.950.472	90
3	BPSPL PONTIANAK	695.970.822	37
4	LPSPL SERANG	399.765.131	60
5	LPSPL SORONG	1.145.488.109	81
6	BPSPL PADANG	562.621.593	80
7	BKKPN KUPANG	501.880.000	22
8	PKPB Dit. JASA KELAUTAN	369.340.000	22
9	PKPB Dit. KKHL	1.054.761.150	96
10	PKPB Dit. PRL	1.384.150.000	118
11	PKPB Dit. P4K	773.137.652	47
12	SETDITJEN PRL	3.752.578.040	408
	TOTAL	13.255.235.559	1.187

- 2) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset Langsung pada LKKPN Pekanbaru berupa mesin Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp263.993.000,00, dengan rincian berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta penambahan wiper dan kaca kapal senilai Rp6.993.000,00;
- 3) Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Satker LKPPN Pekanbaru berupa Note Book yang berasal dari Koreksi Pencatatan berupa Software dengan nilai sebesar Rp1.899.000,00;
- 4) Terdapat transaksi Perolehan Lainnya pada Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp111.084.660,00 hal tersebut dilakukan terkait penertiban penatausahaan Barang Milik Negara, akibat kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai barang pada Modul Komitmen;

Tabel C.27. Transaksi Perolehan Lainnya pada satker LPSPL Serang

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Selam seet	102.796.000	4
2	Kursi Besi/Metal	6.000.000	6
3	Kursi Zeis	2.288.660	2
	TOTAL	111.084.660	12

- 5) Terdapat transaksi Likuidasi Masuk pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan), yang berasal dari Satker Off (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Jenis Kewenangan Dekonsentrasi) berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 27 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00, hal tersebut dilakukan dikarenakan perubahan Kebijakan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.28. Transaksi Likuidasi Masuk pada satker Dinas KP Prov. Kaltim

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3.973.000	1
2	Camera Digital	3.500.000	1
3	Camera Electronic	5.000.000	1
4	Camera Video	20.289.300	1
5	Compressor	64.000.000	1
6	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	2.350.000	1
7	Disolved Oksigen Analyzer	18.500.000	1
8	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Klimatologi)	1.342.500	1
9	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	18.000.000	1
10	GPS Receiver	10.000.000	1
11	Komputer Unit Lainnya	1.661.000	2
12	Note Book	80.500.000	8
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	14.250.000	2
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.000.000	3
15	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	5.560.000	2
	Jumlah	259.925.800	27

- 6) Terdapat transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp57.847.720,00, dengan rincian satker sebagai berikut :

- Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis

Kewenangan Dekonsentrasi (DK) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp25.634.000,00, hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk dilakukan transfer Masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) dan selanjutnya untuk proses hibah lebih lanjut dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

- Setditjen PKRL dengan nilai keseluruhan sebesar Rp32.213.720,00
- 7) Terdapat transaksi Transfer Masuk sebanyak 49 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp477.139.300,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Satker BPSPL Denpasar sebanyak 32 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp370.928.208,00, dengan rincian:
 - i. Berupa Mini Bus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp167.101.500,00 yang berasal dari Satker Setditjen PKRL;
 - ii. Berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp28.900.000,00 yang berasal dari Satker BPSPL Makassar;
 - iii. Berupa Meubelair sebanyak 30 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp174.926.708,00, yang berasal dari Satker Setditjen PKRL;
 - b. BPSPL Makassar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp20.699.000,00, yang berasal dari Satker BPSPL Denpasar;
 - c. LPSPL Serang berupa 6 unit Kursi untuk Kantor Gerai Layanan yang berlokasi di Prov. Yogyakarta yang berasal dari Setditjen PKRL dengan nilai keseluruhan Rp20.790.000,00;
 - d. Setditjen PKRL berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan Rp64.722.092,00, hal tersebut dilakukan karena barang-barang yang sudah terlanjur diserahkan/ditransfer keluar ke BPSPL Denpasar adalah barang-barang pengadaan untuk Kantor CTI Manado, akhirnya barang-barang senilai Rp64.722.092,00 tersebut dibalikin/ditransfer masuk lagi ke Setditjen PKRL.
- 8) Terdapat transaksi Saldo Awal pada lingkup Ditjen PKRL sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.988.500,00, dengan rincian sebagai berikut :
- BPSPL Makassar berupa Timbangan Barang sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan Rp6.488.500,00
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Papan Gambar sebanyak 1 unit

dengan nilai Rp8.500.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)

- 9) Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp617.945.617,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Setditjen PKRL berupa 1 unit Mobil Jeep dengan nilai sebesar Rp534.000.000,00, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terdapat kesalahan Kode Barang yaitu dicatat sebagai Mini Bus menjadi Jeep
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Lainnya dengan nilai Rp49.950.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 dicatat sebagai Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
 - LPSPL Sorong berupa Camera Digital dengan nilai sebesar Rp33.995.617,00, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terdapat kesalahan Kode Barang, yaitu dicatat sebagai Kamera Digital.

Rincian mutasi kurang Peralatan dan Mesin

- 1) Terdapat transaksi Reklasifikasi Aset ke Barang Persediaan pada Satker BPSPL Makassar sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp224.948.000,00, hal tersebut dilakukan karena kesalahan pemilihan akun pada Modul Komitmen, yang seharusnya adalah realisasi anggaran belanja Barang Persediaan 526 untuk diserahkan kepada Masyarakat, namun dicatat sebagai Aset Tetap (Peralatan dan Mesin);
- 2) Koreksi Pencatatan pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Alat Kantor Lainnya yang berlokasi Pulau Cemara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah senilai Rp198.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B.1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024);
- 3) Terdapat transaksi Likuidasi Keluar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Kewenangan Dekonsentrasi (Satker Off) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan, berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 27 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00;

Tabel C.29. Transaksi Likuidasi Keluar pada satker Dinas KP Prov. Kaltim

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3.973.000	1
2	Camera Digital	3.500.000	1
3	Camera Electronic	5.000.000	1
4	Camera Video	20.289.300	1
5	Compressor	64.000.000	1
6	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	2.350.000	1
7	Disolved Oksigen Analyzer	18.500.000	1
8	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Klimatologi)	1.342.500	1
9	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	18.000.000	1
10	GPS Receiver	10.000.000	1
11	Komputer Unit Lainnya	1.661.000	2
12	Note Book	80.500.000	8
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	14.250.000	2
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.000.000	3
15	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	5.560.000	2
	Jumlah	259.925.800	27

- 4) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada Satker LPSPL Serang sebesar Rp111.084.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.30. Rincian Aset Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang LPSPL Serang

No.	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Selam Seet	(102.796.000)	0
2	Kursi Besi/Metal	(6.000.000)	0
3	Kursi Zeis	(2.288.660)	0
	JUMLAH	(111.084.660)	0

Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen berupa Alat Selam Seet, tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 5 unit, Kursi Besi/Metal tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 7 unit, dan berupa Kursi Zeis tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 3 unit, dan sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN.

- 5) Terdapat Transfer Keluar sebanyak 40 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.023.998.684,00, dengan rincian sebagai berikut :
- i. Transfer Keluar pada Satker BPSPL Makassar kepada BPSPL

- Denpasar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp28.900.000,00;
- ii. Transfer Keluar pada Satker BPSPL Denpasar berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp85.421.092,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Transfer Keluar kepada Satker BPSPL Makassar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai Rp20.699.000,00;
 - b) Transfer Keluar kepada Satker Setditjen PKRL sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp64.722.092,00
 - iii. Transfer Keluar dari PKPB Direktorat KKHL kepada BPPSDMKP berupa Mini Bus sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp299.318.500,00;
 - iv. Terdapat Transfer Keluar berupa Mini Bus dari Satker Setditjen PKRL kepada pada Satker BPSPL Denpasar, sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp176.101.500,00,00;
 - v. Transfer Keluar dari Satker Setditjen PKRL kepada BPPSDMKP berupa Mini Bus sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp322.940.500,00
 - vi. Setditjen PKRL berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 25 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp601.859.092,00, dengan rincian :
 - a) Berupa Mini Bus sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp499.042.000,00 dengan rincian :
 - Transfer keluar kepada Satker BPSPL Denpasar sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp167.101.500,00;
 - Transfer keluar kepada BPPSDMKP sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp331.940.500,00
 - b) Berupa Meubelair sebanyak 22 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp102.817.092,0
- 6) Hibah Keluar pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 27 unit nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00;
- 7) Reklasifikasi Keluar sebanyak sebanyak 3 unit nilai keseluruhan sebesar Rp716.782.617,00, dengan rincian :
- LPSPL Sorong berupa Kamera Digital sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp33.995.617,00
 - PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebanyak 1 unit dengan sebesar

Rp148.787.000,00

- Setditjen PKRL berupa Mini Bus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp534.000.000,00

8) Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 1.284 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.284.994.720,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.31. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BAPPEDA Provinsi Riau	(329.661.000)	(38)
2	PKPB Dit. KEBP	(764.916.160)	(48)
3	PKPB Dit. PRL	(3.695.554.000)	(296)
4	PKPB Dit. P4K	(1.783.859.121)	(368)
5	BPSPL Makassar	(45.280.000)	(3)
6	LKKPN Pekanbaru	(325.351.930)	(94)
7	LPSPL Serang	(65.176.500)	(4)
8	PKPB Dit. Jaskel	(2.194.857.009)	(427)
9	Setditjen PKRL	(80.339.000)	(6)
	Jumlah	(9.284.994.720)	(1.284)

9) Penghapusan BMN sebanyak 1.043 unit nilai keseluruhan sebesar Rp966.568.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 65 unit nilai keseluruhan sebesar Rp611.349.800,00
- PKPB BAPPEDA Provinsi Gorontalo berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 97 unit nilai keseluruhan sebesar Rp355.219.150,00

*Gedung dan
Bangunan
Rp90.736.630.532*

C.15. Gedung dan Bangunan

Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Gedung dan Bangunan sebanyak 107 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp86.958.983.679,00. Sampai dengan periode Tahunan TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 26 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.754.590.017,00 dan mutasi kurang sebanyak 25 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.976.943.164,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebanyak 108 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp90.736.630.532,00. Berikut mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel C.32. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	86.958.983.679
MUTASI TAMBAH	6.754.590.017
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	414.991.086
Pengembangan Melalui KDP	2.054.735.385
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	535.318.140
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.837.630.819
Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	9.107.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	363.810.587
Saldo Awal	529.890.000
Perubahan Properti Investasi ke BMN	9.107.000
MUTASI KURANG	(2.976.943.164)
Perubahan BMN Ke Properti Investasi	(9.107.000)
Koreksi Pencatatan	(257.821.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(636.926.401)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.774.831.763)
Reklasifikasi Keluar	(59.057.000)
Transfer Keluar	(239.200.000)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)	90.736.630.532

Rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan

a. Terdapat transaksi Koreksi Nilai Tambah sebesar Rp363.810.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Satker BPSPL Makassar, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00, sesuai Surat Keterangan Nomor : 1262.A/ BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan Perolehan/Penambahan KDP atas pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen, sehingga pada saat penyelesaian Pembangunan dengan KDP membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru;
- 2) Satker LPSPL Serang, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp58.021.000,00, nilai bertambah tersebut berasal dari transaksi Koreksi Pencatatan Kanopi;
- 3) Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, Koreksi

Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen sebesar Rp105.989.587,00, yang berasal Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523), berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B. 1215/LPSPL.1/PL.760/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024

- b. Transaksi Pengembangan Melalui KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.054.735.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker LKKPN Pekanbaru, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00
 - 2) Satker BPSPL Pontianak, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp168.260.000,00
 - 3) Satker BPSPL Makassar, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp214.500.000,00
 - 4) Satker BKKPN Kupang, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00
 - 5) PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp1.472.106.970,00
- c. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai keseluruhan sebesar Rp414.991.086,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Satker LKKPN Pekanbaru berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp347.355.086,00
 - 2) BPSPL Denpasar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp27.736.000,00
 - 3) BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp39.900.000,00
- d. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan pada PKPB Direktorat P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp535.318.140,00. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu mau melakukan proses penghapusan pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa aset-aset sebagaimana tersebut di atas ternyata masih dalam kondisi Baik, sehingga harus dilakukan proses Penggunaan Kembali, kemudian baru bisa dilakukan proses perubahan dari kondisi Baik menjadi Rusak Berat;
- e. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai keseluruhan

sebesar Rp2.837.630.819,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Satker BPSPL Makassar, yaitu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 (pekerjaan renovasi ruang pelayanan Gedung Kantor) dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00
 - 2) Satker LKKPN Pekanbaru, yaitu berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Kantor Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh) yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat, dengan nilai sebesar Rp2.637.830.819,00
- f. Perubahan Aset Kemitraan ke BMN pada Satker Setditjen PKRL yang berlokasi di Pulau Nipa yang menjadi objek Properti Investasi berupa Bangunan Lainnya (Tugu/Prasasti) sebesar Rp9.107.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- g. Saldo Awal sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp529.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) BPSPL Denpasar berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp265.090.000,00
 - 2) PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Aset yang berlokasi di Pulau Cemara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp239.200.000,00 berupa Gazebo, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Terbuka Lainnya masing-masing 1 unit. Penjelasan transaksi Saldo Awal, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang, sebagai dasar perubahan pencatatan adalah Berita Acara Inventarisasi, dan Surat Keterangan Nomor : B.1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024
- h. Reklasifikasi dari Properti Investasi ke BMN berupa Bangunan Lainnya yang berlokasi di Pulau Nipa-Kota Batam sebesar 9.107.000,00.

Rincian mutasi kurang Gedung dan Bangunan

- a. Koreksi Pencatatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp257.821.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada Satker BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp199.800.000,00, hal tersebut karena salah pencatatan Perolehan KDP atas Renovasi Bangunan Gedung Kantor

- Permanen, sehingga pada saat penyelesaian Pembangunan dengan KDP membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru, atas hal tersebut maka dilakukan koreksi pencatatan
- 2) Pada Satker LPSPL Serang berupa Kanopi dengan nilai sebesar Rp58.021.000,00, dan sudah Kapitalisasi/Penambah ke Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp636.926.401,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Pabrik Es, Rumah Sederhana, dan Rumah Khusus;
 - c. Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Properti Investasi berupa Bangunan Lainnya dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
 - d. Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.774.831.763,00, dengan rincian satker sebagai berikut :
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya dengan nilai sebesar Rp74.500.000,00. Hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B.1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
 - BPSPL Denpasar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.697.122.222,00
 - 1) Berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dengan nilai sebesar Rp418.418.222,00, hal tersebut dilakukan dikarenakan secara substansi jumlah terdiri dari 3 petak bangunan, namun sebelumnya pada saat pencatatan perolehan dicatat dalam satu unit Rumah Negara
 - 2) Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 02, yang berasal dari Kementerian Keuangan RI yang berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp1.278.704.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2022 pencatatan nilai Bangunan Gedung

Kantor Permanen tersebut masih tergabung dengan Tanah

- BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dengan nilai sebesar Rp3.209.541,00, hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil Audit Kinerja Inspektorat III KKP, T.152/ITJ/HP.110/IV/2024 pada BPSPL Makassar bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushollah) senilai Rp.3.209.541,00, (Surat Keterangan Nomor : NOMOR B. 1549/BPSPL.3/KP.120/VIII/2024), tanggal 6 Agustus 2024
- e. Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai sebesar Rp49.950.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/ DJPKRL.1/ PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
- f. Terdapat transaksi Transfer Keluar pada Satker Setditjen PKRL berupa Bangunan Lainnya, yaitu aset berlokasi di Pulau Nipa-Kota Batam dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00, hal tersebut dilakukan Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB. 310/DJPKRL.1/PL.760/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sebagai tindak lanjut atas Hasil Reviu APIP atas Laporan Keuangan KKP untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, terdapat kesalahan Kode Barang berupa Aset Tetap (Properti Investasi)

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.616.970.810

C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.616.970.810,00. Jumlah tersebut terdiri atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp7.094.333.844,00, Irigasi sebesar Rp4.234.153.463,00, dan Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00. Terdapat penurunan nilai jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2023 *Audited*. Rincian terhadap akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jalan dan Jembatan

Saldo awal Jalan dan Jembatan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2024

senilai Rp7.923.125.327,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp13.121.507.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp13.950.298.483,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 untuk Jalan dan Jembatan senilai keseluruhan sebesar Rp7.094.333.844,00. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Jalan dan Jembatan pada TA. 2024 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.33. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	7.923.125.327
MUTASI TAMBAH	13.121.507.000
Pengembangan melalui KDP	0
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	13.121.507.000
MUTASI KURANG	(13.121.507.000)
Transfer Keluar	(0)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	(13.121.507.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(828.791.483)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	7.094.333.844

Terdapat transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB. 179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Jalan dan Jembatan.

Selain itu, Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K berupa Jalan Lainnya dengan nilai sebesar Rp828.791.483,00. Saat ini sudah diusulkan permohonan persetujuan penghapusan karena sebab-sebab lain ke Biro Keuangan KKP.

Irigasi

Saldo awal Irigasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel

per 1 Januari 2024 senilai Rp4.234.153.463,00, periode Tahunan TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp92.079.770.860,00 dan mutasi kurang sebesar Rp92.079.770.860,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 senilai keseluruhan sebesar Rp4.234.153.463,00. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Irigasi pada TA. 2024 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.34. Rincian Mutasi Irigasi

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	4.234.153.463
MUTASI TAMBAH	92.079.770.860
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	90.754.497.000
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan	1.325.273.860
MUTASI KURANG	(92.079.770.860)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	(90.754.497.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.325.273.860)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	4.234.153.463

Rincian mutasi tambah Irigasi :

- a. Terdapat transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- b. Terdapat transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.325.273.860,00, Hal tersebut dilakukan karena pada waktu mau melakukan proses penghapusan pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa aset-aset sebagaimana tersebut di atas ternyata masih dalam kondisi Baik, sehingga harus dilakukan proses Penggunaan Kembali, kemudian baru bisa dilakukan proses perubahan dari kondisi Baik menjadi Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berupa Bangunan Pelimpah Sampah sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp138.000.000,00;
 - 2) Berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai sebanyak 4 unit dengan

nilai keseluruhan sebesar Rp1.108.069.000,00, dan;

- 3) Berupa Bangunan Mandi Cuci/Kakus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar 79.204.860,00,

Rincian mutasi kurang Irigasi :

- a. Terdapat transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000, hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Irigasi;
- b. Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.325.273.860,00, berupa Bangunan Pelimpah Sampah, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.108.069.000,00;
 - 2) Berupa Bangunan Mandi Cuci/Kakus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar 79.204.860,00 dan
 - 3) Berupa Bangunan Pelimpah Sampah sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp138.000.000,00.

Jaringan

Saldo awal Jaringan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2024 senilai Rp1.335.050.271,00. Tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebesar Rp46.566.768,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 untuk Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00 atau terdapat penurunan yang tidak signifikan dibandingkan saldo 31 Desember 2023 *Audited*. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Jaringan pada TA. 2024 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.35. Rincian Mutasi Jaringan

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (Rp)	1.335.050.271
MUTASI TAMBAH	0
Pengembangan melalui KDP	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
MUTASI KURANG	(46.566.768)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(46.566.768)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	1.288.483.503

Terdapat transaksi Penghentain Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K berupa Instalasi Pengaman Lainnya dengan nilai sebesar Rp46.566.768,00. Hal ini sudah diusulkan surat permohonan persetujuan penghapusan karena sebab-sebab lain ke Biro Keuangan KKP.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Jalan, Irigasi, Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp129.357.185.571

C.17. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp129.357.185.571,00 terdiri atas Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp0,00 dan Aset Tetap Lainnya (135121) sebesar Rp129.357.185.571,00. Terdapat penurunan yang tidak signifikan nilai antara 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 *Audited* pada akun Aset Tetap Lainnya Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp129.592.041.571,00.

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 dan Rp232.856.000,00 atau terdapat penurunan nilai yang cukup signifikan. Saldo awal akun ini terdapat hanya pada satker pusat Setditjen PKRL. Aset Tetap Renovasi terdapat pada Gedung Mina Bahari II yang merupakan aset dari Kementerian Keuangan dan telah dilakukan Transfer Keluar.

Tabel C.36.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (Rp)	232.856.000
MUTASI TAMBAH	232.856.000
Batal Transfer Keluar	232.856.000
Reklasifikasi Masuk	232.856.000
MUTASI KURANG	(465.712.000)
Transfer Keluar	(465.712.000)
Reklasifikasi Keluar	(232.856.000)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	0

Gedung tersebut ditempati oleh Direktorat Jasa Kelautan yang berlokasi di GMB II (Gedung Lukman Hakim) Lantai 2 milik Kementerian Keuangan. Adapun kronologi terkait Aset Tetap Renovasi (ATR) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Renovasi Ruangan pertama Tahun 2021 dengan nilai ATR sebesar Rp148.000.000,00, dengan Nomor BAST : 78/PPK-JK/XI/2021

tanggal 25 November 2021;

- Pekerjaan Renovasi Ruang Kedua Tahun 2022 dengan nilai ATR sebesar Rp84.856.000,00 dengan Nomor BAST : 3512/DJPR.1/PPK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022;
- Sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.3268/SJ.2/HP.310/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Setditjen PKRL mengirim surat kepada Kepala Biro Umum dan PBJ dalam bentuk Nota Dinas Nomor : B.5270/DJPKRL.1/PL.750/IX2024 tanggal 4 September 2024 tentang Penyerahan BMN berupa Aset Tetap Renovasi pada Satker Setditjen PKRL yang digunakan oleh Direktorat Jasa Kelautan yang berlokasi di GMB II (Gedung Lukman Hakim) Lantai II.

Mutasi Tambah yaitu berasal dari transaksi Batal Transfer Keluar berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi kepada Biro Umum Kementerian Keuangan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp232.856.000,00, hal tersebut dilakukan disebabkan Kementerian Keuangan selaku obyek penerima ATR tidak bersedia melakukan Transfer Masuk, dikarenakan ketidaksesuaian Kode Barang, yang seharusnya Kode Barang adalah Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi. Selain itu juga terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk senilai Rp232.856.000,00 dari sebelumnya Nama Barang Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi (Kode Barang 6070501001) menjadi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi (Kode Barang 6070301001) karena kesalahan pemilihan kode barang pada saat pencatatan Tahun 2021.

Mutasi Kurang yaitu berasal dari transaksi Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi dan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi masing-masing sebesar Rp232.856.000,00. Selain itu juga terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar dengan nilai dan keterangan yang sama dengan transaksi Reklasifikasi Masuknya.

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2024 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel sebanyak 137.576 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.359.185.571,00. Tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar

137.572 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.357.185.571,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.36.2 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal per 1 Jan 2024 (Rp)	129.359.185.571
MUTASI TAMBAH	0
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
Opname Fisik	0
MUTASI KURANG	(2.000.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	(2.000.000)
Habis Pakai	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp)	129.357.185.571

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Dit. PRL berupa Aset Tetap Lainnya (Bahan Kartografi Lainnya) sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 1 Januari 2024 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel senilai Rp492.149.864,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp5.343.516.826,00 dan mutasi kurang sebesar Rp5.835.666.690,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo KDP terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.37. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal per 1 Jan 2024	492.149.864
MUTASI TAMBAH	5.343.516.826
Perolehan/Penambahan KDP	627.523.842
Pengembangan KDP	4.264.842.362
Koreksi Nilai KDP Bertambah	451.150.622
MUTASI KURANG	(5.835.666.690)
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	(2.837.630.819)
Pengembangan Melalui KDP	(2.054.735.385)
Penghapusan/Penghentian KDP	(477.649.864)
Koreksi Pencatatan KDP	(465.650.622)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	0

Rincian mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Terdapat transaksi Perolehan/Penambahan KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp627.523.842,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker BPSPL Makassar dengan nilai total sebesar Rp11.000.000,00 dengan rincian Rp6.000.000,00 berupa pekerjaan Perluasan/Renovasi Ruang Rapat dan Rp5.000.000,00 berupa pekerjaan Perluasan/Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 2) Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp19.856.000,00, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 3) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp24.679.612,00 yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp561.488.230,00 yaitu pekerjaan Renovasi Gudang BMKT (Cileungsi, Kabupaten Bogor).
- b. Pengembangan KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.264.842.362,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker BPSPL Makassar dengan nilai sebesar Rp403.300.000,00, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1;
 - 2) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp2.663.019.622,00, yaitu pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 01 senilai Rp2.637.830.819,00 yang mana diperuntukkan untuk kantor pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang,

Sumatra Barat;

- 3) BPSPL Pontianak yaitu pekerjaan Renovasi Ruangan Pelayanan Gedung Kantor sebesar Rp148.404.000,00;
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan, pekerjaan renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp910.618.740,00;
 - 5) BKKPN Kupang dengan nilai sebesar Rp139.500.000,00 yaitu pekerjaan Renovasi Ruangan Pelayanan Gedung Kantor.
- c. Terdapat Koreksi Nilai KDP Bertambah pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp451.150.622,00

Rincian mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan :

- a. Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP pada Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp477.649.864,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Satker LKKPN Pekanbaru yang rencana dibangun di Pulau Pieh sebanyak 1 NUP dengan nilai sebesar Rp202.860.929,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Satker LKKPN Pekanbaru yang rencana dibangun di Kepulauan Anambas sebanyak 1 NUP dengan nilai sebesar Rp274.788.935,00
- b. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai keseluruhan Rp2.837.630.819,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar berupa pekerjaan Ruangan Pelayanan Gedung Kantor dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00;
 - 2) Pada Satker LKKPN Pekanbaru dengan sebesar Rp2.637.830.819,00, yaitu Penyelesaian Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Kantor Pelayanan) Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat)
- c. Transaksi Pengembangan Melalui KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.054.735.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp168.260.000,00 atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1;
 - 2) Satker BPSPL Makassar dengan nilai sebesar Rp214.500.000,00 atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan Bangunan Gedung Kantor

- Permanen NUP 1;
- 3) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00 pekerjaan pengembangan Bangunan Gedung Kantor Lainnya, (Kantor Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh) yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat);
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan yaitu pengembangan atas pekerjaan renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp1.622.106.970,00, yang berlokasi di Gudang BMKT Cileungsi-Kabupaten Bogor.
- d. Koreksi Pencatatan KDP pada Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp14.500.000,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : B.4037/BPSPL.2/PL.750/XI/2024 tanggal 18 November 2024 antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan serta pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp451.150.622,00.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(110.273.396.926)*

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (137XXX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(110.273.396.926,00) dan Rp(107.252.414.395,00).

Terdapat kenaikan nilai antara 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 *Audited* pada akun Penyusutan Aset Tetap Ditjen PKRL. Hal ini dikarenakan adanya transaksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan pada beberapa satker, sehingga secara otomatis juga terjadi penambahan Akumulasi Penyusutan aset tersebut. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dijelaskan pada Laporan BMN per 31 Desember 2024 atau pada periode Tahunan 2024 dikarenakan penyusutan dilakukan per Semester.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp103.876.004.000

C.20. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Awal Aset Kemitraan per 1 Januari 2024 sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp214.231.398.172,00. Periode Tahunan TA. 2024 terdapat mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp103.876.004.000 dan mutasi kurang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp214.231.398.172,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 untuk Aset Kemitraan Pihak Ketiga sebesar 2 unit senilai sebesar Rp103.876.004.000,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.38. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Awal per 1 Jan 2024	214.231.398.172
MUTASI TAMBAH	103.876.004.000
Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan	103.876.004.000
Pengembangan Aset Kemitraan	0
MUTASI KURANG	(214.231.398.172)
Perubahan dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi	(214.231.398.172)
Pengembangan Aset Kemitraan	0
Saldo Akhir Per 31 Des 2024	103.876.004.000

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen PKRL terdapat pada satker Setditjen PKRL yang merupakan nilai aset yang dikerjasamakan dalam KSP P. Nipa. Awalnya aset yang dikerjasamakan berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang senilai Rp110.346.287.172,00, Bangunan Lainnya senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00, dan Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00. Tahun 2024 ini terdapat mutasi diantaranya :

Rincian mutasi tambah Kemitraan Pihak Ketiga

Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 unit dengan keseluruhan Rp103.876.004.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Irigasi;
- 2) Berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, Hal tersebut dilakukan karena tidak ada

Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Jalan dan Jembatan.

Rincian mutasi kurang Kemitraan Pihak Ketiga

Terdapat transaksi Perubahan dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 unit dengan keseluruhan Rp214.231.398.172,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah ke BMN seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 yang berlokasi di Pulau Nipa. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, serta sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- 2) Berupa Bangunan Lainnya (Tugu/Prasasti) yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, serta sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

Sementara nilai penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp46.557.374.318,00. Informasi lengkap terkait dengan KSP P. Nipa terdapat pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Kemitraan Pihak Ketiga.

Aset Tak Berwujud
Rp1.194.618.534

C.21. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (1621XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL hanya terdiri dari Software (162151) sebesar Rp1.194.618.534,00. Saldo awal per 1 Januari 2024 berupa Software sebanyak 8 unit sebesar Rp832.527.534,00. Pada periode Tahunan TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp512.777.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp150.686.000,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.194.618.534,00. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel C.39. Rincian Mutasi Software

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (Rp)	832.527.534
MUTASI TAMBAH	512.777.000
Saldo Awal	363.990.000
Reklasifikasi Masuk	148.787.000
MUTASI KURANG	(150.686.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.899.000)
Koreksi Pencatatan	(148.787.000)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	1.194.618.534

Transaksi mutasi tambah diantaranya :

- a. Transfer Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp363.990.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PKPB Direktorat KKHL berupa Software Komputer yang berasal dari PUSDATIN KKP sejumlah 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp271.535.000,00;
 - 2) PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut berupa Software Komputer yang berasal dari Pusdatin KKP sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp92.455.000,00
- b. Reklasifikasi Masuk pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00
 - 1) Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan pada Satker LKKPN Pekanbaru berupa Software dan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai Lap Top dengan nilai sebesar Rp1.899.000,00;
 - 2) Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Aset Tak Berwujud.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0*

C.22. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang uang hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah. Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas Lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.

Saldo awal Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga per 1 Januari 2024 senilai Rp411.012.378,00 yang hanya terdapat pada satu satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Kab. Jeneponto. Dana tersebut yang masuk ke rekening penampungan K/L terhadap pekerjaan Integrasi Lahan Pergaraman dan Konsultan Pengawasan Intergrasi Lahan Pergaraman dengan masa pelaksanaan kontrak tanggal 4 Desember s.d 31 Desember 2023 dan pekerjaan tersebut telah selesai 100%.

Jangka waktu kontrak pada pekerjaan tersebut berakhir di tanggal 31 Desember 2023, sehingga menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut baru dapat dilaksanakan 9 Januari 2024, sehingga masih memunculkan akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111). Setelah itu dilakukan Jurnal Manual sehingga terdapat akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191). Secara sistem akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya tereliminasi pada TA. 2024 ini.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

Aset Lain-Lain
Rp13.782.435.459

C.23. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain senilai Rp13.782.435.459,00 terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (166112) senilai Rp13.782.435.459,00 dan Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) senilai Rp0,00.

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna per 1 Januari 2024 sebanyak 1.627 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp20.458.826.980,00. Mutasi tambah sebanyak 1.540 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.124.553.232,00 dan mutasi kurang sebanyak 1.818 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.800.944.753,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebanyak 1.349 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.782.435.459,00. Terdapat

penurunan yang cukup signifikan pada akun ini dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2023 *Audited*. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel C.40 dibawah ini :

Tabel C.40. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (Rp)	20.458.826.980
MUTASI TAMBAH	12.124.553.232
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	12.124.553.232
MUTASI KURANG	(18.800.944.753)
Pencatatan Barang yg Mau Dihapuskan	(16.785.413.908)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1.918.439.720)
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	(97.091.125)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)	13.782.435.459

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Aset Lain-Lain.

Rincian mutasi tambah Penghentian Aset dari Penggunaan :

Penghentian Aset dari Penggunaan Dalam Operasional Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 652 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.124.553.232,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL (PKPB BAPPEDA Prov. Riau, Dit. KEBP, Dit. PRL, Dit. P4K, Dit. Jasa Kelautan, dan Setditjen PKRL), BPSPL Makassar, LPSPL Serang, dan LKKPN Pekanbaru.

Rincian mutasi kurang Penghentian Aset dari Penggunaan

- a. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 1.515 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp16.785.413.908,00 dengan rincian per satuan kerja sebagai berikut :

Tabel C.41. Mutasi Kurang Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BKKPN Kupang	(1.493.307.935)	(26)
2	BPSPL Padang	(1.460.513.954)	(199)
3	BPSPL Makassar	(887.514.648)	(121)
4	LKKPN Pekanbaru	(199.500.000)	(1)
5	LPSPL Serang	(130.000.000)	(1)
6	PKPB BAPPEDA Provinsi Gorontalo	(21.872.000)	(168)
7	PKPB BAPPEDA Provinsi Riau	(329.661.000)	(38)
8	PKPB Direktorat KKHL	(764.916.160)	(48)
9	PKPB Direktorat PRL	(3.950.004.000)	(311)
10	PKPB Direktorat P4K	(5.272.928.202)	(539)
11	PKPB Direktorat Jasa Kelautan	(2.194.857.009)	(57)
12	Setditjen PKRL	(80.339.000)	(6)
	JUMLAH	(16.785.413.908)	(1.515)

- b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 88 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.892.805.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.42. Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

Nama Barang	Nilai Total	Jumlah
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(70.955.000)	(5)
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	(79.204.860)	(1)
Bangunan Pabrik Es	(97.000.000)	(1)
Bangunan Pelimpah Sampah	(138.000.000)	(7)
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	(1.108.069.000)	(4)
Filing Cabinet Kayu	(2.853.375)	(5)
Kursi Besi/Metal	(8.892.000)	(23)
Lemari Kayu	(2.419.470)	(4)
Meja Kerja Kayu	(16.645.875)	(26)
Rak Kayu	(1.403.000)	(2)
Rumah Sederhana	(367.363.140)	(10)
Jumlah	(1.892.805.720)	(88)

- c. Transaksi Penghapusan sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp97.091.125,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BPSPL Padang berupa Sepeda Motor 1 unit dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara berupa Peralatan Inventansi Kantor sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp76.580.000,00.

Saldo awal Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 1 Januari 2024 sebesar Rp751.336.900,00. Pada periode Tahunan 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp900.123.900,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp0,00.

Tabel C.43. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	751.336.900
MUTASI TAMBAH	148.787.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	148.787.000
MUTASI KURANG	(900.123.900)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(900.123.900)
Penghapusan	0
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	0

Mutasi tambah yaitu transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00. Mutasi kurang terdapat transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Aset Tak Berwujud sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp900.123.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. PKPB Direktorat P4K sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp416.700.000,00, dengan rincian :
 - i. Berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00
 - ii. Berupa Software Komputer sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp216.700.000,00
- b. PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00

- c. BKKPN Kupang berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp334.636.900,00

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(59.526.552.128)*

C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Lain-lain dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(59.526.552.128,00) dan Rp(58.429.021.016,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per satker dan keterangan terkait transaksi mutasinya dijelaskan pada Laporan BMN per 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya terdiri dari Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp46.557.374.318,00, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp11.954.300.876,00, Akumulasi Amortisasi Software senilai Rp1.014.876.934,00, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai Rp0,00.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp774.372.777*

C.27. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga (2121XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp774.372.777,00 dan Rp522.601.474,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Beban Pegawai yang masih harus Dibayar (212111) senilai Rp38.164.098,00, Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) senilai Rp736.208.679,00, Beban Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp0,00, Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar (212144) senilai Rp0,00, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp0,00.

Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan 31 Desember 2024 dan

Laporan Keuangan Tahunan 2023 *Audited* pada akun Utang kepada Pihak Ketiga Ditjen PKRL, dimana sebelumnya sebesar Rp522.601.474,00 atau terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya penambahan akun Beban Pegawai yang masih harus Dibayar, dimana pada periode sebelumnya tidak ada.

Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar (212111) per 31 Desember 2024 senilai Rp38.164.098,00. Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu LKKPN Pekanbaru yang merupakan kekurangan tunjangan kinerja untuk sembilan orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan di bulan Januari 2024 a.n Sri Mulia Hamonangan, dkk.

Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) per 31 Desember 2024 senilai Rp736.208.679,00. Beban Barang yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Beban Barang yang Masih harus Dibayar terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Beban Barang yang Masih Harus Dibayar diantaranya berupa jurnal manual akrual Jasa Listrik, Air, Telepon, dan Daya dan Jasa Lainnya baik di kantor utama maupun kantor wilker untuk tagihan bulan Desember 2024 yang dibayarkan Januari 2025 pada satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker BPSPL Makassar senilai Rp29.085.655,00.

Sementara pada satker Setditjen PKRL senilai Rp608.861.400,00 berasal dari UAKPB Direktorat Jasa Kelautan dimana terdapat 3 SPM yang tertolak yaitu SPM Nomor 4410, 4412, dan 4413. Adapun SPM tersebut adalah SPM pelunasan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Aceh Besar sebesar Rp164.836.000,00. Hal ini sesuai SPK Nomor SPK.124/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 09 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp235.480.000,00
- b. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Aceh Utara sebesar Rp165.872.000,00. Hal ini sesuai SPK Nomor SPK.125/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 09 Oktober 2024

dengan nilai kontrak sebesar Rp236.960.000,00

- c. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Sarana Pendukung Rumah Garam Pidie Jaya Aceh Besar Aceh Utara sebesar Rp278.153.400,00. Hal ini sesuai SPK Nomor SPK.132/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 14 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp397.362.000,00

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2023 *Audited* (tidak ada perubahan). Belanja Modal yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar (212144) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2023 *Audited* (tidak ada perubahan). Akun ini merupakan kontra akun Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima. Hal ini dikarenakan pengajuan SPM di akhir bulan namun realisasi di bulan berikutnya. Nilai tersebut akan terkoreksi setelah dilakukan proses pembayaran. Biasanya merupakan kuitansi TUP yang belum di SPJ-kan di bulan pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2023 *Audited* (tidak ada perubahan). Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Akun ini merupakan kontra akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Pada tahun lalu yang hanya terdapat pada satu satker yaitu Dinas KP Kab. Jeneponto senilai Rp411.012.378,00 yang merupakan pekerjaan Integrasi Lahan Pergaraman dan Konsultan Pengawasan Integrasi Lahan Pergaraman dengan masa pelaksanaan kontrak tanggal 4 Desember s.d 31 Desember 2023 dan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, akun ini telah hilang seiring dengan penyelesaian RPATA. Jangka waktu kontrak pada pekerjaan tersebut berakhir di tanggal 31 Desember 2023, sehingga menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut baru dapat dilaksanakan 9 Januari 2024, sehingga masih memunculkan akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang yang

Belum Diterima Tagihannya (218111). Setelah itu dilakukan Jurnal Manual sehingga terdapat akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191).

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Utang kepada Pihak Ketiga.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.28. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan berupa Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) senilai Rp0,00. Nilai Utang Yang Belum Diterima Tagihannya jika dibandingkan per 31 Desember 2023 *Audited* sebesar Rp0,00 maka tidak terjadi perubahan pada akun ini. Dimulai pada tahun 2023 dimungkinkan terdapat akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya tiap bulannya dikarenakan sistem baru aplikasi SAKTI yang memungkinkan saldo Utang Yang Belum Diterima Tagihannya tampil di neraca.

Akun ini biasanya muncul diantaranya disebabkan karena satker telah mencatat pengeluaran sampai dengan akhir bulan namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan bulan yang bersangkutan berakhir, atau juga dapat disebabkan nilai kuitansi yang sudah dibelanjakan dan dicatat di aplikasi SAKTI Modul Komitmen atas pertanggungjawaban Uang Persediaan namun belum dibuat tagihan pembayaran melalui DRPP, SPBy, dan SPM sampai dengan bulan yang bersangkutan berakhir.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Utang Yang Belum Ditagihkan.

*Hibah yang belum
Disahkan Rp0*

C.29. Hibah yang belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan berupa akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terdapat perubahan karena pada saldo 31 Desember 2023 *Audited* juga tidak ada Hibah yang Belum Disahkan. Hibah Langsung yang Belum Disahkan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Hibah Langsung dari pihak ketiga yang belum memperoleh pengesahan.

Pada tahun ini terdapat Hibah Langsung Barang dan Jasa yang hanya terdapat

pada satker Setditjen PKRL berupa hibah luar negeri yang berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorcium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Hibah yang Belum Disahkan.

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.30. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka berupa akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp42.391.800,00 atau tidak terdapat perubahan. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada awal tahun hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp42.391.800,00 yaitu sewa sebagian tanah di Kawasan SKPT Morotai, Desa Daeo Majiko, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 523,84 m² selama 5 tahun dari CV. Putra Karya Jaya untuk SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan). Harga sewa menurut perjanjian sewa selama jangka waktu lima tahun adalah sebesar Rp282.612.000,00 yang dimulai pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka mengalami penurunan karena penyesuaian perhitungan dilakukan pada akhir tahun. Sementara itu untuk obyek tanah yang ditempati pada tahun 2023 ini telah diserahkan pencatatannya berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan dari Direktorat Jenderal PKRL ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Pendapatan Diterima Dimuka.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.31. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN (219511) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Tidak terdapat perubahan nilai Uang Muka dari KPPN dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan saldo pada akhir tahun telah dilakukan penyetoran pada pelaporan TA. 2024.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Uang Muka dari KPPN.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp113.000*

C.32. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan, dan utang jangka pendek lainnya. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp113.000,00 dan Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan karena pada saldo 31 Desember 2023 *Audited* tidak ada akun Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara. Dalam hal ini hanya terdapat pada satu satker TP yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo dengan kondisi pajak petugas Validator yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran namun disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 2 Januari 2025 dengan bukti setoran pajak dengan NTPN Nomor 940126110642167D75BBSE08HLQ.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

*Ekuitas
Rp856.829.743.540*

C.33. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp856.829.743.540,00 dan Rp837.822.061.097,00. Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan 2023 *Audited* pada akun Ekuitas, atau terjadi penurunan

yang cukup signifikan karena ada beberapa koreksi di beberapa akun.

Selain itu terdapat perubahan nilai Ekuitas dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada beberapa akun yang disebabkan adanya koreksi atas temuan BPK maupun koreksi KKP yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp849.223.580.038

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp849.223.580.038,00 dan Rp702.424.483.944,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah pendapatan PNB yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan jumlah aktivitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan. Selain itu kenaikan yang cukup signifikan juga terdapat pada Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya. Walaupun juga terdapat penurunan pada akun Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Denda Lainnya. Adapun rincian pendapatan PNB Tahunan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel. D.1.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Pendapatan PNB. Perubahan terdapat pada akun Pendapatan Perizinan Lainnya bertambah senilai Rp8.273.474.307,00 sehingga dari sebelumnya Rp819.555.281.761,00 menjadi Rp827.828.756.068,00 dikarenakan adanya koreksi pada satker Setditjen PKRL yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Tabel. D.1. Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian Pendapatan	Jenis Pendapatan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	PNBP Lainnya	86.231.711	98.335.341
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	PNBP Lainnya	1.250.000	686.762.808.355
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	PNBP Lainnya	827.828.756.068	15.314.132.406
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	PNBP Lainnya	21.134.564.636	0
425791	Pendapatan Penyelesaian ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat	PNBP Lainnya	0	0
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	PNBP Lainnya	172.777.623	249.201.342
425839	Pendapatan Denda Lainnya	PNBP Lainnya	0	0
425591	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	PNBP Lainnya	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	PNBP Lainnya	0	6.500
		Jumlah	849.223.580.038	702.424.483.944

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan ini merupakan pendapatan sewa

mess/rumah pegawai yang diterima pada tahun berjalan yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya dengan nilai pendapatan di LO Rp43.839.911,00. Nilai Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada realisasi secara kas sebesar Rp43.839.911,00, terdapat selisih senilai Rp42.391.800,00 dikarenakan nilai tersebut merupakan sisa sewa sebagian tanah di Kawasan SKPT Morotai, Prov. Maluku Utara selama 5 tahun sebesar Rp282.612.000,00 yang dimulai pada tahun 2019 dimana tahun 2024 merupakan tahun terakhir sehingga dilakukan jurnal balik secara manual.

Total Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada LO senilai Rp1.250.000,00 dengan pengembalian Rp0,00 sehingga pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi tetap senilai Rp1.250.000,00. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada LRA juga senilai Rp1.250.000,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PKRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNBPN pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya pada LO senilai Rp827.829.161.068,00 dengan pengembalian Rp405.000,00 sehingga pendapatan perizinan senilai Rp827.828.756.068,00. Pendapatan Perizinan Lainnya pada LRA juga senilai Rp819.555.281.761,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Perizinan Lainnya telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp21.135.321.491,00 dengan pengembalian Rp756.855,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi

senilai Rp21.134.564.636,00 berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) bersumber dari pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKP) bersumber dari karcis dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya pada LRA juga senilai Rp21.134.564.636,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp172.777.623,00. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada LRA juga senilai Rp172.777.623,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah telah dijelaskan pada CaLK LRA. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) terdapat pada dua satker yaitu Setditjen PKRL dan Satker LKKPN Pekanbaru.

Beban Pegawai
Rp112.197.428.463

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp112.197.428.463,00 dan Rp98.524.358.181,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Beban Pegawai yang tidak terlalu signifikan sebesar 12,19% seiring dengan kenaikan jumlah anggaran pegawai karena adanya pegawai yang baru masuk serta karena adanya kenaikan tunjangan fungsional. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Pegawai. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas sebesar Rp112.074.699.246,00 atau terdapat selisih

Rp122.729.217,00. Hal ini diakibatkan adanya tunjangan kinerja dan gaji induk bulan Januari 2025 yang sesuai dengan ketentuan teknis proses pengajuan SPM-LSnya dilakukan pada bulan sebelumnya yaitu Desember 2024 sehingga telah diakui sebagai beban pada bulan Desember. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Koreksi Audited temuan BPK pada tiga satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, dan LPSPL Serang dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Adapun rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.2. berikut ini.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	50.128.553.528	47.363.704.753	5,52
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	2.584.561.086	234.003.166	90,95
Beban Lembur (5122)	1.300.873.000	986.998.000	24,13
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito (5124)	58.183.440.849	49.939.652.262	14,17
Jumlah Beban	112.197.428.463	98.524.358.181	12,19

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Pegawai.

Beban Persediaan
Rp922.018.513

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp922.018.513,00 dan Rp1.049.371.886,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dalam operasional kegiatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Beban Persediaan sebesar 13,81%. Adapun rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.3.

Beban persediaan hanya terdiri atas : (1) Beban Persediaan Konsumsi senilai Rp921.953.513,00 yang terdapat pada 34 satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan 25 satker Tugas Pembantuan dengan yang terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp182.724.380,00. (2) Beban Persediaan Bahan Baku senilai Rp65.000,00 hanya terdapat pada satu satker UPT LPSPL Serang yang sebetulnya berupa ATK namun salah pencatatan kode barang pada Modul Komitmen.

Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Konsumsi (593111)	921.953.513	1.049.371.886	-13,82
Beban Persediaan pita cukai, materai & leges (593121)	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan baku (593131)	65.000	0	100,00
Beban Persediaan lainnya (593149)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban	922.018.513	1.049.371.886	-13,81

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Persediaan. Perubahan terdapat pada akun Beban Persediaan Konsumsi bertambah senilai Rp290.000,00 sehingga dari sebelumnya Rp921.663.513,00 menjadi Rp921.953.513,00 dikarenakan adanya koreksi pada satker Dinas KP Prov. NTB yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Beban Barang &
Jasa
Rp126.468.152.564

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp126.468.152.564,00 dan Rp92.151.728.840,00. Beban Barang dan Jasa adalah terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa yang cukup signifikan yaitu sebesar 27,13%. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.4. berikut ini.

Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Barang Operasional (5211)	12.500.175.196	22.217.501.157	-77,74
Beban Barang Non Operasional (5212)	41.590.014.372	32.673.623.319	21,44
Beban Jasa (5221)	72.369.970.996	37.260.604.364	48,51
Beban Aset Ekstrakomptabel (5951)	7.992.000	0	100,00
Jumlah Beban	126.468.152.564	92.151.728.840	27,13

Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Jasa. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Barang dan Jasa total sebesar Rp109.677.190.394,00 atau selisih Rp16.790.962.170,00 dengan rincian Belanja Barang Operasional sebesar Rp12.500.175.196,00 atau tidak ada selisih, Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp41.569.271.257,00 atau selisih Rp20.743.115,00 yang terdapat pada Belanja Bahan (521211), dan Belanja Jasa sebesar Rp55.607.743.941,00 atau selisih Rp16.762.227.055,00 yang terdapat pada Belanja Langganan Listrik, Telepon, Air, Daya dan Jasa Lainnya, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi, dan Belanja Jasa Lainnya.

Selisih ini diantaranya diakibatkan adanya jurnal manual terkait dengan aset ekstrakomptabel, Beban Dibayar Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dll. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Koreksi Audited temuan BPK dan Itjen pada beberapa satker diantaranya yaitu Setditjen PKRL, LPSPL Sorong, Dinas KP Kab. Cirebon, dan Dinas KP Kab. Bima dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Selain itu juga terdapat pembebanan akun Jasa Lainnya atas hibah USAID senilai Rp15.800.713.582,00.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Barang dan Jasa.

*Beban
Pemeliharaan
Rp8.110.707.732*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp8.110.707.732,00 dan Rp10.117.997.525,00. Terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 24,75%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan yang terbesar dari akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp4.963.125.008,00 yang terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp3.242.491.642,00. Adapun rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.5. berikut ini.

Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan (523111)	4.963.125.008	6.672.254.608	-34,44
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya (523119)	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin (523121)	3.140.808.824	3.362.437.775,	-7,06
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya (523129)	6.510.100	7.742.100,	-18,92
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (523131)	0	24.567.075,	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan (523133)	0	2.997.500,	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Lainnya (523199)	0	46.375.800,	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113)	263.800	1.622.667,	-515,11
Beban Persediaan Suku Cadang (593114)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban	8.110.707.732	10.117.997.525	-24,75

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.096.467.215,00 atau selisih Rp14.240.517,00. Selisih ini salah satunya karena pada Beban Pemeliharaan terdapat akun Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113) yang terdapat pada satu satker UPT LPSPL Serang karena pencatatan persediaan yang masuk kategori Bahan untuk Pemeliharaan walaupun berasal dari anggaran Barang Konsumsi. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Balik Koreksi Audited temuan BPK pada satker LPSPL Sorong dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Pemeliharaan.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp150.661.582.859*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp150.661.582.859,00 dan Rp129.331.972.654,00 atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 14,16%. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Beban Perjalanan Dinas yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan anggaran perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Nilai tertinggi terdapat pada akun Beban Perjalanan Biasa (524111) senilai Rp83.181.707.753,00. Kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219) sebesar 39,28% seiring dengan naiknya pagu anggaran. Sementara akun yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada akun Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211) turun sebesar 52,03%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Perjalanan Dinas. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.6. berikut ini.

Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111)	83.181.707.753	71.190.307.893	14,42
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)	3.628.288.766	3.754.263.743	-3,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	15.651.589.152	10.971.104.038	29,90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)	39.490.004.844	34.153.760.065	13,51
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211)	4.349.650.386	6.612.837.274	-52,03
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219)	4.360.341.958	2.649.699.641	39,23
Jumlah Beban	150.661.582.859	129.331.972.654	14,16

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp150.666.279.558,00 atau selisih Rp4.696.699,00. Selisih ini terdapat pada akun Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri dikarenakan adanya jurnal balik manual Koreksi Audited pada awal tahun akibat setoran temuan BPK Tahun 2023 pada satker Setditjen PKRL dan Dinas KP Kab. Pangkep dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Perjalanan Dinas. Perubahan terdapat pada tiga akun yaitu Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Biasa Paket Meeting Luar Kota, dan Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri berkurang senilai Rp15.978.372,00 sehingga dari sebelumnya Rp150.677.561.231,00 menjadi Rp150.661.582.859,00 dikarenakan adanya koreksi pada lima satker diantaranya Setditjen PKRL, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong, dan BKKPN Kupang yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp70.985.835.693

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp70.985.835.693,00 dan Rp53.300.973.230,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar 24,91% salah satunya dikarenakan adanya Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda (593125) dimana pada tahun 2023 sebelumnya tidak ada beban tersebut. Selain itu kenaikan sangat signifikan juga terdapat pada akun Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (593128) sebesar 98,94%. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tersebut sebagaimana Tabel D.7.

Tabel D.7. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121)	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593122)	28.672.037.828	16.317.312.569	43,09
Beban Persediaan Hewan Tanaman untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593123)	3.707.147.078	3.142.571.436	15,23
Beban Persediaan Alsin untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593124)	32.405.798.325	25.226.914.633	22,15
Beban Persediaan JIJ untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593125)	3.757.383.462	8.588.530.592	-128,58
Beban Persediaan ATL untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593126)	14.500.000	0	100,00
Beban Lain-Lain untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593127)	0	0	#DIV/0!
Beban Brng Lainnya utk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593128)	2.428.969.000	25.644.000	98,94
Jumlah Beban	70.985.835.693	53.300.973.230	24,91

Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593122) senilai Rp28.672.037.828,00 terdapat hanya pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya yaitu 43,09%. Pada Direktorat Jasa Kelautan berupa serah terima berdasarkan BAST untuk kegiatan pembangunan rumah garam di Kab. Sambas, Rehabilitasi Gudang Garam Nasional di Kab. Bima, pembangunan Gudang Garam Rakyat pada beberapa lokasi seperti di Kab. Purworejo, Kab. Cirebon, Kab. Pati, Kab. Pangkep, dll. Sementara pada Direktorat P4K berupa serah terima berdasarkan BAST untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara, Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kab. Sumbawa, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Aru, dan Kab. Banggai Laut, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) berupa papan informasi, gazebo, gapura, dll.

Beban Persediaan Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan ke Masyarakat juga berasal dari Dit. Jasa Kelautan berupa Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk pencatatan kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi sesuai LH Pemantauan Nomor : T.608/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai Rp4.151.386,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Pencatatan Pengakuan Temuan pada Dit. Jasa Kelautan a.n. CV. Gibran Raka Pratama senilai Rp76.511,17 dan CV. Bangun senilai Rp85.447,83 sesuai dengan LH Pemantauan Nomor : T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp161.959,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk pencatatan Biofarmakologi (Dit. Jasa Kelautan) atas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin sesuai dengan LH Evaluasi Nomor : T.41/ITJ/KP.730/XII/2024 tanggal 11 Januari 2024 senilai Rp4.230.627,00. Sedangkan dari Dit. P4K berupa Jurnal Balik terkait Koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban yaitu Bantuan Pengembangan Pesisir Tangguh di Lampung Selatan KMP Anugerah Bahari, Mutiara Laut, Mina Segara, Berkah senilai Rp18.538.232,00.

Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan ke Masyarakat (593123) sebesar Rp3.707.147.078,00 terdapat hanya pada satker Setditjen PKRL Direktorat P4K. Pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp3.142.571.436,00 atau naik 15,23%. Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan berupa Jurnal Balik terkait koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa penanaman vegetasi pantai di Kab. Aceh Besar dari

kelompok Tunas Usaha Sejahtera senilai Rp7.830.000,00 dan juga adanya serah terima ke masyarakat dengan BAST untuk kegiatan penyulaman mangrove di Kab. Kebumen, Kab. Aceh Jaya, Kab. Pesawaran, dll serta kegiatan penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana di Kab. Pangandaran, Kab. Tanggamus, dll.

Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat (593124) senilai Rp32.405.798.325,00 terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Untuk satker UPT nilai terbesar yaitu pada satker BPSPL Makassar sebesar Rp299.988.625,00. Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu sebesar 22,15%. Pada seluruh satker UPT terdapat pada kegiatan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi diantaranya berupa peralatan selam, compressor, kamera, laptop, printer, Infocus, mesin tempel, genset, GPS, dll.

Pada satker Setditjen PKRL berasal dari Dit. P4K yaitu Jurnal Balik koreksi BPK Pencatatan Pengakuan Temuan Penausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP pada Setditjen PKRL Tidak Tertib tahun 2023, belanja barang yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp6.660,00, Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Denda Keterlambatan CV. Three Putra Abadi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp6.393.528,00, Habis Pakai Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano Kab. Seram Bagian Barat senilai Rp39.940.000,00, Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif berupa kapal, mesin tempel, *fish finder*, dll pada beberapa lokasi, Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih berupa motor roda tiga pada beberapa lokasi, dan Pengadaan Sarana Produk Turunan Mangrove berupa sirup dan tepung pada beberapa lokasi. Pada satker Dit. Jasa Kelautan berupa pengadaan Mesin Perahu, pengadaan Sarana Pemanfaatan BMKT, pengadaan Sarana Wisata Bahari, Geomembran Integrasi Lahan Pergaraman, Washing Plant, dll.

Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593125) senilai Rp3.757.383.462,00 dimana pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp8.588.530.592,00 atau mengalami penurunan sebesar 128,58%. Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL. Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan berasal dari Dit. P4K yaitu adanya serah terima ke masyarakat dengan BAST untuk kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di beberapa

lokasi serta Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.025.000,00 dan Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.918.400,00. Selain itu juga berasal dari Dit. Jasa Kelautan berupa serah terima kegiatan Integrasi Lahan Pergaraman di beberapa lokasi.

Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (593126) senilai Rp14.500.000,00 dimana pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama tidak terdapat nilai untuk akun beban ini. Akun ini hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Pontianak. Pada awalnya terdapat KDP pada satker tersebut, lalu dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan KDP untuk diinput ke Persediaan 526 dengan transaksi Pengungkapan Lainnya. Setelah itu dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : B. 4037/BPSPL.2/PL.750/XI/2024 tanggal 18 November 2024 antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan.

Sementara itu untuk Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (593128) senilai Rp2.428.969.000,00 yang pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp25.644.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 98,94%. Akun ini hanya terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Perubahan terdapat pada dua akun yaitu Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berkurang senilai Rp247.916.514,00 sehingga dari sebelumnya Rp71.233.752.207,00 menjadi Rp70.985.835.693,00 dikarenakan adanya koreksi hanya pada satker Setditjen PKRL yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen PKRL untuk Tahun Anggaran 2024. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Bantuan Sosial.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp21.068.599.317*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp21.068.599.317,00 dan Rp19.577.237.886,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan beban penyusutan dan amortisasi yang tidak terlalu signifikan disebabkan bertambahnya nilai aset tiap tahunnya. Nilai yang terbesar yaitu pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp11.643.106.517,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.8. berikut ini.

Tabel D.8. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	Akun	31 Des 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	11.643.106.517
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	1.972.361.702
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	591311	467.884.162
Beban Penyusutan Irigasi	591312	355.314.157
Beban Penyusutan Jaringan	591313	32.430.004
Beban Penyusutan Properti Investasi	591611	103.489
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	592211	6.267.632.815
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk Digunakan dlm Operasional	592222	160.368.074
Jumlah Penyusutan		20.899.200.920
Beban Amortisasi Software	592115	169.398.397
Beban Amortisasi Lisensi	592116	0
Jumlah Amortisasi		169.398.397
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		21.068.599.317

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp(29.810.528)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(29.810.528,00) dan Rp(13.548.802,00). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Terdapat kenaikan angka Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP (594211) pada satker Sekretariat Ditjen PKRL senilai Rp892.762,00 dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp41.714.046,00 pada enam satker yaitu Setditjen PKRL, LPSPL Serang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong karena adanya jurnal balik atas piutang di tahun sebelumnya, serta adanya jurnal koreksi atas temuan BPK maupun Itjen pada beberapa satker seperti yang telah dijelaskan pada CaLK Neraca akun Piutang Lainnya. Selain itu terdapat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya (594991) senilai Rp(12.796.280,00) pada satker Setditjen PKRL.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perubahan terdapat pada akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya yaitu berkurang senilai Rp972.800,00 sehingga dari sebelumnya Rp(42.686.846,00) menjadi Rp(41.714.046,00) dikarenakan adanya koreksi pada lima satker diantaranya Setditjen PKRL, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Beban Lain-Lain
Rp0

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak ada perubahan nilai. Tidak ada akun Beban Lain-Lain pada Ditjen PKRL untuk Tahun Anggaran 2024. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Lain-Lain.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(1.481.782.895)

D.12 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(1.481.782.895,00) dan Rp(3.246.687.401,00). Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri atas Defisit Pelepasan Aset senilai Rp(2.498.153.617,00) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.016.370.722,00. Terdapat penurunan nilai antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Defisit Pelepasan Aset senilai Rp(2.498.153.617,00) terdiri atas : (1) Pendapatan Pelepasan Aset senilai Rp(427.360.838,00) berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) dengan nilai yang sama yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan dua satker UPT yaitu BPSPL Padang yang merupakan nilai terbesar senilai Rp187.832.107,00 dan BPSPL Makassar senilai Rp14.656.181,00. Pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp197.978.320,00 antara lain PKPB Dit. P4K berupa Alsin sebesar Rp5.019.000,00, 4 unit sepeda motor sebesar Rp13.128.000,00, kendaraan dinas P4K 1 senilai Rp21.000.000,00 dan kendaraan dinas P4K 2 senilai Rp32.000.000,00; PKPB Dit. PRL berupa Alsin senilai Rp13.392.243,00 dan kendaraan dinas Dit. PRL senilai Rp41.921.000,00; PKPB Dit. KEBP berupa kendaraan dinas Dit. KEBP senilai Rp69.000.000,00; Setditjen PKRL berupa Kendaraan dan Alsin sebesar Rp261.000,00; PKPB BAPPEDA Provinsi Riau berupa Alsin sebesar Rp1.017.077,00; dan PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.240.000,00.

Selain itu Defisit Pelepasan Aset juga berupa (2) Beban Pelepasan Aset senilai Rp2.925.514.455,00 berupa Beban Pelepasan Aset (596111) yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp1.592.539.980,00 berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, serta dua satker UPT yaitu BPSPL Padang senilai Rp655.824.611,00 berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Buku Lainnya, Peta (Map), dll. dan LKKPN Pekanbaru senilai Rp677.149.864,00 juga berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan yaitu Peta (Map) serta Penghapusan/Penghentian KDP.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.014.370.722,00 terdiri atas Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai

Rp36.856.669.322,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun ini senilai Rp35.840.298.600,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa : (1) Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) hanya pada satker Setditjen PKRL yaitu Dit. Jasa Kelautan karena adanya Penghapusan 526 berupa Kegiatan Perencanaan Gudang Garam Nasional menjadi Persediaan yang rusak/using senilai Rp147.186.000,00 dan (2) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) senilai Rp85.800.000,00 hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri atas (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) senilai Rp38.211.588,00, (2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) senilai Rp692.635.593,00, (3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (425913) senilai Rp3.209.541,00, dan (4) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) senilai Rp515.300.000,00.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada lima satker yaitu Setditjen PKRL, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, dan LPSPL Serang senilai total Rp38.211.588,00 terdiri dari pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, PPPK, dan uang makan Tahun Anggaran 2023. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini, yang hanya terdapat pada satker BPSPL Makassar dikarenakan ada jurnal balik hasil temuan BPK. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Tabel D.9. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	Akun	31 Des 2024 (Rp)
Pendapatan Penyelesaian Ganti KN thd Pegawai Negeri	425791	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425911	38.211.588
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	425912	692.635.593
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	425913	3.209.541
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	491429	515.300.000
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		1.249.356.722

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL, 8 satker UPT, dan 1 satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Prov. Maluku Utara senilai total Rp692.635.593,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan

karena pengembalian atas kelebihan pembayaran honor enumerator, pembayaran belanja pemeliharaan, pembayaran belanja barang operasional Tahun Anggaran 2023. Selain itu pendapatan tersebut dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit Inspektorat Jenderal berupa temuan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan listrik mess. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dikarenakan adanya jurnal manual pada satker Setditjen PKRL terhadap 5 satker Tugas Pembantuan Pugar. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 berupa temuan Itjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla. Tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(4) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) senilai Rp515.300.000,00 terdapat pada dua satker yaitu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp500.800.000,00 berupa Perolehan Lainnya Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan untuk pulau Terluar dan satker UPT BPSPL Pontianak senilai Rp14.500.000,00 berupa inputan Persediaan 526 yang akan diserahkan ke Pemda yang merupakan koreksi nilai KDP.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Namun terdapat mutasi tambah dan kurang dengan nilai yang sama yaitu Rp35.607.312.600,00 pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo pada akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Pos Luar Biasa Rp0

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, berada di luar kendali entitas dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat akun Pos Luar Biasa pada LK Ditjen PKRL periode Tahunan TA. 2024 ini.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp837.822.061.097

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp837.822.061.097,00. Nilai ini sama dengan nilai saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 *Audited* pada aplikasi SAKTI pada periode tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit LO
Rp357.297.661.474

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp357.297.661.474,00 dan Rp295.137.705.143,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Terdapat kenaikan Surplus LO sebesar Rp62.159.956.331,00 dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Surplus/Defisit LO karena adanya koreksi seperti yang telah dijelaskan pada CaLK Laporan Operasional.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp17.318.355.738

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* sebesar Rp17.318.355.738,00 dan Rp2.423.893.389,00. Rincian koreksi yang menambah ekuitas dapat dirinci di bawah ini :

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Penyesuaian Nilai Aset.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan (391113) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Koreksi Nilai Persediaan.

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp(7.865.132)

E.3.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Akun 391151 (Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bagian dari Pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara Lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar. Akun ini baru disajikan pada LPE mulai tahun 2019. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(7.865.132,00) dan Rp0,00. Koreksi atas Reklasifikasi hanya terdapat pada satu satker yaitu Setditjen PKRL yang disebabkan karena perbaikan kodefikasi barang berupa Bangunan Lainnya menjadi Tugu/Tanda Batas Lainnya. hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP Nomor : B.3268/SJ.2/HP.310/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Keuangan KKP yang berakhir tanggal 30 Juni 2024, terkait kesalahan kode barang berupa Aset Tetap yang telah dicatat sebagai Aset Properti Investasi.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Koreksi atas Reklasifikasi.

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset, dalam hal ini yaitu aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Selisih Revaluasi Aset.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp18.495.304.940

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp18.495.304.940,00 dan

Rp2.407.214.188,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya atau bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dapat terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Lainnya.

Terdapat kenaikan nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dimana pada tahun 2024 ini terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar Rp18.496.254.440,00 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) sebesar Rp(949.500,00).

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi terdapat pada tujuh satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp18.412.798.658,00 dan enam satker UPT dengan rincian sebagai berikut :

- LPSPL Serang senilai Rp(24.787.236,00) merupakan selisih yang terjadi dari penjumlahan aset lainnya terhadap koreksi aset non revaluasi sebesar Rp(111.084.660,00). Sebelumnya pada akun koreksi aset tetap non revaluasi sudah terdapat saldo sebesar Rp86.297.236,00, sehingga adanya penjurnalan tersebut menghasilkan nilai Rp24.787.236,00 dengan rincian :
 - Transaksi **Koreksi Pencatatan** aset berupa Kanopi dengan nilai penyusutan transaksional sebesar Rp57.440.790,00 (Kredit), dan nilai masa manfaat Kanopi tersebut selanjutnya dikapitalisasi ke Bangunan Gedung Kantor Permanen, hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa aset berupa Kanopi sebagaimana dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen, sebagai data dukung Koreksi Pencatatan adalah Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
 - Transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, yaitu penambahan nilai kuantitas masa manfaat sebesar Rp55.700.160,00 (Debet), dan nilai tersebut berasal dari koreksi pencatatan nilai Kanopi, sesuai Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
 - Transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** berupa Alat Selam Seet senilai Rp77.097.000,00, Kursi Besi/Metal senilai Rp5.400.000,00, dan Kursi Zeis senilai 2.059.794,00, yaitu sebagai pengurangan nilai masa

- manfaat dari masing-masing aset tersebut, dan sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547 /LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
- Transaksi **Jurnal Balik** atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang berasal dari koreksi pencatatan aset karena kesalahan kode barang sebesar Rp111.084.660,00, (Debet), sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547 /LPSPL.2/PL.450 /VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
 - BPSPL Makassar senilai Rp27.624.664,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - **Transaksi Koreksi Pencatatan** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai masa manfaat (Debet) sebesar Rp199.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen, yaitu kesalahan proses pencatatan dengan menggunakan menu transaksi Perolehan/ Penambahan KDP, sehingga pada saat dilakukan transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru, sebagai data dukung koreksi pencatatan yaitu Surat Keterangan Nomor : 1262.A/BPSPL.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024 adalah dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
 - **Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah/Kapitalisasi Nilai** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1, yaitu penambahan nilai kualitas atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan dengan nilai masa manfaat sebesar Rp169.971.037,00, (Debet) pada Bangunan Gedung Kantor Permanen sebagaimana dimaksud, data dukung Surat Keterangan Nomor : 1262.A/BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
 - **Transaksi Saldo Awal** berupa Timbangan Barang, dengan nilai masa manfaat sebesar Rp5.349.650,00, (Kredit), hal tersebut dilakukan karena pada TA. 2023 terdapat belanja pengadaan timbangan digital sebanyak 4 unit menggunakan akun belanja barang operasional lainnya (521119), yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) mengingat timbangan digital telah memenuhi kriteria sebagai aset tetap secara nilai, fungsi dan manfaat, data dukung Surat Keterangan Nomor : 1262.A/BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli

2024

- **Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp3.145.351,00, hal tersebut dilakukan dalam rangka menidaklanjuti hasil Audit Kinerja Inspektorat III KKP, T.152/ITJ/HP.110/IV/2024 pada BPSPL Makassar bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushollah), sebagai data dukung adalah Surat Keterangan Nomor : B.1549/BPSPL.3/KP.120/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024
- LKKPN Pekanbaru senilai Rp(103.625,00), yang berasal dari nilai buku atas Software Komputer yang ditambahkan kepada aset tetap berupa Notebook (NUP 66) saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (kode transaksi 204), yang diperoleh dari Rp1.899.000,00 (nilai perolehan awal Software Komputer) dikurangi dengan Rp1.795.375,00 (nilai penyusutan software komputer yang sudah dilekatkan dengan Aset Tetap berupa Notebook
- Setditjen PKRL senilai Rp18.412.798.658,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - Terdapat transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (Penghapusan) berupa berupa Personal Komputer Lainnya pada PKPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp2.340.467,00 (Kredit)
 - Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp66.305.000,00
 - Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp11.446.875,00
 - Saldo Awal Bangunan Gazebo pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar (24.208.000,00)
 - Saldo Awal Bangunan Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(129.940.000,00)
 - Saldo Awal Bangunan Terbuka Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(58.740.000,00)
 - Saldo Awal Gedung Pos Jaga Semi Permanen pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar

Rp(22.784.000,00)

- Saldo Awal Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan pada Setditjen PKRL, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(7.625.395.000,00)
- BPSPL Denpasar senilai Rp9.871.792,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - Transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang diakibatkan karena adanya penilaian dari KPKNL Denpasar atas aset rumah negara yang semula 1 NUP dilakukan penilaian Kembali menjadi 3 NUP
 - Transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang diakibatkan karena penilaian dari KPKNL Sidoarjo atas pemisahaan nilai tanah dan Gedung bangunan kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur
- LPSPS Sorong senilai Rp90.817.793,00 hal tersebut disebabkan transaksi Reklasifikasi Masuk berupa Camera Digital yang semula tercatat sebagai Kamera Digital
- BPSPL Pontianak senilai Rp14.500.000,00 yang disebabkan adanya transaksi koreksi nilai KDP yang diinput kedalam persediaan dikarenakan akan diserahkan ke Pemda setempat.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi hanya terdapat di satker LKKPN Pekanbaru senilai Rp(949.500,00), yang berasal dari nilai penyusutan atas Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer (NUP 9), yang dikembalikan kepada nilai aset tersebut pada saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan (kode transaksi 305).

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

Koreksi Lain-Lain
Rp(1.169.084.070)

E.3.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain berupa Koreksi Lainnya (391119) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(1.169.084.070,00) dan Rp16.679.201,00. Koreksi Lainnya terdapat pada dua satker yaitu BPSPL Makassar senilai Rp6.250,00 berupa Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR yang masih menyisakan angka tersebut dimana nilai tersebut merupakan nilai penyisihan

pada pelaporan tahun yang lalu. Pada saat penginputan terakhir di SAKTI modul piutang sistem tidak menghilangkan penyisihan tersebut sehingga diperlukan jurnal manual pada modul GLP.

Sementara itu pada satker Setditjen PKRL senilai Rp1.169.090.320,00, diantaranya senilai Rp10.158.659,00 merupakan Jurnal Umum untuk Pencatatan setoran atas CV. Mitra Alami dan LEHPI (penyisihan piutang) dari temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton serta Jurnal untuk mencatat Piutang Lainnya atas setoran pada lima satker Eks Tugas Pembantuan Pugar terkait temuan ltjen tahun 2023 dan Rp1.190.351.664,00 berupa jurnal manual KSP P. Nipa sisa Piutang PNPB yang telah dibayarkan 50% sebelumnya.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Koreksi Lain-Lain.

Transaksi Antar
Entitas
Rp(355.608.334.769)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(355.608.334.769,00) dan Rp(306.855.776.556,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas terdiri dari Diterima dari Entitas Lain berupa pendapatan, Ditagihkan ke Entitas Lain berupa realisasi belanja, Transfer Masuk, Transfer Keluar, serta Pengesahan Hibah Langsung. Rincian atas Transaksi Antar Entitas sebagai berikut :

Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(843.308.374.261)
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	470.651.334.172
Transfer Masuk (313221)	353.037.261
Transfer Keluar (313211)	(492.028.247)
Pengesahan Hibah Langsung (391131)	17.157.971.043
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (391132)	(6.972.940)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL (391133)	36.698.203
Jumlah	(355.608.334.769)

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Transaksi Antar Entitas.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(843.308.374.261,00) sedangkan DKEL sebesar Rp470.651.334.172,00. Terdapat perubahan nilai antara 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 *Audited* pada Pos Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain karena adanya perubahan pada pos realisasi dan pendapatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci pada pos CaLK LRA.

E.4.2 Transfer Masuk /Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Pada LK Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini terdapat transaksi Transfer Masuk (313221) dan Transfer Keluar (313211) dengan nilai yang berbeda.

Transfer Masuk senilai Rp353.037.261,00 terdapat pada tiga satker yaitu Setditjen PKRL senilai Rp335.934.261,00, BPSPL Denpasar senilai Rp8.787.000,00, dan LPSPL Serang senilai Rp8.316.000,00. Sementara Transfer Keluar senilai Rp492.028.247,00 terdapat pada dua satker yaitu Setditjen PKRL senilai Rp453.230.000,00 dan BPSPL Makassar senilai Rp7.225.000,00.

Akumulasi Transfer pada satker BPSPL Denpasar yaitu Transfer Keluar 1 unit Laptop ke BPSPL Makassar dan Kursi Besi/Metal dan Sice ke Setditjen PKRL, sementara untuk Transfer Masuk berupa 1 unit Laptop dari BPSPL Makassar dan beberapa Meubelair dari Setditjen PKRL.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung (391131) per 31 Desember 2024 senilai Rp17.157.971.043,00. Pengesahan Hibah Langsung terdiri dari :

- a) Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Jasa Nomor Register 23D5SAMA senilai Rp15.800.713.582,00 pada Direktorat Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan yang berasal dari USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif) atas proyek *Grant implementation Agreement (GIA) on Marine and Fisheries Portofolio* (MFP) Tahun 2022 - 2027 dengan nilai hibah USD 1.015.143;
- b) Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Jasa Nomor Register 2RQRTF2A

senilai Rp349.076.158,00 pada Direktorat Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan yang berasal dari *Global Environment Facility* melalui FAO atas proyek *Enabling Transboundary Sustainable Management of the Indonesia Seas* dengan nomor perjanjian 0212/GCP/RAS/289/GFF tanggal 16 Januari 2023 dengan nilai Hibah USD 21.991,82; dan

- c) Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB) senilai Rp1.008.181.303,00 pada Direktorat Jasa Kelautan yang berasal dari *Government Of The Republic of Korea* dari proyek *The Establishment Of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* tertanggal 26 September 2023 dengan nilai Hibah KRW510.420.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (391133) per 31 Desember 2024 senilai Rp36.698.203,00. Pengesahan Hibah Langsung tersebut merupakan Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Barang pada tahun 2023 sesuai NPHD Nomor 000.2.3.2/1248/BKA/2023. Hibah Masuk hanya terdapat pada Satker BKKPN Kupang berupa 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 750 m² dengan nilai sebesar Rp36.698.203,00, yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST Nomor : 000.232/1249/BKA/2023 tanggal 28 November 2023. Aset Tanah tersebut rencananya untuk Kantor Pelayanan Wilker BKKPN Kupang yang berlokasi di Kepulauan Kabupaten Rote Ndao - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ekuitas Akhir
Rp856.829.743.540

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *Audited* berdasarkan aplikasi SAKTI adalah masing-masing sebesar Rp856.829.743.540,00 dan Rp837.822.061.097,00. Terdapat perubahan nilai atau kenaikan Ekuitas Akhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada Ekuitas Akhir seiring dengan perubahan pada Surplus/Defisit LO karena adanya koreksi seperti yang telah dijelaskan pada CaLK Laporan Operasional.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat 5 satker dari Tugas Pembantuan Pugar yang pada Tahun Anggaran 2023 statusnya aktif menjadi tidak aktif karena tidak memperoleh anggaran, yaitu Dinas KP Kab. Cirebon (029447), Dinas KP Kab. Pamekasan (059490), Dinas KP Kab. Pangkep (199060), Dinas KP Kab. Jeneponto (199056), dan Dinas KP Kab. Bima (239050) dimana keseluruhan satker tidak meninggalkan Aset Tetap, namun masih terdapat Aset Lancar berupa Piutang Lainnya yang merupakan temuan Inspektorat Jenderal TA. 2023 yang dilakukan penyeteroran TA. 2024. Rincian temuan tersebut terdapat pada bagian lainnya dari Pengungkapan Penting Lainnya dibawah ini. Piutang Lainnya tersebut telah dilakukan transfer terlebih dahulu ke satker Setditjen PKRL dikarenakan penyeteroran dilakukan menggunakan akun satker Setditjen PKRL. Setelah itu dilakukan jurnal manual pada satker Setditjen PKRL pada periode Triwulan III 2024 karena seluruhnya telah dilakukan penyeteroran.

Untuk Tahun Anggaran 2024 sudah tidak terdapat satker Tugas Pembantuan Pugar. Sementara itu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Tahun Anggaran 2024 ada perubahan kewenangan dari Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan beberapa penyesuaian administrasi terutama terkait perubahan kode satker pada 34 satker Dinas KP Provinsi (daftar kode satker pada CaLK Pendahuluan).

F.2. Hasil Monitoring pada Aplikasi MonSAKTI

Status Rekonsiliasi untuk seluruh satker aktif telah selesai sehingga hasil rekonsiliasi terbentuk dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) pada masing-masing satker. Sementara itu untuk posisi tutup buku/periode pada masing-masing modul yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan GLP telah ditutup. Bahkan untuk seluruh satker Eks Dekonsentrasi Dinas KP Provinsi juga telah tutup periode untuk seluruh modul.

Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN pada 12 barang kode akun 526115 senilai Rp225.578.000,00 pada satker BPSPL Makassar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan pada SPM pada modul komitmen dengan nomor SPM 00083 A, 00082 A, 00080 A, dan 00079 A, senilai Rp225.578.000,00 yang

seharusnya tercatat pada aplikasi SAKTI modul persediaan, namun pada saat pemilihan pada SAKTI modul komitmen dipilih sebagai Aset. Atas kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan reklasifikasi keluar persediaan pada modul aset tetap lalu dilanjutkan dengan transaksi reklasifikasi dari aset pada modul persediaan. Barang-barang tersebut dari akun Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dengan barang berupa kamera, notebook, dan set alam selam.

Selisih rekonsiliasi internal piutang jangka panjang yang pada satker Setditjen PKRL senilai Rp100.858.161.685,00 karena telah dilakukan penginputan pada SAKTI Modul Piutang yang merupakan sisa piutang KSP di P. Nipa yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. Selisih tersebut awalnya muncul dikarenakan pada tahun lalu telah diwajibkan penginputan piutang melalui SAKTI Modul Piutang. Untuk menginput di Modul Piutang, dibutuhkan informasi-informasi terkait dengan debitur, kontrak, dll. Setelah seluruh data dikumpulkan satker telah menginput data tersebut pada Modul Piutang. Penjelasan terkait dengan perpindahan dari Piutang Jangka Panjang menjadi Piutang PNPB telah dilakukan sebelumnya pada Laporan Keuangan Tahun sebelumnya.

Pada LK *Unaudited* terdapat 420 jurnal atau 210 pasang jurnal manual pada periode Tahunan 2024 dengan berbagai deskripsi. Jurnal tersebut terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan satker TP Dinas KP Prov. Maluku. Pada satker Setditjen PKRL terdapat 210 jurnal atau 105 pasang jurnal diantaranya berupa jurnal balik atas belanja akrual tahun 2023, jurnal balik atas temuan tahun 2023 yang telah dibentuk piutang beserta penyisihannya, jurnal balik untuk mencatat pembayaran 50% kontribusi KSP Pulau Nipa, jurnal Piutang Lainnya karena setoran atas temuan BPKP pada Dinas KP Kab. Buton, jurnal atas temuan Itjen tahun 2023 pada lima satker eks Tugas Pembantuan yang membayar menggunakan Simponi Setditjen PKRL, dll.

Pada satker lingkup UPT, secara umum diantaranya berupa jurnal balik atas belanja akrual tahun 2023, jurnal balik atas temuan tahun 2023 yang telah dibentuk piutang beserta penyisihannya, jurnal balik atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang berasal dari koreksi pencatatan aset karena kesalahan kode barang pada satker LPSPL Serang, jurnal balik transaksi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi pada satker BPSPL Pontianak, jurnal ketidaksesuaian akun kode barang pada satker BPSPL Makassar, serta belanja akrual jasa tagihan bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025, dll. Sementara itu untuk satker Dinas KP Prov. Maluku berupa jurnal manual Beban Barang Persediaan Konsumsi atas kesalahan penginputan barang konsumsi pada transaksi Saldo Awal senilai total Rp1.600.000,00 yang seharusnya diinput dengan transaksi Pembelian.

Sementara pada LK *Audited* terdapat 476 jurnal atau 238 pasang jurnal manual karena adanya penambahan 28 pasang jurnal terkait koreksi *Audited*. Penambahan jurnal tersebut terdapat pada enam satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, dan Dinas KP Prov. Gorontalo. Pembentukan jurnal manual yang paling banyak terdapat pada pembentukan akun Piutang Lainnya baik dikarenakan temuan BPK maupun koreksi dari KKP.

F.3. Kendala Pelaksanaan Anggaran Belanja

Capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja *output* Ditjen PKRL TA. 2024 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi pada satker-satker lingkup Ditjen PKRL. Adapun kendala pelaksanaan anggaran belanja yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pada satker Tugas Pembantuan adanya perubahan jenis kewenangan dimana sebelumnya Dekonsentrasi, sehingga menyebabkan perubahan administrasi keuangan termasuk didalamnya pada aplikasi SAKTI dan rekening satker;
2. Adanya perubahan atau kekosongan pejabat struktural/pejabat perbendaharaan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja;
3. Keterlambatan proses pekerjaan lelang sehingga kegiatan direncanakan baru dimulai pada selepas Semester I;
4. Adanya *refocusing* untuk kegiatan yang sudah berjalan, sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai dengan akhir tahun; dan
5. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana.

F.4. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Itjen KKP dan BPKP

A. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Terdapat temuan BPK RI Tahun 2009 yang sudah tuntas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 09/LHP-P/XVII/05/2010 pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Rumah Ramah Bencana Khusus Nelayan Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Bartim sebesar Rp28.859.500,00 dan oleh CV. Galang Mitra Sejahtera sebesar Rp9.795.000,00. Terdapat sisa temuan sebesar Rp28.654.500,00 yang telah disetor pada tanggal 09 Juli 2024 dengan NTPN Nomor : CD8C561QV44BV1KC.

Selain itu pada Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 22C/LHP/XVII/06/2017 Tanggal 16 Juni 2017 atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 pada Coremap CTI Project Tahun 2016 dengan nilai temuan sebesar Rp475.987,133,84 terdapat pada satker Dinas KP Kab. Pangkajene Kepulauan, Dinas KP Kabupaten Sikka, BKKPN Kupang, Dinas KP Kabupaten Buton dan LIPI dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp316.333.069,32 sehingga sisa temuan sebesar Rp159.654.064,52, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas honor narasumber, moderator, panitia serta pelaksana kegiatan pada Dinas KP Kab. Buton sebesar Rp37.872.500,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp30.617.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp7.255.000,00;
2. Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. PRM sebesar Rp24.450.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp7.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp17.450.000,00;
3. Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. LB sebesar Rp27.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp15.480.198,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12.019.802,00;
4. Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. L sebesar Rp50.000.250,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp28.000.250,00;
5. Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp102.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp14.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp88.500.000,00;
6. Kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan keramba jaring apung ramah lingkungan pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp22.800.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.800.000,00;
7. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. BP sebesar Rp672.001,32 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp672.001,32;
8. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. CB sebesar Rp7.429.012,52 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp6.429.012,52.

Adapun Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 Tahun 2016 yang disetor Tahun 2024 yaitu Setoran Temuan BPK atas :

1. Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* oleh CV. Lande Bersaudara pada Dinas KP Kab. Buton dengan NTPN C96A87QLUOQIP2AJ tanggal 21 Februari 2024 senilai Rp1.980.198,00;
2. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Tenaga Pendamping Desa dengan NTPN EA2E561QV47G38ML tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp650.000,00;
3. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Tenaga Pendamping Desa dengan NTPN EA2E561QV47G38ML tanggal 15 Agustus 2024 senilai Rp1.310.000,00;
4. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Ekosistem Karang (CV. Meta Plan Konsulindo) dengan NTPN 95BA248VVF2LSDAI tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp2.700.000,00;
5. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Sosek (LSM Prima) dengan NTPN 5FBF33CIFKLVNP28 tanggal 3 Oktober 2024 senilai Rp500.000,00;
6. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Sosek (LSM Prima) dengan NTPN 94EB12G4VQ6I0V4G tanggal 3 November 2024 senilai Rp500.000,00.

Dalam rangka optimalisasi penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat Pelimpahan Penagihan Piutang kepada PUPN Kendari atas LHP BPK RI pada kegiatan tahun 2016 melalui surat Nomor : B.6608/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 23 November 2023 (CV. Citra Baru), Nomor : B.6607/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lande Bersaudara), Nomor : B.6609/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lisyandi), Nomor : B.6605/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Putra Ridi Mandiri), dan Nomor : B.6606/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Yusril Jaya). KPKNL Kendari melalui surat Nomor : S-1421/KNL.1505/2023 tanggal 13 Desember 2023 mengembalikan pengurusan penagihan CV. Citra Baru karena dibawah ketentuan yaitu nilai temuan di bawah 8 juta. PUPN Cabang Sultra menerima pengurusan piutang Negara atas 4 perusahaan total nilai pelimpahan sebesar Rp147.950.250,00 karena memenuhi syarat pelimpahan melalui surat Nomor : SP3N-01/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Putra Ridi Mandiri, SP3N-02/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Yusril Jaya, SP3N-03/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lande Bersaudara, SP3N-04/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lisyandi tanggal 4 Januari 2024.

Sisa temuan Tahun 2016 yang tidak bisa dilimpahkan ke PUPN sebesar Rp19.344.012,52 yang terdiri atas :

- a) Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga CV. Citra Baru sebesar Rp6.429.012,52;

- b) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Penyusunan *Business Plan* Wisata Bahari Kab. Buton Selatan Rp4.250.000,00;
- c) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Monitoring Sosek Kab. Buton Selatan Rp1.775.000,00;
- d) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kab. Buton Tengah Rp1.730.000,00.

Adapun temuan BPK RI Tahun 2016 pada Ditjen PKRL berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : LHP BPK RI Nomor 3C/LHP/XVII/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016 bahwa pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor terdapat temuan Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Non Personil untuk Belanja Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh PT. Survindo Karyatehnik Nusantara Tahun 2016 sebesar Rp95.171.600,00. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp30.171.000,00 sehingga tersisa Rp65.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2017 dengan NTPN A3DC441TSIDUOQ2P tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp5.171.600,00;
2. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2018 dengan NTPN 9C95462HG20MMGSP Tanggal 1 Oktober 2018 senilai Rp5.000.000,00;
3. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2019 dengan NTPN ABDB07QLTB39CL1R Tanggal 26 November 2019 senilai Rp5.000.000,00;
4. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2021 dengan NTPN 987696U8E37Q51C3 Tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp5.000.000,00;
5. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2022 dengan NTPN 120187QLU6I2PJ20 Tanggal 7 Juni 2022 senilai Rp5.000.000,00;
6. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2023 dengan NTPN EEE3A8N3EB0PSOIV Tanggal 27 Desember 2023 senilai Rp5.000.000,00.

Dalam upaya penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat tagihan kepada PT. Survindo Karyatehnik Nusantara sebagai berikut :

1. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.1253/DJPRL.1/HP.520/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022;
2. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.1503/DJPRL.1/HP.550/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
3. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.2276/DJPRL.1/HP.550/IX/2022 tanggal 19 September 2022;
4. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.6242/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

5. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.6480/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 21 November 2023.;
6. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.3444/DJPKRL.1/HP.520/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2023 telah dilakukan koreksi audited, terdapat 7 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 diantaranya 2 temuan Kepatuhan dengan total nilai temuan sebesar Rp151.892.330,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dan 5 temuan SPI antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp48.017.300,00;
2. Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Penatausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP Tidak Tertib senilai Rp128.661.747,00;
4. Penatausahaan Belanja untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belum Memadai;
5. Penatausahaan Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Tertib;
6. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud Tidak tertib;
7. Penyajian Aset Properti Investasi Belum Memadai.

Atas temuan kepatuhan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai telah dilunasi dengan setoran senilai Rp14.515.600,00 NTPN AD6EB6U8EUBCL30P tanggal 28 Maret 2024, setoran senilai Rp10.061.000,00 NTPN 4B048VVEMRR406 tanggal 17 April 2024, setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024, setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024, setoran senilai Rp7.700.000,00 NTPN 0A6880NA04DA745A tanggal 17 April 2024, dan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024;
2. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Barang telah dilunasi dengan setoran senilai Rp7.975.691,00 NTPN 37E0D61QV3RSCSLH tanggal 25 April 2024,

setoran senilai Rp456.660,00 NTPN CD1742G4VPIAOVFV tanggal 26 April 2024, setoran senilai Rp59.245.000,00 NTPN 71CEC48VVEN5NPGL tanggal 30 April 2024, setoran senilai Rp28.670.000,00 NTPN 7983355DF99FVVI9 tanggal 29 April 2024, setoran senilai Rp4.839.404,00 NTPN 1757A7QLUP0NBPMMD tanggal 29 April 2024, dan setoran senilai Rp2.688.275,00 NTPN 992EA55DF99G01JT tanggal 26 April 2024.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara Nomor : 3/LHP/XVII/02/2024 terdapat 2 temuan dengan 7 rekomendasi sebagai berikut :

1. Aspek Strategi dan Regulasi untuk mendukung Implementasi Kebijakan PHSL Belum Memadai dengan rekomendasi :
 - a. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait rekomendasi TPRH;
 - b. berkoordinasi dengan Menteri ESDM tentang : 1) pisah batas kewenangan pengelolaan sedimentasi di laut dengan penambangan pasir laut; 2) penentuan kajian awal berupa sebaran sedimen laut;
 - c. berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan mengenai barang dilarang ekspor serta kebijakan dan pengaturan ekspor;
 - d. menyusun peraturan pendukung yang diamanatkan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 setelah koordinasi dengan K/L terkait selesai;
 - e. menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja tim uji tuntas dan perhitungan kuota kebutuhan pasir laut dalam negeri;
 - f. menetapkan : 1) pedoman perhitungan pasir laut yang diperbolehkan untuk diekspor dan waktu pelaksanaan ekspor pasir laut; 2) mekanisme penetapan dokumen perencanaan atas usulan pembersihan sedimentasi dari pemerintah daerah.
2. Aspek Upaya untuk Mendukung Implementasi Kebijakan PHSL Belum Memadai dengan rekomendasi mengidentifikasi dan mengkaji : a) alokasi anggaran terkait kesiapan implementasi kebijakan PHSL, b) ketersediaan data dan informasi dalam rangka kesiapan implementasi PHSL, c) ketersediaan SDM monitoring dan evaluasi PHSL, dan d) pengembangan aplikasi *e-logbook* pengangkutan hasil

sedimentasi di laut sebagai saran monitoring PHSL.

2. BPSPL Makassar

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada BPSPL Makassar dengan total nilai temuan sebesar Rp7.159.200,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024 dan setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024.

3. LPSPL Serang

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Serang dengan total nilai temuan sebesar Rp8.581.500,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024.

4. LPSPL Sorong

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Sorong dengan total nilai temuan sebesar Rp24.786.717,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 yaitu Realisasi Belanja Pemeliharaan Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717,00 dan Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp10.810.000,00. Atas temuan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut setoran senilai Rp24.786.717,00 NTPN B44020NA04CV3PB9 tanggal 4 April 2024.

B. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Itjen KKP

1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 dengan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penggandaan Buku Peraturan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 senilai Rp46.239.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp20.600.000,00 dengan NTPN Nomor : 879657NAP6IHDHEC tanggal 8 Januari 2024, Rp5.639.000,00 dengan NTPN Nomor : EBA1A555DF9FFC4EN tanggal 25 Juni 2024 dan NTPN Nomor 81AD70NA04P4AN0H tanggal 12 Agustus 2024 dengan total Rp46.239.000,00 sehingga tuntas;
2. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan GGR Tahun 2023 di Kab. Bima, Prov.

- Nusa Tenggara Barat senilai Rp161.959,00 dengan rincian Rp76.511,17 (CV. Gibran Bima Pratama) dan Rp85.447,83 (CV. Bangun Jaya) dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp161.960,00 dengan NTPN Nomor : E95B148VVEJVJVE7 tanggal 21 Maret 2024;
3. Kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi senilai Rp4.151.386,38 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.151.387,00 dengan NTPN Nomor : 578596U8EUB4R4DO tanggal 19 Maret 2024;
 4. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera senilai Rp4.230.627,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.230.627,00 dengan NTPN Nomor : C27F71JNFUSQDUNS tanggal 20 Maret 2024;
 5. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi senilai Rp1.025.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.025.000,00 dengan NTPN Nomor : E95775229MRC6KLD tanggal 10 Januari 2024;
 6. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon senilai Rp1.918.400,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.918.400,00 dengan NTPN Nomor : E2C7COJUQHVE5KKK tanggal 10 Januari 2024;
 7. Denda Keterlambatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo senilai Rp6.393.528,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp6.393.528,00 dengan NTPN Nomor AA1400JUQHVNMS9A tanggal 10 Januari 2024;
 8. Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Tahun 2024 PT. Cakrawala Rentalindo Sejahtera senilai Rp18.079.996,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp18.079.996,00 dengan NTPN DFE2E6QT9JJ2GRDL tanggal 23 September 2024.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain :

1. Terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan LHP Nomor : T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 senilai total Rp23.865.000,00, yaitu : a) Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp765.000,00; b) Pekerjaan revitalisasi gudang garam rakyat oleh CV. Azzam Jaya Sakti senilai Rp3.300.000,00; c) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT. Mahardika Mega Prapta senilai Rp9.900.000,00; d) Pekerjaan Bozem, Peminihan evaporator dan waduk air tua oleh CV. Tiga Utama senilai Rp9.900.000,00. Terdapat bukti sebagian pekerjaan telah dilaksanakan yaitu : a)

Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp83.500,00; b) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT Mahardika Mega Prapta senilai Rp2.500.000,00 dan Rp5.000.000,00 sehingga masih terdapat selisih senilai Rp16.281.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp16.281.500,00 dengan NTPN Nomor : 390400NA0IVOKN2 tanggal 6 Juni 2024;

2. Kelebihan pembayaran honor narasumber sesuai dengan LHP Nomor : T.36/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 senilai Rp1.530.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 695930NA044QBMNM tanggal 31 Januari 2024.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang belum dituntaskan berupa Kelebihan pembayaran kegiatan TP PUGAR TA. 2023 sesuai LHE Nomor : T.575/ITJ.3/HP.410/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kepada CV. Dua Putra Jaya senilai Rp1.077.066,00, dan CV. Putra Akram senilai Rp540.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.077.066,00 dan Rp540.000,00 dengan NTPN 9D3F355DF9CLAA27 tanggal 30 Mei 2024;

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

1. Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sesuai LHP Nomor : T.558/ITJ.3/HP.550/XI/2023 tanggal 1 November 2023 senilai Rp1.380.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.380.000,00 dengan NTPN Nomor : 4AEF41JNFUN5IV7A tanggal 1 Februari 2024;
2. Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap Senilai Rp1.300.000,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 terdiri dari Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari PT. Sanur Putra Pertama senilai Rp500.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024 dan Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari CV. Arsa Engineering senilai Rp800.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024; Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.054.480,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.054.480,00 dengan NTPN No BDA5A1JNFUN5ISI5 tanggal 01 Februari 2024.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 berupa Denda keterlambatan Kegiatan Revitalisasi Gudang Garam Rakyat, Pembangunan Saluran/Jalan Produksi, Integrasi Lahan Pergaraman, dan Geomembran pada Kegiatan PUGAR Tahun 2023 sesuai LHP Nomor : T.555/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp31.360,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp31.360,00 dengan NTPN Nomor : 854CB55DF966QAQD tanggal 14 Maret 2024.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

1. Temuan APIP Tahun 2023 antara lain pertanggungjawaban yang melebihi SBM sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp660.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp660.000,00 dengan NTPN Nomor : F514C2G4VPF2E0E8 tanggal 14 Maret 2024 dan denda keterlambatan atas pemenuhan Output Konsultan Perencana Tidak Lengkap sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp294.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp294.000,00 dengan NTPN Nomor : 92DB148VVEJR8N6I tanggal 14 Maret 2024;
2. Temuan Tahun 2024 pada kegiatan Pembangunan GGR Tahun 2023 yaitu keurangan volume pekerjaan senilai Rp161.959,00 sesuai LHP Nomor T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 dan sudah disetor ke kas negara senilai Rp161.959,00 dengan NTPN Nomor E95B148VVEJVJVE7 tanggal 21 Maret 2024.

7. BPSPL Padang

Pada bulan Januari 2024 telah dilaksanakan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 sesuai LHP Nomor : T.44/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dimana terdapat komponen pekerjaan yang tidak terpasang yaitu saklar triple sebanyak 4 (empat) buah senilai Rp425.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp425.500,00 dengan NTPN Nomor : FDEC32G4VP9BF4C6 tanggal 23 Januari 2024.

8. LPSPL Sorong

Pada bulan Januari 2024 terdapat pengawasan berupa Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), tahun 2023 pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong (LPSPL) Sorong Provinsi Papua Barat sesuai LHP Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

1. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Papua senilai Rp2.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp2.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 87FAE48VVEE5DC6G tanggal 31 Januari 2024;
2. Terapat kelebihan pembayaran jamuan tamu senilai Rp718.080,00 dan telah ditindaklanjuti dengan bukti setor ke kas negara dengan NTPN Nomor : 045716U8EU7UNPM0 senilai Rp718.080,00 tanggal 13 Februari 2024.

9. LKKPN Pekanbaru

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN) Pekanbaru Provinsi Riau sesuai LHP Nomor : T.127/ITJ.3/HP.550/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil antara lain :

1. Pekerjaan Paving Blok pada Mess Kantor Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp713.180,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp713.180,00 dengan NTPN Nomor : 548A86U8EUBONVD tanggal 18 Maret 2024;
2. Terdapat Kurang Bayar Pungut Pajak senilai Rp1.855.653,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.855.653,00 dengan NTPN Nomor : 8480D2G4VPPF2N0A2 tanggal 18 Maret 2024;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp118.795,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp118.795,00 dengan NTPN Nomor : 03D577QLUOTD50EB tanggal 18 Maret 2024.

10. BPSPL Pontianak

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai LHP Nomor : T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 tanggal 9 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

1. Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Speedboat Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp7.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp7.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 56D342G4VPPF90RSF tanggal 22 Maret 2024;
2. Kelebihan Pertanggungjawaban Konsumsi Kegiatan/Rapat Senilai Rp1.384.600,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.384.600,00 dengan NTPN Nomor : E8F980NA04AG6SDQ tanggal 22 Maret 2024;
3. Kelebihan Pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp429.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp429.000,00 dengan NTPN Nomor : 5A2D97QLUOTJERKQ tanggal 22 Maret 2024;

4. Kelebihan Pembayaran Penggandaan Laporan senilai Rp1.348.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.348.000,00 dengan NTPN Nomor : B60AE0NA04AG6SLK tanggal 22 Maret 2024;
5. Pembayaran listrik rumah negara tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.012.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.012.500,00 dengan NTPN Nomor : 115D70NA04AG6STC tanggal 22 Maret 2024.

11. BPSPL Makassar

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Prov. Sulawesi Selatan sesuai LHP Nomor : T.152/ITJ.3/HP.110/IV/2024 tanggal 2 April 2024, dengan hasil antara lain :

1. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Mushola BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp3.209.541,00 sesuai NTPN 5C82B6U8EUAVFJD6 tanggal 20 Maret 2024
2. Kelebihan Pembayaran Bahan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut senilai Rp300.000,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp300.000,00 sesuai NTPN 5AA7C61QV3OJ6O82 tanggal 21 Maret 2024

Pada bulan November 2024 telah dilaksanakan pemantauan kegiatan HLN *Ocean for Prosperity* - LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 di BPSPL Makassar sesuai LHP Nomor B.401/ITJ.1/HP.550/XI/2024 Tanggal 23 November 2024, dengan hasil yaitu Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp4.117.600,00 dan telah di setor ke kas negara senilai Rp92.600,00 sesuai NTPN 8CDE8522A0APUM07 tanggal 26 November 2024, senilai Rp25.000,00 sesuai NTPN 01C4E6QT9LFIOM0K tanggal 26 November 2024 dan senilai Rp4.000.000,00 sesuai NTPN 691C5397AB614M2J tanggal 26 November 2024.

12. BKKPN Kupang

Pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan pemantauan pertanggungjawaban keuangan pada BKKPN Kupang TA. 2024 sesuai LHP Nomor B.327/ITJ.1?HP.550/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan hasil antara lain :

1. Terdapat Belanja Konsumsi yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp1.515.000,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp1.515.000,00 sesuai dengan NTPN D06A65UFPPV309P3 tanggal 25 Oktober 2024;
2. Terdapat Kesalahan Perhitungan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Yang Belum Diperhitungkan Dalam RAB pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKKPN Kupang senilai Rp7.892.180,00 dan telah disetor ke kas negara senilai

Rp7.892.180,00 sesuai dengan NTPN 1A2315229VC3GO3I tanggal 25 Oktober 2024;

3. Terdapat Izin Cuti Sakit dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) yang Belum Dipotong Tunjangan Kinerja senilai Rp157.181,00 dan telah di setor ke kas negaran senilai Rp157.181,00 sesuai NTPN 86E6A7NAPF38NO5L tanggal 25 Oktober 2024.

C. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPKP

Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor LAI 97/PW20/2/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas kegiatan Coremap CTI tahun 2014 dengan nilai temuan sebesar Rp123.046.000,00. Pada Tahun 2015, terdapat setoran sebesar Rp70.300.000,00 sehingga sisa temuan sebesar Rp52.746.000,00, adapun rincian tindak lanjutnya pada TA. 2024 sebagai berikut :

1. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI - 97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 6519948VVEE6IU9G tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp5.000.000,00;
2. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 5CA107QLUOQC9S6N tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp1.000.000,00;
3. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 5752D55DF96JOM7Q tanggal 28 Maret 2024 senilai Rp1.000.000,00;
4. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 54FDF7QLUP0M6CR0 tanggal 27 April 2024 senilai Rp1.000.000,00;
5. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : DCCEE7QLUP3N4J4H tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp1.000.000,00;
6. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : E88543CIFKANITOE tanggal 28 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00;

7. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 2F8467QLUPCN5BUI tanggal 30 Agustus 2024 senilai Rp1.000.000,00;
8. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : AC77361QV4ASLD8D tanggal 28 September 2024 senilai Rp1.000.000,00;
9. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN FE5B26U8EV08L7UI tanggal 29 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00; dan
10. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN B02C81JNFVKUACHP tanggal 30 November 2024 senilai Rp1.000.000.

Sedangkan Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor : LAI-2445/PW20/2/2010 tanggal 9 Juni 2010 atas kegiatan Coremap II tahun 2009 dengan nilai temuan sebesar Rp234.478.857,81 telah ditindaklanjuti sebesar Rp149.790.733,00 masih terdapat sisa temuan sebesar Rp84.688.124,00.

F.5. Jurnal Koreksi atau Reklasifikasi KKP, Kemenkeu, dan BPK RI

Pada Laporan Keuangan *Audited* 2023, terdapat beberapa jurnal koreksi internal (KKP dan Kemenkeu) serta koreksi BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sehingga terdapat jurnal manual pada Laporan Keuangan yang harus dijurnal balik ketika adanya penyetoran ke kas negara. Koreksi terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat Setditjen PRL, 4 satker UPT yaitu BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan LKKPN Pekanbaru, serta 5 satker Tugas Pembantuan. Beberapa jurnal manual yang telah dilakukan pada Tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut :

1. Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) (114112) senilai Rp26.368.232,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL;
2. Piutang Lainnya (115212) senilai Rp374.242.103,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) senilai Rp149.081.709,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;
4. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp1.131.459,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan.

F.6. Rekening Pemerintah

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.7. Pengungkapan Lain-Lain

F.7.1. Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.285/MEN-KP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Nipa Kota Batam dan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 234/MEN-KP/III/2014, dapat disampaikan bahwa mitra terpilih untuk KSP berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan perikanan seluas 24 hektar adalah perusahaan Surya Mina Asinusa KSO. Berdasarkan perjanjian KSP, jangka waktu KSP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi pemerintah dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% per tahun.

Untuk obyek KSP BMN KKP berupa tanah seluas 24 hektar adalah :

- a. Nilai kontribusi tetap tahun pertama (2014) sebesar Rp1.155.102.799,65
- b. Nilai kontribusi tetap tahun kedua (2015) sebesar Rp1.241.735.509,62
- c. Nilai kontribusi tetap tahun ketiga (2016) sebesar Rp1.334.865.672,85
- d. Nilai kontribusi tetap tahun keempat (2017) sebesar Rp1.434.980.598,31
- e. Nilai kontribusi tetap tahun kelima (2018) sebesar Rp1.542.604.143,18
- f. Nilai kontribusi tetap tahun keenam (2019) sebesar Rp1.658.299.453,92
- g. Nilai kontribusi tetap tahun ketujuh (2020) sebesar Rp1.782.671.912,96
- h. Nilai kontribusi tetap tahun kedelapan (2021) sebesar Rp1.916.372.306,44
- i. Nilai kontribusi tetap tahun kesembilan (2022) sebesar Rp2.060.100.229,42
- j. Nilai kontribusi tetap tahun kesepuluh (2023) sebesar Rp2.214.607.746,63
- k. Nilai kontribusi tetap tahun kesebelas (2024) sebesar **Rp1.190.351.664,00**
- l. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP BMN di Pulau Nipa sebesar Rp119.436.939.332,00

Pada tahun 2024 ini, KKP bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai surat Nomor B.192/MEN-SJ/KU.530/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Permohonan Faktor Penyesuai atas Besaran Kontribusi Tetap Pulau Nipa. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara, pada prinsipnya keringanan tersebut dapat disetujui.

Besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan faktor penyesuai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025. Dalam hal ini pada tahun 2024 seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.380.703.328,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.190.351.664,00. Sementara untuk tahun 2025 nanti seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.559.256.077,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.279.628.039,00.

Dengan adanya keringanan pembayaran kontribusi tetap pada tahun 2024 dan 2025, maka diperlukan penyesuaian nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP P. Nipa yang sebelumnya senilai Rp119.436.939.332,00. Penyesuaian angka tersebut akan mempengaruhi nilai Piutang Jangka Panjang pada Laporan Keuangan akhir tahun 2024 yang akan dilakukan pada periode Semester II 2024.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi pembagian keuntungan KSP BMN KKP di Pulau Nipa sebesar 6,95% dari *net cash flow* per tahun, dengan nilai minimal sebesar Rp1.414.905.240,00. Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi dalam bentuk hibah barang untuk KKP adalah berupa bangunan kantor terintegrasi, *speedboat* dan *furniture*/peralatan kantor senilai Rp5.200.000.000,00.

Kontribusi langsung kepada negara berupa sisa aset berupa bangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir KSP untuk KKP senilai Rp1.704.073.842.605,00. Berdasarkan Surat Plt. Dirjen PRL Nomor B.2410/DJPRL/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Hal Tanggapan atas Permohonan Adendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa yang diajukan oleh Pimpinan Surya Mina Asinusa (SMA) KSO, Ditjen PRL menyampaikan bahwa :

1. KSP BMN di Pulau Nipa Kota Batam antara KKP dan SMA KSO telah mendapat catatan BPK dalam Laporan Keuangan KKP karena dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi *profit sharing* sesuai perjanjian, khususnya terkait hak

Negara berupa hibah bangunan kantor terintegrasi dan *furniture*/peralatan kantor yang seharusnya diserahkan oleh SMA KSO;

2. Telah dilakukan pertemuan pada tanggal 14 September 2021 di KKP yang turut dihadiri oleh pihak Kemhan, Kemenkeu, dan pihak SMA KSO dalam rangka pembahasan tindak lanjut permohonan addendum kedua perjanjian KSP Pulau Nipa, Kota Batam;
3. Merujuk pada hasil pertemuan tersebut pada poin 2 di atas, maka permohonan Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa untuk perpanjangan masa konstruksi belum dapat disetujui, masih menunggu penyelesaian penyusunan model bisnis oleh pihak SMA KSO.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022, dilakukan rapat Pokja Gabungan Pulau Nipa yang dipimpin oleh Plt. Dirjen PRL dan dihadiri oleh Direktur P4K, perwakilan dari Baranahan-Kemhan, perwakilan Direktorat PKNSI DJKN-Kemenkeu, Inspektorat III KKP, Bapak Wing Indrasgoro (Authorized Representative SMA KSO), PT. Surya Mina Bunkerindo diwakili oleh Direktur Utama PP Energi (Bapak Ario Setyawan beserta tim), diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO akan menyerahkan secara resmi dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* melalui surat kepada KKP dan Kemhan
2. Pembahasan dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* oleh KKP, Kemhan dan Kemenkeu secara paralel dilakukan setelah diterimanya dokumen secara resmi
3. Dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa perlu ditambahkan penjelasan dan ilustrasi tentang *profit sharing* dan *revenue sharing* beserta kelebihan masing-masing, serta informasi tentang biaya investasi (*investment cost*) dan biaya operasional dan pemeliharaan (*overhead*)
4. Addendum kedua KSP Pulau Nipa mempertimbangkan Surat Persetujuan Menkeu Tahun 2013 dan mengacu pada PMK Nomor 115 Tahun 2020 serta KMK Nomor 213 Tahun 2021
5. Addendum Kedua KSP Pulau Nipa disetujui berdasarkan hasil pembahasan KKP, Kemhan, dan Kemenkeu atas Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa, Kota Batam

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022, dilakukan rapat Pembahasan Kajian Model Bisnis *Oil Storage* Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, yang dihadiri oleh Direktur P4K, PELP Ahli Utama Ditjen PRL, Perwakilan dari Pusat BMN-KEMHAN, Surya Mina Asinusa KSO (Bapak Ario Setyawan dan Tim, Bapak Satrio Mursandhi dan Tim), diperoleh Kesepakatan Rapat sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO sudah menyusun Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* di Pulau Nipa namun masih menunggu proses persetujuan dari Dewan Direksi PT. PP (Persero) Tbk.
2. Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* dalam KSP Pulau Nipa akan dibahas secara final dengan KKP dan Kemhan pada minggu kedua April 2022.

Selain itu berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tanggal 01 Agustus 2022 Nomor B.3978/DJPRL/VIII/2022 terkait Penyesuaian Model Bisnis Kerjasama Pemanfaatan Sebagian BMN KKP di Pulau Nipa, Kota Batam, disampaikan hal-hal berikut :

1. KSP Pulau Nipa didasarkan pada surat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-502/MK.6/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam dan Perjanjian KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam antara MKP dan Direktur Surya Mina Asinusa KSO.
2. Hal-hal yang menjadi substansi persetujuan Menteri Keuangan tersebut termasuk :
 - a. Nilai buku aset yang dikerjasamakan;
 - b. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - c. Besaran kontribusi tetap per tahun dan persentase kenaikannya;
 - d. Besaran pembagian keuntungan (*profit sharing*) minimal per tahun;
 - e. Asumsi besaran nilai investasi;
 - f. Batas waktu pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta denda keterlambatannya.
3. Mengingat bahwa beberapa poin usulan penyesuaian model bisnis dan addendum, perjanjian KSP Pulau Nipa menyangkut masa operasi, nilai investasi, kontribusi tetap, profit sharing, nilai sisa aset, dan jangka waktu KSP yang menjadi kewenangan Kemenkeu, maka hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN;
4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, mengingat bahwa persetujuan penyesuaian model bisnis oleh Kementerian Keuangan ini menjadi prasyarat bagi dilakukannya Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa-Kota Batam, maka dimohon kepada pihak SMA KSO untuk menyiapkan hasil kajian dan data dukung argumentasi permohonan penyesuaian model bisnis KSP Pulau Nipa dimaksud;
5. Terkait permohonan penangguhan kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Desember 2022, disampaikan bahwa :

- a. berdasarkan Akta Perjanjian KSP Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014, Pihak SMA KSO wajib memberikan jaminan pelaksanaan salah satunya berupa jaminan kontribusi tetap yang diperbarui setiap tahun selama jangka waktu kerjasama pada tanggal 1 April pada tahun berjalan, dimana untuk tahun 2022 nilainya adalah sebesar 100% dari nilai kontribusi tetap tahun 2022;
- b. mengingat bahwa Pihak SMA KSO tidak menyampaikan jaminan kontribusi tetap tahun 2022, dan kondisi pandemi COVID-19 sudah menurun dan terkendali, maka KKP tidak dapat memberikan penangguhan kewajiban dimaksud dan meminta pihak SMA KSP segera memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 serta menyampaikan jaminan kontribusi tetap Tahun 2023 sesuai Pasal 15 Akta Perjanjian KSO Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014.



Gambar F.1 Proyek Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa

Pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat surat Surya Mina Asinusa KSO perihal Usulan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Nomor : 013/SMAC/VIII/2023 yang pada garis besar berisi permasalahan yang dihadapi KSO yang mengakibatkan terhentinya progres pembangunan di Pulau Nipa, serta adanya penyesuaian investasi yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perjanjian KSP Pulau Nipa melalui Amandemen Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa diantaranya yaitu meminta tambahan waktu selama 6 (enam) tahun.

Setelah itu, terdapat hasil rewiu dari Inspektorat III KKP Nomor : T.489/ITJ.3/HP.350/IX/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Hasil Reviu Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam. Rekomendasi dari

hasil revidi tersebut yaitu agar Direktur Jenderal PKRL menginstruksikan secara tertulis kepada :

1. Tim Pokja Gabungan Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa untuk menyusun draft Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa setelah mendapat persetujuan perubahan KSP sebagian BMN KKP berupa tanah di Pulau Nipa, Kota Batam dari Menteri Keuangan dan
2. Pihak Surya Mina Asinusa KSO untuk melengkapi : (a) Laporan keuangan KSO yang diaudit oleh auditor independen selama 3 (tiga) tahun terakhir dan (b) SPTJM oleh KSO meliputi kebenaran formil dan materil atas permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap dan laporan keuangan, guna pemenuhan persyaratan persetujuan faktor penyesuaian pembayaran kontribusi tetap.

F.7.2. BMKT (Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam)

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, BMKT adalah salah satu bentuk benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, serta tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun. Melalui UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, maka BMKT secara filosofis tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi kawasan di air sebagai kesatuan setelah melalui proses penetapan. Secara sosiologis juga telah mencakup aturan kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. secara yuridis mengatur hal yang terkait dengan pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan melalui zonasi dalam kawasan cagar budaya.

Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pelayaran dunia sejak dahulu, menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi memang tidak mengejutkan ketika kapal tenggelam dan muatannya (BMKT) banyak ditemukan terdeposit di perairan nusantara. Berdasarkan estimasi ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan Bangka-Belitung, Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi dan barang dari Cina, Asia Barat dan Eropa seperti Belanda (VOC), Inggris, Spanyol. Kekayaan laut termasuk Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

BMKT memiliki nilai yang kompleks, tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan

hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT. Saat ini, Indonesia memiliki potensi peninggalan *shipwrecks* yang tinggi. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US\$ 80 ribu - 18 juta dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan US\$ 800 – 126,000/bulan/lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari Pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai negara maritim.



Gambar F.2 Galeri BMKT, GMB IV, KKP

Sebagai kekayaan bahari, pengawasan pengelolaan BMKT terus ditingkatkan. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), dalam jangka pendek melakukan percepatan penyusunan strategi pengawasan terpadu pada BMKT dan melaksanakan pengawasan terpadu, antar lembaga, seperti TNI-AL dan POLRI. Selain itu, pengawasan BMKT juga akan diintegrasikan dengan pengawasan *illegal fishing*. Koordinasi cepat pun dilakukan dengan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) terkait BMKT, kebijakan dan rencana pengelolaannya ke depan. Selain rencana jangka pendek, pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang bagi pengelolaan BMKT. Sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dilakukan lebih dalam, terutama mengenai *shifting policy* pengelolaan BMKT menjadi pengangkatan BMKT akan ditangani langsung oleh negara, sekaligus langkah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga potensi BMKT. Tahap selanjutnya

adalah menyusun rencana keterlibatan pemerintah lokal maupun masyarakat dalam pengelolaan BMKT.



Gambar F.3 Kegiatan *Update Geotagging* BMKT di *Warehouse*, Cileungsi

Dimulai tahun 2016 Direktorat Teknis yang menangani BMKT pindah dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Direktorat Jasa Kelautan. Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) disimpan dan dikuasai oleh KKP dengan rincian yang disajikan pada Tabel F.1.

Tabel F.1. Tabel BMKT Disimpan dan Dikuasai KKP

No	Pengangkatan BMKT	Jumlah (buah) *Data inventarisasi terpadu PANNAS BMKT	Lokasi Penyimpanan	Status	Nilai SIMAK BMN	Pencatatan BMN
1.	Laut Jawa Utara Cirebon	122,025	Cileungsi dan MHG	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pemerintah - Sedang dihitung ulang nilai pada bagian pemerintah, karena nilai tsb adalah nilai total taksasi sebelum BMKT dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian 	Th 2020: Rp. 872.944.768 1.179 keping	Maret 2022: Rp. 104,422,110 1.370 keping
2.	Pulau Buaya	11,171	Cileungsi dan MHG	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pemerintah - Diusulkan PSP - Telah dilakukan penilaian 	Belum PSP BMN, proses melengkapi data	

3.	Belitung / Tuban	15,353	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian	Th. 2020: Rp.54.981.186 821 keping	Maret 2022: Rp.1.199,862,163 862 keping
4.	Jepara	14,093	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
5.	Karang Heluputan	10,504	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
6.	Teluk Sumpat	17,243	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
7.	Ujung Pamanukan	44,506	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
8.	Karawang	7,759	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
9	Belitung Timur	32,816	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
10	Karang Cina	29,736	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
11	Blanakan	13.149	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
12	Batu Belobang	10,221	Batam	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
13	Kijang	177	Batam	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
TOTAL		328.753				

BPK-RI merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan kepada KPB, supaya segera mencatat Aset Tetap BMKT sebanyak 135.378 keping ke dalam SIMAK BMN. Sebagai tindak lanjut atas Temuan BPK-RI tersebut di atas, PKPB Direktorat Jasa Kelautan sudah melakukan pencatatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 135.378 keping pada Modul Aset Tetap (Aplikasi SAKTI) progres 100%, Penatausahaan pada plugin wasdal (PSP BMKT) sejumlah 137.378 NUP dengan progres 100%, dan Penatausahaan pada Master Aset (foto geotagging) sejumlah 109.786 NUP dengan progres 80%.

F.7.3. Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal PKRL mempunyai anggaran awal sebesar Rp74.810.000.000,00 untuk belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang direvisi sehingga menjadi sebesar Rp72.270.060.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.117.097.115,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp11.102.685,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp71.105.994.430,00. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat lima akun belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yaitu :

- a) Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112)
- b) Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113)
- c) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526114)
- d) Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115)
- e) Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526311)

Rincian realisasi MAK 526 telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LRA. Rincian saldo akhir dari MAK 526 yang terdapat pada neraca dapat dilihat pada penjelasan CaLK Neraca. Rincian beban MAK 526 atau yang telah diserahkan berdasarkan BAST, telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LO. Sementara rincian belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dijelaskan pada Laporan BMN bagian Persediaan per 31 Desember 2024.

F.7.4. Belanja dalam rangka Penanganan Dampak Wabah Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. Salah satu kebijakan Pemerintah yang dilakukan adalah merevisi APBN/APBD TA. 2021 dan 2022 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi Covid-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus Covid-19 semestinya digunakan s.d Semester I 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Penggunaan Akun Khusus Covid-19, seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga termasuk Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak lagi menggunakan akun belanja khusus Covid-19 mulai Semester II tahun 2023 dan TA. 2024 ini. Bagi Satuan Kerja yang masih memiliki akun Covid-19 dan yang telah menggunakan akun belanja khusus Covid-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku dan panduan *mapping* dari akun belanja khusus Covid-19 ke akun reguler.

Pada TA. 2024 awalnya terdapat dua akun terkait Penanganan Pandemi Covid-19 yang hanya terdiri dari Belanja Barang. Pagu belanja Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp0,00 dari anggaran semula Rp23.000.000,00 dengan realisasi 0,00 atau 0%. Pagu awal belanja akun Covid-19 tersebut terdapat pada akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) yang hanya terdapat pada satu satker yaitu satker pusat Setditjen PKRL. Rincian belanja pada akun ini awalnya direncanakan berupa pengadaan masker dan *hand sanitizer*, pembelian vitamin, dan penambah daya tahan tubuh.

F.7.5. Program Prioritas Nasional 2024

Program Prioritas Nasional [PN] Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tersaji pada aplikasi MonSakti. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Monev PA OmSPAN milik Bappenas-Kemenkeu dan telah dilakukan analisis terhadap RO yang terkait DJPKRL diketahui terdapat realisasi Program PN senilai Rp253.723.604.897,00 atau 55,07% dari pagu anggaran senilai Rp460.766.097.000,00. Persentase realisasi tergolong kecil jika dibandingkan dengan kegiatan Non Prioritas Nasional dimana realisasi sebesar Rp215.071.844.837,00 atau 96,32% dari pagu anggaran senilai Rp223.287.147.000,00. Realisasi Program PN terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan seluruh satker Tugas Pembantuan sejumlah 34 satker, sehingga seluruh satker telah merealisasikan program PN untuk tahun 2024 ini.

Selanjutnya pada data menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional terbesar untuk seluruh satker lingkup Ditjen PKRL terdapat pada dua satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Prov. Papua dan Dinas KP Prov. Papua Barat yaitu 100% sementara yang terkecil yaitu satker Setditjen PKRL sebesar 47.36%. Untuk tingkat UPT yang tertinggi yaitu LKKPN Pekanbaru sebesar 98,65% sementara yang terendah yaitu BPSPL Denpasar senilai 85,70%.

Untuk realisasi Prioritas Nasional per Kegiatan yang terbesar yaitu kegiatan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebesar 99,97% dan Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN sebesar 99,96%. Sementara untuk realisasi terkecil yaitu pada kegiatan NSPK Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 64,74% dan Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU) belum realisasi sama sekali atau 0% dengan pagu anggaran sebesar Rp187.100.000.000,00. Adapun rincian realisasi atas Program Prioritas Nasional [PN] DJPKRL Tahun 2024 per satker per kegiatan terdapat pada Lampiran.

F.7.6. Capaian Output Ditjen PKRL Tahun 2024

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Capaian output pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah bagian dari pelaporan data yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaporan ini bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas. Pelaporan data capaian output juga merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang capaian output pada aplikasi SAKTI :

- Pengisian capaian output wajib dilakukan setiap bulan sebelum melakukan tutup buku;

- Pengisian capaian output tidak bersifat akumulatif;
- Satker yang belum pernah merekam capaian output harus melakukan perekaman mulai dari bulan Januari dengan nilai capaian per bulan.

Seluruh satker telah menginput capaian output pada aplikasi SAKTI. Terdapat 477 jumlah output pada DIPA dengan yang terkonfirmasi sejumlah 477 atau 100% (rincian terdapat pada lampiran). Jumlah capaian output terkonfirmasi yang terbesar pada satker lingkup Ditjen PKRL terdapat pada satker Setditjen PKRL sejumlah 63 capaian output, khusus UPT yang terbesar terdapat pada satker BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, dan LPSPL Sorong sejumlah 23 capaian output, sementara pada Tugas Pembantuan yang terbesar terdapat pada satker Dinas KP Prov. Aceh sejumlah 10 capaian output.

F.7.7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Proyek *Ocean for Prosperity* - LAUTRA bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan Konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Adapun lokasi yang menjadi daerah sasaran proyek ini terdiri dari 11 Provinsi (20 Kawasan Konservasi dengan rincian : 8 Kawasan Konservasi Nasional, 7 Kawasan Konservasi Daerah, dan 5 Kawasan Konservasi Baru) dan 3 WPPNRI (714, 715, dan 718) dengan rincian :

- 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4) Provinsi Sulawesi Utara
- 5) Provinsi Gorontalo
- 6) Provinsi Sulawesi Tengah
- 7) Provinsi Sulawesi Selatan
- 8) Provinsi Maluku
- 9) Provinsi Maluku Utara
- 10) Provinsi Papua
- 11) Provinsi Papua Barat

LAUTRA akan didukung komponen pembiayaan pinjaman dan hibah dari Bank Dunia. Untuk mencapai tujuan proyek, kegiatan LAUTRA dirancang dan dilaksanakan melalui 4 komponen. LAUTRA akan dibiayai melalui *Investment Project Financing (IPF)*. Total pembiayaan sebesar US\$ 210 juta, terdiri dari pinjaman dan hibah. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* memberikan pinjaman sebesar US\$ 200 juta. *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund (MDTF)* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5

juta, dan *Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources (OCEANS) Multi-Donor Trust Fund* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5 juta. Kegiatan akan berlangsung selama 60 bulan (5 tahun) dari tahun 2023 s.d 2028 (3 tahun khusus HLN Blue Finance).

Pada tahun 2023, terdapat alokasi anggaran Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA* sebesar Rp100.000.000,00 pada Komponen 2362.REA.002.055 PHLN INSAN TERANG - LAUTRA untuk mendukung Komponen 1. Namun, anggaran PHLN tersebut mengalami pemblokiran oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dikarenakan belum terbitnya *Loan Agreement (LA)* dan *Grant Agreement (GA)* antara Pemerintah Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* di awal tahun 2023 dan belum adanya Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA TA 2023*.

Berikut disampaikan kronologis rencana penarikan anggaran *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA* :

1. Penerbitan Rekening Khusus untuk :
 - Pinjaman LAUTRA No IBRD 9498 ID dengan nomor 601353411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-299/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Pinjaman untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Hibah LAUTRA TF C0495 dengan nomor 602205411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-300/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Rencana Kerja Tahunan atau *Annual Work Plan (AWP)* Tahun 2023 mengalami penyesuaian rincian kegiatan dan anggaran sesuai dengan Arahan Pimpinan berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan *Ocean for Prosperity Project - Lautra* tanggal 18 Agustus 2023, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses untuk pengajuan Surat persetujuan anggaran atau *No Objection Letter (NOL)* dari *World Bank (WB)*;
3. *World Bank (WB)* telah menyampaikan persetujuan anggaran atau *No Objection Letter (NOL)* untuk revisi AWP Tahun 2024 *Ocean for Prosperity Project - Lautra* berdasarkan Surat World Bank tanggal 21 Desember 2023 perihal *No Objection to the Revised Annual Work Plan 2024 Ocean for Prosperity (LAUTRA) Project*;

4. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Usulan Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 antara Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 terkait penambahan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA TA. 2023.

Progres terakhir dari kegiatan ini yaitu mengusulkan pengajuan dokumen *Clearance* melalui Nota Dinas ke Sekretariat Jenderal KKP serta proses usulan revisi percepatan penarikan anggaran (target akhir Juli).

Selain itu juga terdapat Pinjaman dari Kredit Swasta Asing (KSA) kegiatan *Development of the System for Monitoring and Controlling of Marine Space Utilization (MSU)* senilai USD 80 Juta selama 2 tahun (2024 s.d 2025). Kegiatan ini mencakup 5 kawasan yaitu Batam, DKI Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Progres terakhir diantaranya yaitu :

- Mengirimkan permohonan perpanjangan PSP kepada Menteri Keuangan
- Koordinasi dan permintaan fatwa terkait mekanisme pengadaan Barang dan Jasa Project MSU
- Berkoordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PKRL, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Itjen terkait *exit strategy* dan penempatan alat pasca pengadaan barang/jasa MSU
- Berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait *clearance project* MSU

Selain itu juga terdapat Hibah Langsung berbentuk Jasa sesuai dengan BAST yang ditandatangani antara Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut KKP dan USAID Indonesia pada 27 Februari 2024 untuk program USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif) dalam kerangka kerja sama hibah *Grant Implementation Agreement (GIA) on Marine and Fisheries Portfolio (MFP)* tahun 2022-2027 sejumlah USD1.015.143 atau setara dengan Rp15.800.713.582,00. Hibah dengan Nomor Register 23D5SAMA telah mendapat Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Nomor 816598104909754891 tanggal 3 Mei 2024.

Khusus terkait dengan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang bersumber dari kegiatan Lautra telah dijelaskan secara detail pada Laporan PHLN proyek Lautra untuk satker lingkup Ditjen PKRL TA. 2024.

F.7.8. Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Terdapat pada Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk :

- a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut dan
- b) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikecualikan pada :

- a) daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
- b) wilayah izin usaha pertambangan;
- c) alur pelayaran; dan
- d) zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi

Sedangkan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada zona inti kawasan konservasi dilakukan oleh unit organisasi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan.



Gambar F.4 Bagan Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan (oleh Tim Kajian)
- Penetapan Dokumen Perencanaan (Kepmen KP) (lokasi prioritas dan volume)
- Pengumuman MKP (15 hari)
- Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (proposal volume + dokumen PKKPR yang dimohonkan)

- Verifikasi dan evaluasi (oleh tim uji tuntas)
- Persetujuan MKP
- Permohonan OSS (Izin Pemanfaatan Pasir Laut)
- PKKPR
- Izin Pemanfaatan Pasir Laut Terbit
- Pemenuhan perizinan lain (persetujuan lingkungan, IUP penjualan, persetujuan ekspor, perizinan kapal/PPKA)
- Laporan Mulai Bekerja
- Operasional Pembersihan Sedimen
- Laporan pengangkutan dan penempatan per Bulan
- Pembayaran PNBP Lanjutan

F.7.9. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Strategi utama dari kegiatan konservasi yaitu perluasan Kawasan Konservasi KK dan pengelolaan efektif kawasan konservasi dan jenis. Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia saat ini mencapai 29,3 Juta Ha. Kawasan konservasi seluas 30% yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan produksi oksigen, menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi ekosistem penting perairan dan stok karbon. Strategi pencapaian perluasan kawasan konservasi diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Regulasi dan SOP yang memperketat perlindungan KK
2. Memperluas KK yang Proporsional
3. Membangun Sistem Monitoring berbasis Teknologi
4. Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi
5. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
6. Memperluas Insentif/partisipasi dalam pengelolaan KK

Penggunaan PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konservasi diantaranya yaitu :

- a. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyebaran Informasi dan Regulasi terkait Pelayanan Perijinan Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi untuk Penyadartahuan Stakehlder terka dan Peningkatan Kepatuhan Stakeholder terkait terhadap layanan perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Perijinan terintegrasi dengan target *updating* dan *maintenance* menu aplikasi pelayanan dalam optimalisasi pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi serta Implementasi Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- c. Kegiatan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyusunan Revisi 2 Permen KP dan 6 Kepdirjen serta Penyusunan Bahan Sosialisasi dan Publikasi

F.7.10. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel dan Pipa Bawah Laut

Sampai saat ini, kondisi penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib, dan belum tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Kondisi penggelaran pipa/kabel bawah laut yang tidak teratur, akan menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, dan kegiatan lainnya. Semrawutnya pipa dan kabel bawah laut dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut dan menyebabkan Pemerintah kesulitan dalam mengontrol penggelaran kabel dan pipa bawah laut. Sebagai upaya terobosan, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional (Timnas) Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis. Tugas Timnas ini salah satunya melakukan penataan koridor penggelaran pipa dan kabel bawah laut. Pada awalnya, Timnas Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut ditetapkan dengan Kepmenko Marvest, sebagaimana terakhir telah diubah melalui Kepmenko Nomor 124/DII Tahun 2022 tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang merupakan salah satu terobosan nyata pemerintah dalam menangani permasalahan semrawutnya kabel bawah laut. Dalam Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, dilampirkan Peta dan daftar koordinat sebagai arahan penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berupa 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut dan 209 BMH (*Beach Main Hole*), termasuk 4 lokasi *Landing Stations* yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura. Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi, yang berfungsi sebagai alas/dasar dalam penerbitan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Berdasarkan Pasal 113 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, penggelaran SKKL merupakan jenis kegiatan yang sifatnya menetap sehingga wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dasar penentuan tarif PNBP untuk perijinan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut telah diterbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

Gambar F.5 Jenis PNBP PKKPR L Kabel dan Pipa Bawah Laut

KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut yang ditujukan untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan penggelaran SKKL. Untuk itu, dilakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL. Kegiatan penggelaran SKKL yang terbukti terjadi pelanggaran, diantaranya tidak memiliki, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas instalasi dan bangunan di laut, KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

F.7.11. Properti Investasi

Berdasarkan konsep hasil temuan BPK-RI Nomor 52/KKP/LK-KKP/04/2024 tanggal 23 April 2024 terkait Aset Properti Investasi pada Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai, yaitu berupa Aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa NUP 4 seluas 24 Ha dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 pada Ditjen PKRL Satker Sekretariat Ditjen PKRL. Pada periode 14 *Audited* 31 Desember 2023 belum dicatat sebagai Properti Investasi dikarenakan pada hasil pembahasan pada rapat Tripartid yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 disepakati untuk pencatatan Properti Investasi senilai Rp110.346.287.172,00 dan dilakukan pencatatan pada Semester I Tahun 2024. Pertimbangannya dikarenakan Aset Tanah yang direklasifikasikan menjadi Properti Investasi adalah bagian dari saldo Kemitraan Pihak Ketiga senilai Rp214.231.398.172,00, selain Aset Tanah senilai Rp110.346.287.172,00 terdapat aset lain yaitu Bangunan Lainnya (Prasasti) NUP 1 senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi NUP 1 senilai Rp13.121.507.000,00 dan Tanggul Keliling NUP 1 senilai Rp90.754.497.000,00, sehingga sisa aset bagian dari Kemitraan Pihak Ketiga agar lebih tepat dicatat, jika tidak menjadi bagian PI, maka perlu dilakukan inventarisasi/identifikasi di lapangan dengan Tim dari Biro Keuangan KKP, Tim dari Kemenkeu sebagai Pengelola Barang, Tim dari Inspektorat Jenderal KKP, untuk dilakukan Asersi Manajemen, selanjutnya untuk dituangkan ke dalam Kertas Kerja.

F.7.12. Koreksi Audited

Berdasarkan hasil koreksi untuk Laporan Keuangan periode Tahunan 2024 *Audited*, terdapat perubahan nilai pada beberapa akun yang terdapat pada tujuh satker yaitu satu satker pusat Setditjen PKRL, empat satker UPT yaitu BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, dua satker Tugas Pembantuan Dinas KP Prov. NTB dan Dinas KP Prov. Gorontalo (rincian koreksi, satker, akun, dan nilai terlampir).

Terdapat 13 akun yang secara akrual mengalami perubahan karena adanya koreksi *Audited* dengan rincian : (1) Piutang Lainnya (115212), (2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212), (3) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) pada lima satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar,

BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong, (4) Barang Konsumsi (117111) dan (5) Beban Persediaan Konsumsi (593111) hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB, (6) Beban Perjalanan Dinas Biasa (524211) pada empat satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong, (7) Beban Perjalanan Dinas Biasa Paket Meeting Luar Kota (524119) hanya pada satker BPSPL Denpasar, (8) Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) dan (9) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) hanya terdapat pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo, (10) Pendapatan Perizinan Lainnya (425259), (11) Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri (524219), (12) Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (593122), dan (13) Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (593124) yang hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL.

Pada satker Setditjen PKRL terdapat tujuh koreksi pada LK *Audited* yang dirangkum dalam enam temuan dengan rincian :

- 1) Pembentukan piutang koreksi BPK atas izin pelaksanaan reklamasi yang menghasilkan PNBPN dengan pembayaran melewati Tahun Anggaran 2024 oleh BUT EMP Gebang Limited dengan total Rp2.488.353.852,00. Pembayaran dilakukan dengan empat tahap dimana tiga tahap telah dibayarkan pada tahun 2024, sementara sisanya dibayarkan pada tanggal 22 April 2025 senilai Rp622.088.463,00 dengan NTPN Nomor : 5A20161QVD5MR9AI;
- 2) Pembentukan piutang koreksi BPK atas izin pelaksanaan reklamasi yang menghasilkan PNBPN dengan pembayaran melewati Tahun Anggaran 2024 oleh PT. Vesinter Indonesia dengan total Rp9.564.232.305,00. Pembayaran dilakukan dengan tiga tahap dimana satu tahap telah dibayarkan pada tahun 2024, sementara sisanya dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2025 senilai Rp3.825.692.922,00 dengan NTPN Nomor : AE9C17QLV24IKI61 dan rencana pada bulan Juli 2025 senilai Rp3.825.692.922,00, sehingga total yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp7.651.385.844,00;
- 3) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal, Kontrak Nomor SPK.129/PPK-JK/PL.450/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 senilai Rp423.850.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp31.401.720,00;
- 4) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon, Kontrak Nomor SPK.73/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 senilai Rp3.446.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai

kontrak senilai Rp9.410.217,00. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 28 April 2025 senilai Rp9.410.217,00 dengan NTPN Nomor : 064C748VVO17VIJD;

- 5) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pengadaan Bangunan dan Mesin Washing Plan Bima, Kontrak Nomor SPK.66/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Senilai Rp10.730.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp207.104.577,20;
- 6) Pembentukan piutang Koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban kegiatan LAUTRA yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp13.623.846,00 berupa pertanggungjawaban tidak didukung bukti pengeluaran yang sah senilai Rp1.544.700,00 dan pertanggungjawaban melebihi SBM TA 2024 dan/atau bukti riil senilai Rp7.294.845,00.

Pada satker BPSPL Denpasar terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Lautra Tahun 2024 senilai Rp469.400,00 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2025 dengan NTPN Nomor : 3738E5UFSEMQ9M8G.

Pada satker BKKPN Kupang terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja senilai Rp580.000,00 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN Nomor : 820250311369438.

Pada satker LPSPL Sorong terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat realisasi Keuangan Kegiatan PLN Lautra Tahun 2024 senilai Rp816.534.875,00 yang Belum Memenuhi Kaidah Pertanggungjawaban dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 6 Februari 2025 senilai Rp305.126,00 dengan NTPN Nomor : 270B83CIFT5VU3RQ.

Pada satker BPSPL Makassar terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban Keuangan senilai Rp1.000.000,00 tidak sesuai ketentuan dan telah dilakukan pembayaran dengan NTPN Nomor : BE2C53CIFT5VRQPK.

Pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas hasil revidi Itjen yaitu terdapat kesalahan dalam perekaman dari BAST persediaan pada Modul Komitmen berupa kesalahan input volume dan satuan harga barang berupa tinta Epson sehingga menimbulkan Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp35.607.312.600,00.

Pada satker Dinas KP Prov. Nusa Tenggara Barat terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP yaitu terdapat transaksi habis pakai Barang Konsumsi yang dilakukan pada periode 14 senilai Rp290.000,00.

LAMPIRAN DAN DAFTAR



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

A. LAPORAN MODUL GLP SAKTI



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

Laporan Realisasi Anggaran Eselon I



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07**

Tgl Data : 14/05/25 8:13 AM
Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	684,053,244,000	471,154,781,232	(212,898,462,768)	68.88	413,612,996,000	399,297,824,951	(14,315,171,049)	96.54
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

II

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Jenis Belanja / Akun



#2024
KKP BEYOND



DJKRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36,890,548,000	35,647,419,000	35,638,068,100	19,124,550	35,618,943,550	99.92	28,475,450
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,045,000	694,000	528,678	24,345	504,333	72.67	189,667
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,668,037,000	2,604,539,000	2,603,923,170	0	2,603,923,170	99.98	615,830
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	975,642,000	743,950,000	743,253,958	0	743,253,958	99.91	696,042
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	531,408,000	442,600,000	442,600,000	1,620,000	440,980,000	99.63	1,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,913,634,000	4,160,076,000	4,003,206,000	2,745,000	4,000,461,000	96.16	159,615,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	128,478,000	358,310,000	356,869,947	0	356,869,947	99.6	1,440,053
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,039,079,000	1,887,222,000	1,883,354,520	0	1,883,354,520	99.8	3,867,480
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,215,209,000	3,525,606,000	3,455,240,000	0	3,455,240,000	98	70,366,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	201,089,000	199,275,000	199,275,000	0	199,275,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	843,800,000	751,050,000	748,925,000	3,700,050	745,224,950	99.22	5,825,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	54,407,969,000	50,320,741,000	50,075,244,373	27,213,945	50,048,030,428	99.46	272,710,572
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	383,417,000	1,911,392,000	1,908,280,800	0	1,908,280,800	99.84	3,111,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,049,000	67,000	38,290	0	38,290	57.15	28,710
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	33,358,000	116,517,000	116,188,560	0	116,188,560	99.72	328,440
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,198,000	25,489,000	25,335,416	0	25,335,416	99.4	153,584
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60,740,000	198,320,000	177,770,000	0	177,770,000	89.64	20,550,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,242,000	100,302,000	100,012,020	0	100,012,020	99.71	289,980
511628	Belanja Uang Makan PPPK	78,836,000	253,267,000	244,909,000	0	244,909,000	96.7	8,358,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	6,100,000	9,350,000	9,350,000	0	9,350,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	603,940,000	2,614,704,000	2,581,884,086	0	2,581,884,086	98.74	32,819,914
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,074,879,000	1,291,531,000	1,278,645,000	0	1,278,645,000	99	12,886,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	26,282,000	22,228,000	0	22,228,000	84.57	4,054,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,074,879,000	1,317,813,000	1,300,873,000	0	1,300,873,000	98.71	16,940,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	54,913,976,000	55,687,725,000	55,600,522,257	5,540,915	55,594,981,342	99.83	92,743,658
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	537,269,000	2,559,904,000	2,548,930,390	0	2,548,930,390	99.57	10,973,610
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	55,451,245,000	58,247,629,000	58,149,452,647	5,540,915	58,143,911,732	99.82	103,717,268
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	111,538,033,000	112,500,887,000	112,107,454,106	32,754,860	112,074,699,246	99.62	426187754
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15,586,186,000	9,554,389,000	9,330,589,362	317,370	9,330,271,992	97.65	224,117,008

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:49 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	122,603,000	92,749,000	89,996,169	0	89,996,169	97.03	2,752,831
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,407,640,000	2,193,544,000	2,119,324,000	314,100	2,119,009,900	96.6	74,534,100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	816,167,000	1,001,695,000	960,897,135	0	960,897,135	95.93	40,797,865
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	19,935,596,000	12,842,377,000	12,500,806,666	631,470	12,500,175,196	97.34	342,201,804
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	34,103,703,000	39,458,168,000	38,129,689,752	2,505,000	38,127,184,752	96.63	1,330,983,248
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,598,524,000	3,029,083,000	2,598,748,000	300,000	2,598,448,000	85.78	430,635,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	594,866,000	713,473,000	694,644,502	0	694,644,502	97.36	18,828,498
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	67,980,000	149,221,000	148,994,003	0	148,994,003	99.85	226,997
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	39,385,073,000	43,349,945,000	41,572,076,257	2,805,000	41,569,271,257	95.89	1,780,673,743
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,159,270,000	936,877,000	932,048,540	0	932,048,540	99.48	4,828,460
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	3,224,000	464,000	464,000	0	464,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,162,494,000	937,341,000	932,512,540	0	932,512,540	99.48	4,828,460
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,556,600,000	1,714,487,000	1,359,647,570	0	1,359,647,570	79.3	354,839,430
522112	Belanja Langganan Telepon	446,400,000	273,315,000	270,357,466	0	270,357,466	98.92	2,957,534
522113	Belanja Langganan Air	149,900,000	111,086,000	108,844,244	0	108,844,244	97.98	2,241,756
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	797,092,000	740,948,000	733,332,411	0	733,332,411	98.97	7,615,589
522131	Belanja Jasa Konsultan	109,367,000,000	45,078,750,000	3,814,924,210	0	3,814,924,210	8.46	41,263,825,790
522141	Belanja Sewa	15,499,147,000	15,708,918,000	15,295,525,549	18,354,996	15,277,170,553	97.25	431,747,447
522151	Belanja Jasa Profesi	13,499,080,000	7,455,326,000	6,896,756,100	7,600,000	6,889,156,100	92.41	566,169,900
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,584,057,000	93,385,423,000	27,154,311,387	0	27,154,311,387	29.08	66,231,111,613
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	153,899,276,000	164,468,253,000	55,633,698,937	25,954,996	55,607,743,941	33.81	108,860,509,059
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,312,887,000	5,062,654,000	4,957,040,472	7,892,181	4,949,148,291	97.76	113,505,709
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,644,912,000	3,269,706,000	3,143,264,774	2,455,950	3,140,808,824	96.06	128,897,176
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,450,000	9,550,000	6,510,100	0	6,510,100	68.17	3,039,900
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	700,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	8,991,949,000	8,341,910,000	8,106,815,346	10,348,131	8,096,467,215	97.06	245,442,785
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,541,317,000	90,321,969,000	83,330,932,020	140,343,388	83,190,588,632	92.1	7,131,380,368
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,314,550,000	3,876,308,000	3,628,288,766	0	3,628,288,766	93.6	248,019,234
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,888,163,000	17,693,457,000	15,660,079,152	8,490,000	15,651,589,152	88.46	2,041,867,848

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:49 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46,288,304,000	44,704,752,000	39,490,216,753	27,235,927	39,462,980,826	88.27	5,241,771,174
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	166,032,334,000	156,596,486,000	142,109,516,691	176,069,315	141,933,447,376	90.64	14,663,038,624
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,170,372,000	6,108,800,000	4,521,785,472	153,053,486	4,368,731,986	71.52	1,740,068,014
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,407,657,000	5,655,476,000	4,502,717,267	138,617,071	4,364,100,196	77.17	1,291,375,804
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,578,029,000	11,764,276,000	9,024,502,739	291,670,557	8,732,832,182	74.23	3,031,443,818
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	30,635,000,000	28,242,175,000	27,462,731,737	0	27,462,731,737	97.24	779,443,263
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	15,820,000,000	18,356,000,000	18,310,202,000	10,847,730	18,299,354,270	99.69	56,645,730
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	5,295,000,000	2,830,285,000	2,813,072,000	0	2,813,072,000	99.39	17,213,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	15,090,000,000	15,547,000,000	15,471,189,579	254,955	15,470,934,624	99.51	76,065,376
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	66,840,000,000	64,975,460,000	64,057,195,316	11,102,685	64,046,092,631	98.57	929,367,369
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	7,970,000,000	7,294,600,000	7,059,901,799	0	7,059,901,799	96.78	234,698,201
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	7,970,000,000	7,294,600,000	7,059,901,799	0	7,059,901,799	96.78	234,698,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	467,794,751,000	470,570,648,000	340,997,026,291	518,582,154	340,478,444,137	72.35	130092203863
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,412,410,000	93,989,704,000	13,030,287,559	0	13,030,287,559	13.86	80,959,416,441
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	0	1,389,113,000	0	0	0	0	1,389,113,000
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	225,000,000	0	0	0	0	0	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	264,000,000	263,993,000	0	263,993,000	100	7,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	91,637,410,000	95,642,817,000	13,294,280,559	0	13,294,280,559	13.9	82,348,536,441
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,211,589,000	2,400,896,000	2,400,885,520	0	2,400,885,520	100	10,480
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	426,307,000	276,260,000	276,205,299	0	276,205,299	99.98	54,701
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,355,000,000	2,661,736,000	2,630,266,471	0	2,630,266,471	98.82	31,469,529
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	4,992,896,000	5,338,892,000	5,307,357,290	0	5,307,357,290	99.41	31,534,710
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	862,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	862,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	97,492,306,000	100,981,709,000	18,601,637,849	0	18,601,637,849	18.42	82380071151
	JUMLAH BELANJA	676,825,090,000	684,053,244,000	471,706,118,246	551,337,014	471,154,781,232	68.88	212,898,462,768

III

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sumber Dana



#2024
KKP BEYOND

 **DJP KRL**
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36,890,548,000	35,647,419,000	35,638,068,100	19,124,550	35,618,943,550	99.92	28,475,450
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,045,000	694,000	528,678	24,345	504,333	72.67	189,667
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,668,037,000	2,604,539,000	2,603,923,170	0	2,603,923,170	99.98	615,830
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	975,642,000	743,950,000	743,253,958	0	743,253,958	99.91	696,042
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	531,408,000	442,600,000	442,600,000	1,620,000	440,980,000	99.63	1,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,913,634,000	4,160,076,000	4,003,206,000	2,745,000	4,000,461,000	96.16	159,615,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	128,478,000	358,310,000	356,869,947	0	356,869,947	99.6	1,440,053
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,039,079,000	1,887,222,000	1,883,354,520	0	1,883,354,520	99.8	3,867,480
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,215,209,000	3,525,606,000	3,455,240,000	0	3,455,240,000	98	70,366,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	201,089,000	199,275,000	199,275,000	0	199,275,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	843,800,000	751,050,000	748,925,000	3,700,050	745,224,950	99.22	5,825,050
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	383,417,000	1,911,392,000	1,908,280,800	0	1,908,280,800	99.84	3,111,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,049,000	67,000	38,290	0	38,290	57.15	28,710
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	33,358,000	116,517,000	116,188,560	0	116,188,560	99.72	328,440
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,198,000	25,489,000	25,335,416	0	25,335,416	99.4	153,584
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60,740,000	198,320,000	177,770,000	0	177,770,000	89.64	20,550,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,242,000	100,302,000	100,012,020	0	100,012,020	99.71	289,980
511628	Belanja Uang Makan PPPK	78,836,000	253,267,000	244,909,000	0	244,909,000	96.7	8,358,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	6,100,000	9,350,000	9,350,000	0	9,350,000	100	0
512211	Belanja Uang Lembur	1,074,879,000	1,291,531,000	1,278,645,000	0	1,278,645,000	99	12,886,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	26,282,000	22,228,000	0	22,228,000	84.57	4,054,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	54,913,976,000	55,687,725,000	55,600,522,257	5,540,915	55,594,981,342	99.83	92,743,658
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	537,269,000	2,559,904,000	2,548,930,390	0	2,548,930,390	99.57	10,973,610
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	111,538,033,000	112,500,887,000	112,107,454,106	32,754,860	112,074,699,246	99.65	360,678,034
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15,541,786,000	9,537,905,000	9,320,749,622	317,370	9,320,432,252	97.72	217,472,748
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	122,603,000	92,749,000	89,996,169	0	89,996,169	97.03	2,752,831
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,405,480,000	2,193,544,000	2,119,324,000	314,100	2,119,009,900	96.6	74,534,100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	796,167,000	1,001,695,000	960,897,135	0	960,897,135	95.93	40,797,865
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	28,535,571,000	30,053,315,000	29,131,322,991	840,000	29,130,482,991	96.93	922,832,009
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,675,684,000	1,637,838,000	1,551,270,000	300,000	1,550,970,000	94.7	86,868,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	489,266,000	516,517,000	498,050,880	0	498,050,880	96.42	18,466,120
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	67,980,000	149,221,000	148,994,003	0	148,994,003	99.85	226,997
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,147,730,000	927,917,000	923,158,540	0	923,158,540	99.49	4,758,460
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	3,224,000	464,000	464,000	0	464,000	100	0
522111	Belanja Langganan Listrik	1,556,600,000	1,714,487,000	1,359,647,570	0	1,359,647,570	79.3	354,839,430

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	446,400,000	273,315,000	270,357,466	0	270,357,466	98.92	2,957,534
522113	Belanja Langganan Air	149,900,000	111,086,000	108,844,244	0	108,844,244	97.98	2,241,756
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	797,092,000	734,727,000	727,603,583	0	727,603,583	99.03	7,123,417
522131	Belanja Jasa Konsultan	107,478,600,000	43,555,250,000	2,431,369,460	0	2,431,369,460	5.58	41,123,880,540
522141	Belanja Sewa	12,946,749,000	11,534,098,000	11,290,195,209	275,000	11,289,920,209	97.88	244,177,791
522151	Belanja Jasa Profesi	10,045,380,000	4,781,331,000	4,471,879,100	7,600,000	4,464,279,100	93.37	317,051,900
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,549,850,000	82,285,236,000	19,049,104,758	0	19,049,104,758	23.15	63,236,131,242
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,312,887,000	5,062,654,000	4,957,040,472	7,892,181	4,949,148,291	97.76	113,505,709
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,644,912,000	3,269,706,000	3,143,264,774	2,455,950	3,140,808,824	96.06	128,897,176
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,450,000	9,550,000	6,510,100	0	6,510,100	68.17	3,039,900
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	700,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,896,451,000	55,829,174,000	51,633,275,386	96,841,919	51,536,433,467	92.31	4,292,740,533
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,128,170,000	2,492,261,000	2,305,522,365	0	2,305,522,365	92.51	186,738,635
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,811,503,000	13,675,675,000	12,648,425,922	3,480,000	12,644,945,922	92.46	1,030,729,078
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,322,204,000	31,519,348,000	28,019,237,587	27,235,927	27,992,001,660	88.81	3,527,346,340
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	570,372,000	3,591,551,000	2,854,976,571	111,658,419	2,743,318,152	76.38	848,232,848
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,980,000,000	3,029,000,000	2,513,898,089	112,070,166	2,401,827,923	79.29	627,172,077
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	27,970,000,000	25,322,175,000	24,543,264,234	0	24,543,264,234	96.92	778,910,766
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15,420,000,000	18,356,000,000	18,310,202,000	10,847,730	18,299,354,270	99.69	56,645,730
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3,285,430,000	1,362,715,000	1,349,835,000	0	1,349,835,000	99.05	12,880,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	14,150,000,000	14,607,000,000	14,552,369,579	254,955	14,552,114,624	99.62	54,885,376
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7,970,000,000	7,294,600,000	7,059,901,799	0	7,059,901,799	96.78	234,698,201
	JUMLAH BELANJA BARANG	396,275,141,000	376,522,104,000	258,350,952,608	382,383,717	257,968,568,891	68.62	117,788,767,675
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,763,610,000	87,229,627,000	6,308,933,918	0	6,308,933,918	7.23	80,920,693,082
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	1,389,113,000	0	0	0	0	1,389,113,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	264,000,000	263,993,000	0	263,993,000	100	7,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	39,260,000	39,260,000	0	39,260,000	100	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,355,000,000	2,661,736,000	2,630,266,471	0	2,630,266,471	98.82	31,469,529
536111	Belanja Modal Lainnya	862,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	91,980,610,000	91,583,736,000	9,242,453,389	0	9,242,453,389	10.09	82,341,282,611
	JUMLAH RUPIAH MURNI	599,793,784,000	580,606,727,000	379,700,860,103	415,138,577	379,285,721,526	65.4	200,490,728,320
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	10,000,000	3,499,500	0	3,499,500	35	6,500,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	375,856,000	3,584,512,000	3,302,558,009	0	3,302,558,009	92.13	281,953,991
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,360,000	3,040,000	0	3,040,000	90.48	320,000
522131	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	815,500,000	696,958,000	0	696,958,000	85.46	118,542,000
522141	Belanja Sewa	55,400,000	2,076,749,000	1,943,769,000	0	1,943,769,000	93.6	132,980,000
522151	Belanja Jasa Profesi	176,000,000	633,507,000	546,115,000	0	546,115,000	86.21	87,392,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	312,000,000	3,387,650,000	1,717,306,655	0	1,717,306,655	50.69	1,670,343,345
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,047,044,000	8,018,274,000	7,096,322,868	18,496,973	7,077,825,895	88.27	940,448,105
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,000,000	833,769,000	816,916,401	0	816,916,401	97.98	16,852,599
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	663,100,000	1,314,850,000	770,746,630	0	770,746,630	58.62	544,103,370
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	845,160,000	4,412,400,000	3,343,523,512	0	3,343,523,512	75.78	1,068,876,488
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	600,000,000	599,500,000	599,427,083	1,950,000	597,477,083	99.66	2,022,917
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	250,440,000	521,384,000	212,313,649	0	212,313,649	40.72	309,070,351
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	200,000,000	0	0	0	0	0	0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	400,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	5,100,000,000	26,211,455,000	21,052,496,307	20,446,973	21,032,049,334	80.32	5,138,511,720
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,493,336,000	3,460,101,584	0	3,460,101,584	99.05	33,234,416
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	3,493,336,000	3,460,101,584	0	3,460,101,584	99.05	33,234,416
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	5,100,000,000	29,704,791,000	24,512,597,891	20,446,973	24,492,150,918	82.52	5,171,746,136
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
52	BELANJA BARANG							
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI PENDAMPING	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	44,400,000	6,484,000	6,340,240	0	6,340,240	97.78	143,760
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,160,000	0	0	0	0	0	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	5,092,276,000	5,506,213,000	5,388,461,452	1,665,000	5,386,796,452	97.83	119,416,548
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,922,840,000	1,387,885,000	1,044,438,000	0	1,044,438,000	75.25	343,447,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105,600,000	196,956,000	196,593,622	0	196,593,622	99.82	362,378
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,540,000	8,960,000	8,890,000	0	8,890,000	99.22	70,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	6,221,000	5,728,828	0	5,728,828	92.09	492,172
522131	Belanja Jasa Konsultansi	1,788,400,000	708,000,000	686,596,750	0	686,596,750	96.98	21,403,250
522141	Belanja Sewa	2,496,998,000	2,011,121,000	1,974,611,340	18,079,996	1,956,531,344	97.29	54,589,656
522151	Belanja Jasa Profesi	3,277,700,000	1,956,788,000	1,809,462,000	0	1,809,462,000	92.47	147,326,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,722,207,000	6,712,537,000	6,387,899,974	0	6,387,899,974	95.16	324,637,026
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,597,822,000	26,008,021,000	24,147,398,678	16,384,936	24,131,013,742	92.78	1,877,007,258
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,111,380,000	547,788,000	503,470,000	0	503,470,000	91.91	44,318,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,413,560,000	2,679,532,000	2,217,696,600	5,010,000	2,212,686,600	82.58	466,845,400
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,120,940,000	8,745,504,000	8,100,295,654	0	8,100,295,654	92.62	645,208,346
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	1,669,997,000	819,634,706	39,445,067	780,189,639	46.72	889,807,361
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	177,217,000	1,447,092,000	1,120,039,120	22,424,067	1,097,615,053	75.85	349,476,947
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,465,000,000	2,920,000,000	2,919,467,503	0	2,919,467,503	99.98	532,497
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,009,570,000	1,467,570,000	1,463,237,000	0	1,463,237,000	99.7	4,333,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	940,000,000	940,000,000	918,820,000	0	918,820,000	97.75	21,180,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	65,319,610,000	64,926,669,000	59,719,081,467	103,009,066	59,616,072,401	91.98	5,104,578,467
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,648,800,000	3,266,741,000	3,261,252,057	0	3,261,252,057	99.83	5,488,943
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	225,000,000	0	0	0	0	0	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,211,589,000	2,400,896,000	2,400,885,520	0	2,400,885,520	100	10,480
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	426,307,000	237,000,000	236,945,299	0	236,945,299	99.98	54,701
	JUMLAH BELANJA MODAL	5,511,696,000	5,904,637,000	5,899,082,876	0	5,899,082,876	99.91	5,554,124
	JUMLAH PNPB	70,831,306,000	70,831,306,000	65,618,164,343	103,009,066	65,515,155,277	92.64	5,110,132,591
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	100,000,000	262,700,000	260,621,000	0	260,621,000	99.21	2,079,000
522141	Belanja Sewa	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	43,200,000	28,800,000	0	28,800,000	66.67	14,400,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	340,000,000	329,401,440	8,619,560	320,781,880	94.35	19,218,120
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	27,500,000	27,160,000	0	27,160,000	98.76	340,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	658,000,000	656,466,409	4,122,838	652,343,571	99.14	5,656,429
	JUMLAH BELANJA BARANG	100,000,000	1,400,000,000	1,371,048,849	12,742,398	1,358,306,451	97.93	16,208,753
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	100,000,000	1,400,000,000	1,371,048,849	12,742,398	1,358,306,451	97.93	16,208,753
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	51,428,000	46,726,300	0	46,726,300	90.86	4,701,700
522141	Belanja Sewa	0	26,950,000	26,950,000	0	26,950,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	40,500,000	40,500,000	0	40,500,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	126,500,000	124,533,648	0	124,533,648	98.45	1,966,352
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,490,000	2,380,000	0	2,380,000	95.58	110,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	14,800,000	14,610,000	0	14,610,000	98.72	190,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	247,752,000	247,747,112	0	247,747,112	100	4,888
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	510,420,000	503,447,060	0	503,447,060	98.63	6,972,940
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	510,420,000	503,447,060	0	503,447,060	98.63	6,972,940
	TOTAL	676,825,090,000	684,053,244,000	471,706,118,246	551,337,014	471,154,781,232	68.96	211,795,788,740

IV

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Wilayah / Satuan Kerja



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:40 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
603201	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	275,000,000	0	0	0	0	0	0
622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG	504,305,152,000	515,318,986,000	306,609,943,763	487,778,183	306,122,165,580	59.4	209,196,820,420
691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	275,000,000	275,000,000	274,344,158	4,250,000	270,094,158	98.22	4,905,842
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	504,855,152,000	515,593,986,000	306,884,287,921	492,028,183	306,392,259,738	59.52	209,201,726,262
0200	JAWA BARAT							
029092	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	820,184,000	0	0	0	0	0	0
691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	820,184,000	820,184,000	721,221,272	614,100	720,607,172	87.86	99,576,828
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	1,640,368,000	820,184,000	721,221,272	614,100	720,607,172	87.93	99,576,828
0300	JAWA TENGAH							
039019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	894,110,000	0	0	0	0	0	0
691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	894,110,000	894,110,000	557,849,277	0	557,849,277	62.39	336,260,723
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	1,788,220,000	894,110,000	557,849,277	0	557,849,277	62.39	336,260,723
0400	DI YOGYAKARTA							
049035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	501,270,000	0	0	0	0	0	0
691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	501,270,000	501,270,000	495,282,200	0	495,282,200	98.81	5,987,800
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	1,002,540,000	501,270,000	495,282,200	0	495,282,200	98.81	5,987,800
0500	JAWA TIMUR							
059034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	924,858,000	0	0	0	0	0	0
691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	924,858,000	924,858,000	657,243,289	0	657,243,289	71.06	267,614,711
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	1,849,716,000	924,858,000	657,243,289	0	657,243,289	71.06	267,614,711
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
069024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH	904,872,000	0	0	0	0	0	0
691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH	904,872,000	904,872,000	886,742,000	0	886,742,000	98	18,130,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	1,809,744,000	904,872,000	886,742,000	0	886,742,000	98	18,130,000
0700	SUMATERA UTARA							
079035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	541,750,000	0	0	0	0	0	0
691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	541,750,000	541,750,000	533,310,040	0	533,310,040	98.44	8,439,960
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	1,083,500,000	541,750,000	533,310,040	0	533,310,040	98.44	8,439,960
0800	SUMATERA BARAT							
089006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	270,000,000	0	0	0	0	0	0
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)	16,904,860,000	17,622,716,000	17,394,721,109	556,499	17,394,164,610	98.7	228,551,390
691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	270,000,000	270,000,000	267,668,078	0	267,668,078	99.14	2,331,922
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	17,444,860,000	17,892,716,000	17,662,389,187	556,499	17,661,832,688	98.71	230,883,312
0900	RIAU							
099041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	548,800,000	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:40 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	17,494,247,000	17,584,430,000	17,445,472,954	186,288	17,445,286,666	99.21	139,143,334
691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	548,800,000	548,800,000	523,907,720	0	523,907,720	95.46	24,892,280
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	18,591,847,000	18,133,230,000	17,969,380,674	186,288	17,969,194,386	99.1	164,035,614
1000	JAMBI							
109037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	179,000,000	0	0	0	0	0	0
691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	179,000,000	179,000,000	170,664,741	0	170,664,741	95.34	8,335,259
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	358,000,000	179,000,000	170,664,741	0	170,664,741	95.34	8,335,259
1100	SUMATERA SELATAN							
119040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA	218,500,000	0	0	0	0	0	0
691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA	218,500,000	218,500,000	213,363,179	0	213,363,179	97.65	5,136,821
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	437,000,000	218,500,000	213,363,179	0	213,363,179	97.65	5,136,821
1200	LAMPUNG							
129036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	288,000,000	0	0	0	0	0	0
691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	288,000,000	288,000,000	287,641,850	0	287,641,850	99.88	358,150
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	576,000,000	288,000,000	287,641,850	0	287,641,850	99.88	358,150
1300	KALIMANTAN BARAT							
139027	DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	219,000,000	0	0	0	0	0	0
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	18,598,113,000	19,008,625,000	18,754,388,397	14,392,378	18,739,996,019	98.59	268,628,981
691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	219,000,000	219,000,000	203,808,017	0	203,808,017	93.06	15,191,983
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	19,036,113,000	19,227,625,000	18,958,196,414	14,392,378	18,943,804,036	98.6	283,820,964
1400	KALIMANTAN TENGAH							
149032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	319,700,000	0	0	0	0	0	0
691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	319,700,000	319,700,000	273,409,524	0	273,409,524	85.52	46,290,476
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	639,400,000	319,700,000	273,409,524	0	273,409,524	85.52	46,290,476
1500	KALIMANTAN SELATAN							
159039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	239,000,000	0	0	0	0	0	0
691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	239,000,000	239,000,000	233,543,476	0	233,543,476	97.72	5,456,524
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	478,000,000	239,000,000	233,543,476	0	233,543,476	97.72	5,456,524
1600	KALIMANTAN TIMUR							
169036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN	617,140,000	0	0	0	0	0	0
691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	617,140,000	617,140,000	590,317,800	0	590,317,800	95.65	26,822,200
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	1,234,280,000	617,140,000	590,317,800	0	590,317,800	95.65	26,822,200
1700	SULAWESI UTARA							
179057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	523,250,000	0	0	0	0	0	0
691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	523,250,000	523,250,000	520,625,350	0	520,625,350	99.5	2,624,650
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	1,046,500,000	523,250,000	520,625,350	0	520,625,350	99.5	2,624,650

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:40 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
1800	SULAWESI TENGAH							
189038	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	282,740,000	0	0	0	0	0	0
691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	282,740,000	282,740,000	282,445,447	0	282,445,447	99.9	294,553
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	565,480,000	282,740,000	282,445,447	0	282,445,447	99.9	294,553
1900	SULAWESI SELATAN							
199037	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,120,760,000	0	0	0	0	0	0
477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	17,509,172,000	20,375,945,000	20,124,731,189	5,200,661	20,119,530,528	98.74	256,414,472
691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,120,760,000	1,120,760,000	1,108,428,700	0	1,108,428,700	98.9	12,331,300
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	19,750,692,000	21,496,705,000	21,233,159,889	5,200,661	21,227,959,228	98.77	268,745,772
2000	SULAWESI TENGGARA							
209035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI	580,314,000	0	0	0	0	0	0
691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI	580,314,000	580,314,000	576,030,050	0	576,030,050	99.26	4,283,950
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	1,160,628,000	580,314,000	576,030,050	0	576,030,050	99.26	4,283,950
2100	MALUKU							
219032	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	785,878,000	0	0	0	0	0	0
691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	785,878,000	785,878,000	775,879,700	0	775,879,700	98.73	9,998,300
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	1,571,756,000	785,878,000	775,879,700	0	775,879,700	98.73	9,998,300
2200	BALI							
229057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	946,796,000	0	0	0	0	0	0
477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	16,435,987,000	18,095,987,000	17,783,838,182	7,807	17,783,830,375	98.27	312,156,625
691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	946,796,000	946,796,000	621,939,548	0	621,939,548	65.69	324,856,452
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	18,329,579,000	19,042,783,000	18,405,777,730	7,807	18,405,769,923	96.65	637,013,077
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
239069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA	1,110,712,000	0	0	0	0	0	0
691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA	1,110,712,000	1,110,712,000	1,107,931,200	0	1,107,931,200	99.75	2,780,800
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	2,221,424,000	1,110,712,000	1,107,931,200	0	1,107,931,200	99.75	2,780,800
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
249088	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA	1,084,304,000	0	0	0	0	0	0
499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)	17,082,329,000	23,005,128,000	22,795,075,821	10,706,484	22,784,369,337	99.04	220,758,663
691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA	1,084,304,000	1,084,304,000	1,067,345,600	0	1,067,345,600	98.44	16,958,400
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	19,250,937,000	24,089,432,000	23,862,421,421	10,706,484	23,851,714,937	99.06	237,717,063
2500	PAPUA							
259040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	398,700,000	0	0	0	0	0	0
691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	398,700,000	398,700,000	398,700,000	0	398,700,000	100	0
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	797,400,000	398,700,000	398,700,000	0	398,700,000	100	0
2600	BENGKULU							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:40 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
269035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	485,600,000	0	0	0	0	0	0
691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	485,600,000	485,600,000	458,989,784	0	458,989,784	94.52	26,610,216
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	971,200,000	485,600,000	458,989,784	0	458,989,784	94.52	26,610,216
2800	MALUKU UTARA							
289031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	610,500,000	0	0	0	0	0	0
691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	610,500,000	610,500,000	610,413,000	0	610,413,000	99.99	87,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	1,221,000,000	610,500,000	610,413,000	0	610,413,000	99.99	87,000
2900	BANTEN							
290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	16,788,043,000	16,542,545,000	16,394,450,936	8,002,149	16,386,448,787	99.06	156,096,213
299038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	483,474,000	0	0	0	0	0	0
691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	483,474,000	483,474,000	476,388,697	0	476,388,697	98.53	7,085,303
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	17,754,991,000	17,026,019,000	16,870,839,633	8,002,149	16,862,837,484	99.09	163,181,516
3000	BANGKA BELITUNG							
309041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA	516,825,000	0	0	0	0	0	0
691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN	516,825,000	516,825,000	498,634,100	5,742,250	492,891,850	95.37	23,933,150
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	1,033,650,000	516,825,000	498,634,100	5,742,250	492,891,850	96.48	23,933,150
3100	GORONTALO							
319035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	831,640,000	0	0	0	0	0	0
691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	831,640,000	831,640,000	820,416,921	1,538,520	818,878,401	98.47	12,761,599
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	1,663,280,000	831,640,000	820,416,921	1,538,520	818,878,401	98.65	12,761,599
3200	KEPULAUAN RIAU							
329013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	558,800,000	0	0	0	0	0	0
691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	558,800,000	558,800,000	530,498,764	0	530,498,764	94.94	28,301,236
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	1,117,600,000	558,800,000	530,498,764	0	530,498,764	94.94	28,301,236
3300	PAPUA BARAT							
339154	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	265,990,000	0	0	0	0	0	0
477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	13,333,073,000	17,311,825,000	16,571,104,333	12,361,695	16,558,742,638	95.65	753,082,362
691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	265,990,000	265,990,000	265,990,000	0	265,990,000	100	0
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	13,865,053,000	17,577,815,000	16,837,094,333	12,361,695	16,824,732,638	95.79	753,082,362
3400	SULAWESI BARAT							
340066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	497,750,000	0	0	0	0	0	0
691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	497,750,000	497,750,000	496,445,821	0	496,445,821	99.74	1,304,179
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	995,500,000	497,750,000	496,445,821	0	496,445,821	99.74	1,304,179
3500	KALIMANTAN UTARA							
417744	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN	341,840,000	0	0	0	0	0	0
691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	341,840,000	341,840,000	324,972,259	0	324,972,259	95.07	16,867,741

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:40 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500	683,680,000	341,840,000	324,972,259	0	324,972,259	95.07	16,867,741
	JUMLAH BELANJA	676,825,090,000	684,053,244,000	471,706,118,246	551,337,014	471,154,781,232	68.96	212,898,462,768

V

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program / Kegiatan



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/05/25 1:41 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	50,044,175,000	46,544,175,000	44,798,619,712	11,080,130	44,787,539,582	96.23	1,756,635,418
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16,299,150,000	16,299,150,000	15,749,284,729	4,856,745	15,744,427,984	96.6	554,722,016
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	66,343,325,000	62,843,325,000	60,547,904,441	15,936,875	60,531,967,566	96.415	2,311,357,434
WA	Program Dukungan Manajemen							
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	223,761,396,000	220,946,727,000	213,686,845,452	258,471,158	213,428,374,294	96.6	7,518,352,706
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	223,761,396,000	220,946,727,000	213,686,845,452	258,471,158	213,428,374,294	96.6	7,518,352,706
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keaneekaragaman Hayati Laut	49,456,206,000	41,383,818,000	39,608,175,540	80,120,116	39,528,055,424	95.52	1,855,762,576
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38,272,000,000	38,272,000,000	36,255,657,610	30,193,339	36,225,464,271	94.65	2,046,535,729
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	87,728,206,000	79,655,818,000	75,863,833,150	110,313,455	75,753,519,695	95.085	3,902,298,305
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	221,960,857,000	217,160,857,000	29,602,277,060	30,417,089	29,571,859,971	13.62	187,588,997,029
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	221,960,857,000	217,160,857,000	29,602,277,060	30,417,089	29,571,859,971	13.62	187,588,997,029
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	599,793,784,000	580,606,727,000	379,700,860,103	415,138,577	379,285,721,526	82.203	201,321,005,474
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keaneekaragaman Hayati Laut	5,000,000,000	29,604,791,000	24,512,597,891	20,446,973	24,492,150,918	82.73	5,112,640,082
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	5,000,000,000	29,604,791,000	24,512,597,891	20,446,973	24,492,150,918	82.73	5,112,640,082

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/05/25 1:41 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	5,100,000,000	29,704,791,000	24,512,597,891	20,446,973	24,492,150,918	41.365	5,212,640,082
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
04	PNBP							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	25,150,825,000	25,150,825,000	23,842,206,906	38,555,893	23,803,651,013	94.64	1,347,173,987
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8,210,850,000	8,210,850,000	7,810,478,194	0	7,810,478,194	95.12	400,371,806
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	33,361,675,000	33,361,675,000	31,652,685,100	38,555,893	31,614,129,207	94.88	1,747,545,793
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	20,847,488,000	20,847,488,000	19,769,793,439	39,017,353	19,730,776,086	94.64	1,116,711,914
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	20,847,488,000	20,847,488,000	19,769,793,439	39,017,353	19,730,776,086	94.64	1,116,711,914
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	16,622,143,000	16,622,143,000	14,195,685,804	25,435,820	14,170,249,984	85.25	2,451,893,016
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	16,622,143,000	16,622,143,000	14,195,685,804	25,435,820	14,170,249,984	85.25	2,451,893,016

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/05/25 1:41 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PNPB	70,831,306,000	70,831,306,000	65,618,164,343	103,009,066	65,515,155,277	92.412	5,316,150,723
09	HIBAH LUAR NEGERI							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	100,000,000	1,400,000,000	1,371,048,849	12,742,398	1,358,306,451	97.02	41,693,549
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	100,000,000	1,400,000,000	1,371,048,849	12,742,398	1,358,306,451	97.02	41,693,549
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	100,000,000	1,400,000,000	1,371,048,849	12,742,398	1,358,306,451	97.02	41,693,549
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	0	510,420,000	503,447,060	0	503,447,060	98.63	6,972,940
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	0	510,420,000	503,447,060	0	503,447,060	98.63	6,972,940
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	510,420,000	503,447,060	0	503,447,060	98.63	6,972,940
	JUMLAH	676,825,090,000	684,053,244,000	471,706,118,246	551,337,014	471,154,781,232	76.08	212,898,462,768

VI

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Akun Covid-19



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/02/25 8:11 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,000,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	23,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	23,000,000	0	0	0	0		0

VII

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Eselon I



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 10:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	427,360,838	0	427,360,838	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,839,911	0	43,839,911	0
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,380,704,000	1,190,351,664	0	1,190,351,664	50
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,250,000	0	1,250,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	2,380,704,000	1,662,802,413	0	1,662,802,413	69.84
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	690,923,051,000	819,555,686,761	405,000	819,555,281,761	118.62
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	690,923,051,000	819,555,686,761	405,000	819,555,281,761	118.62
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	15,009,636,000	21,135,321,491	756,855	21,134,564,636	140.81
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	15,009,636,000	21,135,321,491	756,855	21,134,564,636	140.81
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	172,777,623	0	172,777,623	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	172,777,623	0	172,777,623	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45,370,788	0	45,370,788	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	734,367,499	0	734,367,499	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,209,541	0	3,209,541	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	782,947,828	0	782,947,828	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	708,313,391,000	843,309,536,116	1,161,855	843,308,374,261	119.06
	JUMLAH PENDAPATAN	708,313,391,000	843,309,536,116	1,161,855	843,308,374,261	119.06

VIII

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Wilayah / Akun



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:42 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100 622145	DKI JAKARTA SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	700,524,028,000	827,297,175,764	0	827,297,175,764	118.1
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	700,524,028,000	827,297,175,764	0	827,297,175,764	118.1
0800 499346	SUMATERA BARAT BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35
0900 477456	RIAU LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	18,203,000	164,934,448	0	164,934,448	906.08
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	18,203,000	164,934,448	0	164,934,448	906.08
1300 477425	KALIMANTAN BARAT BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,000,000,000	2,421,607,418	0	2,421,607,418	121.08
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	2,000,000,000	2,421,607,418	0	2,421,607,418	121.08
1900 477431	SULAWESI SELATAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	500,000,000	850,067,746	756,855	849,310,891	169.86
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	500,000,000	850,067,746	756,855	849,310,891	169.86
2200 477419	BALI BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	950,000,000	3,035,051,977	0	3,035,051,977	319.48

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 14/05/25 1:42 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	950,000,000	3,035,051,977	0	3,035,051,977	319.48
2400 499352	NUSA TENGGARA TIMUR BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	1,354,900,000	4,133,213,817	0	4,133,213,817	305.06
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	1,354,900,000	4,133,213,817	0	4,133,213,817	305.06
2800 691072	MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0	2,000,000	0	2,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2900 290145	BANTEN LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	1,216,260,000	2,629,830,631	0	2,629,830,631	216.22
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	1,216,260,000	2,629,830,631	0	2,629,830,631	216.22
3300 477440	PAPUA BARAT LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	1,100,000,000	1,687,478,812	0	1,687,478,812	153.41
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	1,100,000,000	1,687,478,812	0	1,687,478,812	153.41
	JUMLAH PENDAPATAN	708,313,391,000	843,309,536,116	1,161,855	843,308,374,261	247.664

IX

Neraca Tingkat Eselon I



NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM
Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,381,065,501	883,191,198	497,874,303	56.37
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	548,385,782	(548,385,782)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	11,239,891,322	2,832,398,450	8,407,492,872	296.83
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(198,749,177)	(194,731,226)	(4,017,951)	2.06
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	11,041,142,145	2,637,667,224	8,403,474,921	318.59
Persediaan	1,641,794,412	1,028,272,785	613,521,627	59.67
JUMLAH ASET LANCAR	14,064,002,058	5,097,516,989	8,966,485,069	175.90
ASET TETAP				
Tanah	328,758,991,227	308,545,890,024	20,213,101,203	6.55
Peralatan dan Mesin	125,006,191,641	122,993,161,716	2,013,029,925	1.64
Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	86,958,983,679	3,777,646,853	4.34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,616,970,810	13,492,329,061	(875,358,251)	(6.49)
Aset Tetap Lainnya	129,357,185,571	129,592,041,571	(234,856,000)	(0.18)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	492,149,864	(492,149,864)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(110,273,396,926)	(107,252,414,395)	(3,020,982,531)	2.82
JUMLAH ASET TETAP	576,202,572,855	554,822,141,520	21,380,431,335	3.85
Properti Investasi				
Properti Investasi	110,346,287,172	0	110,346,287,172	0.00
JUMLAH Properti Investasi	110,346,287,172	0	110,346,287,172	
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(6,250)	6,250	(100.00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	(6,250)	6,250	(100.00)
Piutang Jangka Panjang lainnya	98,155,639,556	100,714,895,633	(2,559,256,077)	(2.54)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(490,778,189)	(503,574,469)	12,796,280	(2.54)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	97,664,861,367	100,211,321,164	(2,546,459,797)	(2.54)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	97,664,861,367	100,211,314,914	(2,546,453,547)	(2.54)
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000	214,231,398,172	(110,355,394,172)	(51.51)
Aset Tak Berwujud	1,194,618,534	832,527,534	362,091,000	43.49
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	411,012,378	(411,012,378)	(100.00)
Aset Lain-lain	13,782,435,459	21,210,163,880	(7,427,728,421)	(35.02)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(59,526,552,128)	(58,429,021,016)	(1,097,531,112)	1.88
JUMLAH ASET LAINNYA	59,326,505,865	178,256,080,948	(118,929,575,083)	(66.72)
JUMLAH ASET	857,604,229,317	838,387,054,371	19,217,174,946	2.29
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM
Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Utang kepada Pihak Ketiga	774,372,777	522,601,474	251,771,303	48.18
Pendapatan Diterima Dimuka	0	42,391,800	(42,391,800)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	113,000	0	113,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	774,485,777	564,993,274	209,492,503	37.08
JUMLAH KEWAJIBAN	774,485,777	564,993,274	209,492,503	37.08
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	856,829,743,540	837,822,061,097	19,007,682,443	2.27
JUMLAH EKUITAS	856,829,743,540	837,822,061,097	19,007,682,443	2.27
JUMLAH EKUITAS	856,829,743,540	837,822,061,097	19,007,682,443	2.27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	857,604,229,317	838,387,054,371	19,217,174,946	2.29

Keterangan :

FINAL

X

Neraca Percobaan Tingkat Eselon I Saldo Awal



#2024
KKP BEYOND



DJKPRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl. Cetak 08/05/2025

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	883,191,198	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	548,385,782	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,380,703,328	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	451,695,122	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	11,903,517
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	182,827,709
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,291,935	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	1,010,980,850	0
0.0	131111	Tanah	308,545,890,024	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	122,993,161,716	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	86,958,983,679	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,923,125,327	0
0.0	134112	Irigasi	4,234,153,463	0
0.0	134113	Jaringan	1,335,050,271	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	232,856,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	129,359,185,571	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	492,149,864	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	89,884,072,097
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,886,202,612
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,513,268,719
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,455,113,630
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	513,757,337
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	100,714,895,633	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	6,250
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	503,574,469
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	214,231,398,172	0
0.0	162151	Software	832,527,534	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	411,012,378	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,458,826,980	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	751,336,900	0
0.0	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	0	40,290,983,371
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	17,085,216,994
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	501,483,751
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	551,336,900
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	111,589,096
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	411,012,378

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl. Cetak 08/05/2025

lap_neraca_percobaan_sawal_akrua1_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	42,391,800
0.0	391111	Ekuitas	0	837,822,061,097
JUMLAH			1,004,766,801,727	1,004,766,801,727

XI

Neraca Percobaan Aktual



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	113,000	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1,380,952,501	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,559,256,077	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	8,680,635,245	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	12,796,279
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	185,952,898
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,522,162	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	744,470,250	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	869,802,000	0
0.0	131111	Tanah	328,758,991,227	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	125,006,191,641	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,094,333,844	0
0.0	134112	Irigasi	4,234,153,463	0
0.0	134113	Jaringan	1,288,483,503	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	129,357,185,571	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	90,235,424,132
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	12,849,746,261
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,847,909,772
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,810,427,787
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	529,888,974
0.0	138311	Properti Investasi	110,346,287,172	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	98,155,639,556	0
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	490,778,189
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000	0
0.0	162151	Software	1,194,618,534	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,782,435,459	0
0.0	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	0	46,557,374,318
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,954,300,876
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,014,876,934
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	38,164,098
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	736,208,679
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	113,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	470,651,334,172
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	843,308,374,261	0
0.0	313211	Transfer Keluar	492,028,247	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	353,037,261

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI

: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391111	Ekuitas	0	837,822,061,097
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	18,496,254,440
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	949,500	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	1,169,084,070	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	17,157,971,043
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	6,972,940	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,698,203
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	7,865,132	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	427,360,838
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	86,231,711
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,250,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	827,828,756,068
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	21,134,564,636
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	172,777,623
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,211,588
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	692,635,593
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,209,541
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	515,300,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	35,652,101,650	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	504,333	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,603,923,170	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	743,253,958	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	440,980,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,008,161,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	356,869,947	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,883,354,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,494,905,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	199,275,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	745,224,950	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,908,280,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	38,290	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	116,188,560	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	25,335,416	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	177,770,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	100,012,020	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	247,586,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	9,350,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,278,645,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	22,228,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	55,634,490,849	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,548,950,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,330,271,992	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	89,996,169	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2,119,009,900	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	960,897,135	0
3.0	521211	Beban Bahan	38,155,919,867	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,598,448,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	694,644,502	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	141,002,003	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,365,367,412	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	273,333,956	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	110,416,449	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	738,822,057	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	3,814,924,210	0
3.0	522141	Beban Sewa	15,799,188,103	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,956,817,682	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	43,311,101,127	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,963,125,008	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,140,808,824	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,510,100	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	83,181,707,753	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,628,288,766	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,651,589,152	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,490,004,844	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,349,650,386	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,360,341,958	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,643,106,517	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,972,361,702	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	467,884,162	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	355,314,157	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	32,430,004	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	103,489	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	169,398,397	0
3.0	592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6,267,632,815	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	160,368,074	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	921,953,513	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	263,800	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	28,672,037,828	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,707,147,078	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	32,405,798,325	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	3,757,383,462	0
3.0	593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	14,500,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,428,969,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	65,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	85,800,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	892,762	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	41,714,046	0
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	12,796,280
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7,992,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,925,514,455	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	147,186,000	0
JUMLAH			2,366,694,412,291	2,366,694,412,291

Keterangan :

FINAL

XII

Neraca Percobaan Kas



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	471,154,781,232
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	843,308,374,261	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	427,360,838
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,839,911
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,190,351,664
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,250,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	819,555,686,761
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	21,135,321,491
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	172,777,623
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45,370,788
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	734,367,499
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,209,541
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	35,638,068,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	528,678	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,603,923,170	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	743,253,958	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	442,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,003,206,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	356,869,947	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,883,354,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,455,240,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	199,275,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	748,925,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,908,280,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	38,290	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	116,188,560	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	25,335,416	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	177,770,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	100,012,020	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	244,909,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	9,350,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,278,645,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	22,228,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	55,600,522,257	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,548,930,390	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,330,589,362	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	89,996,169	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI

: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,119,324,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	960,897,135	0
3.0	521211	Belanja Bahan	38,129,689,752	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,598,748,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	694,644,502	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	148,994,003	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	932,048,540	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	464,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,359,647,570	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	270,357,466	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	108,844,244	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	733,332,411	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	3,814,924,210	0
3.0	522141	Belanja Sewa	15,295,525,549	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,896,756,100	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	27,154,311,387	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,957,040,472	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,143,264,774	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,510,100	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,330,932,020	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,628,288,766	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,660,079,152	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,490,216,753	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,521,785,472	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,502,717,267	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	27,462,731,737	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	18,310,202,000	0
3.0	526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,813,072,000	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15,471,189,579	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7,059,901,799	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,030,287,559	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	263,993,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,400,885,520	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	276,205,299	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,630,266,471	0
3.1	425259	Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	405,000	0
3.1	425629	Pengembalian Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	756,855	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:27 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	19,124,550
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	24,345
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,620,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,745,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,700,050
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	5,540,915
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	317,370
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	314,100
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,505,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	300,000
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	18,354,996
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	7,600,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	7,892,181
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,455,950
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	140,343,388
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	8,490,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	27,235,927
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	153,053,486
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	138,617,071
3.1	526113	Pengembalian Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	10,847,730
3.1	526115	Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	254,955
JUMLAH			1,315,015,654,362	1,315,015,654,362

Keterangan :

FINAL

XIII

Laporan Operasional Tingkat Eselon I



#2024
KKP BEYOND



DJKP
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON I

: (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:26 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	849,223,580,038	702,424,483,944	146,799,096,094	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	849,223,580,038	702,424,483,944	146,799,096,094	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	849,223,580,038	702,424,483,944	146,799,096,094	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	112,197,428,463	98,524,358,181	13,673,070,282	-
Beban Persediaan	922,018,513	1,049,371,886	(127,353,373)	-
Beban Barang dan Jasa	126,468,152,564	92,151,728,840	34,316,423,724	-
Beban Pemeliharaan	8,110,707,732	10,117,997,525	(2,007,289,793)	-
Beban Perjalanan Dinas	150,661,582,859	129,331,972,654	21,329,610,205	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	70,985,835,693	53,300,973,230	17,684,862,463	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:26 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	21,068,599,317	19,577,237,886	1,491,361,431	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29,810,528	(13,548,802)	43,359,330	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	490,444,135,669	404,040,091,400	86,404,044,269	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	358,779,444,369	298,384,392,544	60,395,051,825	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(2,498,153,617)	(6,748,615,449)	4,250,461,832	-
Pendapatan Pelepasan Aset	427,360,838	1,342,599,995	(915,239,157)	-
Beban Pelepasan Aset	2,925,514,455	8,091,215,444	(5,165,700,989)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,016,370,722	3,501,928,048	(2,485,557,326)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,249,356,722	3,501,928,048	(2,252,571,326)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	232,986,000	0	232,986,000	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,481,782,895)	(3,246,687,401)	1,764,904,506	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	357,297,661,474	295,137,705,143	62,159,956,331	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	357,297,661,474	295,137,705,143	62,159,956,331	-

Keterangan :

FINAL

XIV

Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Eselon I



#2024
KKP BEYOND

 **DJP KRL**
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 11:26 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	837,822,061,097	847,116,239,121	(9,294,178,024)	(1.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	357,297,661,474	295,137,705,143	62,159,956,331	21.06
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	17,318,355,738	2,423,893,389	14,894,462,349	614.49
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(7,865,132)	0	(7,865,132)	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	18,495,304,940	2,407,214,188	16,088,090,752	668.33
LAIN-LAIN	(1,169,084,070)	16,679,201	(1,185,763,271)	(7,109.23)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(355,608,334,769)	(306,855,776,556)	(48,752,558,213)	15.89
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	19,007,682,443	(9,294,178,024)	28,301,860,467	(304.51)
EKUITAS AKHIR	856,829,743,540	837,822,061,097	19,007,682,443	2.27

Keterangan :

FINAL

XV

Laporan BMN dan Persediaan



#2024
KKP BEYOND



DJP/KRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tanggal : 14/05/25 1:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_es1_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,302,850
1010301003	Penjepit Kertas	160,000
1010301004	Penghapus/Korektor	13,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,553,562
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	83,100
1010301010	Alat Perekat	515,700
1010301012	Staples	358,500
1010301013	Isi Staples	25,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,679,200
1010302001	Kertas HVS	6,373,280
1010302002	Berbagai Kertas	506,770
1010302003	Kertas Cover	164,000
1010303002	Tinta Cetak	788,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	7,109,500
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,309,000
1010309001	Meterai	1,440,000
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	140,700
Jumlah Barang Konsumsi		27,522,162
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501007	Aset Lain-lain	744,470,250
Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		744,470,250
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	
1010901002	Peralatan dan mesin dalam proses	869,802,000
Jumlah Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses		869,802,000
TOTAL		1,641,794,412

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl.Data : 14/05/25 12:24 PM
Tgl.Cetak : 14/05/25 2:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	27,522,162
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	744,470,250
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam	869,802,000
131111	Tanah	328,758,991,227
132111	Peralatan dan Mesin	125,006,191,641
133111	Gedung dan Bangunan	90,736,630,532
134111	Jalan dan Jembatan	7,094,333,844
134112	Irigasi	4,234,153,463
134113	Jaringan	1,288,483,503
135121	Aset Tetap Lainnya	129,357,185,571
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(90,235,424,132)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12,849,746,261)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3,847,909,772)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(2,810,427,787)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(529,888,974)
138311	Properti Investasi	110,346,287,172
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000
162151	Software	1,194,618,534
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,782,435,459
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	(46,557,374,318)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(11,954,300,876)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,014,876,934)
J U M L A H		747,517,160,304

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	3,109,405	308,545,890,024	4,960,419	130,559,388,375	240,000	110,346,287,172	7,829,824	328,758,991,227
20101	TANAH PERSIL	104,684	142,005,302,425	885	1,455,082,203	0	0	105,569	143,460,384,628
20102	TANAH NON PERSIL	2,954,721	143,551,777,599	4,719,534	18,758,019,000	0	0	7,674,255	162,309,796,599
20103	LAPANGAN	50,000	22,988,810,000	240,000	110,346,287,172	240,000	110,346,287,172	50,000	22,988,810,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,955	122,993,161,716	1,348	15,091,259,156	1,553	13,078,229,231	11,750	125,006,191,641
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	47	1,062,669,160	6	335,444,350	1	74,250,000	52	1,323,863,510
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	253	20,901,029,500	6	1,333,501,500	28	2,478,682,136	231	19,755,848,864
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	17	46,378,200	1	1,740,000	0	0	18	48,118,200
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	17	13,066,154,413	2	463,993,000	0	0	19	13,530,147,413
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1	77,926,279	1	160,000,000	0	0	2	237,926,279
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	1,331,815,340	0	0	0	0	29	1,331,815,340
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	7	23,362,902	1	1,929,000	0	0	8	25,291,902
30303	ALAT UKUR	55	749,850,872	13	277,168,342	19	179,997,000	49	847,022,214
30401	ALAT PENGOLAHAN	83	1,301,317,878	14	288,200,000	3	35,200,000	94	1,554,317,878
30501	ALAT KANTOR	1,229	8,711,382,338	127	587,341,995	204	1,370,550,220	1,152	7,928,174,113
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,148	17,107,756,569	658	2,340,842,918	493	1,618,685,119	4,313	17,829,914,368
30601	ALAT STUDIO	614	9,817,304,546	84	2,138,042,035	156	1,411,982,153	542	10,543,364,428
30602	ALAT KOMUNIKASI	266	1,668,306,231	17	337,318,820	20	175,653,950	263	1,829,971,101
30603	PERALATAN PEMANCAR	36	1,295,620,567	0	0	1	6,042,600	35	1,289,577,967
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5	131,080,000	0	0	0	0	5	131,080,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	271	632,120,239	26	46,046,260	49	149,375,135	248	528,791,364
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	89	448,989,926	1	64,000,000	2	128,000,000	88	384,989,926
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	187	2,296,340,960	13	277,762,100	18	172,194,720	182	2,401,908,340
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	6	37,131,708	0	0	0	0	6	37,131,708
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	32	176,728,490	5	20,000,000	9	33,757,990	28	162,970,500
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	3	45,000,000	0	0	0	0	3	45,000,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	1	49,500,000	0	0	1	49,500,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	15	177,144,659	2	6,230,000	0	0	17	183,374,659
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	11,377,000	0	0	4	11,377,000	0	0
30901	SENJATA API	7	91,000,000	0	0	0	0	7	91,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	7	58,724,000	1	70,650,000	0	0	8	129,374,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	120	1,672,296,417	6	63,709,600	17	270,514,367	109	1,465,491,650
31001	KOMPUTER UNIT	1,515	24,916,898,252	237	4,948,246,000	212	3,203,223,182	1,540	26,661,921,070
31002	PERALATAN KOMPUTER	905	5,457,112,642	72	422,482,972	163	1,090,454,339	814	4,789,141,275
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	19	173,607,760	0	0	7	44,012,000	12	129,595,760
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5	39,054,400	0	0	3	3,454,400	2	35,600,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31501	ALAT DETEKSI	1	1,100,125	0	0	0	0	1	1,100,125
31502	ALAT PELINDUNG	12	12,265,000	0	0	3	990,000	9	11,275,000
31503	ALAT SAR	1,728	7,780,062,613	54	856,660,264	126	487,656,320	1,656	8,149,066,557
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	40	610,118,299	0	0	0	0	40	610,118,299
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	19	113,486,740	0	0	10	53,076,600	9	60,410,140
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	8,140,000	0	0	0	0	2	8,140,000
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	160	893,007,691	0	0	4	29,600,000	156	863,407,691
133111	Gedung dan Bangunan	107	86,958,983,679	26	6,754,590,017	25	2,976,943,164	108	90,736,630,532
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	73	71,557,569,244	14	6,016,147,290	13	1,965,103,541	74	75,608,612,993
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	22	8,238,811,435	12	738,442,727	11	887,389,623	23	8,089,864,539
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	199,500,000	0	0	0	74,500,000	1	125,000,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	10	6,913,153,000	0	0	0	0	10	6,913,153,000
134111	Jalan dan Jembatan	13,528	7,923,125,327	4,409	13,121,507,000	4,631	13,950,298,483	13,306	7,094,333,844
50101	JALAN	13,150	4,614,179,454	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	13,150	4,614,179,454
50102	JEMBATAN	378	3,308,945,873	0	0	222	828,791,483	156	2,480,154,390
134112	Irigasi	21	4,234,153,463	13	92,079,770,860	13	92,079,770,860	21	4,234,153,463
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0	7	138,000,000	7	138,000,000	0	0
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	255,903,000	0	0	0	0	2	255,903,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	9	3,082,895,630	4	1,108,069,000	4	1,108,069,000	9	3,082,895,630
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	5	200,610,000	0	0	0	0	5	200,610,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	606,978,833	1	79,204,860	1	79,204,860	4	606,978,833
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	1	87,766,000	0	0	0	0	1	87,766,000
134113	Jaringan	26	1,335,050,271	0	0	1	46,566,768	25	1,288,483,503
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	307,382,353	0	0	0	0	3	307,382,353
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	211,453,000	0	0	0	0	2	211,453,000
50307	INSTALASI PERTAHANAN	1	15,600,000	0	0	0	0	1	15,600,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	2	60,702,768	0	0	1	46,566,768	1	14,136,000
50310	INSTALASI LAIN	2	196,216,400	0	0	0	0	2	196,216,400
50402	JARINGAN LISTRIK	13	507,126,250	0	0	0	0	13	507,126,250
50403	JARINGAN TELEPON	3	36,569,500	0	0	0	0	3	36,569,500
135111	Aset Tetap Renovasi	2	232,856,000	4	465,712,000	6	698,568,000	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	2	232,856,000	2	232,856,000	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	232,856,000	2	232,856,000	4	465,712,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	137,576	129,359,185,571	0	0	4	2,000,000	137,572	129,357,185,571
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2	20,000,000	0	0	0	0	2	20,000,000
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	10	37,600,000	0	0	0	0	10	37,600,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	143	348,637,560	0	0	4	2,000,000	139	346,637,560
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	137,420	128,951,948,011	0	0	0	0	137,420	128,951,948,011
138311	Properti Investasi	0	0	240,001	110,355,394,172	1	9,107,000	240,000	110,346,287,172
20103	LAPANGAN	0	0	240,000	110,346,287,172	0	0	240,000	110,346,287,172
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	1	9,107,000	1	9,107,000	0	0
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	244,411	214,231,398,172	4,410	103,876,004,000	244,411	214,231,398,172	4,410	103,876,004,000
20103	LAPANGAN	240,000	110,346,287,172	0	0	240,000	110,346,287,172	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,107,000	0	0	1	9,107,000	0	0
50101	JALAN	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1,627	20,458,826,980	1,540	12,124,553,232	1,818	18,800,944,753	1,349	13,782,435,459
30101	ALAT BESAR DARAT	1	418,994,000	0	0	0	0	1	418,994,000
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18	759,319,000	21	1,006,321,636	29	1,506,144,636	10	259,496,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	7,600,000	0	0	0	0	4	7,600,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	13	4,729,058,133	0	0	2	1,347,363,133	11	3,381,695,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1	78,870,000	0	0	1	78,870,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	734,661,200	0	0	0	0	7	734,661,200
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
30303	ALAT UKUR	44	72,459,128	4	129,600,000	7	141,173,000	41	60,886,128
30401	ALAT PENGOLAHAN	3	4,559,000	1	32,000,000	1	32,000,000	3	4,559,000
30501	ALAT KANTOR	139	990,295,850	183	1,099,629,920	197	1,175,826,190	125	914,099,580
30502	ALAT RUMAH TANGGA	312	799,556,309	422	1,287,908,335	501	1,482,376,775	233	605,087,869
30601	ALAT STUDIO	76	1,122,884,887	124	1,283,056,253	169	1,738,544,437	31	667,396,703
30602	ALAT KOMUNIKASI	60	1,531,073,400	19	174,641,950	33	190,883,200	46	1,514,832,150
30603	PERALATAN PEMANCAR	11	117,949,700	0	0	0	0	11	117,949,700
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2	47,336,000	0	0	1	19,000,000	1	28,336,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	40	87,842,355	39	85,042,355	1	2,800,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16	46,265,730	0	0	0	0	16	46,265,730
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	11	62,963,900	7	34,795,800	7	41,858,500	11	55,901,200

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	3	8,546,124	0	0	0	0	3	8,546,124
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	1,870,000	9	33,757,990	9	33,757,990	1	1,870,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	0	0	1	49,500,000	1	49,500,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	34,096,000	0	0	1	17,904,000	4	16,192,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	23	109,695,200	15	225,818,750	25	287,126,450	13	48,387,500
31001	KOMPUTER UNIT	109	1,426,072,445	174	2,768,024,272	251	3,784,710,317	32	409,386,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	66	277,358,648	121	696,641,139	159	810,583,187	28	163,416,600
31101	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	0	0	6	39,737,000	0	0	6	39,737,000
31102	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	0	0	1	2,500,000	1	2,500,000	0	0
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	3	990,000	0	0	3	990,000
31503	ALAT SAR	459	1,533,781,657	120	263,362,320	173	468,226,701	406	1,328,917,276
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	44,086,000	0	0	7	44,086,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	23,000,000	9	39,267,000	11	62,267,000	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	61	315,018,444	4	29,600,000	5	73,050,000	60	271,568,444
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13	896,349,200	6	167,955,000	12	335,910,000	7	728,394,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	12	490,023,140	11	468,971,401	20	734,726,280	3	224,268,261
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50102	JEMBATAN	3	559,143,143	222	828,791,483	0	0	225	1,387,934,626
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	7	138,000,000	7	138,000,000	14	276,000,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	7	1,392,569,000	4	1,108,069,000	8	2,216,138,000	3	284,500,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	79,204,860	1	79,204,860	2	158,409,720	0	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	1	46,566,768	0	0	1	46,566,768
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	3	665,000	0	0	3	665,000	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	3	458,318,273	0	0	3	458,318,273	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	122	1,145,983,609	4	2,000,000	126	1,147,983,609	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			896,272,631,203		484,428,178,812		466,220,113,603		914,480,696,412

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_es1_po

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	2,659	897,950,914	417	151,086,792	578	127,422,490	2,498	921,615,216
30103	ALAT BANTU	21	14,516,000	1	630,000	1	630,000	21	14,516,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	999,000	0	0	0	0	1	999,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	3,769,550	0	0	0	0	7	3,769,550
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	2,423,350	0	0	0	0	6	2,423,350
30303	ALAT UKUR	9	5,692,000	1	100,000	2	200,000	8	5,592,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	834	166,452,150	0	0	500	111,500,000	334	54,952,150
30501	ALAT KANTOR	16	6,727,900	46	20,759,874	8	1,473,314	54	26,014,460
30502	ALAT RUMAH TANGGA	641	241,565,814	368	129,250,818	46	6,799,376	963	364,017,256
30601	ALAT STUDIO	15	11,330,700	0	0	0	0	15	11,330,700
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	618,100	0	0	0	0	1	618,100
30603	PERALATAN PEMANCAR	26	1,726,000	0	0	2	276,000	24	1,450,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	18	12,500,818	0	0	1	180,000	17	12,320,818
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	6	2,126,500	0	0	0	0	6	2,126,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	1,977,000	0	0	0	0	8	1,977,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	650,000	0	0	0	0	1	650,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	1,080,000	0	0	4	1,080,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	180,000	0	0	1	180,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	4,989,500	0	0	0	0	17	4,989,500
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	14	4,295,700	0	0	0	0	14	4,295,700
31503	ALAT SAR	920	386,624,501	0	0	11	4,593,800	909	382,030,701
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	1	346,100	0	0	1	346,100
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	71	16,865,331	0	0	2	510,000	69	16,355,331
31901	PERALATAN OLAH RAGA	22	10,841,000	0	0	0	0	22	10,841,000
133111	Gedung dan Bangunan	6	102,223,400	1	9,107,000	1	9,107,000	6	102,223,400
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	102,223,400	0	0	0	0	6	102,223,400
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	1	9,107,000	1	9,107,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
138311	Properti Investasi	0	0	1	9,107,000	0	0	1	9,107,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	1	9,107,000	0	0	1	9,107,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	195	435,977,586	22	6,844,189	63	409,084,710	154	33,737,065

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
Tanggal : 14/05/25 1:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_es1_po

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	16	1,619,200	0	0	0	0	16	1,619,200
30401	ALAT PENGOLAHAN	26	2,674,734	0	0	0	0	26	2,674,734
30501	ALAT KANTOR	3	63,414	4	675,014	7	738,428	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	74	17,107,393	5	1,299,375	24	4,102,482	55	14,304,286
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	2	276,000	0	0	2	276,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	475,000	0	0	4	475,000	0	0
31503	ALAT SAR	63	17,419,845	11	4,593,800	24	7,938,800	50	14,074,845
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	788,000	0	0	0	0	5	788,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	3	202,400,000	0	0	3	202,400,000	0	0
60501	TANAMAN	1	193,430,000	0	0	1	193,430,000	0	0
TOTAL			1,436,151,900		176,144,981		545,614,200		1,066,682,681

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	3,109,405	308,545,890,024	4,960,419	130,559,388,375	240,000	110,346,287,172	7,829,824	328,758,991,227
20101	TANAH PERSIL	104,684	142,005,302,425	885	1,455,082,203	0	0	105,569	143,460,384,628
20102	TANAH NON PERSIL	2,954,721	143,551,777,599	4,719,534	18,758,019,000	0	0	7,674,255	162,309,796,599
20103	LAPANGAN	50,000	22,988,810,000	240,000	110,346,287,172	240,000	110,346,287,172	50,000	22,988,810,000
132111	Peralatan dan Mesin	14,614	123,891,112,630	1,765	15,242,345,948	2,131	13,205,651,721	14,248	125,927,806,857
30103	ALAT BANTU	68	1,077,185,160	7	336,074,350	2	74,880,000	73	1,338,379,510
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	253	20,901,029,500	6	1,333,501,500	28	2,478,682,136	231	19,755,848,864
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	18	47,377,200	1	1,740,000	0	0	19	49,117,200
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	17	13,066,154,413	2	463,993,000	0	0	19	13,530,147,413
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1	77,926,279	1	160,000,000	0	0	2	237,926,279
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	36	1,335,584,890	0	0	0	0	36	1,335,584,890
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	13	25,786,252	1	1,929,000	0	0	14	27,715,252
30303	ALAT UKUR	64	755,542,872	14	277,268,342	21	180,197,000	57	852,614,214
30401	ALAT PENGOLAHAN	917	1,467,770,028	14	288,200,000	503	146,700,000	428	1,609,270,028
30501	ALAT KANTOR	1,245	8,718,110,238	173	608,101,869	212	1,372,023,534	1,206	7,954,188,573
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,789	17,349,322,383	1,026	2,470,093,736	539	1,625,484,495	5,276	18,193,931,624
30601	ALAT STUDIO	629	9,828,635,246	84	2,138,042,035	156	1,411,982,153	557	10,554,695,128
30602	ALAT KOMUNIKASI	267	1,668,924,331	17	337,318,820	20	175,653,950	264	1,830,589,201
30603	PERALATAN PEMANCAR	62	1,297,346,567	0	0	3	6,318,600	59	1,291,027,967
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5	131,080,000	0	0	0	0	5	131,080,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	289	644,621,057	26	46,046,260	50	149,555,135	265	541,112,182
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	95	451,116,426	1	64,000,000	2	128,000,000	94	387,116,426
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	195	2,298,317,960	13	277,762,100	18	172,194,720	190	2,403,885,340
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	6	37,131,708	0	0	0	0	6	37,131,708
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	33	177,378,490	5	20,000,000	9	33,757,990	29	163,620,500
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	3	45,000,000	0	0	0	0	3	45,000,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	1	49,500,000	0	0	1	49,500,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	15	177,144,659	2	6,230,000	0	0	17	183,374,659
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	8	12,457,000	0	0	8	12,457,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	180,000	0	0	1	180,000	0	0
30901	SENJATA API	7	91,000,000	0	0	0	0	7	91,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	7	58,724,000	1	70,650,000	0	0	8	129,374,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	120	1,672,296,417	6	63,709,600	17	270,514,367	109	1,465,491,650
31001	KOMPUTER UNIT	1,515	24,916,898,252	237	4,948,246,000	212	3,203,223,182	1,540	26,661,921,070
31002	PERALATAN KOMPUTER	922	5,462,102,142	72	422,482,972	163	1,090,454,339	831	4,794,130,775
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	19	173,607,760	0	0	7	44,012,000	12	129,595,760
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5	39,054,400	0	0	3	3,454,400	2	35,600,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31501	ALAT DETEKSI	1	1,100,125	0	0	0	0	1	1,100,125
31502	ALAT PELINDUNG	26	16,560,700	0	0	3	990,000	23	15,570,700
31503	ALAT SAR	2,648	8,166,687,114	54	856,660,264	137	492,250,120	2,565	8,531,097,258
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	40	610,118,299	0	0	0	0	40	610,118,299
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	1	346,100	0	0	1	346,100
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	90	130,352,071	0	0	12	53,586,600	78	76,765,471
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	8,140,000	0	0	0	0	2	8,140,000
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	182	903,848,691	0	0	4	29,600,000	178	874,248,691
133111	Gedung dan Bangunan	113	87,061,207,079	27	6,763,697,017	26	2,986,050,164	114	90,838,853,932
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	79	71,659,792,644	14	6,016,147,290	13	1,965,103,541	80	75,710,836,393
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	22	8,238,811,435	12	738,442,727	11	887,389,623	23	8,089,864,539
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	199,500,000	0	0	0	74,500,000	1	125,000,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	10	6,913,153,000	1	9,107,000	1	9,107,000	10	6,913,153,000
134111	Jalan dan Jembatan	13,528	7,923,125,327	4,409	13,121,507,000	4,631	13,950,298,483	13,306	7,094,333,844
50101	JALAN	13,150	4,614,179,454	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	13,150	4,614,179,454
50102	JEMBATAN	378	3,308,945,873	0	0	222	828,791,483	156	2,480,154,390
134112	Irigasi	21	4,234,153,463	13	92,079,770,860	13	92,079,770,860	21	4,234,153,463
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0	7	138,000,000	7	138,000,000	0	0
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	255,903,000	0	0	0	0	2	255,903,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	9	3,082,895,630	4	1,108,069,000	4	1,108,069,000	9	3,082,895,630
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	5	200,610,000	0	0	0	0	5	200,610,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	606,978,833	1	79,204,860	1	79,204,860	4	606,978,833
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	1	87,766,000	0	0	0	0	1	87,766,000
134113	Jaringan	26	1,335,050,271	0	0	1	46,566,768	25	1,288,483,503
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	307,382,353	0	0	0	0	3	307,382,353
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	211,453,000	0	0	0	0	2	211,453,000
50307	INSTALASI PERTAHANAN	1	15,600,000	0	0	0	0	1	15,600,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	2	60,702,768	0	0	1	46,566,768	1	14,136,000
50310	INSTALASI LAIN	2	196,216,400	0	0	0	0	2	196,216,400
50402	JARINGAN LISTRIK	13	507,126,250	0	0	0	0	13	507,126,250
50403	JARINGAN TELEPON	3	36,569,500	0	0	0	0	3	36,569,500
135111	Aset Tetap Renovasi	2	232,856,000	4	465,712,000	6	698,568,000	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	2	232,856,000	2	232,856,000	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	232,856,000	2	232,856,000	4	465,712,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	137,576	129,359,185,571	0	0	4	2,000,000	137,572	129,357,185,571
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2	20,000,000	0	0	0	0	2	20,000,000
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	10	37,600,000	0	0	0	0	10	37,600,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	143	348,637,560	0	0	4	2,000,000	139	346,637,560
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	137,420	128,951,948,011	0	0	0	0	137,420	128,951,948,011
138311	Properti Investasi	0	0	240,002	110,364,501,172	1	9,107,000	240,001	110,355,394,172
20103	LAPANGAN	0	0	240,000	110,346,287,172	0	0	240,000	110,346,287,172
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	1	9,107,000	1	9,107,000	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	1	9,107,000	0	0	1	9,107,000
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	244,411	214,231,398,172	4,410	103,876,004,000	244,411	214,231,398,172	4,410	103,876,004,000
20103	LAPANGAN	240,000	110,346,287,172	0	0	240,000	110,346,287,172	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,107,000	0	0	1	9,107,000	0	0
50101	JALAN	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000	4,409	13,121,507,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000	1	90,754,497,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1,822	20,894,804,566	1,562	12,131,397,421	1,881	19,210,029,463	1,503	13,816,172,524
30101	ALAT BESAR DARAT	1	418,994,000	0	0	0	0	1	418,994,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18	759,319,000	21	1,006,321,636	29	1,506,144,636	10	259,496,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	7,600,000	0	0	0	0	4	7,600,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	13	4,729,058,133	0	0	2	1,347,363,133	11	3,381,695,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1	78,870,000	0	0	1	78,870,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	734,661,200	0	0	0	0	7	734,661,200
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
30303	ALAT UKUR	60	74,078,328	4	129,600,000	7	141,173,000	57	62,505,328
30401	ALAT PENGOLAHAN	29	7,233,734	1	32,000,000	1	32,000,000	29	7,233,734
30501	ALAT KANTOR	142	990,359,264	187	1,100,304,934	204	1,176,564,618	125	914,099,580
30502	ALAT RUMAH TANGGA	386	816,663,702	427	1,289,207,710	525	1,486,479,257	288	619,392,155
30601	ALAT STUDIO	76	1,122,884,887	124	1,283,056,253	169	1,738,544,437	31	667,396,703
30602	ALAT KOMUNIKASI	60	1,531,073,400	19	174,641,950	33	190,883,200	46	1,514,832,150
30603	PERALATAN PEMANCAR	11	117,949,700	2	276,000	0	0	13	118,225,700
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2	47,336,000	0	0	1	19,000,000	1	28,336,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	40	87,842,355	39	85,042,355	1	2,800,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16	46,265,730	0	0	0	0	16	46,265,730
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	11	62,963,900	7	34,795,800	7	41,858,500	11	55,901,200
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	3	8,546,124	0	0	0	0	3	8,546,124

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:58 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	1,870,000	9	33,757,990	9	33,757,990	1	1,870,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	0	0	1	49,500,000	1	49,500,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	34,096,000	0	0	1	17,904,000	4	16,192,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	23	109,695,200	15	225,818,750	25	287,126,450	13	48,387,500
31001	KOMPUTER UNIT	109	1,426,072,445	174	2,768,024,272	251	3,784,710,317	32	409,386,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	66	277,358,648	121	696,641,139	159	810,583,187	28	163,416,600
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0	6	39,737,000	0	0	6	39,737,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	475,000	1	2,500,000	5	2,975,000	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	3	990,000	0	0	3	990,000
31503	ALAT SAR	522	1,551,201,502	131	267,956,120	197	476,165,501	456	1,342,992,121
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	44,086,000	0	0	7	44,086,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	23,788,000	9	39,267,000	11	62,267,000	5	788,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	61	315,018,444	4	29,600,000	5	73,050,000	60	271,568,444
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13	896,349,200	6	167,955,000	12	335,910,000	7	728,394,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	12	490,023,140	11	468,971,401	20	734,726,280	3	224,268,261
50102	JEMBATAN	3	559,143,143	222	828,791,483	0	0	225	1,387,934,626
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	7	138,000,000	7	138,000,000	14	276,000,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	7	1,392,569,000	4	1,108,069,000	8	2,216,138,000	3	284,500,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	79,204,860	1	79,204,860	2	158,409,720	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	1	46,566,768	0	0	1	46,566,768
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	3	665,000	0	0	3	665,000	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	3	458,318,273	0	0	3	458,318,273	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	122	1,145,983,609	4	2,000,000	126	1,147,983,609	0	0
60401	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	3	202,400,000	0	0	3	202,400,000	0	0
60501	TANAMAN	1	193,430,000	0	0	1	193,430,000	0	0
TOTAL			897,708,783,103		484,604,323,793		466,765,727,803		915,547,379,093

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
 Tanggal : 14/05/25 1:59 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	8	832,527,534	4	512,777,000	2	150,686,000	10	1,194,618,534
80101	ASET TAK BERWUJUD	8	832,527,534	4	512,777,000	2	150,686,000	10	1,194,618,534
162161	Lisensi	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5	751,336,900	1	148,787,000	6	900,123,900	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	5	751,336,900	1	148,787,000	6	900,123,900	0	0
TOTAL			1,583,864,434		661,564,000		1,050,809,900		1,194,618,534

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
Tanggal : 14/05/25 1:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	328,758,991,227	0	0	0	328,758,991,227
20101	TANAH PERSIL	143,460,384,628	0	0	0	143,460,384,628
20102	TANAH NON PERSIL	162,309,796,599	0	0	0	162,309,796,599
20103	LAPANGAN	22,988,810,000	0	0	0	22,988,810,000
132111	Peralatan dan Mesin	125,006,191,641	(89,884,072,097)	(351,352,035)	(90,235,424,132)	34,770,767,509
30103	ALAT BANTU	1,323,863,510	(577,525,202)	(115,776,619)	(693,301,821)	630,561,689
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	19,755,848,864	(15,570,805,843)	587,526,701	(14,983,279,142)	4,772,569,722
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	48,118,200	(44,445,588)	(2,802,612)	(47,248,200)	870,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	13,530,147,413	(6,767,462,935)	(1,137,552,194)	(7,905,015,129)	5,625,132,284
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	237,926,279	(77,926,279)	(26,666,667)	(104,592,946)	133,333,333
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1,331,815,340	(898,739,723)	(119,689,904)	(1,018,429,627)	313,385,713
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	25,291,902	(19,778,860)	(1,387,580)	(21,166,440)	4,125,462
30303	ALAT UKUR	847,022,214	(530,296,799)	64,712,592	(465,584,207)	381,438,007
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,554,317,878	(1,247,766,478)	(49,264,281)	(1,297,030,759)	257,287,119
30501	ALAT KANTOR	7,928,174,113	(7,873,399,911)	951,028,363	(6,922,371,548)	1,005,802,565
30502	ALAT RUMAH TANGGA	17,829,914,368	(13,773,867,636)	6,524,870	(13,767,342,766)	4,062,571,602
30601	ALAT STUDIO	10,543,364,428	(5,954,410,862)	(65,640,179)	(6,020,051,041)	4,523,313,387
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,829,971,101	(884,160,106)	(102,445,799)	(986,605,905)	843,365,196
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,289,577,967	(856,399,247)	(106,334,582)	(962,733,829)	326,844,138
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	131,080,000	(79,497,671)	(8,738,666)	(88,236,337)	42,843,663
30701	ALAT KEDOKTERAN	528,791,364	(394,554,611)	68,180,116	(326,374,495)	202,416,869
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	384,989,926	(385,596,882)	44,719,896	(340,876,986)	44,112,940
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2,401,908,340	(1,102,157,502)	(70,588,854)	(1,172,746,356)	1,229,161,984
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	37,131,708	(21,843,035)	(2,468,900)	(24,311,935)	12,819,773
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	162,970,500	(60,350,810)	9,880,440	(50,470,370)	112,500,130
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	45,000,000	(6,750,000)	(4,500,000)	(11,250,000)	33,750,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	0	(49,500,000)	49,500,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	183,374,659	(153,928,358)	(5,646,939)	(159,575,297)	23,799,362
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	(11,377,000)	11,377,000	0	0
30901	SENJATA API	91,000,000	(91,000,000)	0	(91,000,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	129,374,000	(58,724,000)	(23,550,000)	(82,274,000)	47,100,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1,465,491,650	(972,997,726)	(21,306,449)	(994,304,175)	471,187,475
31001	KOMPUTER UNIT	26,661,921,070	(18,870,164,963)	(263,580,681)	(19,133,745,644)	7,528,175,426
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,789,141,275	(4,552,114,459)	657,175,701	(3,894,938,758)	894,202,517
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	129,595,760	(108,779,152)	25,914,848	(82,864,304)	46,731,456
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	35,600,000	(35,109,400)	(105,600)	(35,215,000)	385,000
31501	ALAT DETEKSI	1,100,125	(110,013)	(220,025)	(330,038)	770,087

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
Tanggal : 14/05/25 1:59 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
31502	ALAT PELINDUNG	11,275,000	(12,265,000)	990,000	(11,275,000)	0
31503	ALAT SAR	8,149,066,557	(6,914,291,349)	(585,163,251)	(7,499,454,600)	649,611,957
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	610,118,299	(95,741,630)	(59,571,430)	(155,313,060)	454,805,239
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	60,410,140	(108,343,795)	50,048,985	(58,294,810)	2,115,330
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	8,140,000	(8,140,000)	0	(8,140,000)	0
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	49,950,000	0	(21,645,000)	(21,645,000)	28,305,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	863,407,691	(713,749,272)	(84,285,335)	(798,034,607)	65,373,084
133111	Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	(10,886,202,612)	(1,963,543,649)	(12,849,746,261)	77,886,884,271
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	75,608,612,993	(8,737,417,373)	(1,667,722,157)	(10,405,139,530)	65,203,473,463
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	8,089,864,539	(1,124,454,638)	(155,886,453)	(1,280,341,091)	6,809,523,448
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	125,000,000	(21,945,000)	5,695,000	(16,250,000)	108,750,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	0	(6,868,125)	6,868,125	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	6,913,153,000	(995,517,476)	(152,498,164)	(1,148,015,640)	5,765,137,360
134111	Jalan dan Jembatan	7,094,333,844	(3,513,268,719)	(334,641,053)	(3,847,909,772)	3,246,424,072
50101	JALAN	4,614,179,454	(3,114,387,570)	(408,969,247)	(3,523,356,817)	1,090,822,637
50102	JEMBATAN	2,480,154,390	(398,881,149)	74,328,194	(324,552,955)	2,155,601,435
134112	Irigasi	4,234,153,463	(2,455,113,630)	(355,314,157)	(2,810,427,787)	1,423,725,676
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	255,903,000	(25,753,823)	(5,190,022)	(30,943,845)	224,959,155
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	3,082,895,630	(2,243,030,684)	(322,093,687)	(2,565,124,371)	517,771,259
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	200,610,000	(55,172,483)	(8,875,806)	(64,048,289)	136,561,711
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	606,978,833	(114,377,847)	(16,573,289)	(130,951,136)	476,027,697
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	87,766,000	(16,778,793)	(2,581,353)	(19,360,146)	68,405,854
134113	Jaringan	1,288,483,503	(513,757,337)	(16,131,637)	(529,888,974)	758,594,529
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	307,382,353	(82,913,094)	(10,246,078)	(93,159,172)	214,223,181
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	211,453,000	(50,289,113)	(5,286,325)	(55,575,438)	155,877,562
50307	INSTALASI PERTAHANAN	15,600,000	(4,420,000)	(520,000)	(4,940,000)	10,660,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	14,136,000	(21,495,398)	14,427,398	(7,068,000)	7,068,000
50310	INSTALASI LAIN	196,216,400	(196,216,400)	0	(196,216,400)	0
50402	JARINGAN LISTRIK	507,126,250	(140,746,094)	(12,678,157)	(153,424,251)	353,701,999
50403	JARINGAN TELEPON	36,569,500	(17,677,238)	(1,828,475)	(19,505,713)	17,063,787
135121	Aset Tetap Lainnya	129,357,185,571	0	0	0	129,357,185,571
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	20,000,000	0	0	0	20,000,000
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	37,600,000	0	0	0	37,600,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	346,637,560	0	0	0	346,637,560
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,000,000	0	0	0	1,000,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	128,951,948,011	0	0	0	128,951,948,011
138311	Properti Investasi	110,346,287,172	0	0	0	110,346,287,172

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:59 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
20103	LAPANGAN	110,346,287,172	0	0	0	110,346,287,172
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,782,435,459	(17,085,216,994)	5,130,916,118	(11,954,300,876)	1,828,134,583
30101	ALAT BESAR DARAT	418,994,000	(418,994,000)	0	(418,994,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	259,496,000	(759,319,000)	499,823,000	(259,496,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7,600,000	(7,600,000)	0	(7,600,000)	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	3,381,695,000	(4,641,151,153)	1,289,370,653	(3,351,780,500)	29,914,500
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	0	(78,870,000)	78,870,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	734,661,200	(734,661,200)	0	(734,661,200)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1,200,000	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0
30303	ALAT UKUR	60,886,128	(72,459,128)	11,573,000	(60,886,128)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	4,559,000	(4,559,000)	0	(4,559,000)	0
30501	ALAT KANTOR	914,099,580	(935,586,740)	26,423,530	(909,163,210)	4,936,370
30502	ALAT RUMAH TANGGA	605,087,869	(799,556,309)	194,468,440	(605,087,869)	0
30601	ALAT STUDIO	667,396,703	(1,105,964,887)	440,105,544	(665,859,343)	1,537,360
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,514,832,150	(1,531,073,400)	16,241,250	(1,514,832,150)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	117,949,700	(117,949,700)	0	(117,949,700)	0
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	28,336,000	(27,757,329)	6,977,597	(20,779,732)	7,556,268
30701	ALAT KEDOKTERAN	2,800,000	0	(2,800,000)	(2,800,000)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	46,265,730	(46,265,730)	0	(46,265,730)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	55,901,200	(60,623,433)	4,722,233	(55,901,200)	0
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8,546,124	(6,620,793)	(550,095)	(7,170,888)	1,375,236
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1,870,000	(498,664)	(124,666)	(623,330)	1,246,670
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	16,192,000	(34,096,000)	17,904,000	(16,192,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	48,387,500	(109,695,200)	61,307,700	(48,387,500)	0
31001	KOMPUTER UNIT	409,386,400	(1,426,072,445)	1,016,686,045	(409,386,400)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	163,416,600	(277,358,648)	113,942,048	(163,416,600)	0
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	39,737,000	0	(39,737,000)	(39,737,000)	0
31502	ALAT PELINDUNG	990,000	0	(990,000)	(990,000)	0
31503	ALAT SAR	1,328,917,276	(1,533,781,657)	204,864,381	(1,328,917,276)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	(38,686,000)	38,686,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	(23,000,000)	23,000,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	271,568,444	(315,018,444)	43,450,000	(271,568,444)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	728,394,200	(272,938,151)	25,311,442	(247,626,709)	480,767,491
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	224,268,261	(105,382,760)	40,692,987	(64,689,773)	159,578,488
50102	JEMBATAN	1,387,934,626	(122,956,098)	(152,860,560)	(275,816,658)	1,112,117,968
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	(48,300,000)	48,300,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	284,500,000	(1,392,569,000)	1,108,069,000	(284,500,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
 Tanggal : 14/05/25 1:59 PM
 Halaman : 4
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	(34,652,125)	34,652,125	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	46,566,768	0	(17,462,536)	(17,462,536)	29,104,232
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	103,876,004,000	(40,290,983,371)	(6,266,390,947)	(46,557,374,318)	57,318,629,682
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	(1,241,868)	1,241,868	0	0
50101	JALAN	13,121,507,000	(11,630,426,659)	(1,491,080,341)	(13,121,507,000)	0
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	90,754,497,000	(28,659,314,844)	(4,776,552,474)	(33,435,867,318)	57,318,629,682
JUMLAH		914,480,696,412	(164,628,614,760)	(4,156,457,360)	(168,785,072,120)	745,695,624,292

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_es1_poc

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	921,615,216	(754,089,526)	32,544,844	(721,544,682)	200,070,534
30103	ALAT BANTU	14,516,000	(2,362,991)	(2,073,709)	(4,436,700)	10,079,300
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	999,000	(999,000)	0	(999,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3,769,550	(1,505,853)	(376,955)	(1,882,808)	1,886,742
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2,423,350	(684,730)	(386,360)	(1,071,090)	1,352,260
30303	ALAT UKUR	5,592,000	(4,043,500)	(291,000)	(4,334,500)	1,257,500
30401	ALAT PENGOLAHAN	54,952,150	(162,493,380)	109,950,740	(52,542,640)	2,409,510
30501	ALAT KANTOR	26,014,460	(4,927,600)	(2,617,946)	(7,545,546)	18,468,914
30502	ALAT RUMAH TANGGA	364,017,256	(185,720,388)	(32,793,549)	(218,513,937)	145,503,319
30601	ALAT STUDIO	11,330,700	(2,227,672)	(2,266,144)	(4,493,816)	6,836,884
30602	ALAT KOMUNIKASI	618,100	(185,430)	(123,620)	(309,050)	309,050
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,450,000	(1,474,100)	93,100	(1,381,000)	69,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	12,320,818	(4,927,950)	(2,284,166)	(7,212,116)	5,108,702
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2,126,500	(1,488,554)	(425,299)	(1,913,853)	212,647
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,977,000	(947,939)	(172,375)	(1,120,314)	856,686
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	650,000	(151,669)	(43,334)	(195,003)	454,997
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	(1,080,000)	1,080,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	(180,000)	180,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,989,500	(4,254,875)	(484,750)	(4,739,625)	249,875
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	4,295,700	(4,295,700)	0	(4,295,700)	0
31503	ALAT SAR	382,030,701	(349,553,221)	(31,630,980)	(381,184,201)	846,500
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	346,100	0	(17,305)	(17,305)	328,795
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	16,355,331	(12,934,973)	(330,505)	(13,265,478)	3,089,853
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10,841,000	(7,650,001)	(2,440,999)	(10,091,000)	750,000
133111	Gedung dan Bangunan	102,223,400	(10,467,974)	(2,044,468)	(12,512,442)	89,710,958
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	102,223,400	(10,467,974)	(2,044,468)	(12,512,442)	89,710,958
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
60401	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0	0	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0
138311	Properti Investasi	9,107,000	0	(2,367,820)	(2,367,820)	6,739,180
40401	TUGU/TANDA BATAS	9,107,000	0	(2,367,820)	(2,367,820)	6,739,180
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	33,737,065	(40,147,586)	6,424,321	(33,723,265)	13,800
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM

Tanggal : 14/05/25 1:59 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_es1_poc

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPA-Es1 : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30303	ALAT UKUR	1,619,200	(1,619,200)	0	(1,619,200)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	2,674,734	(2,674,734)	0	(2,674,734)	0
30501	ALAT KANTOR	0	(63,414)	63,414	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	14,304,286	(17,107,393)	2,803,107	(14,304,286)	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	276,000	0	(262,200)	(262,200)	13,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	(475,000)	475,000	0	0
31503	ALAT SAR	14,074,845	(17,419,845)	3,345,000	(14,074,845)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	788,000	(788,000)	0	(788,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0
60401	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0	0	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0
JUMLAH		1,066,682,681	(804,705,086)	34,556,877	(770,148,209)	296,534,472

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 032
UAPPB-E1 : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/05/25 12:24 PM
Tanggal : 14/05/25 1:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		10	1,194,618,534	(501,483,751)	(513,393,183)	(1,014,876,934)	179,741,600
80101	ASET TAK BERWUJUD		10	1,194,618,534	(501,483,751)	(513,393,183)	(1,014,876,934)	179,741,600
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	(551,336,900)	551,336,900	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		0	0	(551,336,900)	551,336,900	0	0
JUMLAH			10	1,194,618,534	(1,052,820,651)	37,943,717	(1,014,876,934)	179,741,600

XVI

Rekapitulasi Monitoring SAKTI



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN

No	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	477431	BPSPL Makassar	BAST NONKONTRAKTUAL	'00031	19-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Biaya Pembelian GoPro Hero 12 Black Action Kamera dan GoPro Protective Housing dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat sesuai nota terlampir	3150303040	1	7.998.000	7.998.000	'241361301004105
2	477431	BPSPL Makassar	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	20-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Belanja Notebook ASUS P1412CEA-EK5850X , Projector Acer X1, Printer Epson L-3120 dalam rangka belanja barang fisik untuk diserahkan kepada Masyarakat, sesuai nota terlampir	3050105048	1	6.000.000	6.000.000	'241361301004209
3	477431	BPSPL Makassar	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	20-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Belanja Notebook ASUS P1412CEA-EK5850X , Projector Acer X1, Printer Epson L-3120 dalam rangka belanja barang fisik untuk diserahkan kepada Masyarakat, sesuai nota terlampir	3100102003	1	10.300.000	10.300.000	'241361301004209
4	477431	BPSPL Makassar	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	20-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Belanja Notebook ASUS P1412CEA-EK5850X , Projector Acer X1, Printer Epson L-3120 dalam rangka belanja barang fisik untuk diserahkan kepada Masyarakat, sesuai nota terlampir	3100203003	1	2.200.000	2.200.000	'241361301004209
5	477431	BPSPL Makassar	BAST KONTRAKTUAL	BA.11/PPK-BPSPL.3/PL.410/III/2024	22-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PEKERJAAN BELANJA BARANG BERUPA 2 (DUA) SET ALAT SELAM	3150303001	1	22.700.000	22.700.000	'241361302002047
6	477431	BPSPL Makassar	BAST KONTRAKTUAL	BA.11/PPK-BPSPL.3/PL.410/III/2024	22-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PEKERJAAN BELANJA BARANG BERUPA 2 (DUA) SET ALAT SELAM	3010313010	1	74.250.000	74.250.000	'241361302002047
7	477431	BPSPL Makassar	BAST KONTRAKTUAL	BA.12/PPK-BPSPL.3/PL.410/III/2024	22-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PEKERJAAN BELANJA BARANG BERUPA 3 (TIGA) SET ALAT SELAM	3150303001	4	22.700.000	90.800.000	'241361302002046
8	477431	BPSPL Makassar	BAST KONTRAKTUAL	BA.12/PPK-BPSPL.3/PL.410/III/2024	22-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PEKERJAAN BELANJA BARANG BERUPA 3 (TIGA) SET ALAT SELAM	3010313999	1	630.000	630.000	'241361302002046
9	477431	BPSPL Makassar	BAST KONTRAKTUAL	BA.12/PPK-BPSPL.3/PL.410/III/2024	22-03-2024	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PEKERJAAN BELANJA BARANG BERUPA 3 (TIGA) SET ALAT SELAM	3090402031	1	10.700.000	10.700.000	'241361302002046



MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 12

: 03207

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	03201	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ? Dalam Proses	285,315,300	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	285,315,300	0
2	03201	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	162151	Software	363,990,000	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	363,990,000	0
3	03201	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	-344,944,286	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-344,944,286	0
4	03207	029447	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON	115212	Piutang Lainnya	25,395,000	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	25,395,000	0
5	03207	029447	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	-126,975	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-126,975	0
6	03207	059490	DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN	115212	Piutang Lainnya	1,617,066	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,617,066	0
7	03207	059490	DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	-8,085	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-8,085	0
8	03207	169036	DINAS	132111	Peralatan dan	259,925,800	03207	691061	DINAS KELAUTAN	259,925,800	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

			PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		Mesin				DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
9	03207	169036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-259,925,800	03207	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-259,925,800	0
10	03207	199056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO	115212	Piutang Lainnya	31,360	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	31,360	0
11	03207	199056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	-157	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-157	0
12	03207	199060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	115212	Piutang Lainnya	3,734,480	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	3,734,480	0
13	03207	199060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	-18,672	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-18,672	0
14	03207	239050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	115212	Piutang Lainnya	954,000	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	954,000	0
15	03207	239050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	-4,770	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-4,770	0
16	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA	132111	Peralatan dan Mesin	20,699,000	03207	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA	20,699,000	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

			PESISIR DAN LAUT DENPASAR						PESISIR DAN LAUT MAKASSAR		
17	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-20,699,000	03207	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	-20,699,000	0
18	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	132111	Peralatan dan Mesin	64,722,092	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	64,722,092	0
19	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-64,722,092	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	-64,722,092	0
20	03207	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	132111	Peralatan dan Mesin	28,900,000	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	28,900,000	0
21	03207	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-21,675,000	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	-21,675,000	0
22	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	0	01501	409294	SEKRETARIAT JENDERAL	232,856,000	-232,856,000
23	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	135111	Aset Tetap Renovasi	232,856,000	01501	409294	SEKRETARIAT JENDERAL	0	232,856,000
24	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	20,790,000	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	20,790,000	0
25	03207	622145	SEKRETARIAT	137111	Akumulasi	-12,474,000	03207	290145	LOKA	-12,474,000	0

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

			DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT		Penyusutan Peralatan dan Mesin				PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG		
26	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	249,128,592	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	249,128,592	0
27	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-247,566,592	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	-247,566,592	0
28	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	172,040,500	03212	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	172,040,500	0
29	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-172,040,500	03212	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	-172,040,500	0
30	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	149,659,250	03212	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	149,659,250	0
31	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-149,659,250	03212	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	-149,659,250	0
32	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	8,500,000	03212	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	8,500,000	0
33	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	239,200,000	03212	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	239,200,000	0

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

34	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-8,500,000	03212	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	-8,500,000	0
35	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-28,704,000	03212	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	-28,704,000	0
36	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	159,900,000	03212	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	159,900,000	0
37	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-159,900,000	03212	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	-159,900,000	0
38	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	132111	Peralatan dan Mesin	149,659,250	03212	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	149,659,250	0
39	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-149,659,250	03212	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	-149,659,250	0
40	03212	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	132111	Peralatan dan Mesin	92,899,616	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	92,899,616	0
41	03212	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-92,899,616	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	-92,899,616	0



MONITORING DETAIL TRANSAKSI RESIPROKAL SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 12

: 03207 Periode Sampai Dengan : 2024-12 Jenis Transaksi Resiprokal : Data : detail

No	Periode	Kode Akun	Uraian Akun	No. Dokumen	Tanggal Dokumen	Belanja					Pendapatan					Selisih
						BA	BAES1	Kode Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Nilai Belanja	BA	BAES1	Kode Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai Pendapatan	
1	05	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	DA01655DF99M9HUI	01-05-2024	032	03207	477440	LOKA PENGLOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	0	087	08701	418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	2,280,000	-2,280,000
2	05	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6AF1748VVEN9SIFH	02-05-2024	032	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	0	087	08701	418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	2,280,000	-2,280,000
3	10	522191	Belanja Jasa Lainnya	241751701001539	31-10-2024	032	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,280,000	087	08701	418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	0	2,280,000
4	11	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	E64BF2G4VQ3R479V	11-11-2024	032	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	0	087	08701	450448	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	1,700,000	-1,700,000
5	12	522191	Belanja Jasa Lainnya	240661701000272	10-12-2024	032	03207	477440	LOKA PENGLOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	2,280,000	087	08701	418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	0	2,280,000
6	12	522191	Belanja Jasa Lainnya	241751303049192	26-12-2024	032	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN	1,700,000	087	08701	450448	ARSIP NASIONAL RI	0	1,700,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

									AN KELAUTAN DAN RUANG LAUT					JAKARTA		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	---------	--	--



MONITORING REKAP REKONSILIASI INTERNAL ASET, PERSEDIAAN DAN PIUTANG BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12

: 03207

No	BA Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Nilai Neraca	Nilai SubLedger	Selisih
1	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	12	45,883,680,040	45,883,680,040	0
2	03207	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	12	18,917,000,158	18,917,000,158	0
3	03207	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	12	21,906,291,502	21,906,291,502	0
4	03207	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	12	8,876,544,192	8,876,544,192	0
5	03207	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	12	20,376,562,594	20,376,562,594	0
6	03207	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	12	15,882,917,608	15,882,917,608	0
7	03207	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	12	10,782,075,775	10,782,075,775	0
8	03207	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	12	32,769,152,073	32,769,152,073	0
9	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	12	672,979,282,263	572,121,120,578	100,858,161,685
10	03207	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	12	30,400	30,400	0
11	03207	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	12	489,000	489,000	0
12	03207	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	12	471,500	471,500	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

13	03207	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	12	120,000	120,000	0
14	03207	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	12	0	0	0
15	03207	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12	0	0	0
16	03207	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	12	0	0	0
17	03207	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	12	75,000	75,000	0
18	03207	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	12	934,000	934,000	0
19	03207	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	12	290,000	290,000	0
20	03207	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	12	0	0	0
21	03207	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	12	0	0	0
22	03207	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	12	610,632	610,632	0
23	03207	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	12	0	0	0
24	03207	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	12	0	0	0



RINCIAN PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA (491429) PERIODE BULAN 12

: 03207

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Modul	Nomor Dok	Keterangan	Nilai
1	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	GLP	202406290145008	Jurnal Balik atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang berasal dari koreksi pencatatan aset karena kesalahan kode barang	111,084,660
2	03207	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	PER	032071300477425000KD202400105M	62554208.Perolehan Lainnya 2410 Gedung Balikpapan	-14,500,000
3	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	AST	A17242	Perolehan Lainnya Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	-250,000,000
4	03207	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	AST	A17241	Perolehan Lainnya Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	-250,800,000
5	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	AST	A17243	Perolehan Lainnya Kursi Zeis	-2,288,660
6	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	AST	A17242	Perolehan Lainnya Kursi Besi/Metal	-6,000,000
7	03207	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	AST	A17241	Perolehan Lainnya Alat Selam Seet	-102,796,000

B. DAFTAR REKENING PER SATKER



#2024
KKP BEYOND



DJP-KRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa

DAFTAR REKENING SATKER LINGKUP DITJEN PKRL TA. 2024

No	Nama Satker	Alamat Satker	Telepon	Bank	Nomor Rekening
1	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Jl. Budi Luhur, Kel. Mentangor, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	(0761) 8404559	BNI	0185105003
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG	Jl. Raya Pertanian Sei. Duo - Sei. Lareh Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah, Padang	(0751) 497052 (0751) 497053	Bank NAGARI	9000014993461000
3	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Jl. Raya Carita Km. 4,5 Caringin, Labuan Pandeglang	(0253) 802616	BRI	654312901451000
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Jl By Pass Prof Ida Bagus Mantra Km 16,7 Pering Gianyar	(0361) 4794821	BRI	036801000663303
5	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota Kupang 85231	(0380) 890421	BNI	9891344993521000
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Jl. Husein hamzah no.01 pallima pontianak barat	(0561) 769991	MANDIRI	8100124774251000
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Jl. KPR PDAM KM.10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, 98417	(0951) 331378	MANDIRI	1600000610127
8	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Jalan Makmur Daeng Sitakka No.129 Turikale Maros 90511	(0411) 371337	BRI	0000005001001265303
9	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110	(021) 3522060 (021) 3522560	BNI	0284853114

MONITORING REKENING SATKER LINGKUP DITJEN PKRL

NO	KODE	NAMA SATKER	BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	SURAT PERSETUJUAN KPPN	
						NOMOR	TANGGAL
1	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	BNI	9891346910461000	BPG 175 DINAS KPKP PROV DKI JKT	S-652/KPN.1206/2024	05-Apr-24
2	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	BNI	9891346910471000	BPG 095 DINAS KP PROV JABAR	S-652/KPN.1206/2024	05-Apr-24
3	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	9891346910481000	BPG 134 DINAS KP PROV JATENG	S-619/KPN.1206/2024	02-Apr-24
4	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Mandiri	8100126910491000	BPG 030 DKP PROV DIY	S-620/KPN.1206/2024	02-Apr-24
5	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Bank Jatim	6910501000	BPG 135 DINAS KP PROV JATIM	S-694/KPN.1206/2024	23-Apr-24
6	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BSI	8100676910511000	BPG 001 DKP PROV NAD	S-621/KPN.1206/2024	02-Apr-24
7	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	BNI	9891346910521000	BPG 123 DINAS KP PROV SUMUT	S-652/KPN.1206/2024	05-Apr-24
8	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	BRI	654316910531000	BPG 010 DINAS KP PROV SUMBAR	S-653/KPN.1206/2024	05-Apr-24
9	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	BNI	9891346910541000	BPG 008 DINAS KP PROV RIAU	S-652/KPN.1206/2024	05-Apr-24
10	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	BRI	654316910551000	BPG 012 DINAS KP PROV JAMBI	S-653/KPN.1206/2024	05-Apr-24
11	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	BRI	654316910561000	BPG 014 DKP PROV SUMSEL	S-622/KPN.1206/2024	02-Apr-24
12	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Mandiri	8100126910571000	BPG 017 DKP PROV LAMPUNG	S-620/KPN.1206/2024	02-Apr-24
13	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Mandiri	8100126910581000	BPG 042 DINAS KP PROV KALBAR	S-717/KPN.1206/2024	26-Apr-24
14	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	BNI	9891346910591000	BPG 043 DINAS KP PROV KALTENG	S-695/KPN.1206/2024	23-Apr-24
15	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BNI	9891346900601000	BPG 045 DINAS KP PROV KALSEL	S-883/KPN.1206/2024	17-May-24
16	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Mandiri	8100126910611000	BPG 046 DKP PROV KALTIM	S-620/KPN.1206/2024	02-Apr-24
17	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	BNI	9891346910621000	BPG 049 DINAS KP PROV SULUT	S-679/KPN.1206/2024	19-Apr-24
18	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	BNI	9891346910631000	BPG 051 DINAS KP PROV SULTENG	S-659/KPN.1206/2024	17-Apr-24
19	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	BRI	654316910641000	BPG 136 DINAS KP PROV SULSEL	S-696/KPN.1206/2024	23-Apr-24
20	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	BNI	9891346910651000	BPG 060 DINAS KP PROV SULTRA	S-619/KPN.1206/2024	02-Apr-24
21	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Mandiri	8100126910661000	BPG 061 DINAS KP PROV MALUKU	S-680/KPN.1206/2024	19-Apr-24
22	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	BNI	9891346910671000	BPG 037 DINAS KP PROV BALI	S-679/KPN.1206/2024	19-Apr-24
23	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	BRI	654316910681000	BPG 038 DKP PROV NTB	S-622/KPN.1206/2024	02-Apr-24
24	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	BNI	9891346910691000	BPG 039 DINAS KP PROV NTT	S-659/KPN.1206/2024	17-Apr-24
25	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Mandiri	8100126910701000	BPG 063 DKP DAERAH PROV PAPUA	S-717/KPN.1206/2024	26-Apr-24
26	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Mandiri	8100126910711000	BPG 016 DKP PROV BENGKULU	S-620/KPN.1206/2024	02-Apr-24
27	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	BRI	654316910721000	BPG 062 DKP PROV MALUT	S-622/KPN.1206/2024	02-Apr-24
28	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	BRI	654316910731000	BPG 020 DKP PROV BANTEN	S-622/KPN.1206/2024	02-Apr-24
29	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BRI	654316910741000	BPG 015 DINAS KP PROV KEP BABEL	S-653/KPN.1206/2024	05-Apr-24
30	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	BRI	654316910751000	BPG 050 DINAS KP PROV GORONTALO	S-653/KPN.1206/2024	05-Apr-24
31	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	9891346910761000	BPG 009 DINAS KP PROV KEPRI	S-652/KPN.1206/2024	16-Apr-24
32	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Mandiri	8100126910771000	BPG 065 DINAS KP PROV PAPUA BARAT	S-801/KPN.1206/2024	6 Mei 2024
33	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Mandiri	8100126910781000	BPG 178 DINAS KP PROV SULBAR	S-660/KPN.1206/2024	17-Apr-24
34	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	BNI	9891346910791000	BPG 185 DINAS KP PROV KALTARA	S-619/KPN.1206/2024	02-Apr-24

C. LAIN-LAIN



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

MONITORING KINERJA SATKER

Kode	Satker	Fungsi	Prog	Keg	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target Vol	Real Vol	Progre	Pagu	Real. Blnja	Nilai Blnja	%	KODE_PRIORITAS_NASIONAL_DESKRIPSI	PROGRAM_PRIORITAS_DESKRIPSI	KEGIATAN_PRIORITAS_DESKRIPSI
290145	LPSP Serang	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1.250.000.000	1.188.176.716	1.188.176.716	95,05	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keekaragaman Hayati Laut	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	49.951.869	49.951.869	99,94	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	PEC	'001	Kerjasama Konservasi Keekaragaman Hayati Laut	Kesejahteraan	1	1	100	70.000.000	69.884.893	69.884.893	99,84	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	QEH	'001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	2	2	100	300.000.000	299.695.763	299.695.763	99,9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	RAL	'001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	Unit	1	1	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	REB	'001	Keekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang	Janis	4	4	100	750.000.000	728.891.744	728.891.744	97,19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pamanj	Janis	4	4	100	1.250.000.000	1.199.708.019	1.199.708.019	95,98	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	2362	SCC	'002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang diting	Orang	40	40	100	200.000.000	192.184.396	192.184.396	96,09	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberika	Kelompok Masyarakat	40	40	100	800.000.000	798.414.126	798.414.126	99,8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
290145	LPSP Serang	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	175.000.000	174.924.097	174.924.097	99,96	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	UBA	'001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	2	100	180.000.000	175.949.069	175.949.069	97,75	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberika	Kelompok Masyarakat	2	2	100	500.000.000	493.520.173	493.520.173	98,7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	225.000.000	190.069.730	190.069.730	84,48	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1.100.000.000	1.039.542.990	1.021.457.958	94,5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keekaragaman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	46.770.665	46.770.665	93,54	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	PEC	'001	Kerjasama Konservasi Keekaragaman Hayati Laut	Kesejahteraan	1	1	100	70.000.000	59.587.307	59.587.307	85,12	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	QEH	'001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	3	3	100	400.000.000	384.025.163	384.025.163	96,01	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	REA	'004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	Hektar	277,073	277,073	100	1.660.000.000	1.656.253.604	987.335.210	99,77	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	REB	'001	Keekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang	Janis	5	5	100	700.000.000	643.327.962	639.013.012	91,9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pamanj	Janis	5	5	100	1.340.000.000	1.326.604.341	1.313.198.820	99	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477419	BPSPL Denpasar	'05.04	FD	2362	SCC	'002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang diting	Orang	25	25	100	200.000.000	199.337.003	199.337.003	99,67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	SCC	'002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang diting	Orang	60	70	100	350.000.000	296.381.392	296.381.392	84,68	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	UBA	'001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	1	100	100.000.000	98.095.526	98.095.526	98,1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberika	Kelompok Masyarakat	4	4	100	800.000.000	799.782.256	799.782.256	99,97	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	99.981.632	99.981.632	99,98	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	3	100	1.150.000.000	1.148.581.822	1.148.581.822	99,88	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pamanj	Janis	4	6	100	1.300.000.000	1.251.062.950	1.251.062.950	96,24	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keekaragaman	Rekomendasi Kebijakan	1	3	100	425.000.000	424.987.533	424.987.533	100	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	PEC	'001	Kerjasama Konservasi Keekaragaman Hayati Laut	Kesejahteraan	1	1	100	70.000.000	69.998.671	69.998.671	100	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keekaragaman Hayati	Kesejahteraan	1	1	100	100.000.000	99.999.436	99.999.436	100	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	QEH	'001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	2	2	100	300.000.000	289.260.486	289.260.486	96,42	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	REA	'004	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau	Hektar	21,000	21,000	100	2.481.306.000	2.456.914.599	2.456.914.599	99,02	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477425	BPSPL Pontianak	'05.04	FD	2362	REB	'001	Keekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang	Janis	5	8	100	750.000.000	745.953.221	745.953.221	99,46	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberika	Kelompok Masyarakat	4	4	100	800.000.000	782.244.631	782.244.631	97,78	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	150.000.000	146.977.647	146.977.647	97,99	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477431	BPSPL Makassar	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1.100.000.000	1.095.793.017	1.095.793.017	99,62	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keekaragaman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	43.201.884	43.201.884	86,4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	PEC	'001	Kerjasama Konservasi Keekaragaman Hayati Laut	Kesejahteraan	1	1	100	70.000.000	50.281.378	50.281.378	71,83	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	QEH	'001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	3	3	100	425.000.000	414.945.974	414.945.974	97,63	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	RAL	'001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	Unit	11	11	100	370.000.000	368.759.188	368.759.188	99,66	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	REA	'004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	Hektar	#####	#####	100	2.526.220.000	2.522.723.390	2.522.723.390	99,86	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang	Janis	6	6	100	1.060.000.000	1.006.701.453	1.006.701.453	94,97	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pamanj	Janis	5	5	100	1.190.000.000	1.180.119.674	1.180.119.674	99,17	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	SCC	'002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang diting	Orang	50	50	100	200.000.000	167.743.151	167.743.151	83,87	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477431	BPSPL Makassar	'05.04	FD	2362	UBA	'001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	1	100	100.000.000	88.040.167	88.040.167	88,04	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pamanj	Janis	2	5	100	850.000.000	800.243.871	800.243.871	94,15	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	2362	SCC	'002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang diting	Orang	50	90	100	300.000.000	273.390.719	273.390.719	91,13	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	2362	UBA	'001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	2	100	100.000.000	82.475.644	82.475.644	82,48	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberika	Kelompok Masyarakat	4	4	100	800.000.000	740.988.883	740.988.883	92,62	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
477440	LPSP Sorong	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	42.791.788	42.791.788	85,58	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477440	LPSP Sorong	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Periz	Rekomendasi Kebijakan	1	3	100	970.000.000	916.025.725	916.025.725	94,44	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	2366	RAL	'001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang	Unit	3	3	100	130.000.000	129.725.150	129.725.150	99,79	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kematiran, Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
477440	LPSP Sorong	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keekaragaman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	30.027.231	30.027.231	60,05	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan

Kode	Satker	Fungsi	Prog	Keg	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target Vol	Real Vol	Progre	Pagu	Rea. Blnja	Nilai Blnja	%	KODE_PRIORITAS_NASIONAL_DESKRIPSI	PROGRAM_PRIORITAS_DESKRIPSI	KEGIATAN_PRIORITAS_DESKRIPSI
499352	BKPN Kupang	'05.04	HB	2366	PBT	'009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Per	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	300.000.000	290.763.926	290.763.926	96,92	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
499352	BKPN Kupang	'05.04	HB	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	2.676.306.000	2.656.051.837	2.647.306.997	99,24	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
499352	BKPN Kupang	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keaneekaragaman H	Kesejahteraan	1	3	100	100.000.000	99.590.516	99.590.516	99,59	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
499352	BKPN Kupang	'05.04	FD	2362	QEH	'004	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	2	3	100	320.000.000	293.328.210	293.328.210	91,67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
499352	BKPN Kupang	'05.04	FD	2362	REA	'004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	Hektar	10	10	100	5.917.133.566	5.907.133.566	5.907.133.566	99,69	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	REA	'002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	Hektar	10	10	100	1.800.000.000	1.606.514.027	1.588.719.027	89,25	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PBW	'001	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100	2.500.000.000	2.344.465.499	2.344.465.499	93,78	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PBW	'004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	2.042.016.000	1.921.481.234	1.921.481.234	94,1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PFA	'001	Dokumen NSPK Jasa Kelautan	NSPK	7	7	100	6.482.873.435	6.482.873.435	6.482.873.435	95,62	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidid
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QEG	'001	Sarana Wisata Bahari	Unit	8	8	100	6.700.000.000	6.235.036.222	6.235.036.222	93,06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QEG	'002	Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	Unit	2	2	100	407.984.000	377.017.152	377.017.152	92,41	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QEG	'003	Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun	Unit	1	46	100	38.011.000.000	36.727.418.080	36.650.723.680	96,62	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidid
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QEG	'004	Sarana produksi bioteknologi yang dibangun	Unit	2	2	100	2.315.000.000	2.220.126.090	2.220.126.090	95,9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PBW	'002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100	660.000.000	657.238.343	657.238.343	99,58	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbat
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PFA	'001	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di	NSPK	1	1	100	200.000.000	129.482.107	129.482.107	64,74	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	PFA	'002	NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	NSPK	1	1	100	225.000.000	223.891.410	223.891.410	99,51	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbat
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QDD	'001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kec	Kelompok Masyarakat	3	3	100	1.200.000.000	931.181.822	931.181.822	77,6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QDD	'002	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang	Kelompok Masyarakat	4	4	100	1.600.000.000	1.447.497.144	1.447.497.144	90,47	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	QDD	'003	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Ke	NSPK	55	55	100	7.975.000.000	7.755.934.509	7.755.934.509	97,25	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbat
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekarag	Rekomendasi Kebijakan	22	22	100	11.509.506.000	10.697.794.916	10.697.794.916	92,95	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	PBW	'002	Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100	300.000.000	245.420.610	245.420.610	81,81	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jerjasama Konservasi Keaneekaragaman Hayati Laut	Kesejahteraan	2	2	100	380.000.000	363.361.033	363.361.033	95,62	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keaneekaragaman H	Kesejahteraan	6	6	100	465.000.000	444.360.722	444.360.722	95,56	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	PFA	'001	Dokumen NSPK Konservasi dan keaneekaragaman Hayati	NSPK	8	8	100	3.150.000.000	2.978.037.202	2.978.037.202	94,54	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	QEH	'001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	20	20	100	625.000.000	563.747.961	563.747.961	90,2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	REA	'002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau	Hektar	100	100	100	454.000.000	428.801.901	428.801.901	95,29	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	REA	'004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	Hektar	100	100	100	16.784.950.000	11.841.192.413	11.841.192.413	70,55	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	UBA	'003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100	3.400.000.000	3.252.549.693	3.252.549.693	95,66	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	UBA	'004	Pemerintah daerah yang dibina untuk pengelolaan Kes	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	4	100	2.250.000.000	1.822.096.612	1.822.096.612	80,98	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	2362	REB	'002	Keaneekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanj	NSPK	9	9	100	4.861.800.000	4.475.687.480	4.435.728.480	92,06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	PFA	'001	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan	NSPK	4	4	100	1.000.000.000	818.039.611	818.039.611	81,8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	QDD	'001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberik	Kelompok Masyarakat	33	33	100	8.497.000.000	7.900.811.783	7.737.840.261	92,98	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	QDD	'002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingk	Kelompok Masyarakat	3	3	100	1.500.000.000	1.411.171.235	1.411.171.235	94,08	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	QEG	'002	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	Unit	10	10	100	2.000.000.000	1.955.656.666	1.955.656.666	97,78	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	RBH	'001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Unit	2	2	100	2.000.000.000	1.914.430.027	1.914.430.027	95,72	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	RBQ	'001	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pul	Unit	4	4	100	1.800.000.000	1.780.495.115	1.780.495.115	98,92	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pendampingan dan Layanan Terpadu
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	RBQ	'002	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pul	Unit	5	5	100	9.475.000.000	9.020.059.200	9.020.059.200	95,2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
622145	Setdipren PRL	'05.04	FD	4346	REA	'001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Hektar	210	210	100	5.700.000.000	5.415.085.541	5.412.645.541	95	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2365	RBQ	'001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kec	Unit	3	3	100	10.520.000.000	10.340.123.986	10.340.123.986	98,24	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbat
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBT	'007	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KPRL (Kesesuaian	Rekomendasi Kebijakan	550	550	100	12.750.000.000	10.571.017.439	10.571.017.439	82,91	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBW	'001	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Anta	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100	4.000.000.000	3.796.643.971	3.796.643.971	94,92	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBW	'002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN ya	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100	3.000.000.000	2.896.454.370	2.896.454.370	96,55	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBW	'003	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT ya	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100	3.500.000.000	3.489.758.123	3.489.758.123	99,71	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBW	'007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1.350.000.000	1.349.506.983	1.349.506.983	99,96	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PBW	'008	Rekomendasi kebijakan KSN Non PPKT yang Memiliki	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	2.100.000.000	2.080.432.986	2.080.432.986	99,07	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	PFA	'001	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	NSPK	4	4	100	2.100.000.000	1.996.189.500	1.996.189.500	95,06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	RAL	'001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang	Unit	39	39	100	1.133.000.000	1.132.950.000	1.132.950.000	100	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'05.04	HB	2366	RAL	'002	Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Per	Unit	5	0,5	187.100.000.000	0	0	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	RAT	'001	Lahan Garam yang difasilitasi	Hektar	30	81	100	1.200.000.000	6.015.108.881	6.015.108.881	96,88	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidid
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2363	SCC	'001	Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensi	Orang	20	20	100	600.000.000	545.098.759	545.098.759	90,85	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kekarifan, Pe	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
622145	Setdipren PRL	'04.03	HB	2365	PBW	'001	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi P	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100	2.125.000.000	2.071.963.602	2.071.963.602	97,5	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbat
691046	Dinas KP Prov. DK	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kom	Orang	4	10	100	30.000.000	29.905.348	29.905.348	99,68	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc		

Kode	Satker	Fungsi	Prog	Keg	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target Vol	Real Vol	Progre	Pagu	Real. Blnja	Nilai Blnja	%	KODE_PRIORITAS_NASIONAL_DESKRIPSI	PROGRAM_PRIORITAS_DESKRIPSI	KEGIATAN_PRIORITAS_DESKRIPSI
691074	Dinas KP Prov. Ba	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	47.306.800	47.306.800	94,61	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691074	Dinas KP Prov. Ba	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keaneekaragaman H	Kesepakatan	1	1	100	70.000.000	69.979.800	69.979.800	99,97	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691074	Dinas KP Prov. Ba	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	3	3	100	30.000.000	27.880.300	27.880.300	92,93	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691074	Dinas KP Prov. Ba	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan kom	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	310.000.000	303.122.900	303.122.900	97,78	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
691075	Dinas KP Prov. Gc	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	3	3	100	30.000.000	29.684.692	29.684.692	98,95	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691075	Dinas KP Prov. Gc	'04.03	HB	2363	PBW	'003	Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	300.000.000	294.650.007	294.650.007	98,22	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik
691075	Dinas KP Prov. Gc	'05.04	FD	2362	PBW	'003	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi P	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	200.000.000	198.227.925	198.227.925	99,11	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691075	Dinas KP Prov. Gc	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	98.489.330	98.489.330	98,49	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691075	Dinas KP Prov. Gc	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan pe	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	97.817.377	97.817.377	97,82	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
691076	Dinas KP Prov. Ke	'05.04	FD	2362	PBW	'003	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi P	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	250.000.000	239.184.277	239.184.277	95,67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691076	Dinas KP Prov. Ke	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	4	4	100	30.000.000	28.848.450	28.848.450	96,16	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691076	Dinas KP Prov. Ke	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan kom	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	100.000.000	95.368.747	95.368.747	95,37	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
691076	Dinas KP Prov. Ke	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	41.651.480	41.651.480	83,3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691076	Dinas KP Prov. Ke	'05.04	FD	2362	PEE	'001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keaneekaragaman H	Kesepakatan	1	1	100	70.000.000	66.686.412	66.686.412	95,27	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691077	Dinas KP Prov. Pa	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan pe	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	100.000.000	100,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
691077	Dinas KP Prov. Pa	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	2	2	100	30.000.000	30.000.000	100,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	
691077	Dinas KP Prov. Pa	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	50.000.000	100,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	
691078	Dinas KP Prov. Su	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	100.000.000	99.700.000	99,70	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	
691078	Dinas KP Prov. Su	'05.04	FD	2362	PBW	'003	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi P	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	200.000.000	199.878.680	199.878.680	99,94	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691078	Dinas KP Prov. Su	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	4	4	100	30.000.000	29.821.461	29.821.461	99,4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691078	Dinas KP Prov. Su	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan pe	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	99.897.380	99.897.380	99,9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
691079	Dinas KP Prov. Ka	'05.04	FD	2362	PBW	'001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keaneekarag	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	50.000.000	49.110.000	49.110.000	98,22	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691079	Dinas KP Prov. Ka	'05.04	FD	2362	REA	'002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau	Hektar	100	100	100	100.000.000	88.898.479	88.898.479	88,9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691079	Dinas KP Prov. Ka	'05.04	FD	2362	SCC	'001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan komp	Orang	4	3	86,55	30.000.000	25.966.380	25.966.380	86,55	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benc	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
691079	Dinas KP Prov. Ka	'05.04	HB	2366	PBT	'008	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan pe	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	100.000.000	99.655.000	99.655.000	99,66	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Ber	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Pe	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
												460.766.097.000	255.671.914.344	253.723.604.897				



REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : DESEMBER

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			Validasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah							
1	K14	030	03207.691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	6	8	8	0	8	8	0	8	100.00	1	6	31-12-2024 14:27:43	01-01-2025 06:00:01	Closed	
2	K10	020	03207.691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	6	7	7	0	7	7	0	7	100.00	1	6	01-01-2025 07:05:44	01-01-2025 09:00:01	Closed	
3	K05	012	03207.691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	3	6	6	0	6	6	0	6	100.00	1	3	02-01-2025 08:23:18	02-01-2025 09:00:02	Closed	
4	K25	060	03207.691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1	8	8	0	8	8	0	8	100.00	1	1	02-01-2025 11:14:33	02-01-2025 12:00:02	Closed	
5	K16	042	03207.691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3	6	6	0	6	6	0	6	100.00	1	3	02-01-2025 12:15:43	02-01-2025 15:00:01	Closed	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

6	K16	042	03207.477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	12	23	23	0	23	23	0	23	100.00	1	12	02-01-2025 15:29:07	02-01-2025 18:00:02	Closed
7	K07	017	03207.691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	2	7	7	0	7	7	0	7	100.00	8	2	01-01-2025 08:51:06	02-01-2025 18:00:02	Closed
8	K04	008	03207.691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	3	8	8	0	8	8	0	8	100.00	1	3	02-01-2025 15:28:26	02-01-2025 18:00:02	Closed
9	K22	039	03207.499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	12	15	15	0	15	15	0	15	100.00	3	12	01-01-2025 23:11:59	03-01-2025 09:00:10	Closed
10	K20	037	03207.691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	4	9	9	0	9	9	0	9	100.00	1	4	03-01-2025 07:13:38	03-01-2025 09:00:10	Closed
11	K33	066	03207.477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	13	23	23	0	23	23	0	23	100.00	1	13	03-01-2025 06:59:05	03-01-2025 09:00:10	Closed
12	K32	178	03207.691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	5	7	7	0	7	7	0	7	100.00	1	5	03-01-2025 19:32:48	06-01-2025 03:32:09	Closed



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

13	K23	136	03207.477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	16	22	22	0	22	22	0	22	100.00	3	16	02-01-2025 15:11:15	06-01-2025 15:18:33	Closed
14	K33	065	03207.691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	5	6	6	0	6	6	0	6	100.00	1	5	06-01-2025 13:03:25	06-01-2025 15:18:33	Closed
15	K26	050	03207.691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	2	9	9	0	9	9	0	9	100.00	1	2	06-01-2025 14:53:47	06-01-2025 15:18:33	Closed
16	K11	175	03207.691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	3	6	6	0	6	6	0	6	100.00	2	3	02-01-2025 10:08:49	06-01-2025 15:18:33	Closed
17	K03	010	03207.691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	7	7	0	7	7	0	7	100.00	2	0	03-01-2025 15:42:31	06-01-2025 15:18:33	Closed
18	K10	020	03207.290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	15	20	20	0	20	20	0	20	100.00	3	15	02-01-2025 10:37:56	06-01-2025 15:18:33	Closed
19	K04	008	03207.477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	19	16	16	0	16	16	0	16	100.00	5	19	02-01-2025 09:22:30	07-01-2025 15:10:06	Closed



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

20	K29	061	03207.691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	2	7	7	0	7	7	0	7	100.00	4	2	06-01-2025 12:22:43	07-01-2025 18:11:12	Closed
21	K20	037	03207.477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	12	23	23	0	23	23	0	23	100.00	9	12	07-01-2025 08:53:48	08-01-2025 09:37:02	Closed
22	K06	014	03207.691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	3	6	6	0	6	6	0	6	100.00	5	3	06-01-2025 16:03:15	08-01-2025 15:00:41	Closed
23	K11	175	03207.622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	17	63	63	0	63	63	0	63	100.00	2	17	07-01-2025 11:27:29	09-01-2025 09:19:12	Closed
24	K28	062	03207.691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	2	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	2	06-01-2025 13:51:47	09-01-2025 09:19:12	Closed
25	K01	001	03207.691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	10	10	0	10	10	0	10	100.00	4	0	03-01-2025 16:08:50	09-01-2025 18:51:20	Closed



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

26	K24	051	03207.691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	2	02-01-2025 07:52:01	10-01-2025 09:16:40	Closed
27	K03	010	03207.499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	15	21	21	0	21	21	0	21	100.00	4	15	03-01-2025 10:53:47	10-01-2025 15:41:50	Closed
28	K18	045	03207.691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2	6	6	0	6	6	0	6	100.00	2	2	06-01-2025 10:04:03	11-01-2025 12:39:35	Closed
29	K12	095	03207.691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	2	8	8	0	8	8	0	8	100.00	3	2	31-12-2024 14:46:34	11-01-2025 12:39:35	Closed
30	K09	015	03207.691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	0	06-01-2025 13:43:52	11-01-2025 12:39:35	Closed
31	K17	043	03207.691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	1	08-01-2025 16:28:47	11-01-2025 20:31:33	Closed



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

32	K08	016	03207.691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	0	03-01-2025 20:51:13	11-01-2025 20:31:33	Closed
33	K13	134	03207.691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	10	8	8	0	8	8	0	8	100.00	2	10	07-01-2025 14:12:33	13-01-2025 07:27:22	Closed
34	K30	063	03207.691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	2	6	6	0	6	6	0	6	100.00	20	2	07-01-2025 09:24:32	13-01-2025 12:40:02	Closed
35	K27	049	03207.691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0	7	7	0	7	7	0	7	100.00	3	0	05-01-2025 21:08:24	13-01-2025 12:40:02	Closed
36	K31	009	03207.691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3	8	8	0	8	8	0	8	100.00	5	3	02-01-2025 08:18:54	13-01-2025 16:28:47	Closed
37	K15	135	03207.691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	1	8	8	0	8	8	0	8	100.00	1	1	13-01-2025 16:28:29	13-01-2025 16:28:47	Perbaikan dari 21- JAN-25 sd 22-JAN-25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

38	K22	039	03207.691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2	9	9	0	9	9	0	9	100.00	2	2	06-01-2025 20:01:30	14-01-2025 09:24:17	Closed
39	K02	123	03207.691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	3	7	7	0	7	7	0	7	100.00	14	3	06-01-2025 09:24:18	14-01-2025 12:00:04	Closed
40	K34	185	03207.691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2	7	7	0	7	7	0	7	100.00	8	2	06-01-2025 13:29:33	15-01-2025 12:00:02	Closed
41	K19	046	03207.691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1	7	6	1	7	0	7	7	100.00	22	1	06-01-2025 13:11:21	15-01-2025 13:33:17	Closed
42	K23	136	03207.691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2	9	9	0	9	8	1	9	100.00	3	2	07-01-2025 15:24:02	15-01-2025 15:00:02	Perbaikan dari 20- JAN-25 sd 22-JAN-25
43	K21	038	03207.691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2	9	9	0	9	8	1	9	100.00	5	2	08-01-2025 06:43:33	15-01-2025 17:16:52	Closed
Total					477	476	1	477	468	9	477	100.00						

SURAT HASIL REKONSILIASI (SHR)



#2024
KKP BEYOND



DJP/PP
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 622145
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	515,318,986,000	515,318,986,000	0
2	Belanja	306,609,943,763	306,609,943,763	0
3	Pengembalian Belanja	-487,778,183	-487,778,183	0
4	Estimasi Pendapatan	700,524,028,000	700,524,028,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	827,297,175,764	827,297,175,764	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1,380,952,501	1,380,952,501	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	16,149,789,740	16,149,789,740	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 477456
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	17,584,430,000	17,584,430,000	0
2	Belanja	17,445,472,954	17,445,472,954	0
3	Pengembalian Belanja	-186,288	-186,288	0
4	Estimasi Pendapatan	18,203,000	18,203,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	164,934,448	164,934,448	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 499352
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,005,128,000	23,005,128,000	0
2	Belanja	22,795,075,821	22,795,075,821	0
3	Pengembalian Belanja	-10,706,484	-10,706,484	0
4	Estimasi Pendapatan	1,354,900,000	1,354,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,133,213,817	4,133,213,817	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	36,698,203	36,698,203	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 691057
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	288,000,000	288,000,000	0
2	Belanja	287,641,850	287,641,850	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 691078
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	497,750,000	497,750,000	0
2	Belanja	496,445,821	496,445,821	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JAN-25



425122

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN

BerAKHLAK #berbagai
kegiatan
berkeadilan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240319532423
Tanggal Billing : 19-03-2024 09:28:20
Tanggal Kedaluwarsa : 26-03-2024 09:28:20
Tanggal Bayar : **19-03-2024 09:35:55**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK MANDIRI**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Pekanbaru
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 1.017.077 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Tujuh Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **653215723254**
NTPN : **1357F3CIFK1J7JC7**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 1.017.077 (IDR)
Keterangan : HBL Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut RL
132/03.03/2024-01 tgl 18/03/24 MTWS3N



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240425425550
Tanggal Billing : 25-04-2024 11:36:01
Tanggal Kedaluwarsa : 02-05-2024 11:36:01
Tanggal Bayar : **25-04-2024 12:27:06**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANG
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **499346 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**
Total Disetor : 60.482.400 (IDR)
Terbilang : *Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000312348**
NTPN : **0C2BF48VVEN4K6KE**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 60.482.400 (IDR)
Keterangan : HBL Lelang Noneksekusi Wajib BMN BPSPL Padang RL166/03.01/2024-01 tgl 24/04



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240305079386
Tanggal Billing : 05-03-2024 08:35:05
Tanggal Kedaluwarsa : 12-03-2024 08:35:05
Tanggal Bayar : **05-03-2024 11:42:28**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **477431 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR**
Total Disetor : 14.656.181 (IDR)
Terbilang : *Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh
Satu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240305514877**
NTPN : **9B66E61QV3OALH2Q**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 14.656.181 (IDR)
Keterangan : Hasil Bersih Lelang RL-206/15.02/2024-01

425131

Pendapatan Sewa
Tanah, Gedung, dan Bangunan



#2024
KKP BEYOND



DJPRL

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240109145916
Tanggal Billing : 09-01-2024 13:43:08
Tanggal Kedaluwarsa : 16-01-2024 13:43:08
Tanggal Bayar : **09-01-2024 13:43:36**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BPSPL Padang
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **499346 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**
Total Disetor : 325.215 (IDR)
Terbilang : *Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Belas (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000518140**
NTPN : **BDC8061QV3IFQ3PS**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 325.215 (IDR)
Keterangan : Sewa Rumah Dinas BPSPL Padang

425134

**Pendapatan dari KSP
Tanah, Gedung, dan Bangunan**



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
DIREKTORAT JENDERAL PERPAJAKAN

BerAKHLAK #berbagai
melayani
berprestasi



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240328837097
Tanggal Billing : 28-03-2024 11:43:25
Tanggal Kedaluwarsa : 04-04-2024 11:43:25
Tanggal Bayar : 01-04-2024 13:24:51
Bank/Pos/Fintech Bayar : BPD JABAR BANTEN
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **622145** - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
Total Disetor : 1.190.351.664 (IDR)
Terbilang : *Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **392557535391**
NTPN : **0FEC81JNFUT39HV9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425134 - Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 1.190.351.664 (IDR)
Keterangan : Pendapatan KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan untuk Pulau Nipah

425151

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi



#2024
KKP BEYOND



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240827719863
Tanggal Billing : 27-08-2024 13:29:55
Tanggal Kedaluwarsa : 03-09-2024 13:29:55
Tanggal Bayar : **30-08-2024 14:17:41**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Phone Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 250.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **401794709766**
NTPN : **435302G4VPUBF85N**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI - E. Penggunaan Ruang Display Benda Muatan Kapal Tenggelam
Kode Akun : 425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Jumlah Setoran : 250.000 (IDR)
Keterangan : Ijin Penggunaan Ruang Display BMKT oleh Kinderfield Highfield School Depok

425259

Pendapatan Perizinan Lainnya



#2024
KKP BEYOND



DJPRL

BerAKHLAK #bergerak
berdaya
berprestasi



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240125408518
Tanggal Billing : 25-01-2024 09:58:57
Tanggal Kedaluwarsa : 01-02-2024 09:58:57
Tanggal Bayar : **01-02-2024 08:41:44**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK MANDIRI**
Channel Bayar : **Overbooking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 1.342.158.000 (IDR)
Terbilang : *Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **960161982814**
NTPN : **0C32D7QLUONO4D86**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT -
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 1.342.158.000 (IDR)
Keterangan : Setoran PNBP Berdasarkan PP No.85 Th.2021 atas PKKPRL Keg. Pemanfaatan Ruang utk keg. yg menetap di Laut (Terminal Khusus dan Dumping Area_Tuban) Luas 71,85ha oleh PT Semen Indonesia Tbk



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240610105028
Tanggal Billing : 10-06-2024 14:38:31
Tanggal Kedaluwarsa : 17-06-2024 14:38:31
Tanggal Bayar : 10-06-2024 14:36:36
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut PTK
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **477425** - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
PONTIANAK
Total Disetor : 620.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Ratus Dua Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **687517628007**
NTPN : **0A3E77QLUP66C5M4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - H. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya - 1. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 540.000 (IDR)
Keterangan : PNBP SAJI-DN PD DIAN ARDYKA surat nomor 115/JUN/SAJI-DN/DA/2024 (10 Juni 2024)
Jenis Setoran : XV. PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA - C. Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya - 3. Jenis Ikan Dilindungi Penuh Turunan Ketiga (F3) dan seterusnya
Kode Akun : 425629 - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
Jumlah Setoran : 80.000 (IDR)
Keterangan : Pungutan Perdagangan atas 4 ekor arwana super red F3) dan seterusnya an PD DIAN ARDYKA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240224987846
Tanggal Billing : 24-02-2024 14:44:31
Tanggal Kedaluwarsa : 02-03-2024 14:44:31
Tanggal Bayar : 25-02-2024 14:27:49
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT. INDO MINERALS RESOURCES
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **329013** - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Total Disetor : 2.241.600.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **355157402072**
NTPN : **52E5F48VVEH5FAM6**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT -
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 2.241.600.000 (IDR)
Keterangan : PKKPRL 120 Ha



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240302829282
Tanggal Billing : 02-03-2024 13:41:11
Tanggal Kedaluwarsa : 09-03-2024 13:41:11
Tanggal Bayar : 04-03-2024 15:00:22
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT. INDO MINERALS RESOURCES
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **329013** - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Total Disetor : 56.040.000 (IDR)
Terbilang : *Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000109412**
NTPN : **9BED455DF95S3RN2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT -
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 56.040.000 (IDR)
Keterangan : PKKPR 3 HA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240220482526
Tanggal Billing : 20-02-2024 19:22:29
Tanggal Kedaluwarsa : 27-02-2024 19:22:29
Tanggal Bayar : 21-02-2024 11:52:35
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT. INDO MINERALS RESOURCES
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **329013** - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Total Disetor : 18.680.000 (IDR)
Terbilang : *Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000076700046**
NTPN : **CC12955DF93DIQUU**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT -
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 18.680.000 (IDR)
Keterangan : PKKPR 1 Ha

425629

**Pendapatan
Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya**



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDAPATAN DAN PERBUKUAN

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240610108517
Tanggal Billing : 10-06-2024 14:53:17
Tanggal Kedaluwarsa : 17-06-2024 14:53:17
Tanggal Bayar : 10-06-2024 15:19:43
Bank/Pos/Fintech Bayar : PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar : *Virtual Account*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut PTK
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **477425** - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
Total Disetor : 1.260.000 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **001736522047**
NTPN : **68DA72G4VPNRU935**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - H. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya - 1. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya
Jumlah Setoran : 540.000 (IDR)
Keterangan : PNBP SAJI-DN PD. Tirta Kapuas surat nomor 06/SAJI-DN/PDTK/6/2024 (10 Juni 2024)

Jenis Setoran : XV. PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA - C. Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya - 3. Jenis Ikan Dilindungi Penuh Turunan Ketiga (F3) dan seterusnya
Kode Akun : 425629 - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
Jumlah Setoran : 720.000 (IDR)
Keterangan : Pungutan Perdagangan atas 36 ekor arwana super red (F3) dan seterusnya an. PD. Tirta Kapuas



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240429807410
Tanggal Billing : 29-04-2024 10:36:48
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2024 23:59:59
Tanggal Bayar : **29-04-2024 12:24:56**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BKKPN KUPANG
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **499352 - BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG**
Total Disetor : 200.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000287767**
NTPN : **9CEE748VVEN8PTPI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : XI. TANDA MASUK DAN KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI - A. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan - 2) Penelitian oleh Warga Negara Asing - a. s.d. 1 bulan
Kode Akun : 425629 - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
Jumlah Setoran : 200.000 (IDR)
Keterangan : -

425811

**Pendapatan Denda
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah**



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
Direktorat Jenderal Pajak

BerAKHLAK #berakhlak
melayani
beyond



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240314051405
Tanggal Billing : 14-03-2024 14:09:37
Tanggal Kedaluwarsa : 21-03-2024 14:09:37
Tanggal Bayar : **14-03-2024 15:14:13**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 31.360 (IDR)
Terbilang : *Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000657025**
NTPN : **854CB55DF966QAQD**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun : 425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran : 31.360 (IDR)
Keterangan : Pembayaran atas denda keterlambatan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Saluran/Jalan Produksi Tahun 2023 oleh CV Aliah Consulindo pada Satker DKP Kab Jeneponto

425911

**Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai TAYL**



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN LAUTAN

BerAKHLAK #bangga
meliputi
bangsa



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240322005772
Tanggal Billing : 22-03-2024 09:47:02
Tanggal Kedaluwarsa : 29-03-2024 09:47:02
Tanggal Bayar : **22-03-2024 10:07:35**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Mobile Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Loka PSPL Serang
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **290145 - LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG**
Total Disetor : 8.581.500 (IDR)
Terbilang : *Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000790710**
NTPN : **B66162G4VPF9620C**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 8.581.500 (IDR)
Keterangan : Pembayaran potongan gaji bln Juli-Des 2023 an. Yuli Deviyani



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240110328229
Tanggal Billing : 10-01-2024 14:44:40
Tanggal Kedaluwarsa : 17-01-2024 14:44:40
Tanggal Bayar : **11-01-2024 08:37:17**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **POS INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BPSPL DENPASAR
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **477419 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR**
Total Disetor : 740.000 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **906389581971**
NTPN : **1A4638N3EJ9M56D5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 740.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240315220427
Tanggal Billing : 15-03-2024 16:29:58
Tanggal Kedaluwarsa : 22-03-2024 16:29:58
Tanggal Bayar : **18-03-2024 09:22:21**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Loka KKP N Pekanbaru
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **477456 - LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU**
Total Disetor : 118.795 (IDR)
Terbilang : *Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000546155**
NTPN : **03D577QLUOTD50EB**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 118.795 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja an, 9 orang pegawai LKKPN Pekanbaru

425912

Penerimaan Kembali
Belanja Barang TAYL



#2024
KKP BEYOND



DJPRL

BerAKHLAK #berakhlak
berakhlak



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240129913413
Tanggal Billing : 29-01-2024 15:39:10
Tanggal Kedaluwarsa : 05-02-2024 15:39:10
Tanggal Bayar : **01-02-2024 13:13:31**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **POS INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 1.054.480 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **131706767980**
NTPN : **BDA5A1JNFUN5ISI5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.054.480 (IDR)
Keterangan : Setoran Temuan Itjen Lap Hasil Pemantauan No.T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 atas Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan pada DKP Kab Pangkajene Kepulauan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240213668055
Tanggal Billing : 13-02-2024 14:24:10
Tanggal Kedaluwarsa : 20-02-2024 14:24:10
Tanggal Bayar : **15-02-2024 08:30:55**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **POS INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 1.000.000 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **301707960624**
NTPN : **5CA107QLUOQC9S6N**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.000.000 (IDR)
Keterangan : Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat oleh LEPHLI pada DKP Kab Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No LAI-97/PW20/2/2015



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240220457299
Tanggal Billing : 20-02-2024 15:22:01
Tanggal Kedaluwarsa : 27-02-2024 15:22:01
Tanggal Bayar : **21-02-2024 11:00:23**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Setditjen PRL
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **622145 - SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**
Total Disetor : 1.980.198 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240221976712**
NTPN : **C96A87QLUOQIP2AJ**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.980.198 (IDR)
Keterangan : Setoran atas kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan publication material of coremap CTI di Kab Buton oleh CV Lande Bersaudara sesuai LHP BPK RI No.22C/LHP/XVII/06/2017



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240315220290
Tanggal Billing : 15-03-2024 16:23:14
Tanggal Kedaluwarsa : 22-03-2024 16:23:14
Tanggal Bayar : **18-03-2024 09:21:59**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Loka KKPN Pekanbaru
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **477456 - LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU**
Total Disetor : 1.855.653 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000540079**
NTPN : **8480D2G4VPP2N0A2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.855.653 (IDR)
Keterangan : Pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi di Anambas, pemeliharaan pagar kantor dan gerbang gapura kantor



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240212453056
Tanggal Billing : 12-02-2024 11:22:34
Tanggal Kedaluwarsa : 19-02-2024 11:22:34
Tanggal Bayar : 13-02-2024 07:06:06
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Loka PSPL Sorong
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **07** - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Satuan Kerja : **477440** - LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
Total Disetor : 718.080 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **051707782736**
NTPN : **045716U8EU7UNPM0**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 718.080 (IDR)
Keterangan : Kelebihan pembayaran jamuan tamu tahun 2023

425913

Penerimaan Kembali
Belanja Modal TAYL



#2024
KKP BEYOND



DJPRL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDAFTARAN PAJAK

BerAKHLAK #Bergerak
Bergerak
Bergerak



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240313896358
Tanggal Billing : 13-03-2024 14:25:41
Tanggal Kedaluwarsa : 20-03-2024 14:25:41
Tanggal Bayar : **20-03-2024 13:01:32**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **POS INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BPSPL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Unit Eselon I : **07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**
Satuan Kerja : **477431 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR**
Total Disetor : 3.209.541 (IDR)
Terbilang : *Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **958457130132**
NTPN : **5C82B6U8EUAVFJD6**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 3.209.541 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan bayar pembangunan Mushallah



NPWP : 001594225822000 / 0001594225822000
NITKU : 0001594225822000000000
NAMA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN P
ALAMAT : 0001594225822000000000-JL THAYEB M GOBEL - KAB. BO

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 07-07
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.113.000
TERBILANG : Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah

URAIAN : Honor validator



NPWP PENYETOR : 001594225822000 / 0001594225822000
NITKU PENYETOR : 0001594225822000000000
NAMA PENYETOR : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO DITJEN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0295 9936 9123 002
MASA AKTIF : 16/01/2025 04:31:45

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-362/MK.6/2024
Sifat : Segera
Hal : Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

9 Mei 2024

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan
u.p.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.192/MEN-SJ/KU.530/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Permohonan Faktor Penyesuai atas Besaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) untuk tahun 2024 dan 2025, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pembayaran kontribusi tetap KSP tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keringanan pembayaran kontribusi tetap diberikan untuk tahun 2024 dan 2025 atas pelaksanaan KSP sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tanggal 15 November 2013 hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan faktor penyesuai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025.
3. Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab diantaranya untuk menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT), JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4,
JAKARTA 10710 CALL CENTER 1500-991; LAMAN: WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Unit : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.16

Sesuai Pasal 50 PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara bahwa "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan mitra KSP melalui Pengguna Barang, untuk BMN pada Pengguna Barang", menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bertanggung jawab dalam proses koreksi nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas KSP Pulau Nipa senilai Rp1.190.351.664,00 pada neraca Laporan Keuangan, terhadap proses pengelolaan BMN yang lainnya akan diselesaikan pada periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara bahwa keringanan pembayaran untuk tahun 2024 dan 2025 sebesar 50% dari kewajiban pembayaran tahun bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 13 November 2024



Victor Gustaaf Manoppo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.156/ITJ.5/HP.470/VI/2024 27 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pendampingan Identifikasi dan Asersi Properti Investasi Pulau Nipa pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL di Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Yth. Sekretaris Ditjen PKRL
di Jakarta

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) telah melaksanakan kegiatan Pendampingan Identifikasi dan Asersi Properti Investasi Pulau Nipa pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL di Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: B.4504.1/ITJ.5/KP.440/VI/2024, tanggal 5 Juni 2024 perihal Melaksanakan Pendampingan Identifikasi dan Asersi Properti Investasi Pulau Nipa pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 Juni 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Memberikan pendampingan atas identifikasi dan asersi Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) atas aset di Pulau Nipa, Batam Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik properti investasi; dan b) Memberikan rekomendasi perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

Ruang lingkup kegiatan adalah identifikasi dan asersi atas BMN di Pulau Nipa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang memenuhi karakteristik sebagai properti investasi. Identifikasi dan asersi PI dilakukan bersama antara Satker Sekretariat Ditjen PKRL, Inspektorat Jenderal, dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP.

Berdasarkan pendampingan disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Aset BMN di Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau, dalam Neraca Satker Sekretariat Ditjen PKRL tercatat sebagai Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yang terdiri dari:

- a. Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah (NUP 4) sebanyak 1 (satu) unit seluas 240.000 m² dengan nilai perolehan senilai Rp110.346.287.172,00;
 - b. Jalan Khusus Komplek (NUP 1) sebanyak 1 (satu) unit sepanjang 4.409 m dengan nilai perolehan senilai Rp13.121.507,00;
 - c. Bangunan Lainnya (NUP 1) sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai perolehan senilai Rp9.107.000,00;
 - d. Tanggul Keliling (NUP 1) sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai perolehan senilai Rp90.754.497.000,00.
2. Kerja sama Pemanfaatan BMN KKP di Pulau Nipa didasarkan pada surat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-502/MK.6/2013, tanggal 15 November 2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa, Kota Batam yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surya Mina Asinusa KSO Nomor 09, tanggal 16 April 2014 dan Addendum Nomor 06, tanggal 16 April 2018 dengan jangka waktu selama 30 tahun, terhitung mulai 16 April 2014 sampai dengan 16 April 2044;
 3. Pembayaran kontribusi tetap Surya Mina Asinusa KSO kepada KKP telah dilakukan sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dengan total kontribusi tetap yang telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp17.531.692.037,00;
 4. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa aset BMN yang berada di Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau memenuhi kriteria properti investasi sesuai Petunjuk Teknis 09 Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Kementerian/Lembaga, yaitu pada kriteria:
 - a. BMN gedung yang disewakan kepada pihak lain secara komersial dan tidak berhubungan langsung dengan properti digunakan sendiri;
 - b. BMN pemanfaatannya untuk mendapatkan sewa, jika intensinya tidak digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara/pemerintah dan pemanfaatannya dalam skema bisnis, baik secara tarif sewa sesuai harga pasar maupun tidak sesuai harga pasar;
 - c. BMN properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, jika:
 - 1) BMN properti ditatausahakan secara terpisah; dan

2) Memenuhi karakteristik signifikansi untuk diakui sebagai PI (>75%). Hasil identifikasi secara lengkap dapat dilihat pada tautan link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DLQWGdpSiO-t7vXgCu-687CHvygtFUbe?usp=sharing>

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Sekretaris Ditjen PKRL selaku Kuasa Pengguna Barang agar menginstruksikan secara tertulis kepada Petugas BMN untuk melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Pulau Nipah menjadi Properti Investasi pada Semester I 2024.

Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dimaksud, harus sudah diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur V,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cipto Hadi Prayitno

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal KKP
2. Kepala Biro Keuangan

Dokumentasi Kegiatan:





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5704,
(021) 3812684 Surel: ditpa.djpb@kemenkeu.go.id Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-7/PB/PB.2/2024

23 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Tanggapan atas Penggunaan Akun Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (329013)

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.392/DJPKRL/KU.330/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang diterima di tanggal 31 Maret 2024, hal Penggunaan Akun Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (329013), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik, Sistem Informasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem Billing, dan Sistem Pelaporan PNBPN.
2. Terkait dengan pembatasan penggunaan akun dimaksud, selanjutnya Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai unit yang mengelola aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI: Profesional, Amanah, Solutif, Terpercaya, Inovatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-1023/MK.02/2024 7 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Kementerian/Lembaga TA 2024

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.
4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
 - a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
 - b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.
6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia



USULAN JURNAL KOREKSI ATAS PEMERIKSAAN LK KKP TA. 2024 (AUDITED)

Kode Es1	Nama Es1	Kode Sather	Nama Sakter	No	Kode Akun		Nama Akun		Nilai		Hasil Pembahasan	Asal Koreksi (BPK/Kemkeu/ KKP)	No. Urut (Sesuai Rekap)	Informasi Temuan Pemeriksaan				Keterangan	Jenis Modul				
					Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				Uraian TP	Tanggapan	Tgl Setor	Bukti Setor (NTPN)			Nominal Setor			
03207	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	622145	Sekretariat Ditjen PKRL	1	115212		Piutang Lainnya		622.088.463		Disepakati Tgl 22 Apr 2025	BPK		Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PMPB dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2024 oleh BUT EMP Gebang Limited dengan total Rp2.488.353.852,00	22 Apr 2025	5A20161QVDSMR9AI	622.088.463	Pembayaran dilakukan 4 tahap dgn rincian : 1. Tgl Mei 2024 Rp622.088.463,00 NTPN No. CICE92G4VPU75CFB 2. Tgl Sep 2024 senilai Rp622.088.463,00 NTPN No. 3. Tgl Des 2024 senilai Rp622.088.463,00 NTPN No. 4. Tgl 22 Apr 2025 Rp622.088.463,00 NTPN No. 5A20161QVDSMR9AI	GLP				
					425259		Pendapatan Perizinan Lainnya		622.088.463														
					594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		3.110.442														
							116212			Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya		3.110.442											
				2	115212		Piutang Lainnya		7.651.385.844		Disepakati Tgl 22 Apr 2025	BPK		Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PMPB dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2024 oleh PT. Vestinter Indonesia dengan total Rp9.564.232.305,00	21 Feb 2025	AE9C17QLV24IKI61	3.825.692.922	Pembayaran dilakukan 3 tahap dgn rincian : 1. Tgl 23 Aug 2024 Rp1.912.846.461,00 NTPN No. CICE92G4VPU75CFB 2. Tgl 21 Feb 2025 Rp3.825.692.922,00 NTPN No. AE9C17QLV24IKI61 3. Akan dibayar Jul 2025 senilai Rp3.825.692.922,00	GLP				
					425259		Pendapatan Perizinan Lainnya		7.651.385.844														
					594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		38.256.929														
							116212			Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya		38.256.929											
				3	115212		Piutang Lainnya		31.401.720		Disepakati 29 Apr 2025	BPK (Terinci Tahap IV)		Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal, Kontrak Nomor SPK.129/PPK-JK/PL.450/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 senilai Rp423.850.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp31.401.720,00	Sependapat							GLP	
					594212		Beban Persediaan Alsint utk Diserahkan ke Masv.		31.401.720														
					594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		157.009														
							116212			Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya		157.009											
				4	115212		Piutang Lainnya		9.410.217		Disepakati 29 Apr 2025	BPK (Terinci Tahap IV)		Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon, Kontrak Nomor SPK.73/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 senilai Rp.3.446.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp9.410.217,00	Sependapat	28 Apr 2025	064C748VV017VIJD	9.410.217	Lunas				GLP
					593124		Beban Persediaan TB utk Diserahkan ke Masv.		9.410.217														
					594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		47.051														
							116212			Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya		47.051											
				5	115212		Piutang Lainnya		207.104.577		Disepakati 29 Apr 2025	BPK (Terinci Tahap IV)		Pengadaan Bangunan dan Mesin Washing Plan Bima, Kontrak Nomor SPK.66/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Senilai Rp10.730.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp.207.104.577,20	Sependapat								GLP
					593124		Beban Persediaan Alsint utk Diserahkan ke Masv.		207.104.577														
					594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		1.035.523														
							116212			Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya		1.035.523											
				6	115212		Piutang Lainnya		7.060.059		Disepakati 29 Apr 2025	KKP (Itjen)		Terdapat Pertanggungjawaban Keg. LAUTRA yg Tdk Sesuai Ketentuan senilai Rp13.623.846,00 a) Pertanggungjawaban tdk didukung bukti pengeluaran yg sah senilai Rp1.544.700,00 b) Pertanggungjawaban melebihi SBM TA 2024 dan/atau bukti riil senilai Rp7.294.845,00	Sependapat	7 Mar 2025	02F9F7QLV273GNJS	464.000	Lunas				
						524219		Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri		3.758.238							4 Mar 2025	520C861QVD2AMOF0	6.392.238				
						524211		Beban Perjalanan Dinas Biasa		3.301.821							4 Mar 2025	1E9313CIFT85FOUC	17.500				
						594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		35.300							7 Mar 2025	52E342G502OP2PML	186.321				
			116212							35.300													
7	115212		Piutang Lainnya		6.563.787		Disepakati 29 Apr 2025	KKP (Itjen)		Terdapat Pertanggungjawaban Keg. LAUTRA yg Tdk Sesuai Ketentuan senilai Rp13.623.846,00 a) Pertanggungjawaban tdk didukung bukti pengeluaran yg sah senilai Rp1.544.700,00 b) Pertanggungjawaban melebihi SBM TA 2024 dan/atau bukti riil senilai	Sependapat	11 Mar 2025	16F6855DFIG3QVGO	510.000					GLP				
		524111		Beban Perjalanan Dinas Biasa		6.563.787							11 Mar 2025	5E78261QVD2G8C2I						44.200			
		594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		32.819							11 Mar 2025	A6E5D0NA0DK5QKVB						700.167			
				116212									11 Mar 2025	94FD82G502OUKM55						202.440			
									319.180														
									876.800														
477419	BPSPL Denpasar	8	115212		Piutang Lainnya		469.400		Disepakati 29 Apr 2025	KKP (Itjen)		Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Lautra Tahun 2024 senilai Rp469.400,00 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Sependapat	25 Jan 2025	3738E5UFSEM9M8G	469.400	Lunas			GLP			
				524119		Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		469.400															
				594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		2.347															
499352	BKKN Kupang	9	115212		Piutang Lainnya		580.000		Disepakati 29 Apr 2025	KKP (Itjen)		Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Senilai Rp580.000,00	Sependapat	11 Mar 2025	820250311369438	580.000	Lunas			GLP			
				524111		Beban Perjalanan Dinas Biasa		580.000															
				594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		2.900															
477440	LPSPL Sorong	10	115212		Piutang Lainnya		305.126		Disepakati 29 Apr 2025	KKP (Itjen)		Terdapat Realisasi Keuangan Kegiatan PLN LAUTRA Tahun 2024 Senilai Rp816.534.875,00 yang Belum Memenuhi Kaidah Pertanggungjawaban	Sependapat	6 Feb 2025	270883CIFT5VU3RQ	305.126	Lunas			GLP			
				524111		Beban Perjalanan Dinas Biasa		305.126															
				594212		Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		1.526															
						116212																	
477431	BPSPL Makassar	11	115212		Piutang Lainnya		1.000.000		Disepakati 29			Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan senilai Rp1.000.000,00 tidak sesuai ketentuan	Sependapat		BE2C53CIFT5VRQPK	1.000.000	Lunas						
				524111		Beban Perjalanan Dinas Biasa		1.000.000															

